MASMUNI MAHATMA

Manusia POLITIK dan NALURI AGAMA

Otokritik Terhadap Geliat Sosial Politik dan Keberagaman

Pengantar:

Acep Zamzam Noor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Masmuni Mahatma

Manusia Politik & Naluri Agama

Otokritik Terhadap Geliat Sosial Politik dan Keberagamaan

MANUSIA POLITIK DAN NALURI AGAMA:
Otokritik Terhadap Geliat Sosial Politik dan Keberagamaan

Copyright© 2019
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Dilarang memproduksi atau memperbanyak
seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk
atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan I, Maret 2019

Penulis **:** Masmuni Mahatma
Editor : Jamiludin
Desain Cover : Z. Muttaqin
Layout : Zul Fadly

Diterbitkan oleh :
Pustaka Aura Semesta
email:penerbitpas99@gmail.com

Di Cetak Oleh ;
Prima Data Graphica
Jl. PH.H. Mustofa No.120 Padasuka,
Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125
email:pdgraphica@gmail.com

ISBN : 978-623-7231-010

Pengantar Redaksi

Manusia dan Agama, ibarat mata air yang terus mengalir menghilangkan haus dahaga kearifan bagi yang meminumnya. Semakin digali semakin jernih kearifannya. Ketika manusia yang lekat dengan arus kepentingan beririsan dengan agama yang senantiasa menyuguhkan "paradoks" problematika kehidupan, maka letupan "panasnya magma" syahwat manusia membanjiri seluruh sisi kehidupan, terlebih ketika keduanya memotret lanskap fenomena sosial, politik dan keberagamaan. Manusia kerap kali memakai "topeng sosial" untuk menampilkan dirinya yang lain, bukan diri yang sesungguhnya; tidak lain ia menjadi manusia politik. Agama pun begitu ia menjadi "shadow kebaikan" untuk raihan sesaat, tidak menjadi penguat dan pengawal peta perjalanan yang sesungguhnya.

Secara kritis dan pedas, namun tetap gurih untuk dicicipi, Masmuni Mahatma dengan bernas mampu memotret dan memasak keduanya, dan menarasikannya dalam tulisan di setiap masanya untuk disedekahkan kepada khalayak. Sesekali tulisannya yang menggigit membuat hati "nyelekit", dibalik itu semua sesungguhnya ia sedang meramu obat bagi yang tidak pernah sadar, atau bahkan bagi yang

rasa sakitnya tertutupi oleh syahwat politiknya. Itulah cara Masmuni merespon zaman tanpa mengenal lelah dan kalah, baginya manusia terbaik adalah manusia yang mampu merespon dan mengolah realitas "zaman" yang abstrak mewujud dalam sebuah karya yang dapat terbaca secara kasat mata. Mungkin spirit inilah yang menggerakkan saudara Masmuni Mahatma, seorang pejuang yang tak kenal lelah dan kalah, ia mewakili dan menjadi model, seperti apa yang didengungkan Bj. Habibie, *Kita adalah keturunan bangsa pejuang, yang tidak mengenal lelah dan kalah*. Sebagai pejuang, pergulatan intelektual dan ketajaman batinnya terus ditempa dalam setiap pertempuran realitas, tak ubahnya seperti pejuang di "medan perang" yang selalu tanggap dengan situasi darurat di medan pertempuran, dengan awas ia merespon, kapan "peluru" siap untuk diletupkan. Ia bertempur di setiap waktunya dengan menelorkan kehangatan gagasan kreatifnya.

Buku Manusia Politik dan Naluri Agama ini, setiap fragmennya mengisahkan dan memerankan "artificial" pementasan yang artistik atas berbagai konstruksi sosial, politik dan keberagamaan. Meski buku ini tidak ditulis secara utuh, namun sebagai bunga rampai dari tulisan yang pernah dimuat di seluruh media lokal dan nasional. Sehingga, setiap sajian topiknya bisa dibaca secara terpisah atau bahkan satu sama lain bisa saling menguatkan, seperti masakan "sayur" yang tersaji, Ia tidak pernah menghilangkan bumbunya, setiap adonan garam, gula, bawang, dan bumbu lainnya menyatu dalam satu rasa air sayur menjadi sebuah masakan yang lezat. Pementasan Manusia Politik dan Naluri Agama dalam buku ini masih sangat relevan dengan kondisi yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam, terlebih menjelang pilpres dan pileg 2019, terkadang manusia membawa-bawa politik ke dalam agama, atau menyeret agama untuk komoditas politik. Untuk memahami detail konstruksi keduanya, buku ini akan memantik kita untuk diajak berimajinasi di dunia nyata.

Semoga buku ini memberi manfaat dan menyadarkan kita, untuk benar-benar melihat fenomena apapun, terlebih sosial, politik dan keberagamaan secara lebih bijak dan arif. Penutup, mengutip apa yang dikatakan Ibn 'Atha'illah, *aktivitas-aktivitas manusia bagaikan robot-robot, ruhnya adalah kebeningan hati yang tersembunyi di dalamnya.* Selamat Membaca.

Bandung, 1 April 2019
Jamiludin

Prolog

Acep Zamzam Noor

PEMILU merupakan perhelatan yang sangat menghibur, paling tidak bagi saya pribadi. Kampanye sudah berlangsung jauh sebelum ada jadwal resmi dari KPU. Jalan-jalan dipenuhi baligo berbagai ukuran dengan sparasi warna alias *full collors*. Bukan hanya di jalan-jalan raya, jalan-jalan di kampung bahkan pematang sawah pun penuh dengan macam-macam baligo. Ketika saya tanya kenapa baligo dipasang padahal jadwal kampanye masih belum dimulai, tetangga saya yang menjadi caleg salah satu partai berkilah bahwa itu untuk sosiaslisasi. Semacam pemanasan pra kampanye, di mana para caleg memperkenalkan dirinya masing-masing kepada masyarakat. Yang punya kumis tebal akan memperkenalkan kumisnya, yang mempunyai senyum manis akan memperkenalkan senyumnya. Begitu juga yang mempunyai tahi lalat atau lesung pipit.

Ketika saya tanya berapa harga baligo per buahnya dan apakah ada pajak untuk pemasangannya di ruang-ruang publik, tetangga saya hanya tersenyum. Dia juga hanya tersenyum ketika saya tanyakan berapa jumlah baligo untuk sosialisasi dan berapa untuk kampanye

resmi. Tentu saja saya tidak terus bertanya tentang berapa jumlah dana yang disiapkan dan berapa pasukan yang diturunkan sebagai tim sukses selama proses pencalegan berlangsung. Pemilu kali ini memang unik dan atmosfirnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertarungannya bukan lagi antar partai, namun antar caleg sekalipun berasal dari partai yang sama. Logo-logo partai hanya sekedar pelengkap, yang terpampang besar-besaran justru wajah para calegnya sendiri.

Dan yang membuat saya terhibur tak lain karena wajah para caleg yang terpampang di jalan-jalan umumnya menampakkan kegembiraan dan keceriaan. Mereka selalu berpose dengan menyunggingkan senyum. Ada yang senyumnya formal dan sedikit tertahan, ada juga yang senyumnya lepas dan bebas. Beberapa caleg muda bahkan bergaya layaknya peragawan dan peragawati terkenal. Ada yang sambil mengibaskan rambutnya seperti iklan *Sunsilk*, ada yang sambil memamerkan giginya seperti iklan *Pepsodent*, ada juga yang sambil memperlihatkan otot-otot tubuhnya seperti iklan *Kuku Bima*. Semuanya nampak penuh semangat, gembira dan ceria.

Setiap ke luar rumah saya selalu berdoa agar mereka yang wajahnya terpampang di jalan-jalan semuanya lolos menjadi wakil rakyat. Saya cukup terhibur dengan kegembiraan mereka, dengan keceriaan mereka, dengan senyum mereka, dengan kumis mereka, dengan model rambut atau jilbab mereka. Juga dengan optimisme mereka. Kalau semuanya lolos, berarti kehidupan di lingkungan mereka tidak akan terganggu. Kegembiraan dan keceriaan mereka akan tetap memancar seperti sedia kala. Saya tak berani membayangkan bahwa di antara mereka kelak akan ada yang stres atau depresi, akan ada yang lari keliling kota memakai celana dalam, akan ada yang orasi di tengah pasar sambil membakar bendera, akan ada yang dirawat di rumah sakit jiwa, akan ada yang gantung diri di pohon mangga.

Sebagai orang yang jarang berurusan dengan angka, saya memang tidak tahu persis berapa jumlah partai yang ikut berkompetisi dalam pemilu kali ini dan berapa kursi yang tersedia buat para caleg yang konon mencapai ribuan jumlahnya. Bahkan saya tidak tahu apa saja syarat untuk bisa mendaptar sebagai caleg, yang jika terpilih akan mewakili rakyat duduk di parlemen. Apakah diperlukan bakat

tertentu, penguasaan ilmu tertentu, tahapan akademik tertentu, latihan dan keterampilan tertentu, pengalaman dan kemampuan tertentu, laku spiritual tertentu, niat dan tujuan tertentu? Apakah diperlukan semacam rasa keterpanggilan yang heroik atau cukup sekedar keinginan yang sifatnya hedonis saja?

Kadang saya berkhayal seandainya pemilu dilaksanakan setiap tahun atau kalau perlu setahun dua atau tiga kali, mungkin para pengusaha sablon dan kerudung akan tersenyum karena ada peluang meraup untung besar. Mungkin lapangan kerja akan bertambah lebar. Mungkin masyarakat yang kebelet menjadi caleg akan lebih tersalurkan hasratnya. Mungkin penonton seperti saya akan mendapat hiburan gratis terus-menerus. Kadang saya juga berkhayal seandainya pelaksanaan pemilu ditangani langsung oleh Depnaker, mungkin akan jauh lebih praktis dan hemat ketimbang diurus KPU yang boros dan kurang profesional. Bukankah mereka yang mendaftar menjadi caleg tak ada bedanya dengan para pelamar kerja?

***

Realitas di atas sengaja saya paparkan sebagai pengantar sebelum mengapresiasi esai-esai Masmuni Mahatma yang terhimpun dalam *Manusia Politik dan Naluri Agama* ini. Meski tidak membahas secara khusus persoalan caleg dan pemilu, saya menemukan adanya benang merah yang mengaitkan secara kuat antara pengamatan dan renungan penulis dengan realitas-realitas sosial yang terjadi, khususnya dalam kehidupan politik dan keagamaan belakangan ini.

Sudah cukup lama saya mengenal Masmuni Mahatma. Mula-mula saya mengenalnya sebagai seorang santri kelahiran Madura yang kemudian kuliah dan menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Bandung. Seperti umumnya orang Madura, Masmuni adalah warga *nahdliyin* yang dibesarkan dalam kultur Nahdlatul Ulama (NU) yang kental. Masmuni pernah mondok di Pondok Pesantren Annuqoyah, Guluk-guluk, Sumenep. Di pesantren tersebut ia bukan hanya belajar agama namun juga mendalami sastra. Mendalami sastra di pesantren adalah hal yang lumrah-lumrah saja. Hampir setiap pesantren di Madura mempunyai sanggar sastra

dengan segala aktivitasnya.

"Kalau ingin menjadi penyair yang baik jadilah warga NU," begitulah saya biasa berkelakar, termasuk jika tampil di forum-forum diskusi. Kadang kelakar saya ditanggapi dengan tawa, tapi sering juga ditanggapi serius oleh sebagian pemirsa. Dengan kelakar tersebut sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa berimajinasi sangat penting bagi seorang penyair, terutama dalam kaitannya dengan proses kreatif. Dan sejauh ini NU memberikan cukup keleluasaan bagi siapapun untuk berimajinasi, termasuk di dalamnya berziarah ke makam wali. Ulama-ulama NU tidak pernah mempermasalahkan aktivitas tersebut sebagai *bid'ah*. Malah sebaliknya, yang belum pernah ziarah ke makam wali justru diragukan ke-NU-annya. "Ziarah ke makam wali itu bagus untuk melatih imajinasi dan kepekaan puitik," kelakar saya selanjutnya.

Masmuni Mahatma rupanya salah seorang yang serius menanggapi kelakar saya. Meskipun aktivitasnya sebagai pengurus PMII sering menyerempet ke wilayah politik praktis, namun diam-diam ia sangat rajin mengasah batinnya dengan menulis puisi dan esai, juga dengan berziarah ke makam-makam wali. Meskipun begitu ia lebih banyak menyimpan puisi-puisinya di dalam laci ketimbang mempublikasikannya di media cetak. Setiap kali bertemu dengan saya, nampaknya ia lebih tertarik mendiskusikan kondisi NU ketimbang membicarakan proses kreatifnya sebagai penulis.

Seorang penulis bisa saja mempunyai aktivitas lain di luar dunia literasi. Seorang penulis bisa saja menjadi pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, guru madrasah, dosen universitas, membuka toko kelontong, menarik ojek atau bahkan menjadi wakil rakyat. Dan sebaliknya, seorang penyair atau penulis bisa saja memilih menjadi penganggur atau *freelance*. Inti dari kepenulisan bukanlah pada embel-embel pekerjaan atau jabatan, melainkan sejauh mana kemampuannya dalam menulis, sejauh mana kreativitas maupun intensitasnya dalam mengolah realitas menjadi sebuah karya. Meskipun seorang penulis mempunyai kebebasan berpikir dan berimajinasi, yang dihadapinya tetaplah sebuah realitas dan bukan angan-angan kosong. Dengan demikian seorang penulis akan selalu ditantang untuk bisa melahirkan realitas baru, atau paling

tidak memberi makna baru pada realitas yang diamatinya. Puisi atau tulisan jenis apapun, termasuk esai-esai tentang politik seperti dalam buku ini, selalu lahir dari proses pergulatan dengan realitas. Seorang penulis, lebih-lebih penulis esai, tidak pernah berangkat dari ruang kosong atau kekosongan semata.

Dalam menghadapi realitas, seorang penulis yang serius akan berusaha menciptakan ruang yang memungkinkannya melakukan pergulatan intens dengan realitas. Dalam pergulatan ini tugas penulis bukan sekedar melaporkan atau mengabarkan realitas yang dihadapinya, melainkan menunjukkan atau mewujudkannya sebagai sesuatu yang kongkrit, sebagai sebuah penggambaran yang kasat mata. Dengan demikian semua pengalaman yang dialami sang penulis, baik rohani maupun jasmani, akan mampu dilukiskan secara visual lewat kata-kata. Sesuatu yang tadinya abstrak kemudian menjadi kongkrit dan terbaca.

Saya merasakan esai-esai yang ditulis Masmuni Mahatma dalam buku ini sedikit banyak mempunyai nilai kreativitas dan intensitas tersebut. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa penulis yang juga seorang aktivis ini telah berusaha sekuat tenaga mengolah realitas yang hadapinya dan mewujudkannya dalam bentuk tulisan. Berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi, berbagai fonomena yang mengaitkan politik dengan agama, politik dengan pesantren, maupun politik dengan kiai dan santri telah ditulisnya dengan intens. Dan usaha kerasnya tersebut berhasil melahirkan realitas baru, juga pemaknaan baru, yang kemudian memperkaya nilai tulisannya secara keseluruhan.

Buku *Manusia Politik dan Naluri Agama* karya Masmuni Mahatma yang ada di tangan pembaca ini bukanlah sebuah buku yang ditulis secara utuh, namun semacam bunga rampai yang masing-masing esai bisa berdiri dan berbicara sendiri. Selain itu esai-esai dalam buku ini ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama. Ditulis sejak penulis masih mahasiswa, masih menjadi penyair muda dan anggota PMII di kampusnya sampai ketika ia menjadi seorang dosen dan ketua PW Ansor di Bangka Belitung. Penulis yang produktif ini kadang tampil sebagai pengamat yang menganalisis berbagai peristiwa sosial dan politik dengan cermat, namun di lain kesempatan tak jarang tulisannya mengesankan seorang praktisi yang terlibat langsung

dalam peristiwa politik yang ditulisnya.

Pada bagian-bagian awal bunga rampai ini penulis banyak menyoroti soal perilaku politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perilaku politik yang masih jauh dari nilai-nilai ideal ini tidak hanya dilakukan para caleg atau politisi, namun juga sudah menjadi perilaku masyarakat secara umum. Sikap menerabas, kebiasaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek, kesukaan menarik suara dengan iming-iming materi dalam pemilu atau pilkada sampai terjadinya tarik-menarik kepentingan antara partai politik, ormas dan pesantren, yang di dalamnya tentu saja melibatkan kiai dan santri. Pada bagian-bagian selanjutnya penulis juga menampilkan esai-esai tentang makna demokrasi dan kedewasaan berpolitik dalam kaitannya dengan pendidikan politik masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Sedang pada bagian akhir penulis banyak menyoroti hubungan antara politik, spiritual serta nilai-nilai agama. Hubungan ini menjadi menarik untuk diamati mengingat nilai-nilai spiritual dan agama yang seharusnya menjadi ruh perjuangan yang bermartabat dan berkeadilan, justru hanya sekedar dijadikan alat atau asesoris saja dari kepentingan politik yang praktis dan pragmatis.

Meskipun esai-esai dalam bunga rampai ini ditulis sejak belasan tahun yang lalu, saya kira banyak hal yang masih sangat relevan bahkan terasa berkesinambungan dengan situasi politik belakangan ini. Jika perilaku aneh, lucu atau absurd yang dilakukan para politisi belasan tahun yang lalu seperti yang saya singgung di awal pengantar, justru sekarang seakan-akan mencapai puncak absurditasnya. Dalam konteks ini, jelas esai-esai yang ditulis Masmuni Mahatma bisa menjadi bahan renungan yang berharga bagi kita semua. Bukan hanya untuk anak-anak muda sebagai pemilik masa depan, namun penting juga untuk para orang tua yang masih harus merenungkan betapa indahnya menjadi manusia yang tidak mudah kena hoaks, yang tidak gampang menerima provokasi atau ajakan reuni, yang tidak merasa paling benar sendiri, tidak latah meneriakan takbir di sembarang tempat, juga tidak cepat terbujuk iming-iming mendapat kapling khusus di surga. []

Daftar Isi

PENGANTAR REDAKSI —iii
PROLOG; ACEP ZAMZAM NOOR —v
DAFTAR ISI —xi

Bagian 1 Bisikan Sukma Politik —1

1 Dicari, Pemikir Politik Tercerahkan! —3
2 Kiai Dan Ormas —9
3 Pilgub Dan "Futuwah" Politik —13
4 Politik Menang dan Kalah —17
5 Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU —21
6 Guru dan Politik Kita —25
7 Golkar Muda —29
8 Uang dan Politik —33
9 Keadilan (Dalam) Politik —37
10 Politik Futuristik —41
11 Isu Politik —45
12 Teologi Politik —49
13 Presiden Islam —53
14 Jujur dalam Politik —57

15 Tahu Diri —61
16 Pesan (Politik) Pesisir —65
17 Tangisan Politik —69
18 Fawallaituka —73
19 Syarah Politik —77

Bagian II Lentera (Ber) Demokrasi —81
1 Pemilih dan Pencoblos —83
2 Masyarakat Pembaca —87
3 Golput Itu Fitrah —91
4 Kemenangan Itu Amanah —95
5 Upah Demokrasi —99
6 Perilaku Penyelenggara Pemilu —103
7 Pilkada (Untuk) Rakyat —107
8 Hindari Perilaku Politik Adu Jotos san Saling Teror —111
9 Ketakutan (Dalam) Politik —115
10 Falsafah Maaf —119
11 Politik Feminis(Me) —123
12 Partai Politik —127
13 Ulama dan Politik —131
14 Intelektual Politik —135
15 Politik Nama Besar —139
16 Kedaulatan Rakyat —143
17 Guru Politik —147
18 Irama (Politik) Rhoma —151
19 Generasi Politik —155
20 Krisis Keteladanan —159
21 Berani Itu Manusiawi —163
22 Rakyat (Yang) Merdeka —167
23 Wisata Kita, Wisata Rakyat —171

Bagian III Spiritualitas Politik —175
1 Kearifan Kolektif —177
2 Iman dan Politik —181
3 Khalifah Politik —185

4 Tuhan Parlemen —189
5 Puasa Politik —193
6 Lapar dan Politik —197
7 Manusia Politik—201
8 Perempuan Dalam Politik —205
9 Ksatria Politik —209
10 Iktikaf Politik —213
11 Meditasi Politik —217
12 Ukhuwah Politik —221
13 Saatnya PPP di Depan —225
14 Mikraj (Politik) PPP —229
15 Menjadi Pemimpin —233
16 Paradoks (Ke)Pemimpin(An) —237
17 Teks (Ke)Pemimpin(An) —241
18 Kesalihan Struktural —245
19 Belajar Pada Abu Bakar —249

Bagian IV Nilai-Nilai Agama dan Fenomena Politik 255

1 Agama Itu Perilaku —255
2 Agama (Untuk) Manusia —259
3 Beragama Itu Indah dan Penuh Harmoni —263
4 Seni Beragama —267
5 Memaknai Bencana —271
6 Remaja (Malam) Kamisan —275
7 Islam (Bagi) Remaja — 279
8 Persaudaraan Keserumpunan —283
9 Gerakan NU —287
10 Biji Iman —291
11 Pelayan Tuhan —295
12 Iman Itu Pintu —299
13 Panggilan (Ber)Haji —303
14 Berhaji, Melatih Mati —307
15 Haji Itu Pertobatan —311
16 Damai Dalam Doa —315
17 Naluri Agama —319
18 Menuju Jalan Tuhan —323

19 Esensi Religiusitas —329
20 Religiusitas Polisi —333
21 Agama (Dalam) KTP —337
22 Sedulang Rindu —341
23 Tali Kasih —345
24 Ahli Surga —349
25 Puasa Adalah Jihad —353
26 Spirit Jihad di Bulan Ramadhan —357
27 Memaknai Ramadhan —363
28 Puasa dan Pembenahan Diri —367
29 Puasa dan Pancasila —371
30 Bulan Prestasi —375
31 Upah Buruh(Dari) Kuali —379
32 Uskup Baru, Saudara Baru —383
33 Semangat Pluralitas dalam Penutupan Tahun Iman di Keuskupan Pangkalpinang —387
34 Cinta Agama Cinta Sesama —393
35 Spiritualitas Natal —399

BIOGRAFI PENULIS —403

Bagian I

Bisikan Sukma Politik

1

Dicari, Pemikir Politik Tercerahkan!

Pesta demokrasi yang sudah memaklumi masyarakat indonesia sebagai realisasi dari "ritual politik" kenegaraan sebentar lagi akan segera digelar. Banyak detak jantung masyarakat yang berputar penuh harap pun juga kecemasan. Nyanyian nurani setiap basis politik masing-masing parpol tidak dapat dibohongi bahwa sesungguhnya mereka tidak rela kalau "suara tulus" nya ternyata hanya dijadikan taruhan sesaat dalam "perjudian" para elit politik memperebutkan kursi kekuasaan. Lebih dari itu, bersamaan dengan lajunya teknologi (politik) inforamsi, kesadaran politik masyarakat Indonesia juga telah mekar secara alamiah.

Jelas, fenomena ini akan menjadi "modal"dan "potensi" politik paling menarik bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memang mendambakan terwujudnya demokrasi maupun "birokrasi politik" yang rasional-aspiratif. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, hal itu juga merupakan tantangan berat bagi para politisi dan aktivis partai politik secara keseluruhan di negeri ini. Lebih-lebih bagi mereka yang hanya memiliki modal "nekat" dan "tebal muka" bukan pesangon "akidah

politik-paradigmatik" dalam meraih kursi kekuasaan di parlemen atau lembaga yang lainnya.

Realitas kesadaran politik masyarakat seperti apa pun sebenarnya tidak akan pernah menjadi ancaman bagi prosesi kampanye politik para elite demi kemenangannya dalam pertarungan dan perjudian politik dalam pemilu besok selama mereka masih konsisten dengan "fitrah politik" itu sendiri. Yakni, pertama, mendidik masyarakat agar lebih mengerti peran dan fungsinya dalam lingkungan sosial-politik kenegaraan secara makro. Kedua, harus menata kecakapan rakyat dalam berpolitik, baik sebagai partisan salah satu partai politik maupun selaku pengontrol seluruh praktik (kebijakan) politik elite.

Ketiga, memaksimalkan semangat dan komitmen politik terhadap "pencerdasan rasionalitas" serta "kepekaan spiritual" sosio-kultur kependidikan masyarakat. Disamping itu, partai politik dan pemilu sebenarnya bertanggungjawab besar terhadap pendewasaan wawasan serta kematangan mentalitas politik seluruh rakyat. Pasalnya, politik bukan "pelet kotor" untuk membingungkan masyarakat. Partai politik dengan misi dan ambisi politiknya pada hakikatnya bukan rumah megah yang penuh hiasan "kepura-puraan" dan "tipu daya" semata bagi rakyat. Partai politik adalah sebuah "sekolah alternatif" bagi setiap masyarakat untuk mengasah (baca: mempertajam) kesadaran dan kontrol politiknya agar mereka tidak sekedar menjadi partisan dan "penonton fanatik".

Dengan formulasi bahwa parpol adalah sekolah alternatif itulah pergeseran filosofis-fungsional akan terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat dari partisan dan penonton fanatik ke jenjang pengontrol aktif serta penentu efektif terhadap sekian *public policy* (kebijakan publik). Di sinilah kita membutuhkan "mediasi politik" sejati. Disini kita memerlukan segenap tekad dalam kejujuran dan kesetiaan politik bagi *grass root,* basis ideal yang tidak mementingkan penghargaan sosial. Pada kontek inilah cukup logis bagi kita untuk merekontruksi persepsi kita terhadap siapakah sebenarnya intelektual politik, politisi (politikus), aktivis politik dan "pemikir politik" sejati itu.

Ali Syariati (1988) dengan tegas dan begitu ilmiah sempat

menuliskan bahwa ada perbedaan antara intelektual dan "pemikir tercerahkan". Kaum intelektual, dalam definisi Syariati hanya memerankan "egoisme" pengetahuan teoretis dan praktis, dan terkadang abstrak. Melangit. Tidak menyentuh sisi batin dari solusi sosial yang didambakan masyarakat. Inilah realitas ilmiah yang ternyata tidak senapas dengan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan kaum intelektual, kata Syariati pemikir-pemikir tercerahkan itu lebih mengedepankan rasa tanggungjawab sosialnya ketimbang pengetahuan atau pengalaman teoritis-praktis yang dimiliki.

Kaum intelektual itu oleh Ali Syariati disebut ilmuwan yang hanya bisa membenarkan, menjelaskan dan menciptakan keadaan-keadaan untuk menjadikan kehidupan nyaman, makmur, kuat, dan nikmat secara maksimal. Masih dalam bahasa Syariati, seorang ilmuwan paling hanya bisa menemukan "fakta-fakta", sedangkan pemikir tercerahkan mengajarkan dan menemukan "kebenaran" itu. Kaum intelektual (ilmuwan) akan memberikan cahaya yang dapat dipergunakan untuk mengetahui mana yang *haq* dan mana yang *bathil*. Akan tetapi, kaum pemikir tercerahkan yang pasti akan menunjukan jalan bagaimana memposisikan yang benar adalah benar dan yang salah ialah salah.

Kaum intelektual itu bisa saja politisi (politikus) yang sekarang banyak *sowan* ke kiai (dukun) agar kekekalan dan kekuasaannya terjamin. Para ilmuwan politik itu bisa jadi adalah aktivis parpol yang sedang sibuk "tahajjud" yang sedang merendahkan dahi dan kepalanya di depan setiap basis politiknya agar mendapatkan *sosial image* bahwa mereka betul-betul caleg humanis yang pantas didukung dan meraih kursi kekuasaan di DPR/MPR dari tingkat atas sampai buntut yang paling bawah.

Bahkan para cerdik-ilmuan itu ternyata adalah *broker-broker* politik yang hanya manis bibirnya secara teoretis-praktis saat kampanye untuk membius masyarakat dengan "program ambisius"-nya, tetapi berlaga sok "sibuk"dan sok "pahlawan"setelah duduk di keempukan kursi kekuasaanya. Mereka adalah penipu yang sebenar-benarnya. Inilah yang Julien Benda (1999) ditegaskan sebagai "pengkhianatan kaum intelektual" itu. Mereka tidak lagi memilih dan berpihak kepada kebenaran. Lebih fatal, mereka telah memilah

dan berpihak kepada ego-negatif dan kepentingan-kepentingan pragmatis-struktualnya.

Beda hati dan ketulusan, lain pula cita ideal hidupnya. Para pemikir politik tercerahkan tidak akan lalai terhadap segala praktik pembodohan, eksploitasi dan hegemonisasi. Entah itu lewat sikap politik ataupun melalui strategi pragmatik yang sangat rasional-realistik. Para pemikir tercerahkan itu sangat awas terhadap penindasan dan kezaliman penguasa atas rakyatnya, pembodohan dan "pemerkosaan inletektual" pemimpin bagi masyaraktnya serta sangat peka terhadap tipu daya muslihat elite parpol bagi basisnya. Pemikir politik tercerahkan akan senantiasa istikamah dalam "lokalitas historis"-nya. Mereka akan tidak kenal waktu untuk menjadi pemandu rohaniawan sejati bagi *grass root* (basis ideal) yang memberangkatkannya menuju kursi amanahnya.

Dengan seluruh "kekhusuyukan" tanggungjawab kemanusiaannya, mereka akan mengajarkan bagaimana masyarakat memulai suatu perjalanan dan mengakhirinya dalam dinamika kehidupan sosialnya. Karena tujuan yang ada di tangan para pemikir politik tercerahkan ini hanyalah memberi kepada segenap masyarakat suatu keyakinan bersama yang dinamis dan membantu mereka untuk mencapai derajat kesadaran diri *(khud-agahi)* yang progresif serta memandu masyarakat merumuskan cita-cita sosialnya. Pada kontek inilah pemikir tercerahkan dari parpol dan elite politik akan betul betul melahirkan sekolah alternatif bagi masyarakat.

Dalam perspektif sosilogis, pemikir politik tercerahkan akan selalu memahami dan memaknai bahwa masalah sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat harus diantisipasi dan dicarikan solusi sosialnya berdasarkan karakterisktik dan filosofi yang relevan dengan tipologi kultural mereka sendiri. Pemikir politik tercerahkan akan ssenantiasa menyadari posisinya bahwa mereka hanyalah mediator antara realitas sosial kehidupan masyarakat dan kontektualitas penyelesaiannya.

Lebih jauh dari semua itu, pemikir politik tercerahkan dalam kondisi apa dan bagaimana pun akan selalu sadar bahwa rakyat (basis) bukan "komoditas politik"yang harus dilelang seenak perut elite. Rakyat juga bukan "sapi perahan" yang harus digiring secara

tidak humanis mengikuti arus maupun gelombang kepentingan elite parpol yang tidak aspiratif bahkan cenderung eksploitatif, dan manipulatif. Rakyat juga bukan segerombolan "domba dungu" yang tidak berakal yang siap dikorbankan sebagai pertaruhan dalam "pen-togelan politik" elite.

Sebaliknya, dengan komitmen moralitas ataupun kesadaran tanggungjawabnya yang besar terhadap "kemanusiaan rakyat," pemikir politik tercerahkan dalam setiap saat, dalam perspektif sosial yang universal akan menempatkan serta mendudukkan rakyat pada kemuliaan predikatnya sebagai "subjek aktif" dalam seluruh lintasan dinamika kebijakan sosial politik kenegaraan. Mereka akan mendidik dan mengantarkan rakyat betul-betul menemukan identitas sosialnya. Pasalnya, rakyat bukan "pemilih yang lugu" melainkan "akar terkuat"dalam keseimbangan seluruh keberlangsungan sosial politik.

Pada prinsip logisnya, pemikiran politik tercerahkan akan menjadi dambaan masyarakat politik Indonesia sejak pemilu besok hingga masa-masa yang akan datang. Pasalnya, potensi rasionalitas masyarakat dalam menakar sebuah visi dan misi serta cita-cita sosial politik parpol maupun elite politik semakin subur dengan aromanya masing- masing. Salah satu contoh, 32 tahun Orde Baru yang dimotori oleh partai Golkar yang ditumbangkan secara mendebarkan ternyata kini kembali menjadi dambaan masyarakat.

Standarnya sederhana, kecerdasan sebagian elite politik bangsa dan parpol yang menegaskan era reformasi ternyata tidak juga mampu memberikan warna stabilitas perekonomian. Perpecahan, konflik dan perang intrik yang dibumbui "reformasi" tidak juga memakmurkan rakyat. Sebaliknya dalam nalar masyarakat awam, reformasi hanya membawa bencana bertubi-tubi, banjir di mana-mana dan perang di aceh merupakan salah satu buktinya.

Sekali lagi, inilah "realitas argumentatif" parpol dan elite politik yang tidak cerdas menafsiri, meresponi, dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat secara rasional dan proporsional cepat atau lambat akan diabaikan oleh masyarakat. Sementara itu, pragmatisme politik yang dilakukan oleh sekian banyak parpol pun akan menjadi bumerang yang kan melahirkan banyak penyakit dalam kehidupan masyarakat. Seperti, kencangnya

diskriminasi, maraknya hedonisme, ramainya kriminalitas-sosial dan menguatnya dentuman dehumanisasi dalam tata laku sosial masyarakat.

Budaya dan praktik politik bangsa ini sejak orde baru berdiri hingga hari ini tidak jauh beda. Pasalnya, secara moralistik, tak ada satupun elite politik saat ini yang tidak berperilaku Orde Baru. Dalam kontek (politik) teoritis-ilmiah dan pada aspek diplomasi politik memang ada kelainan antara Orde Baru dan non-Orde Baru. Akan tetapi untuk wilayah watak, strategi dan pemicu konflik serta ketidaktransparanan politik sama sekali tidak ada titik perbedaan. Tegasnya, gairah dan nafsu politiknya sama.

Maka semakin jelas, dalam "perjudian politik" pemilu besok dan besok lusa kita sangat membutuhkan lahirnya banyak pemikir politik tercerahkan yang senantiasa berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Munculnya pemikir politik tercerahkan juga diandaikan mampu mengubah dan memandu masyarakat bangsa Indonesia untuk menemukan identitas dan kesadaran diri menuju kedewasaan politik maupun kematangan mentalitas pikir sosialnya. Pemikir politik tercerahkan dimaksudkan untuk mencegah virusnya Goethe, "biarlah politik itu dilakukan kaum diplomat dan militer".

Sebaliknya, pemikir politik tercerahkan adalah "nabi-nabi politik" yang selalu siap mempertaruhkan kearifan filosofis untuk mendidik dan menumbuh-suburkan kesadaran rakyat dalam berpolitik dengan pendekatan persuasifnya, sensitivitas perasaan, dan prestise moral sosialnya. Sebab,-- meminjam bahasa Syariati – pemikir politik tercerahkan adalah orang yang sadar akan "keadaan kemanusiaan"*(human condition)* dimasanya, *setting* kesejarahan politik, dan tanggung jawab politiknya bagi *grass root*, basis ideal yang telah ikut andil "membiayai" perjalanan karier politiknya.***

2

Kiai Dan Ormas

Setidaknya ada tiga fenomena sosial yang layak dikritisi menjelang pesta demokrasi pemilihan gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Pertama, mudahnya para pejabat (birokrat) menghegemoni kiai terutama elite ormas. Kedua, cerobohnya kiai dan elite ormas yang menjadi "penandah" atau "pengemis" terhadap para birokrat ataupun kandidat gubernur dan wakil gubernur di beberapa ruang dan kesempatan. Ketiga, fenomena kelembagaan ormas yang "direntalkan" oleh elite-elite strukturalnya demi pragmatisme kekuasaan dan "proyek taktis" lainnya.

Kiai dan elite organisasi masyarakat (ormas) adalah figur teladan dalam seluruh aspek sosial masyarakat. Mereka adalah pewaris para nabi yang harus konsisten berpegang teguh dan mentransformasikan nilai-nilai kejujuran dan moralitas demi kemaslahatan umatnya.

Kalau kiai dan elite ormas menadah dan mengemis di hadapan Tuhan dengan berdoa dan memohon perlindungan, itu sebuah kewajiban sebagai hamba. Sebab, Allah SWT telah menegaskan kepada hamba-Nya untuk senantiasa berdoa kepada-Nya (Qs.

Ghafir:60).

Akan tetapi, kiai dan elite ormas yang menadah atau mengemis dalam kontek pragmatis kepada para pejabat itu berarti telah melakukan perbuatan tercela yang keluar dari nilai agama. Dalam bahasa Al-Gazali, kiai seperti dikategorikan sebagai kiai Suu, kiai yang jelek. Bukankan Rasulullah Saw telah bersabda "*alyadul ulya khairun min yadissufla*" bahwa tangan yang di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (menadah atau mengemis).

Kiai dan elite ormas penadah semacam itu jelas tidak memiliki *muruah*, sifat malu kepada Allah SWT, kepada diri dan umatnya. Mereka bukan saja "melelangkan" harga dirinya dengan sangat murah dan mencederai kefigurannya sendiri.

Pejabat (kandidat) yang memberi pun bukan berarti lebih baik. Justru antra kiai dan elite ormas yang menadah dan pejabat yang memberi itu berada dalam posisi yang sama-sama keliru. Sama-sama tidak bermoral. Sama-sama mengalami krisis identitas. Sebab, dengan berperilaku seperti itu, keduanya bisa dikategorikan melegalkan prinsip sogok-menyogok yang dilarang agama. Dan, tentu saja, dalam idiom islam, ancamannya adalah neraka, *al Rasyi walmurtasyi fi al Nar.*

Padahal ada tiga kelompok manusia yang kelak dihari kiamat tidak akan diperhatikan oleh Allah dan dosanya juga tidak akan dibersihkan. Salah satunya adalah kiai atau ahli agama seperti elite ormas yang memilih (membaiat) pemimpin karena dipengaruhi kepentingan duniawi(pargmatis).

Kedaulatan Sosial

Kalau kiai dan elite ormas saja bisa memeragakan praktik sogok-menyogok setiap menjelang pesta demokrasi (pilkada), bagaimana dengan perilaku politisi partai politik, lebih-lebih ketika pesta demokrasi presiden?. Wajar banyak masyarakat mengatakan, antara kiai dan politisi saat ini memang tidak ada bedanya. Lihat saja kiai-kiai dalam salah satu ormas yang berderet dipartai politik tertentu. Mereka yang dulu dididik idealis kini mulai lebih "lincah" secara pragmatis dibandingkan dengan politisi.

Ketika kiai menjadi penadah dan ormasnya direntalkan, mereka

akan kehilangan kedaulatan sosialnya dan terus-menerus tercekik oleh kendali politik "orang luar". Karena *al ihsan yasta'bidul ihsan,* kebaikan itu sering menjadikan penerimanya siap melakukan apa saja demi kepentingan pihak pemberi. Disamping itu, kiai penadah dan ormas "rentalan" ini bisa dipakai siapa saja dengan latar apapun setiap ada momentum politik. Disini, yang menentukan hanya negosiasi "harga" dengan seninya sendiri-sendiri bukan integrasi moral dan kejernihan akal budi.

Ormas dan birokrasi itu adalah dua pilar kehidupan kebangsaan. Birokrasi berfungsi menata struktur masyarakat secara "administratif" demi terciptanya efektifitas dan efisiensi sistem sosial. Adapun ormas mempunyai tugas mendidik dan mencerahkan kultur mentalitas dan moral msyarakat secara menyeluruh.

Ormas tidak seharusnya "direntalkan" demi konsesi politik atau pragmatisme birokratis. Sebaliknya, birokrasi jangan "dikreditkan" hanya demi pragmatisme individu birokrat yang memiliki ambisi kekuasaan tak terhingga. Sebab, hal itu sama-sama menyalahi fitrahnya dan mendustai amanah masyarakat.

Di tengah kemelut dan karut-marutnya kehidupan sosial masyarakat, yaitu lembaga politik seperti parpol tidak berfungsi maksimal, harapan terakhir bagi masa depan sosial masyarakat yang lebih terbuka dan tercerahkan itu ada dipundak birokrasi dan ormas. Peran dan fungsi keduanya selalu menjadi taruhan terwujudnya produktivitas dan harmoni sosial masyarakat.

Adapun hal yang harus dilakukan kiai dan elite ormas menyikapi pesta demokrasi seperti pilgub ini adalah mendampingi masyarakat dengan baik agar tidak terjerumus dalam perjudian politik praktis. Masyarakat harus dididik menjadi konsisten yang kritis dan mengerti akan hak dan kewajiban politiknya agar menajdi pemilih yang "sadar", bukan pencoblos yang emosional.

Artinya, kiai dan elite ormas tidak boleh mengoordinasi dan memobilisasi masyarakat sebagai komoditas politik dalam berbagai momentum demi mendapatkan simpati dan kue politik dari para kandidat.

Fungsi Ormas

Setidaknya ada empat fungsi dan peran ormas yang layak kita "*upgrade*" lagi. Pertama, ormas sebagai lembaga kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan birokrasi. Dengan fungsi ini sejatinya ormas memposisikan diri sebaik mungkin untuk menasihati, meluruskan praktik sosial birokrasi yang melenceng dari aspirasi masyarakat secara umum. Bukan sebaliknya, yakni merayap diketiak birokrat (birokrasi) demi mendulang hal-hal yang bersifat pragmatis.

Kedua, ormas sebagai mediator aspirasi sosial masyarakat dengan struktur birokrasi. Artinya, ormas dan elitnya yang memang banyak bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat harus mampu mendengar, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara objektif tanpa tendensi apa pun kepada elite birokrasi. Bukan justru mengklaim dan menjual umatnya kepada salah satu kandidat dengan konsesi sekretariat ormasnya besok akan lebih baik, atau berupa uang miliaran rupiah. Itu sangat utopis.

Ketiga, ormas harus ditempatkan sebagai institusi yang bisa menjadi penyuplai bagi birokrasi untuk produk-produk pendidikan, hukum, politik, ekonomi dan sosial demokrasi demi kepentingan publik secara menyeluruh.

Keempat, di samping sebagai mediator, penyuplai dan lembaga kontrol, ormas mesti di posisikan sebagai "majelis amanah" yang bisa proaktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan sosial birokrasi, terutama yang terkait langsung dengan kebutuhan riil pemberdayaan masyarakat di berbagai ruangnya.

Meminjam istilah Annemarie Schimmel, ormas dan birokrasi ibarat langit dan bumi, yang satu memahami peran fungsinya yang lainnya dengan sangat tulus. Maka, meniru dialek para sastrawan, membangun Jawa Barat butuh pemimpin yang berani dan berdaulat. Sebab, nasib umat tidak bisa direntalkan. ***

3

Pilgub Dan "Futuwah" Politik

Secara teoritis pesta demokrasi politik jawa barat telah dimulai. Pasangan"pegulat-pegulat" didalamnya telah berkemas dengan segala modal dan tipologinya. Awalnya mereka hanya melakukan proses administratif, dengan mendaftarkan diri sebagai peserta resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Berikutnya adalah realisasi strategi dan taktik melalui tim sukses dari yang sekedar provokatif-propagandis hingga tebar pesona lewat media massa elektronik dan cetak yang sangat simbolis.

Hampir semua elemen masyarakat seperti wajib disapa. "Senyum politik" di tabur disetiap ruang. Pertanyaan yang layak muncul, benarkah mereka memahami politik dan demokrasi dengan baik? Benarkah mereka peka terhadap amanah aspirasi rakyat?

Dalam kaidah kepemimpinan, masyarakat sunda sangat mengenal filosofi wadah dan isi. Wadah bisa bermakna ruang, termasuk medan pesta politik pemilihan gubernur (pilgub). Wadah juga dapat berarti berbagai aktivitas sosial diantara agenda-agenda propaganda politik masing-masing tim sukses. Adapun isi mengarah

pada aspek mentalitas dan spiritualitas politik masing-masing pemimpin dan pengikutnya.

Dalam tradisi masyarakat sunda seorang pemimpin harus memiliki kualitas seorang guru. Menjadi pemimpin tidak hanya ditekankan bisa menunjuk dan memerintah. Ia juga harus punya kemampuan, kesabaran, dan keterampilan mengajar dan membimbing masyarakat. Sebab pemimpin adalah isi dan masyarakat yang dipimpin merupakan wadah yang siap menampung limpahan isi. Seorang pemimpin yang berkualitas senantiasa akan mengalirkan kebaikan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Ia juga mengalirkan isi pada wadah yang menampungnya, dan bukan sebaliknya.

Salah satu nilai luhur filosofi sunda, khususnya dalam kontek kepemimpinan tidak terpaku pada primordial semata. Bagi mereka, pemimpin bukan sekedar aktivis partai politik atau akademisi, melainkan "guru sejati" dalam seluruh ruang sosial.

Dengan latar filosofis wadah dan isi itu mereka selalu menempatkan kualitas mental dan spiritual pemimpinnya di atas segalanya. Jika pemimpin tidak berkualitas, secara mental (akhlak) dan spiritual ia akan mudah ditinggal. Militansi sosial kepemimpinan masyarakat sunda adalah militansi ilahiah, ketakwaan yang melampaui definisi materialnya. Semua pegulat sama-sama putra asli sunda, tetapi siapa yang paling berkualitas secara moral politik, itulah yang akan menjadi tokoh idaman.

"Futuwah" Politik

Pemimpin yang berkualitas secara mental dan spritual akan memiliki komitmen sosial yang tinggi dan ksatria. Inilah, dalam bahasa sufisme dikenal dengan *futuwah*. *Futuwah* adalah kepedulian. Ya, kepedulian yang sangat tulus dan terjauhkan dari aspek sentimentalitas ataupun *vested interest*. Salah satu sufi, Syaikh al Daqaq, menegaskan bahwa dalam prinsipnya *futuwah* merupakan kepedulian yang diberikan seseorang kepada orang lain secara terus menerus. Bahkan seorang sufi lain menyatakan, *futuwah* berarti tidak menutup diri dari orang yang menerimanya (KH. Yusup Muhammad, SQ:2007:57).

Masih dalam konsep *Futuwah*, suatu ketika Dzunnun Al-Mishri

menceritakan kebesaran jiwa seseorang ahli *futuwah*. Saat ditawari dinar karena jasanya memberikan air kepada orang yang kehausan, sang ahli *futuwah* menolak dan berkata, "saya tidak akan masuk golongan *futuwah* jika menerima dinar dari anda". Bahkan mengusir semut yang ada di tilam saja ahli *futuwah* menggapnya tidak terpuji dan sudah keluar dari nilai-nilai *futuwah*. Sungguh, *futuwah* bisa menjadi paradigma isi alternatif dalam kehidupan, lebih-lebih dalam struktur sosial politik.

Kalau spirit dan komitmen nilai *futuwah* dikonsumsi oleh pegulat politik dalam pilgub nanti, pragmatisme atau politik uang akan terkikis. Proses demokrasi akan lebih indah dan menarik setidaknya beberapa hal akan terwujud. Pertama, pilgub Jawa Barat akan menjadi pemilihan kepala daerah yang tidak melahirkan anarkisme politik dalam bentuk sekecil apapun seperti yang dialami Sulawesi Selatan.

Kedua, pilgub Jawa Barat juga akan menjadi pilgub percontohan yang tidak memakan *cost politics* yang boros dan tidak efektif seperti yang terjadi di beberapa tempat. Artinya, amunisi yang dimiliki para pegulat kalah atau menang, bisa dimaksimalkan demi mewujudkan janji-janji dan kepedulian politiknya bagi massa yang telah berubah mengusungnya. Disitulah akan terbangun kepercayaan politik antara massa dan elite. Ini akan prospektif dan sangant menakjubkan bagi masa depan demokrasi lokal (nasional).

Ketiga, kultur politik publik Jawa Barat akan mengalami proses pematangan yang positif. Ia akan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Rakyat betul-betul diposisikan sebagai faktor terpenting dalam demokrasi nyata, bukan sebaliknya, sering dijadikan lipstik atau "pemoles" kepentingan elite semata.

Keempat, rakyat dan elite politik terutama, sang pegulat besok, akan belajar memahami pentingnya amanah dalam proses politik apapun. Kelima, spirit *futuwah* politik itu akan meminimalisasi terjadinya konflik politik yang tidak adil. Bahwa politik senantiasa berada di antara tarik-menarik kepentingan memang betul, tetapi tidak dibenarkan kalau menafikan toleransi dan kaidah-kaidah demokrasi: silaturahim, menebar kasih sayang dan menggembirakan masyarakat. Dan, seperti kata imam Ali bin Abi Thalib, tokoh *futuwah*, "sesungguhnya amal yang paling baik adalah menggembirakan orang

lain."

"Nyaah ka rahayatna"

Terlepas dari semua itu, para pegulat harus memahami bahwa kekuasaan politik bukan hak yang mutlak didapat. Itu hanya media, itu adalah amanah Tuhan. Sebab, Tuhan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki-Nya dan mencopot kekuasaan dari yang dikehendaki juga. Dalam kontek demokrasi kekuasaan adalah amanah dari rakyat. Sudah semenstinya spirit *futuwah* itu pun dipersembahkan bagi kesejahtraan rakyat.

Maka, pemimpin yang banyak diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat adalah pemimpin yang berkarakter, jujur, berkomitmen dan amanah. Akan tetapi, berbekal kejujuran dan amanah saja rasanya tidak cukup untuk membangun Jawa Barat yang mulai penuh dengan tumpukan persoalan ini.

Karena itu, dibutuhkan kriteria berikutnya, yaitu keahlian. Tanpa keahlian dalam mengelola potensi manusia dan alam yang sangat berlimpah ditatar sunda ini, kemajuan yang kita harapkan seperti sebuah penantian tanpa akhir. Hadits Rasullulah mengatakan, *"jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah detik-detik kehancurannya".*

Tentu saja kita tidak ingin Jawa Barat hancur karena urusan publiknya diserahkan kepada orang orang yang tidak ahli, apalagi yang baru mau merambah dan bersentuhan dengan dinamika sosial kemasyarakatan Jawa Barat.

Pasangan pegulat Dani-Iwan memiliki kelebihan pada aspek ini. Tinggal apakah mereka mau menganut spiritualitas *futuwah* atau tidak. Sebab, karakteristik pemimpin *futuwah* dan sunda memiliki visi yang sama, yaitu pemimpin isi, bukan pemimpin prosedural. Itulah pemimpin *anu nyaah ka rahayatna*.

4

Politik Menang dan Kalah

Dalam salah satu ajarannya, Buddha mengatakan, kemenangan menimbulkan kebencian, dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia.

Menang dan kalah hanya terjadi dalam gelanggang pertarungan apalagi pertarungan politik kekuasaan yang kebanyakan lebih hegemonik, sadis dan anarkis. Namun, pertarungan dalam kontek ini sebetulnya adalah pertarungan parsial yang hanya didedahkan demi pragmatisme sosial.

Di luar itu ada pertarungan sejati, yaitu pertarungan hidup seutuhnya antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan salah. Yang menang dalam pertarungan di gelanggang politik belum tentu menang dalam pertarungan hidup universal. Bahkan, yang menang pun bukan otomatis benar dan baik. Sebaliknya, yang kalah juga tidak mungkin salah dan jahat. Bisa jadi yang menang dan yang kalah sama-sama baik atau juga sama-sama jahat.

Tidak sedikit manusia beranggapan bahwa menjadi yang kalah

adalah memalukan dan identik lemah atau tidak benar. Adapun menjadi pemenang adalah menyenangkan karena dimaknai kuat, perkasa, berwibawa, menempuh rel yang lurus dan benar. Di sinilah terjadi kritik nalar hidup bagi kebanyakan manusia.

Rendah Hati

Di samping humanitas, kodrat manusia yang terbaik adalah kejernihan nalar dan kedalaman spiritualitas. Nalar yang jernih akan membawa manusia selalu positif dan produktif memaknai realitas hidup. Sebaliknya, nalar yang dangkal dan kotor terbukti menciptakan mental dan perilaku negatif dalam ranah sosial kemanusiaan.

Secara kodrati, manusia memiliki potensi yang bisa menjadikan kompas nilai atas jalan hidupnya. Salah satu potensi tersebut adalah nalar pikiran. Nalar pikiran ini bisa memberi warna iman penginderaan manusia terhadap dinamika hidup yang dialaminya, termasuk ketika membaca dan menempatkan pertarungan politik kekuasaan (pilkada) yang disaksikan.

Kejernihan nalar akan mewujudkan kebajikan dalam makna dan konteknya yang luas. Adapun nalar yang dangkal dan sempit cenderung melahirkan letupan, kecurigaan, apatisme, egoisme, dan sebagainya. Kriminalitas dalam hidup tumbuh subur dari nalar sosial yang sempit dan jorok.

Manusia yang memiliki nalar jernih, meminjam dari bahasanya Abraham Maslow, akan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan memiliki integritas kepribadian yang mencerahkan. Ia lebih kreatif menafsirkan fenomena hidup bermasyarakat. Ia juga tidak akan menempatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi berdiri sendiri tanpa ada kaitan spirit satu dan lainnya.

Bagian dari kualitas kemanusiaan adalah sikap dewasa dan rendah hati. Andrew Murray menyatakan, rendah hati adalah ketenangan sempurna dalam hati, tidak memiliki kesulitan apa pun. Ia tidak pernah sakit hati atau kecewa ketika gagal dan kalah dalam satu hal atau tidak pernah lupa diri ketika mengalami kemenangan dan keberhasilan dalam kontek tertentu. Sebab, dalam makna yang lebih jauh, rendah hati adalah dasar utama dalam religiusitas setiap manusia.

Manusia yang rendah hati merupakan teladan publik. Sebab, ia selalu mengorbankan diri dan potensi demi orang lain. Terkadang ia rela mengalah demi kemenangan orang lain yang lebih membutuhkan. itulah kebajikan. Seperti dalam ajaran Buddha, harumnya kebajikan dapat melawan angin, dan harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru.

Adapun manusia akan rendah hati dan lebih bijak setelah belajar dari penderitaan dan berbagai kegagalan dalam hidup. Dengan bekal pengalaman pahit itu manusia bisa membawa diri, mengasah emosi, dan membumbui dengan gurih nalar pikirannya. Untuk itu pula, ia akan selalu paham filosofi ataupun nilai pertarungan dan pengorbanannya, baik dalam ketika posisi menang maupun dipihak yang kalah.

Menang dan Kalah

Pepatah "menang jadi arang, kalah jadi abu", tampaknya masih cukup di kenal dan mewarnai nalar pikiran manusia. Lebih-lebih di kalangan manusia politik yang sering berkonflik, kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan kekuasaan adalah realitas yang cukup berarti. Menang seperti meraih kejayaan, dan kalah seakan terbunuh dan gugur dengan memalukan dalam kehidupan.

Apa pun alasannya, kultur dan nalar politik dengan logika menang jadi arang dan kalah jadi abu tidak layak di kembangkan lagi. Sebab, nalar politik sama sekali tidak mendidik dan tidak pula mencerahkan. Nalar seperti itu hanya akan terus menciptakan ketidak harmonisan (politik) di kalangan masyarakat.

Padahal, untuk menata *civil society* seutuhnya dibutuhkan nalar politik yang berlandaskan pada kerendah hatian serta elemen politik. Dengan politik rendah hati, menang atau kalah dalam pertarungan politik kekuasaan, seperti pemilihan gubernur ini, tetap dimaknai sebagai media memproses kematangan nalar pikiran dan moral secara kolektif, bukan diskriminasi kemanusiaan yang sangat destruktif.

Artinya, menjadi pemenang bukan seketika mengubah diri berperilaku serba menguasai dan membabat kelompok yang kalah dengan keji. Sebaliknya, menjadi yang kalah juga tidak harus kecil

hati dan frustasi kemudian mencela dan mengoordinasi tindakan-tindakan yang tidak produktif. Sebab, menjadi yang kalah bukan berarti tidak bisa berkarya lebih baik bagi kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Bahkan menjadi pemenang pun juga tidak menjamin dapat mewujudkan aspirasi rakyat dengan baik dan benar selama nalar dan spiritualitas politiknya tidak jernih.

Rendah hati akan menempatkan kemenangan bukan sebagai kekuatan dan keperkasaan, melainkan sebagai amanah dan ridha Tuhan yang harus dimaksimalkan, yaitu tetap harus merangkul, mengayomi, dan menyantuni semua pihak yang kalah tanpa kebencian sedikit pun. Rendah hati dalam kekalahan tentu saja bukan apatis, marah, dan menganggap semua kegagalan sebagai beban sosial yang dapat menciderai karier kemanusiaannya. Meski kalah, tetap harus ksatria, mengakui, dan memberikan kontribusi positif bagi yang menang. Itulah demokrasi. Itulah politik sejati, bukan sekedar bicara kepentingan melainkan harus mewujudkan kemaslahatan.

Rendah hati dalam politik adalah model terbaik menata kekuasaan. Lebih jauh dari itu, rendah hati dalam politik akan mengantarkan yang menang atau pun yang kalah sebagai manusia beradab, manusia yang menghiasi diri dengan akhlak Tuhan.

5

Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU

Konflik politik partai kebangkitan bangsa atau PKB diakui atau tidak merupakan pukulan psikologis bagi kultur politik nahdliyin. Terlepas dari cara Gus Dur memainkan peran di dalamnya, PKB dan politik nahdliyin pada umumnya sedang mengalami disorientasi yang sangat rentan, dan bisa-bisa konflik itu berujung pada pentas pen-diskualifikasi-an NU secara nasional.

Di lain sisi, tausiyah moral sebagian kiai Nahdlatul Ulama (NU) juga kurang "diminati" dan tidak banyak mempengaruhi tarikan *friktif* di dalamnya yang demikian tinggi. Bahkan, bentuk mediasi yang digagas NU sebagai jamiah pun tak membekas. Sebab, elite-elite NU sendiri belakangan hanya cenderung menjadikan struktur NU sebagai batu lompatan. Mereka tak malu-malu ikut bursa calon anggota legislatif (caleg), dari DPRD kabupaten/kota, DPRD propinsi, hingga DPR.

Jadi, ujian terakahir politik nahdliyin tergantung pada Pemilihan Umum 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam pemilu legislatif, misalnya, kita bisa melihat seberapa besar raihan suara yang didapat partai-partai yang berbasis nahdliyin yang

masuk kategori besar, seperti PKB,PPP, dan PKNU.

Kalau raihan suara masing-masing partai itu tidak terwujud sesuai harapan, atau tidak signifikan, pilihan NU hanya dua: Segera reorientasi peran sosial-kebangsaan atau menyusun khittah 1999 dengan semangat peradaban abad ke 21 dan total meninggalkan politik praktis tanpa *mustsasna* (pengecualian) sedikit pun. Artinya, semua warga NU, kiai atau bukan, harus diharamkan secara mutlak terlibat dalam dunia politik praktis.

Konflik politik berkepanjangan yang dialami PKB ini sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi konstituen NU, terutama yang berada di daerah perkotaan. Meski demikian tidak bisa diprediksi bahwa sebagian besar suara mereka itu akan "lari" dan mudah "dilarikan" kepada PPP di mana banyak kiai NU telah memberikan dukungan moral dan menganggap PPP sebagai rumah politik NU periode awal. Sebab, masih ada banyak partai kebangkitan nasional ulama (PKNU) partai baru yang didalamnya juga berkumpul jawara-jawara nahdliyin dari kalangan kiai, akademisi, pembisnis, dan aktivis organisasi yang secara emosional terikat langsung dengan NU.

Melihat PKNU

Kita perlu melihat dengan lebih jernih kehadiran dan keberadaan PKNU. Bukan karena tidak sedikit kiai-kiai NU yang dulu berbaris tangguh dalam gerakan politik Gus Dur (PKB) kini memulai start jihad politiknya di PKNU, atau bukan pula lantaran partai ini tergolong baru dan masih belum disesaki konflik di dalamnya. Namun, salah satu argumen yang cukup rasional adalah sosok Choirul Anam (Cak Anam) yang kini menjadi pilot utamanya, sebagai bekas kader dan ketua umum DPW PKB Jawa Timur, ia tentu sangat mengenal karakter dan tipologi aspirasi politik basis PKB, terutama di Jatim, yang sampai detik ini masih menjadi lumbung suara PKB terbesar.

Anam dikenal sebagai konsolidator ulung dalam politik. Ketika menjadi pucuk pimpinan DPW PKB Jatim, ia sama sekali tidak pernah memperebutkan kursi anggota Dewan, baik DPRD tingkat I maupun DPR. Ia memahami dengan cukup matang tugas dan amanah dalam berpolitik. Ia betul-betul bekerja dengan konsentrasi penuh mengayomi dan mengawal basis.

Anam seakan memberikan teladan politik bagi kita bahwa masuk dalam politik harus jantan memilih mengawal basis dan program-program strategis partai (fungsionaris-Strukturalis) atau menjadi anggota dewan mengurusi kepentingan publik secara umum sambil terus menguatkan militansi politik kepada partai (fungsionaris-Kultural).

Secara propaganda, PKNU memang tidak vulgar mengutarakan visi dan capaian politiknya di berbagai media massa. Kalau boleh di istilahkan, PKNU sedang menerapkan budaya kerja politik PKS, yaitu gerilya-produktif, menyatroni dan mengawinkan misi politiknya diam-diam dengan berbagai aspirasi politik masyarakat di pelosok-pelosok.

Kiai-kiai dan pesantren NU, khususnya yang sudah *nuzuz* (tidak akur) dengan Gus Dur dan PKB yang bertebaran di berbagai desa dan kota dirangkul dengan baik. Bahkan sebagai partai gabungan antara kelompok nahdliyin dan nasionalis, elite-elit PKNU pun dengan rapinya menggalang kekuatan dari basis nasional baik yang pernah dulu dimiliki PDI-P maupun PNBK.

Dengan langkah ini, keberadaan PKNU tidak bisa dilihat sebelah mata, baik oleh PKB dan PPP maupun oleh PDI-P dan PNBK. Dalam era transisi politik yang masih belum berkarakter ini, semua partai baru yang memiliki modal basis kultur yang kuat tak tertutup kemungkinan bisa meraup suara cukup signifikan. Hal itu pula yang pernah dialami Partai Demokrat.

Simbol Terakhir

Eksistensi PKNU pun menjadi simbol terakhir pergulatan politik nahdliyin, baik secara lokal maupun nasional. Raihan suara PKNU pada pemilu 2009 nanti merupakan *fit and profer test* tersendiri bagi eksistensi politik NU. Kalau saja raihan suara PKNU itu sedikit, berarti politik NU tidak lagi diperhitungkan. Meminjam bahasa bisnis, eksistensi dan politik NU sudah "tak laku lagi dipasaran Modernitas".

Ketidaklakuan itu bisa di akibatkan oleh beberapa hal. Pertama, banyaknya kiai NU yang telah banyak melalaikan amanah Allah SWT dan aspirasi masyarakat. Mereka abai pada tugas utamanya sebagai

pemilik saham moralitas terbesar dimuka bumi. Mereka lebih sibuk mengurusi politik praktis dengan segala "hadiah"pragmatismenya. Bahkan tampaknya mereka lupa akan tujuan luhurnya sebagai ahli waris Nabi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan manusia kepada Allah SWT, dan lebih memilih menjadi *mak comblang* politik praktis melalui kharisma yang telah Allah anugrahkan.

Kedua, tak sedikit elite kiai dan elite NU yang kurang memahami spirit dan orientasi kejuangan NU. Berjuang dengan dan untuk NU sangat berbeda dengan memperjuangkan ambisi diri melalui NU, yang pertama menekankan keikhlasan dan totalitas tanpa pamrih duniawi, sedangkan yang kedua sarat dengan kepentingan-kepentingan parsial. Kategori kedua ini yang marak diwujudkan elite NU belakangan. Wajar kalau mereka sering kali menjadikan NU sebagai lompatan utopisme semata.

Agar PKNU eksis dan lebih prospektif, kiai-kiai dan elite NU yang ada didalamnya harus bisa memilah mana politik yang benar dan mana politik yang hanya untuk membenarkan. Sebab, politik itu seni sosial, bukan *kasab* hidup. Maka politik yang benar ialah yang memahami dan menegaskan dengan artikulasi tinggi bahwa yang benar tetap benar, tidak tergantung pesanan dan kepentingan sesaat, dan lebih mementingkan kebajikan moral dari pada keuntungan parsial.

Kalau prinsip demikian diabaikan, masyarakat akan menganggap *wujuduhu ka'adamihi,* ada dan tiadanya PKNU sama saja, menggelikan.

6

Guru dan Politik Kita

Guru dan Politik Kita

Ws Rendra, dalam salah satu penggalan sajaknya, berujar, …/ *hanya mengalami kelengkapan diriku/apabila menjadi guru/semangatku bergelora/gairah hidupku menyala/dalam suka maupun duka/apabila aku menjadi guru.*

Sajak ini juga pernah dikutip Andrias Harefa dalam buku *menjadi manusia pembelajar* (2000). Bahkan, Harefa menulis bahwa tugas dan panggilan tertinggi seorang anak manusia adalah menjadi manusia guru. Sebab ia bisa bertanggung jawab untuk menciptakan suatu masyarakat pembelajar yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru bagi sebuah bangsa dan umat manusia pada umumnya.

Guru identik dengan manusia yang memiliki komitmen tinggi terhadap regenerasi suatu bangsa bahkan dalam perspektif integralistik, guru adalah faktor penentu dan ujung tombak keberhasilan implementasi kebijakan dan usaha-usaha inovatif, termasuk pembentukan karakter bangsa itu sendiri.

Fuad Fachruddin, direktur INSEP dan Tim Pengembang

Yayasan Pendidikan Sukma, Jakarta, menulis bahwa secara nasional jumlah guru di indonesia 2.783.321 orang yang tersebar di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Media Indonesia, 11/05/09) sebuah jumlah yang masih jauh dari cukup untuk mempercepat pencerahan generasi bangsa ini.

Masa Depan Guru

Disadari atau tidak, meningkatnya atmosfer politik 2009 sejak Pemilihan Umum Legislatif dan menjelang Pemilihan Umum Presiden membuat masa depan guru yang berjumlah 2.783.321 orang itu sendikit terancam. Salah satu faktornya tak lain adalah rencana pemerintah mengurangi anggaran pendidikan pada RAPBN 2010, dengan hanya mematok angka pada Rp. 195,63 Triliun (20,6%). Padahal, anggran 2009 saja 207,4 Triliun atau 21% dari APBN. Jumlah yang berkurang sekitar 11,7 Triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 (kompas, 27/04/2009).

Semangat ideal undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ingin meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seorang guru, seharusnya menjadi perhatian yang benar-benar utuh. Sebab persentase 20 persen yang diamanahkan dalam UU no.20/2003 itu tidak hanya untuk gaji dan tunjangan guru, tetapi juga mencakup alokasi perangkat kependidikan, seperti media pembelajaran dan lain sebagainya.

Membiarkan pengurangan anggaran itu berlangsung sama saja dengan menciptakan "derita" baru lagi dalam dunia pendidikan dan masa depan kaum guru. Padahal, pendidikan adalah kunci dalam mencerdaskan bangsa. Kaum guru merupakan "mesin penggerak" untuk memicu dan memacu seluruh pencerdasan generasinya.

Maka, pemahaman secara bijaksana dan proporsional atas profesi ditetapkanya anggaran pendidikan 20% (persen) itu merupakan keniscayaan. Politisasi atau apa pun bentuknya yang berpotensi membiaskan jaminan kesejahteraan kaum guru dan dunia pendidikan tidak layak diteruskan.

Budaya politik yang selalu memperagakan setiap ganti kepemimpinan berarti mengubah kebijakan harus diakhiri. Budaya kekuasaan politik semacam ini tidak hanya akan merugikan

masyarakat, tetapi juga akan berakibat buruk terhadap struktur kelembagaan politik itu sendiri. Sampai kapan pun bangsa kita tidak akan pernah memiliki arahan dan standar objektif menyelami kegagalan dan keberhasilan kepemerintahannya.

Akar filosofi pepatah mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa semestinya mesti diliris lagi sepenuh hati. Dengan demikian, kita dapat memaknai peran tanggung jawab mereka secara rasional, etis, dan lebih manusiawi. Sebab, kaum guru adalah khalifah terkemuka yang benar-benar bertata rasa. Di tangan mereka nasib pendidikan generasi bangsa ditentukan.

Eksistensi guru adalah manifestasi ilmu (pengetahuan). Tanpa peran kaum guru, bisa jadi sebagai bangsa kita akan semakin terjauh dari nilai-nilai luhur peradaban. Karena begitu besar peran sosial kaum guru, Sayyida Ali K.W pernah menegaskan bahwa siapa saja diantara kita yang bisa memberikan ilmu (pengetahuan) meski satu huruf, hendaknya ia ditempatkan sebagai seorang guru.

Tanpa ilmu kita akan terus tercengkram oleh kepongahan prilaku sosial kita sendiri yang jumud. tanpa ilmu kita tidak akan pernah bisa kreatif dan memiliki peradaban bernilai tinggi. Ilmu kata Sayyidina Ali Kw, adalah sebaik baiknya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Buah dari ilmu adalah kebajikan dan keselamatan. Bahkan, ilmu lebih baik dari pada harta atau kekayaan. Sebab, ilmu melindungi kita, sedangkan harta sebagian besar kadang mencelakakan kita.

Baginda Muhammad SAW menegaskan bahwa siapa saja yang menginginkan dunia hendaknya dengan ilmu (pengetahuan). Siapa pula yang merindukan akhirat mesti dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, siapa yang menginginkan keduanya haruslah dengan ilmu (pengetahuan). Kaum guru adalah pelestari tradisi ilmu (pengetahuan) itu sendiri.

Semangat Politik

Sebagai seni mengolah dan mengartikulasi aspirasi publik, selayaknya semangat politik diarahkan pada pematangan pemikiran, atau pun perilaku yang lebih edukatif dan humanistik. Politik yang diceraikan dari semangat kependidikan dan kemanusiaan, disadari atau tidak, hanya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat.

Politik berbasis pendidikan akan ikut mempercepat pendewasaan demokratisasi, dengan mentransformasikan nilai-nilai kependidikan dalam politik demokrasi akan sigap memberikan maslahat bagi publik. Ia akan bisa diandalkan meminimalisasi friksi dan konflik sosial kebangsaan. Karena dengan membasiskan pada spirit pendidikan, politik akan tumbuh subur secara bersahaja. Ia akan menjadi rahmat, toleran, luwes, empatik, dan bukan eksklusif dan irasional.

Konsekuensi logis menempatkan semangat politik dijalur kependidikan adalah partai-partai bersama seluruh aktivis politik pun akan terus menyadari pentingnya profesionalisme dalam kerja pengabdian, dan bukan terbuai tipologi klaim sosial ataupun tarian kekuasaan yang hegemonik.

Aristoteles berujar, ketika ditukangi kaum terpelajar (berpendidikan), politik akan lebih menyehatkan ketimbang dijalankan oleh komunitas yang tidak berpendidikan. Di sinilah pentingnya mengeksplorasi dan merumuskan kembali tata kerja politik kita, mesti ada media kemitraan yang efektif yang integratif antara kaum guru dan kaum politik secara maksimal dan profesional. Sebab, masa depan pendidikan bangsa ini tidak terletak pada seberapa besar kecilnya anggaran, tetapi juga sangat tergantung pada kualitas keterampilan dan komitmen humanisme seutuhnya.

Legislator dan guru bukanlah dua kutub komunitas yang berbeda secara mutlak, mereka sama-sama generasi bangsa. Politik hanya salah satu jalur menata kenegaraan. Kereta api mereka sama-sama indonesia. Yang berbeda tentu hanya gerbong dan tempat duduk masing-masing. Dan, ketika partisipasi kaum guru tidak dicederai, demokrasi politik pun akan kian bertaji!.

7
Golkar Muda

Kontradiksi dan perubahan biasanya melekat dalam dunia praksis politik. Sebab, politik senantiasa tidak stabil. Ia kadang tenang dan menjanjikan, tetapi sering bergemuruh dan menakutkan. Ia sekilas tampak ramah dan menyenangkan, namun dalam waktu bersamaan cepat mengacak-ngacak dan memorak porandakan struktur sosial kita. Salah satu sifat politik yang tidak mudah hilang adalah menggantungkan eksistensinya pada desakan-desakan kepentingan pragmatis yang berdasarkan momentum.

Fenomena kontradiksi dan friktif seperti itulah yang mulai mengiris-iris eksistensi politik Golkar sepuluh tahun terakhir. Terlebih ketika dikaitkan dengan eksistensi politik Golkar pasca pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009. Padahal meski tahun 2004 kalah dalam pemilihan presiden, diparlemen, Golkar menjadi "jawara". Sedikit kontras dengan pemilu 2009.

Politik Golkar

Dari segi kesejarahan, politik Golkar tentu sudah bisa

dikategorikan "tua". Setidaknya lebih dari tiga puluh tahun politik Golkar telah mengalami kejayaan. Pada era Orde Baru yang dikendalikan oleh Soeharto, disadari atau tidak, politik Golkar telah menjadi bagian cukup vital dalam budaya birokasi politik indonesia. Sebab, Soeharto lihai dalam mengaktualisasikan komando politik secara kultur maupun struktur. Hampir semua pejabat politik dibelahan negeri ini waktu itu adalah kader Golkar.

Berbeda dengan era Soeharto, politik Golkar kini mulai kehilangan "komando". Ia mengalami krisis karakter politik, baik secara ideologis, maupun dalam kontek kelembagaan politiknya. Di antara faktor penyebabnya adalah hengkangnya tokoh-tokoh penting Golkar dan terbentuknya partai-partai baru yang dibidani oleh mereka yang dulu pernah dibesarkan oleh Golkar. Inilah praktik pengembosan politis yang memilukan.

Padahal meniru bahasa Paul Chartledge, kalau mau mengaca pada teori poltik kuno, seharunya politik Golkar di masa sekarang ini lebih banyak berbicara tentang *sharing* (*methexis*) dan aturan/*rule* (Arche) daripada kedaulatan atau kekuasaan (*bia, kratos, ananke*). Atau, sebuah gerakan politik yang lebih cakap mengolah potensi dan kelemahan secara internal maupun eksternal.

Dari aspek pengertian yang paling sederhana, *sharing* itu merupakan media efektif dalam rangka menjungjung tinggi eksistensi demokrasi, yakni komitmen yang senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi kolektif dan bukan diskriminasi sadistik. *Sharing* berarti mengandaikan adanya kebesaran hati dan ketulusan dalam melihat seluruh realitas politik yang dihadapi, baik dalam posisi yang dianggap kalah maupun dipandang menang sekalipun. Artinya, sejarah kemenangan dan kejayaan di masa lalu yang kini tiba tiba hancur diterpa badai sosio-politik tidak lantas dipersepsi sebagai kegagalan yang membuat struktur politik dan kader Golkar kehilangan rasionalitasnya. Fenomena itu bukan merupakan bala atau karma. Itu hanya dinamika proses. Tak etis dijadikan tolok ukur untuk saling menajtuhkan.

Tua dan Muda

Seperti kita tahu, wacana kontradiksi dan friksi di tubuh

Golkar akhir-akhir ini mulai menyinggung soal regenerasi politik. Perhelatan eksistensi di antara kader tua dan kader muda kian memanas menjelang ritual formal organisatoris (munas). Bahkan, perdebatan pun hampir-hampir keluar dari jalur humanistik dan semakin menunjukan tendensiusitas politiknya. Kalau dibiarkan begitu saja, pelan tapi pasti mereka akan benar-benar terjebak dalam desakan kepentingan pragmatis dan abai terhadap solidaritas politik kepartaiannya.

Padahal, melalui sunnahnya, Rasulullah SAW menegaskan, *man lam yarham shagirana walam yuwaqqir kabirana falaisa minna* "barang siapa yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda, maka mereka tidak termasuk golongan kami".

Syeh Mustofa Al-Ghalayani menulis kitab "Idzhatu Al- Nasyiin pernah berkata *Syubbanu Alyaumi rijalu Al ghadi.* Menurut dia, pemuda sekarang adalah generasi penerus masa depan. Masa depan sautu bangsa akan selalu berada dipundak kaum muda. Tidak terkecuali kemerdekaan negara Indonesia yang juga dimotori kaum muda.

Persoalan eksistensi kaum tua dan kaum muda tampaknya memang menjadi bagian dari dinamika sejarah sosial kemanusiaan. Secara karakter, kaum tua tampak bisa mengolah emosi dengan berbagai pengalaman maupun kematangan berpikirnya. Meskipun sering kali ketika menghadapi pergumulan sosial mereka kelihatan agak lamban, kurang progresif, dan tidak bisa zig-zag.

Sebaliknya, kaum muda dengan darah segarnya, meminjam bahasa bung Rhoma Irama, tampak gagah namun sulit mengalah. Mereka terlihat egois-progresif walau kadang kurang perhitungan dan tidak bisa mengemas emosionalnya. Namun demikian, Moh. Iqbal, sang penyair eksistensialis, dalam sajaknya pernah berujar suara jernih kaum muda bisa melampaui takdirnya sendiri. Menyia-nyiakan kaum muda, sindir Moh. Iqbal, dengan segala potensi dan perannya, merupakan langkah picik yang sangat membahayakan. Ibarat tumbuhan dan pepohonan, katanya, tak mungkin ada yang disebut tua dan matang kalau tidak melalui proses muda. Namun sesuatu yang tiba-tiba tua berarti telah mengidap masalah. Ia bisa jadi "karbitan", tidak bisa tahan banting. Hanya bisa menggeliat-geliat tapi miskin inisiasi.

Oleh karena itu, Golkar muda kedepan bukan hanya ditentukan oleh kader yang berusia muda atau tua sebatas pertimbangan umur semata. Itu logika yang prematur. Lebih jauh dari itu kepemimpinan politik Golkar mesti didobrak oleh dan dengan kecakapan politik kolektivitas, yaitu semangat dan komitmen politik yang tetap memadukan antara eksistensi kaum tua dan kaum muda.

Sebab, yang muda rata-rata potensinya masih orisinil, energik. Bertenaga jumbo. Adapun yang tua, telah lebih dulu kenyang dengan garam. mereka lebih punya pengalaman (taktik) berkompetisi meski zaman spiritnya berbeda, sudah selayaknya, kaum tua melengkapi potensi yang muda itu dengan siraman empati yang lebih terampil, bukan dengan sikap gegabah, dan antipati yang kerdil. ***

8

Uang dan Politik

Ketika Gus Dur -sapaan akrab KH. Abdurrahman Wahid- menjabat sebagai presiden, konon ia pernah berkata kepada salah satu orang dekatnya bahwa "saya tidak pernah terang-terangan memusuhi mereka yang punya uang". Sebab, uang mereka lah yang menggerakkan politik. Selama mereka tidak mengeluarkan uang, tidak akan terjadi apa-apa.

Tentu saja untuk memahami pernyataan Gus Dur dalam kontek ini tidak terlalu sulit. Momentum pemilihan kepala daerah mulai dari bupati dan gubernur, di berbagai wilayah Indonesia, tidak pernah sepi dari dinamika "biaya politik" dengan segala modusnya. Sebab dalam dunia politik praktis memang tidak pernah berlaku rumus konsolidasi tanpa amunisi.

Bahwa uang betul-betul berkaitan dan bisa menggerakan politik dapat disimak dari pengeluaran parpol kontestan pemilu 2009 tahun lalu. Gerinda misalnya, sebagi partai baru dengan pemasukan 308.77 Miliar, ternyata pengeluaran biaya politiknya mencapai 308.77 Miliar. Partai Demokrat sebagai partai incumbent, dengan pemasukan

234.819 Miliar belanja politiknya mencapai 234.632 Miliar.

Partai Golkar agak berbeda dari yang lain, dengan pemasukan 145,583 Miliar tapi pengeluarannya lebih banyak yakni 234. 632 Miliar. Adapun pengeluaran partai lain berkisar dalam jumlah puluhan Miliar rupiah. Di antaranya, PKS (36.258M), Hanura (19.197M), PAN (17.858 M), PDIP (7.256 M), PPP (3.662 M), PKB (3.253 M), PDP (2.0 M), PKPB (4.5 M), Partai Kedaulatan (3.5M), dan partai Patriot hanya 151.67 juta rupiah.

Uang Politik

Dalam urusan uang politik ini selayaknya kita membedakan dua hal, yaitu biaya politik dan pembelian suara yang diorientasikan demi memenangkan pertarungan politik. Biaya politik itu berkaitan dengan administrasi konsolidasi, baik dalam bentuk silaturrahim dengan konstituen atau tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh cukup baik ditengah masyarakat, biaya opersional tim sukses, biaya iklan di media massa dan sejenisnya.

Biaya politik tentu berbeda dengan biaya pembelian suara. Sebab dalam proses pembelian suara itu mengandung bujukan berlebihan yang harus ditandai dengan mengekang kebebasan setiap individu dalam setiap menentukan pilihan politik. Pembelian suara mengandalkan terjadinya kontrak politik yang mengikat dan belum tentu menguntungkan dua belah pihak. Inilah yang disebut sebagai risywah (praktik sogok-menyogok).

Sementara dalam konsolidasi yang terjadi baisanya hanya tukar pikiran, membangun ikatan emosional, permohonan restu, dan menyentuhkan kesepemahaman visioner antara politisi dan konstituen. Tidak ada unsur paksaan yang harus memilih dengan segala konsekuensi sebagaimana konpensasi politik yang telah ditetapkan.

Dalam konteks menerima uang politik ini ada banyak pendapat yang perlu dikemukakan. Pertama, sebagian ahli agama menilai selama pemberian itu tidak menyertakan kontrak khusus (akad sharih) atau kontrak sindiran (akad ta'ridl) antara politisi dan konstituen, maka yang menerima tidak akan mendapatkan dosa, tapi hanya dianggap tidak mempunyai sikap kehati-hatian (wara'). Dan kalau dua akad itu

disertakan maka baik yang memberi maupun yang menerima telah masuk pada wilayah dosa menurut ajaran agama (Islam).

Kedua, sekiranya yang memberi tidak berniat membeli suara maka ia juga tidak berdosa. Meski demikian, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa menyogok karena hak itu boleh bagi orang yang menyogok tapi tidak boleh bagi orang yang menerima. Namun, ulama seperti kiyai Najih Maemun (Jawa Tengah) dengan tegas mengatakan bahwa hal itu termasuk Mafsadah Dhahiroh mutlak.

Artinya, haram hukumnya menerima uang politik seperti itu, baik dengan itikad menuruti pihak pemberi maupun sekedar menerima untuk kemudian bersandar pada suara nuraninya. Dan kalau menuruti si pemberi berarti risywah, seandainya tidak menuruti berarti menilep uang tanpa hak. Dan dua-duanya pun tetap haram.

Politik Bersih

Politik bersih bukan berarti praktik politik yang sama sekali tidak memakai uang. Lolosnya Gerindra dan Hanura dari batas parliamentary Treshold (2,5%) mengalahkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), hal itu tidak bisa dipisahkan dari biaya politik yang telah dikeluarkannya.

Namun, politik bersih juga bukan berarti semata-mata tidak melakukan black campaign terhadap lawan-lawan politik, tidak melakukan money politic di setiap ruang dan momentum, tidak memanipulasi data pemilih, tidak melakukan manuver yang kontraproduktif, tidak menerapkan pembunuhan karakter atau tidak melakukan kecurangan administratif dan sejenisnya.

Meminjam istilah Emha Ainun Najib, politik bersih adalah budaya dan praktik politik yang tidak didasarkan pada paradigma juz'iyyah, yang memahami proses politik hanya sebatas sektoral, fakultatif dan parsialistik. Atau, politik yang semata menyantuni konstituen ketika menjelang pemilu (pilkada) dengan retorika pragmatis dan trik pembelian suara yang relatif murah.

Akan tetapi, masih meniru istilah Emha, politik bersih ialah tradisi dan perilaku politik yang dibangun dari karakter berpikir kulliyah, yang betul-betul menempatkan eksistensi masyarakat pada nilai-nilai universalitasnya dan senantiasa berjihad memasuki

kedalaman spiritualitas kekuasaan. Politik tidak dimaknai semata alat menaikan status sosial dan memperkaya diri secara material, melainkan diyakini sebagai amanah publik dan lumbung sosial terbaik untuk mengolah aspirasi seluruh elemen masyarakat.

Meskipun disupport oleh kekuatan uang guna merealisasikan konsolidasinya yang lebih efektif, politik bersih juga selalu dipacu oleh kualitas kepribadian dan etos kerja politisi itu sendiri. Kekuatan uang tidak lagi dipahami untuk menghegemoni publik dengan kebiasaan "rentenirisasi" suara, namun dijadikan "bensin" untuk meningkatkan daya kreatifitas dan produktifitas kerja politik secara rasional, konstruktif, proporsional dan akuntabel.

Politik bersih merupakan manifestasi dari sikap dan budaya politik yang mampu berdikari dengan akuntabilitasnya sebagai pohon demokratisasi bagi publik, dan bukan politik yang eksploitatif hanya karena kekuatan uang. Artinya, di samping mengintegrasikan komitmen, kejujuran dan keadilan, politik bersih selalu menempatkan setiap individu masyarakat layaknya manusia yang dianugerahi kemerdekaan memilih dan bukan komunitas lemah yang kapan saja bisa dicekik dan dimangsa.

Maka pesta demokrasi pemilihan Gubernur Bangka Belitung kedepan, harus senantiasa dipahami dan diletakkan pada wilayah spirit kekuasaan sebagai amanah umat, bukan sebatas panggung untuk popularitas dan pragmatisme politik beberapa kelompok kepentingan. Sebab kalau tidak demikian, masyarakatlah yang akan terus menjadi korban setiap pertarungan politik, Na'udzubillah.

9

Keadilan (Dalam) Politik

Sejarawan muslim terkemuka, Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa "jika urusan dunia ini diperintahkan dengan keadilan, maka masyarakat menjadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral peribadi para penguasa... Dan jika urusan dunia ini diperintahkan dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh tanpa peduli kesalihan peribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala diakhirat nanti. .. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam".

Pernyataan Ibn Taimiyah itu selayaknya dijadikan modal evaluasi dan reorientasi tersendiri dalam transformasi budaya politik dan demokrasi yang semakin "diminati" oleh masyarakat kita akhir-akhir ini. Tak terkecuali bagi kontestan pemilukada Bangka Belitung yang baru saja berlaga.

Tanpa transformasi keadilan yang sesungguhnya, maka budaya politik dan dinamika demokrasi akan terjauh dari makna dan misi fundamentalnya sebagai kebajikan sosial bagi masyarakat.

Konsekuensinya, masyarakat akan senantiasa berada dalam bayang-bayang friksi dan konflik sosial yang bersenyawa dengan barbarisme maupun kanibalisme. Semua akan mudah saling curiga, mengadu domba dan meluapkan ekspresi-ekspresi sosialnya secara destruktif.

Makna (Ke)adil(an)

Sering kali kebanyakan manusia memaknai adil dengan istilah "tengah" atau "pertengahan" atau "tidak menampakkan keberpihakan" dalam suatu ruang atau situasi tertentu. Itulah makna etimologisnya menurut versi bahasa Arab. Dalam makna ini pula, menurut uraian Nurcholish Madjid atau Cak Nur (1992:514), kata adl (adil) itu sinonim dengan kata Wasth (tengah-tengah). Maka wajar masih menurut Cak Nur, kalau dalam dunia sepak bola ada juru kunci yang disebut "wasit", yang berarti "penengah" atau "orang yang berdiri "ditengah" yang mengisyaratkan sikap keadilan.

Namun, lanjut Cak Nur, kata adl, itu sinonim dengan kata inshaf (berasal dari kata nishf yang artinya "setengah"). Maka orang yang adil itu disebut munshif; orang yang sadar. Artinya, setiap orang yang adil itu memiliki kesadaran atau keinsafan bahwa ia memang sanggup berdiri ditengah-tengah tanpa melibatkan sedikit pun keberpihakan yang timpang. Ia benar-benar harus sadar untuk melihat dan memposisikan suatu masalah dengan perspektif yang menyeluruh, sehingga sikap yang diambilnya menjadi tepat dan benar seutuhnya.

Menurut Sayyid Murtadha Muthahhari, keadilan itu sedikitnya memiliki empat makna. Pertama, keadilan mengandung arti perimbangan atau keseimbangan (Mawzun atau balanced). Keadilan dalam pengertian pertama ini, berkaitan dengan kesatuan-kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya. Penegasan ini diambil oleh Muthahhari dari semangat Alquran surat Al rahman (55) ayat 9 yang berbunyi: Dan langit pun ditinggikan olehNya dan dia meletakkan keseimbangan (Mizan).

Di sisi lain, Rasullullah Muhammad Saw telah bersabda, bahwa "dengan keadilan, langit dan bumi tegak berdiri". Keadilan dalam makna keseimbangan ini kata Mutthahari seperti yang ditiru Cak Nur, merupakan lawan dari kekacauan atau ketidakserasian dan bukan kezaliman. Dan dalam pengertian ini pula, keadilan hanya menghasilkan kebaikan umum, yang sangat terbuka bagi kemungkinan untuk

diingkari bagi sebagian orang yang punya kepentingan tersendiri dalam masyarakat.

Kedua, keadilan menyiratkan makna persamaan (musawwah) dan tiada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Tidak lah keliru ketika ada ungkapan bahwa yang dikategorikan adil adalah sikap memperlakukan sesuatu atau orang itu secara sama. Ketiga, keadilan menyangkut pemaknaan yang lebih substansif, yakni memberikan perhatian terhadap hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang memang berhak.

Maka menyia-nyiakan hak, atau bahkan memerkosa dan merampas hak orang lain terlebih secara sengaja, dalam perspektif pengertian ketiga ini menurut Muthahhari bisa dikategorikan sebagai kezaliman. Itulah perbuatan yang bukan semata diskriminatif, melainkan telah masuk pada ranah kriminalisasi moralitas. Sedangkan makna keadilan yang keempat menurut pandangan Muthahhari, ialah keadilan Tuhan (al 'adl al illahi), bahwa dalam segala ciptaan itu selalu ada keadilan.

Orientasi Keadilan

Semangat keadilan adalah konstruksi bangunan nilai terluhur dalam kehidupan. Keadilan adalah kunci segala urusan kemasyarakatan. Dikatakan John Rawls dalam Teori Keadilan (A theory of justice, 2006;3), bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, bagaimana kebenaran dalam dalam sistem pemikiran. Meskipun, lanjut John Rawls ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Adapun sifat dan orientasi dari keadilan itu menurut John Rawls, pertama, menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang lain dapat di benarkan oleh hal lebih besar yang di dapatkan orang lain. Kedua, tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Maka dalam masyarakat yang adil, tegas John Rawls, kebebasan warga negara dianggap mapan bilamana hak-hak mereka yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebab, keadilan pada maknanya yang lebih substantif adalah pembentuk kontrak paling mendasar dari asosiasi masyarakat

yang terstruktur dengan baik. Disini, struktur atau cara lembaga-lembaga sosial dari masyarakat harus benar benar piawai dalam mendistribusikan hak dan kewajiban paling mendasar dari dan untuk masyarakat, termasuk dalam mengalirkan keuntungan sosialnya.

Namun demikian, menegakkan keadilan memang bukan soal mudah, lebih-lebih menyangkut distribusi sosial politik. Karena politik senantiasa memiliki misi, orientasi, dan paradigma tersendiri dalam memposisikan dunia sosial kemasyarakatan. politik itu cenderung berkelok, terjal, tapi kadang sangat hampa. Dipermukaan kaya retorika, penuh argumentasi, di dalam sangat kering makna. Selalu ambigu. Juga (terkadang) menipu.

Wajar saja ketika mengulas philosophy and politics, Alain-Badiou (2006;53) mengatakan bahwa secara empirik pada umumnya politik itu tidak pernah bicara kebenaran. Politik tak lebih sekedar institusi sosial menjijikan yang senantiasa memagari dirinya dengan kekuatan (power) dan opini-opini (Opinions) belaka. Bahkan, tegas Badiou, salah satu semangat subjektif yang sering kali menjiwai politik adalah lobi-lobi demi mengamankan kepentingan dirinya meskipun menyembunyikan konfrontasi terhadap sebuah komunitas masyarakat. Itulah politik kekuatan, yakni tradisi dan model kerja politik yang lebih menampakkan kompromi-kompromi pragmatis demi eksistensi kekuasaan, seperti mengiringi skandal Century, Wisma Atlet, dan sejenisnya. Berbeda dengan politik keadilan, yang senantiasa perpijak pada akar filosofinya sebagai seni artikulatif dalam memaknai dan memahami gelembung aspirasi sosial masyarakat secara konsisten dan menyeluruh.

Oleh karena itu, kata Badiou, hanya ada satu jalan untuk mengetahui dan mengukur keadilan dalam dunia politik, yakni dengan memahami betul ketidakadilan itu sendiri. Dan pada titik ekstrimnya, keadilan dalam politik, meminjam bahasa John Rawls, belum menjadi nafas dan sikap, melainkan sebatas bumbu retorik yang apologetik. Padahal Rasulullah Saw, bersabda, sebagaimana dikutip Al-Ghazali dalam Al-tibbr al Masbuk fi Nasihat al Muluk, bahwa "adil adalah bagian dari agama, dan dalam keadilan terletak kebaikan seorang penguasa dan kekuatan orang awam. Dalam keadilan pula, terletak kebaikan rakyat, kesejahtraan, dan kesehatan mereka. Segala sesuatu akan ditimbang dengan timbangan keadilan."***

10

Politik Futuristik

Dalam pandangan Aristoteles, bahwa salah satu kekhasan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial adalah ketergiurannya pada dunia politik. Dan karena itu tak sedikit filosof yang menggelari manusia dengan istilah *zon politicon,* hewan politik yang paling lincah dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain.

Bahkan, tegas Aristoteles, kaum lelaki di era yunani kuno (hampir) sebagian besar suka mengejar karier dalam dunia politik. Sebab, wilayah politik dipandang sebagai salah satu jalur ideal untuk mengukir eksistensi hidup yang lebih prestise secara sosial. Dengan menggeluti dan sukses dalam aktivitas politik, seringkali harapan-harapan sosial materalistis kemanusiaannya mudah digapai.

Namun demikian, pergulatan politik Indonesia akhir-akhir ini kalau dicermati dengan seksama semakin hari tanpak semakin tidak mencerahkan. Wacana yang lebih dominan menari dipermukaan publik hanyalah friksi-friksi dan pencitraan politik yang parsialistik. Sehingga komitmen untuk terus mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 sering kali lenyap

di tengah kebisingan isu-isu politik pragmatis.

Kawan dan Lawan

Sebagaimana kita mafhumi bahwa dalam wilayah politik memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Semua berpulang pada kepentingan kekusaan itu sendiri. Yang salah bisa (sedikit) benar, dan yang benar dapat dengan mudah disalahkan, tergantung transaksi politik yang berlangsung. Bahkan, masing-masing skuad politik yang sering kali mengatasnamakan rakyat itu bisa saling menebar ancaman dan larut dalam friksi dan pencitraan politik *Un-paradigmatic* bila mana eksistensi politik kepentingannya terusik.

Adapun friksi dan pencitraan politik yang kurang paradigmatik, disadari atau tidak, sebenarnya hanya dapat mengusutkan tali temali demokrasi yang telah dibentangkan pasca rezim Soeharto diruntuhkan. Dan salah satu akibatnya adalah elite politik dari lapisan apa pun kadang tidak memiliki etos kerja politik yang bisa diandalkan. Mereka seperti mengalami "autisme Politik", pura-pura lupa pada semburan janji politiknya selama kampanye. Bahkan, tak jarang mereka pula tiba-tiba menjadi peragu dan penakut yang berlebihan.

Dari sinilah disorientasi terhadap nilai-nilai demokrasi bermula. Elite-elite politik pun hanya pandai berkelit tapi tak sungguh-sungguh memahami aliran aspirasi publik yang kian terjepit. Mereka terjebak dalam debat-debat dan "pertengkaran klise" antar mereka sendiri. Akibatnya, manakala menangani kerja-kerja politik kebangsaan mereka selalu abai terhadap aspirasi publik (konstituen) sekaligus tersandra oleh kepentingan dari mitra-mitra koalisinya. Maka dari itu, cukup wajar kalau negeri ini hanya menjadi "negeri satgas" dan "bangsa angket" yang sangat teramat lebai.

Adagium kawan bisa jadi lawan dan lawan kelak bisa jadi kawan pula dalam tradisi politik tampaknya perlu ditelaah lebih jernih. Istilah ini tak lebih sebagai citraan dari cara kerja politik yang sangat dangkal dan pragmatis. Adapun pragmatisme sering kali disinyalir oleh Jonh Dewey, memang tidak begitu mementingkan faktor-faktor a-priori atau nilai-nilai abstrak, keinginan dan dorongan, melainkan hanya berbicara soal akibat atau implikasi dari suatu gejala dan tindakan sosial itu sendiri.

Padahal secara prosedural, para elite politik tidak pernah

menduduki kursi kekuasaan di parlemen dengan tiba tiba. Semua melalui proses aspiratif dari berbagai konstituen dengan cara dan kontraknya masing-masing. Oleh karena itu, pemaknaan kawan dan lawan dalam tradisi politik meski ditaruh dalam kontek proporsional, yakni ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi senyawa dengan kebutuhan mendasar masyarakat secara makro.

Betapa pun ada partai politik yang menjadi pemenang pemilu dan penguasa dalam sebuah rezim tertentu, fungsi utamanya adalah mewakili aspirasi rakyat. Dan yang namanya perwakilan, meminjam bahasanya Seymour Msrtin Lipset, bukan hanya sarana penyesuaian politik terhadap tekanan-tekanan sosial dan juga hanya sebatas alat manipulasi. Lebih dari itu, perwakilan adalah menempatkan kombinasi hubungan antara partai politik dan landasan sosial yang memungkinkan pemerintahan berdaya guna dalam menyejahterakan massa politiknya.

Koalisi Taktis

Dalam perspektif demokrasi modern, memang agak sulit menginginkan kemenangan secara politik dalam kekuasaan tanpa membangun koalisi-taktis dengan berbagai elemen demokrasi yang lain. Sehingga tak berlebihan manakala Max Weber Dan Joseph Schumpeter menyatakan bahwa element demokrasi yang nyata dan paling bernilai adalah pembentukan elite politik dalam rangka perjuangan untuk menarik suara terutama dari para pemilih yang pasif.

Namun demikian, koalisi politik apa pun bentuknya mesti dimaknai sebagai upaya menguatkan jahitan demokrasi yang ideal demi kemaslahatan publik dan bukan taktik hedonis sebagian elit meraih kekuasaan semata. Dengan kerangka seperti itu, politik tidak akan lepas dari irisan-irisan generiknya sebagai monumen aspirasi sekaligus laboratorium moral sosial kerakyatan. Dan pelan tapi pasti politik akan tumbuh produktif dalam mengayomi dan mengolah struktur kehidupan publik.

Dari spirit politik semacam itu pula cepat atau lambat akan terbangun budaya politik yang futuristik, yaitu wawasan dan prilaku

politik yang holistik dalam memahat aspirasi maupun kemauan sosial (konstituen), sebab menurut Freud Polak, pada dasarnya semua pemikiran manusia mengundang usaha yang sadar dalam mengarahkan penglihatan, perasaan, dan tanggapannya, serta menyusunnya dalam kategori-kategori yang memperlihatkan rangkaian waktu yang mengandung arti. Dan kemampuan mental manusia memungkinkan mereka menjadi warga dari dua dunia; kekinian dan keakanan (masa depan).

Di sisi lain, hanya orang yang merasa asing dengan masyarakat (*alienated),* lanjut Polak, yang mulai menolak memikirkan masalah masa depan dan hanya megutamakan masa kini. Sebaliknya, orang-orang yang kecewa dan merasa tidak puas dengan masa kini sangat rindu dengan pembaharuan masa depan. Maka manusia politik yang kurang lihai mengasah spirit optimisme, ia akan tampil tak ubahnya problema baru ketimbang sebagai pembawa solusi dan rahmat bagi kehidupan publik.

Kalau saja meniru kaidah fikih sosial NU, politik futuristik itu akan tangguh dalam memelihara nilai-nilai tradisi politik lama, namun juga akan semakin lincah ketika menangani terobosan-terobosan politik berbasis modernitas (*Al muhafadhatu 'ala al qadimi al shalih wal akhdu bi al jadidil al ashlah)*. Dan melalui rajutan politik futuristik ini pula kita akan dapat menyaksikan "tarian-tarian erotis" praktisi parpol yang lebih kreatif dan menyentuh di hadapan publik.

Pada dimensi terdalam pun, politik futuristik akan ikut mempertajam analisa-analisa sosial baik menyangkut hal-hal yang sekedar kasuistik maupun problematika politik yang sedikit manipulatif, seperti Lumpur Lapindo, "KPK Antasari", "BI Miranda", misteri Bank Century", mafia perpajakan, kekerasan berbasis agama, dan lain lain.

Singkat kata, politik futuristik adalah salah satu cara pandang dan kaidah kerja politik integralistik dalam menuntaskan setiap masalah politk dengan membasiskan diri pada nilai-nilai kejujuran sekaligus keluhuran kemanusiaan, bukan kerja politik yang hanya dihantui ketakutan dan kerguan kekanak-kanakan melalui penyanderaan atau transaksi politik yang parsialistik. ***

11

Isu Politik

Usai sudah ritual pencoblosan masyarakat Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka terhadap figur politik masing-masing. Segudang harap dan kecemasan juga mengiringi perilaku dan sikap mereka dalam memilih.

Namun demikian, isu politik pasca pencoblosan dipastikan terus memenuhi ruang-ruang sosial sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang merupakan tim sukses dari setiap kontestan pemilukada.

Politik memang lengket dengan "isu", tapi tidak semua isu identik dengan politik. Dan isu politik, diakui atau tidak, adalah isu sosial yang sering kali tampak "seksi" dan "molek" di lintasan mata dan pikiran sebagian aktifis (sosial).

Terkadang isu politik itu memengaruhi pola dan struktur sosial masyarakat dengan produktif, namun tak jarang juga menciptakan social chaos yang sama sekali berjauhan dengan kebutuhan mendasar publik.

Di tanah air ini, kasus-kasus korupsi pun kurang "gurih"

kalau tidak di olah atau dikipas-kipas menjadi isu politik, terutama dalam rangka pergunjingan antar partai politik dengan dinamika dan strategi pencitraan masing-masing.

Bail out Century, Proyek Hambalang, Impor daging sapi, hatta soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp. 4500 ke Rp. 6500 (bensin), selalu menarik kalau dibalut dengan pergunjingan politik yang sedang menghangat.

Sebagai Fenomena

Isu politik itu, apa pun bentuk dan materinya, adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat bernegara. Apalagi kalau dikembalikan pada tabiat manusia yang memang gampang mengendus pembicaraan dan menyebarkannya dari mulut ke mulut. Kebiasaan itu telah ada sejak dahulu kala, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau secara teoritis ada orang yang suka mempelajari atau bahkan memiliki keahlian dalam mengolah-tumbuh isu politik.

Sebagai fenomena, isu politik merupakan hal yang normal dalam dinamika kehidupan makhluk berakal seperti manusia ini. Akan tetapi, isu politik akan sangat berbahaya kalau sudah dibajak dan dipoles melalui propanda, yakni sebuah pola pengarahan (praktis) terhadap keberadaan isu politik secara terstruktur ke hadapan publik. Tanpa disuntikkan misi propaganda, keberadaan isu politik sebetulnya hanya berupa kabar sosial yang datar-datar saja.

Isu politik senantiasa berawal dari penggalan berita "berbau" politik, mulai sifat dan bentuknya yang ringan hingga yang teramat besar. Isu politik itu dapat merambah suatu tatanan sosial yang berada di permukaan sampai pada dimensi yang terdalam.

Dan sebetulnya, isu politik merupakan bagian dari irisan ekspresi politis seseorang atas apa yang diamati dan didengarnya dalam realitas sosial (politik).

Tanpa isu politik, kehidupan sosial sepertinya memang kurang dinamis. Tidak begitu menarik untuk dinikmati, dijalani, dan diapresiasi. Fenomena kehidupan akan terasa hampa dan kering, atau bahkan mengalami krisis dalam konteks makna dan produktifitasnya. Atau, tanpa isu politik, berbagai realitas hidup kurang menantang

untuk "diperlombakan." Padahal meniru istilah Alquran, (ke) hidup(an) ini merupakan lapangan permainan yang tak boleh (di) sepi(kan). Namun demikian, kelebihan isu politik dalam kehidupan juga amat kurang baik. Terlebih ketika dijadikan modal dan model yang bersifat propagandis.

Salah satu konsekuensinya, isu politik itu akan mencerai-beraikan tali-tali silaturrahim dalam bermasyarakat. Ia bukan saja membuat sendi transformasi kehidupan mandeg, melainkan dapat juga membuat anatomi kehidupan ini mati suri seketika.

Sekali lagi, sebagai fenomena, isu politik adalah hal yang tak perlu dicemaskan. Tetapi juga tidak boleh sembarang dibisniskan. Sebab isu politik memiliki peran dan fungsi yang terbilang strategis, terutama bagi dinamika berdemokrasi, baik dalam perspektif kepartaian atau menyangkut eksistensi birokrasi kekuasaan pada umumnya.

Nilai Positif

Isu politik tidak selalu negatif dan berbuah buruk. Isu politik juga memiliki nilai positif. Salah satunya adalah untuk melatih kelincahan pikiran dan olah kesadaran manusia dalam mengamati dan memaknai realitas sosial (politik) bermasyarakat dan berbangsa. Maka menempatkan isu politik secara efektif dan produktif, sejatinya adalah hal yang patut ditradisikan dalam kehidupan berdemokrasi.

Melalui transformasi isu politik yang baik dan terarah, tanpa disadari ternyata banyak hal yang dapat dikontrol dengan baik pula oleh sebagian masyarakat. Terungkapnya perilaku korup dan menyimpang dari sebagian elit politik dan petinggi negeri ini, telah menjadi bukti kalau isu politik itu juga dapat memberikan nilai positif bagi proses kehidupan publik.

Eksistensi dan dimanika isu politik menunjukkan bahwa setiap individu dari masyarakat memang tidak mudah diam manakala mendengar, melihat, dan bergesekan dengan realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Inilah bentuk kesadaran tersendiri yang dimiliki masyarakat. Tidak boleh diabaikan, apalagi digerus tanpa alasan yang rasional dan lebih realistis dari lingkup anatomi kehidupan publik.

Dengan terus dapat mencermati isu politik secara sehat dan

jernih, berarti masyarakat kian kritis, kreatif, dan produktif dalam menggeluti kehidupan berdemokrasi.

Mereka akan bertumbuh dengan olahan kesadaran yang prospektif. Dan meniru istilah para filosof, ketika individu dalam masyarakat mulai angkat bicara menyangkut tebaran isu politik yang ada di hadapannya, maka mereka telah jujur terhadap dirinya sendiri. Sebab ketika mereka diam, berarti telah merangkai pengkhianatan atas kesadaran dan martabat (ke)manusia(an).

Dalam perspektif yang lain, ketika masyarakat semakin baik mencermati dan mengkritisi isu sosio-politiknya, dapat dikatakan mereka telah mendemontrasikan kemerdekaannya sebagai manusia di tengah-tengah bermasyarakat.

Sebab mereka punya lidah, otak, hati, dan cita-cita sosial dalam hidupnya. Modal dan potensi inilah yang menandai manusia layak sebagai pengelola aktif alam semesta. Namun demikian, meminjam cara pandang Moh Iqbal, yang dimaksud manusia merdeka sejati bukan semata pribadi yang mudah angkat bicara ketika mendapati isu-isu sosial di hadapannya. Lebih dari itu, ia merupakan pribadi yang kuat dan tangguh dengan konstruksi akal budinya, bukan semata egois dengan letupan emosionalitas politiknya.

Manusia merdeka, masih kata Iqbal, adalah pribadi-pribadi yang dalam kehidupan aktualnya selalu sedikit bicara, namun banyak kerja dan tulus berkarya untuk kemaslahatan sesama. Tidak mudah terjebak dengan pola-pola parsial dalam memaknai dan menjalani kehidupan sosial. Juga tidak gampang mengipasi isu politik, apalagi sampai mencabik-cabik aspirasi rakyat sebagai pemegang saham terbesar (ber)demokrasi.

Ala kulli hal, bagi yang (terlihat) kalah, sebaiknya tetap jernih mencermati isu money politic, black campaign, penggelembungan suara, "sulap-sulapan" di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan isu-isu politik lainnya. Sedangkan yang (merasa) menang, akan sangat arif manakala langsung tanggap terhadap isu-isu popular; mengatasi kemiskinan, pengangguran, disorientasi sosial di kalangan remaja hingga "krisis listrik" yang kian mengganggu kenyamanan publik. Sehingga politik itu produktif, dan rakyat senantiasa empatik. ***

12

Teologi Politik

Prahara "daging sapi" yang menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan fenomena politik yang kian mengkhawatirkan. Bukan saja karena bencana politik ini kebetulan menggema dalam lingkaran PKS, melainkan lantaran kasus ini mulai ditarik-tarik ke arah konspirasi politik keumatan.

Friksi dan saling menjatuhkan dalam dunia politik memang menjadi bumbu tersendiri. Tanpa friksi, politik tampak kurang sensasional. Dan tanpa konflik, politik seakan tidak menarik, seperti kehilangan "aura." Inilah wajah politik kalau dijauhkan dari semangat dan nilai-nilai luhur teologis.

Kajian teologis, sering kali menjadi diskursus yang sangat mengemuka dalam berbagai pergulatan peradaban umat manusia. Melalui pendekatan-pendekatan teologis, upaya pencerahan dalam dunia politik, mungkin dapat ditransformasikan ke arah yang lebih benar dan meyakinkan. Sebab teologi tidak sekadar bicara aspek ketuhanan, melainkan juga pelurusan terhadap muatan esensial dari perilaku manusia beragama.

Istilah Teologi

Teologi (*theology*), dalam bahasa Yunani sering diartikan sebagai pengetahuan mengenai Allah. Dalam bahasa Latin, teologi diistilahkan sebagai *fides quaerens intellectum*, iman yang mencari pemahaman. Sebagai disiplin tersendiri, teologi merupakan ilmu yang menggunakan sumber daya rasio, khususnya ilmu sejarah dan filsafat. Ia menjelajah kedalaman misteri ketuhanan. Bahkan, meminjam bahasa Gerald dan Edward, di hadapan misteri ilahiah, teologi selalu "mencari" dan tidak pernah sampai pada jawaban terakhir dan pemahaman yang selesai.

Ada pemaknaan lain bahwa teologi adalah ajaran tentang Tuhan. Hal ini disandarkan pada dua kata dasar (Yunani) "theos-theos" yang berarti Tuhan, dan "logos" yang bermakna kata, ajaran, dan ilmu. Maka acapkali teologi dilukiskan sebagai analisis atas seluruh kenyataan yang berkaitan erat dengan Tuhan. Pertama-tama yang disoroti memang Tuhan, kemudian himpunan ciptaan-Nya (manusia dan semua kandungan jagad raya).

W. Chang, mengurai bahwa teologi dapat dibedakan setidaknya pada dua hal: teologi filosofis dan teologi suci. Teologi filosofis itu didahului oleh akal budi manusia; adapun teologi suci didahului oleh cahaya iman. Dalam makna yang lebih sempit, teologi menunjuk pada refleksi atas sumber-sumber yang memperbincangkan kebenaran iman manusia. Terkadang ada juga teologi negatif; yang mendasarkan pada keyakinan bahwa wujud Tuhan begitu jauh melampaui wujud manusia yang terbatas sehingga tak satu pun dari karakteristik Tuhan yang dapat diketahui dalam pengertian nyata. Kita bisa memahami bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak dapat mengetahui apa Tuhan ini. Di sini kita bisa mengetahui apa Tuhan itu dari yang bukan Tuhan.

Sayyid Hussien Nasr mensinyalir bahwa dalam Kristen, teologi tidak hanya berupaya menyediakan pembelaan rasional terhadap iman, tetapi berusaha juga menyediakan akses menuju realitas tertinggi kehidupan spiritual, sebagaimana ditemukan dalam teologi mistis dari Dionysius the Areopagite, atau dalam Theologia Germanica (Protestan) karya Martin Luther.

Terminologi ini tidak dikenal dalam Islam, begitu kata Nasr. Sebab *kalam*, yang literer berarti "kata", cenderung menjadi ilmu yang

bertanggung jawab terhadap pembentukan keyakinan keagamaan dengan memberikan bukti-bukti dan melenyapkan keraguan. Bahkan, lanjut Nasr, ungkapan terdalam spiritual dan intelektual Islam tidak bisa ditemukan dalam karya-karya ilmu kalam.

Lepas dari definisi-definisi di atas, teologi dengan segala makna dan orientasinya mengalami perkembangan tersendiri. Ia melebarkan sayap dan nilainya bukan hanya pada soal ketuhanan atau bukan, melainkan sudah merasuk dalam hal-hal cukup riil bagi kehidupan manusia. Dari sinilah muncul istilah teologi moral, teologi politik, teologi budaya, teologi ekonomi, dan seterusnya.

Teologi Politik

Hingga saat ini, belum ada satu definisi politik yang dianggap final dan lengkap. Mayoritas pakar politik seringkali memberikan pemaknaan cukup variatif dari sisi makna dasar hingga obyek politik itu sendiri. Dan definisi yang banyak dipakai bahwa politik adalah alat meraih kekuasaan semata. Politik hanya media praktis memenuhi kepentingan pragmatis. Politik masih identik dengan hegemonisasi terhadap aspirasi rakyat dalam latar sosialnya.

Paul Cartledge, dalam artikel *Pemikiran Politik Yunani: Konteks Sejarahnya*, menulis bahwa politik dalam pengertiannya yang paling kuat : yaitu pembuatan keputusan komunal yang diberlakukan kepada publik setelah mengalami pembahasan substantif oleh atau di depan para pemilih yang dianggap sama, dan pada isu-isu yang prinsip dan juga hal-hal yang murni bersifat teknis operasional.

Sementara bagi Aristoteles, politik berarti sebuah nama dari pengetahuan praktis yang sasaran akhirnya sama dengan etika, yaitu demi mencapai *eudaimonia* atau kesejahteraan vital dari individu manusia. Ia adalah bagian dari etika yang berkait langsung dengan aktifitas dalam kelompok-kelompok manusia. Sebab, masih kata Aristoteles, kecenderungan alamiah manusia adalah membentuk kelompok-kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai sebuah kelompok.

Dari dua perspektif ini tampak jelas bahwa politik bukan semata media meraih dan melanggengkan kekuasaan, melainkan bertujuan demi kemaslahatan publik itu sendiri. Ia bukan saja milik

politikus tapi sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dan wajar ketika Aristoteles mengatakan bahwa politisi sejati (yakni orang yang memiliki pemahaman politik riil) adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar energinya demi mempelajari kebaikan.

Kalau politik, meminjam istilah Aristoteles, senantiasa menekankan kepada setiap individunya untuk menegakkan kebaikan, ia bukan sesuatu yang haram atau buruk dalam prosesi sosial kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi, kekeliruan memahami dan memaknai politik itu merupakan sumber masalah atau konflik yang sering mengiringinya. Di sisi lain, perlu dilirik kembali bahwa sejak awal politik memang tidak lepas dari ranah teologis dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Inilah yang pernah disinggung oleh Sunardji Dahri Tiam, bahwa dari lapangan politik pada mulanya mereka berselisih, kemudian segera pula berpindah ke lapangan teologis.

Sementara itu, di samping nilai-nilai ketuhanan, basis teologi politik Islam sejatinya menyangkut semangat humanisme, kebebasan kreatifnya, keadilan dan sosial kehambaan seutuhnya. Bahtiar Effendy, misalnya, menulis bahwa inti dari dasar-dasar teologi politik Islam, dalam berbagai aliran yang ada, berasal dari rasa percaya terhadap sifat kholistik Islam. Dari kekholistikan itu dapat dimaknai kalau teologi politik Islam tidak serta merta memisahkan urusan transenden dengan yang temporal. Sebab Islam adalah agama dan negara, *inna al Islam al din wa al dawlah*.

Mengacu pada fenomena prahara PKS, ketika ideologi politik kian tersisihkan, maka parpol-parpol yang membasiskan diri atau sebagian besar penghuninya adalah umat Islam, perlu segera merekonstruksi struktur dan kultur teologi politiknya dengan cerdas dan aplikatif. Mau dimulai dari kerangka teologi filosofis atau teologi suci yang lebih mendasarkan pada pancaran nilai-nilai imani, terpulang pada kesiapan paradigma masing-masing parpol yang ada saat ini. Atau, meniru seruan Hassan Hanafi, parpol-parpol boleh saja kembali pada dua kutub tradisi besar dalam teologi politik Islam; yaitu tradisi oposisi seperti dianut Syiah yang revolusioner, dan tradisi akomodatif demi menjaga stabilitas politik sebagaimana dikembangkan Sunni yang evolusioner. ***

13

Presiden Islam

Ide dan niat politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung presiden atau wakil presiden yang mewakili umat Islam, bukan hal yang baru. Sebab dalam dinamika pemilu tahun 2004 dan 2009, cuplikan ide semacam ini pernah juga digembar-gemborkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Setidaknya ada dua kesan yang layak dicermati berkait dengan cuplikan ide tentang presiden dan wakil presiden yang khusus "berlabel" Islam itu. Pertama, tak sedikit orang beranggapan bahwa politik aliran (berbasis agama) sudah mencapai titik klimaks dan secara agregat telah kalah saing dengan partai berideologi kebangsaan atau nasionalisme. Hal ini dapat dibuktikan dengan kian merosotnya perolehan suara partai-partai berbasis Islam dari setiap pemilu.

Kedua, sebagian masyarakat menilai bahwa partai-partai berideologi agama (Islam) mulai kehilangan identitas dan karakter politiknya. Kasus korupsi yang menimpa beberapa kader parpol Islam, dari PKS, PPP, PKB dan PAN, misalnya, dianggap sebuah perilaku politik yang telah menodai nilai-nilai luhur (agama) Islam

dan memiliki kecenderungan pragmatisme dan hedonisme yang kian memalukan.

Mengukur Niat

Dalam kaidah fikih dinyatakan *innamal a'malu bi al niyati*, bahwa segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Dan niat, menurut tradisi kaum sufi, adalah sisi terdalam dari kemauan, cita-cita, dan proses ikhtiari setiap manusia yang ditujukan hanya kepada Allah SWT. Adapun perbuatan (*'amal*) dalam istilah fikih itu menyangkut tiga hal, yakni perbuatan untuk badan, perbuatan lisan dan perbuatan yang melekat dengan hati.

Maka parpol berideologi agama Islam, mesti kembali mengukur niatnya dalam bergelut di dunia politik praktis. Sebab untuk menjadi parpol alternatif yang berhaluan ideologi Islam sejatinya bukan hanya mendedahkan simbol-simbol dan propaganda politik bernuansa agamis (Islamis), melainkan dituntut menancapkan kerja-kerja politik *limaslahatil ummah* secara riil, terarah dan akuntabel.

Islam adalah agama penyempurna yang lebih luhur ketimbang konstruksi ideologi politik kepartaian. Islam memiliki nilai-nilai luhur berkait dengan kehidupan yang lebih sakral di muka bumi ini. Sedangkan ideologi politik, nilai-nilainya lebih banyak diwarnai suatu kepentingan pragmatis dalam meraih kekuasaan sesaat.

Kalau pun agama dikaitkan dengan kekuasaan, itu untuk memberikan *supporting values* agar kekuasaan tidak dimaknai sebagai ajang adu citra, massa dan kekuatan semata, tetapi ditempatkan sebagai aktualisasi amanah dari kekhalifahan kita. Dan berbicara kekhalifahan, berarti tugas kita adalah menyeru, menggerakkan potensi politik dengan penuh hikmah dan kesantunan, bukan dengan eksplorasi politik pencitraan dan gertak-pragmatis.

Atau, seperti kredo Al Maududi, *al din fi al daulah aqwa*, *wa al daulah fi al din a'ma.* Tesis ini kurang lebih mengandung makna bahwa agama dalam kekuasaan akan lebih kuat dan digjaya, adapun kekuasaan dalam agama akan tampak lebih paripurna dan bersahaja. Itu pun kalau keduanya disenyawakan sejernih mungkin.

Oleh karena itu, parpol yang berideologi Islam perlu menginternalisasi nilai-nilai jihad sebagaimana hakikatnya menurut

Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dan dalam jihad, niat adalah sesuatu yang paling vital. Niat jihad yang integral dan bersih, akan menghadirkan simpati dan melahirkan kemaslahatan di tengah kehidupan umat. Karena esensi jihad bukan berarti perang semata, melainkan pengerahan segala upaya dan tenaga untuk mempertaruhkan prinsip kebenaran dalam situasi apa pun.

Karakter semacam inilah yang belum melekat di tubuh parpol-parpol berideologi Islam di Indonesia. Wajar kalau beberapa komunitas menilai bahwa apa yang dilakukan parpor-parpol Islam bukan dilandasi oleh niat jihad yang tulus demi umat. Bahkan gerakan dan gertakan politiknya selama ini tak lebih dari retorika atas pemanipulasian citra politik berbungkus agama semata.

Padahal kalau mau meneladani Nabi Muhammad SAW, sepanjang sejarahnya meski dalam peperangan tidak pernah memakai cara-cara yang negatif dan parsialistik. Semua tantangan dan ancaman dilalui oleh beliau dengan retorika dan strategi yang santun, bijaksana, aspiratif, dan empatik. Niat meluruskan akhlak keumatan, benar-benar dijadikan modal jihad maupun inspirasi ijtihad politiknya.

Menyangkut langkah politik sebagian parpol berbasis Islam yang hendak menata bangsa ini dengan potensi dan kekuatan Islam, sangat layak diapresiasi. Akan tetapi, kualitas niat perjuangan politik mereka akan diuji oleh perilaku dan komitmen kerja politiknya sendiri. Kalau niat politiknya demi umat benar-benar utuh dan tulus, menyatukan visi dan misi dengan sejumlah partai lain yang sama-sama berbasis agama tidak akan begitu sulit. Dan nilai-nilai Islam pun akan cepat diberdayakan.

Tiga Instrumen

Demi memberdayakan Islam dengan spirit jihadnya memang harus berani. Jihad butuh dedikasi dan integritas. Bahkan untuk kuat, Islam membutuhkan konsistensi, perlu menyiapkan konsep brilian dengan aplikasinya yang inovatif dan mampu menggerakkan konsolidasi moralitas *ummatan wahidah* seutuhnya. Sebab hanya dengan kekuatan moral itulah Islam diperhitungkan untuk menjadi domain publik di masa yang akan datang.

Adapun menjadikan Islam sebagai domain publik setidaknya membutuhkan tiga (3) instrumen, yaitu *souvereignity* atau kekuasaan, *authority* atau kewenangan, dan *moral politics* atau politik moralitas.

Instrumen pertama yang menyangkut kekuasaan tampaknya sudah didapatkan dari nilai-nilai sila pertama dasar negara, Pancasila. Instrumen kedua seharusnya diwujudkan melalui derma-derma Islam politik, seperti PBB, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Melalui derma Islam politik ini dimungkinkan bisa membuka jalur pemasaran Presiden Islam sebagai *instrument bargaining* terhadap Presiden Kebangsaan (sekular).

Dari bargaining ini diandaikan pula bisa terjadi sharing antara kekuatan Islam dan kekuatan sekular dalam membesarkan NKRI. Sharing di sini tentu bukan semata persoalan legal formal politik, melainkan transformasi dan pembumian nilai-nilai Islam dalam seluruh kebijakan publik. Bahkan dengan sharing nilai-nilai seperti ini aspek-aspek ilahiyah dan kerasulan bisa dijadikan legislasi dalam produk-produk kebijakan publik itu sendiri.

Namun demikian, sharing semacam itu tidak serta merta bisa diartikan bahwa kriteria Presiden Islam harus figur yang benar-benar beragama Islam. Ini kriteria yang sempit dan parsialistik. Sebab Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, kalau dilihat dari aspek lahiriahnya, mereka adalah beragama Islam. Dan diakui atau tidak, yang betul-betul melaksanakan misi jihad baru Soekarno, mendermakan potensi dan keberaniannya membebaskan dan mengantarkan kita merdeka dari segala eksploitasi kolonialisme dan imperialisme.

Maka kriteria Presiden Islam ke depan selayaknya bukan soal status agama lagi, melainkan integralisasi sikap dan teladan kepemimpinan politik yang bisa menebarkan rahmat bagi semua komponen bangsa. Karena spirit "rahmat" itulah fitrah Islam sebagai agama. ***

14

Jujur dalam Politik

Salah satu karakter manusia bermoral adalah senantiasa mengedepankan perilaku bersahaja. Perilaku hidup bersahaja ini, meminjam ulasan sang Buddha, ialah komitmen yang bersih dan tulus dalam mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih, mengalahkan kejahatan dengan murah hati, dan mengalahkan kebohongan dengan kejujuran.

Prinsip bersahaja ini sejatinya dijadikan spirit dalam persaingan politik memasuki pemilihan pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, saat intensitas konsolidasi politik partai dengan aneka propagandanya terus menanjak. Bahkan pencitraan tipologi calon anggota legislatif yang diusung pun terus memenuhi ruang publik, baik melalui media massa maupun menyambangi konstituen dari rumah ke rumah, yang kadang kurang mempedulikan prinsip kebajikan, cinta, dan kejujuran.

Dalam ranah yang penuh seperti sekarang ini berbagai cara demi memenangi pertarungan akan dipakai setiap calon legislator. Bahkan bukan hal aneh kalau itikad untuk saling bunuh karakter antar caleg dan parpol, yang jauh dari semangat kebajikan, dan kejujuran

akan diolah. Padahal budaya politik yang tidak dikontruksi dari dan dengan nilai kejujuran hanya akan menyebabkan suburnya friksi dan konflik horizontal berkepanjangan.

Jujur itu mulus. Maka, melakukan sesuatu dengan ketidakjujuran bisa jadi tidak akan melahirkan aroma ketulusan. Perilaku ketidakjujuran ini, kalaupun menang, akan lebih sering melakukan praktik hegemonisasi dan eksploitasi. Adapun kalau kalah, ia cenderung lebih meluapkan ketidakpuasan, yang berujung pada kebencian dan perusakan.

Makna Jujur

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap kejujuran akan membawa kita pada kebaikan. Setiap kebaikan akan mengantarkan manusia pada surga, kedamaian abadi yang senantiasa dijanjikan Tuhan, simbol kebajikan tertinggi dalam perspektif agama.

Yusuf Bin Ali Husain, seorang tokoh sufi, menyatakan yang dimaksud kejujuran adalah cinta menyendiri; bermunajat kepada Allah; kecocokan antara yang tersembunyi dan yang lahir disertai dengan kejujuran berbicara; sibuk mengurus diri sendiri tanpa melihat orang lain; serta menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam tata cara makan, adab berpakaian, dan mencari rezeki.

Kejujuran itu adalah pedang Allah di muka bumi. Setiap kali diletakkan pada sesuatu, ia akan memotongnya, seperti yang dikatakan Dzun Nun. Maka, menurut Syekh Al junaid, barang siapa yang mencari sesuatu dengan jujur dan bersungguh-sungguh, tentu ia akan mendapatkannya. Seandainya tidak mendpatkan sleuruhnya, ia akan memperoleh sebagian.

Kejujuran dalam perspektif agama adalah bagian dari eksistensi manusia, tidak terkecuali para elite politik dan tokoh masyarakat. Bahkan kejujuran merupakan sifat utama yang mesti dimiliki dan diwujudkan setiap manusia. Maka, jujur itu benar dan beruntung.

Begitu penting nilai-nilai kejujuran dalam mengarungi kehidupan ini, tidak kurang dari Dzawawi Imron, sang penyair Cerulit Emas melalui sajaknya berujar :

Ketika hujan mengguyur bumi
Basah kuyup orang yang jujur

Basah kuyup orang yang tidak jujur
Tapi yang lebih basah kuyup
Adalah orang-orang yang jujur, mengapa?
Karena payung orang-orang yang jujur
Habis dicuri orang-orang yang tidak jujur

Hujan sering dimaknai sebagi perlambang rahmat dan biasanya hanya turun kepada orang-orang yang dipandang layak dihadapan Tuhan. Dengan demikian, bisa jadi rahmat Tuhan pun turun kepada mereka yang senantiasa jujur dan menegakkan kejujuran dalam semua model politiknya.

Menjaga Lisan

Salah satu ciri orang yang jujur, termasuk yang aktif dalam dunia politik, ialah senantiasa menjaga lisannya. Ia tidak boleh sembarangan bicara. ia harus selalu waspada dan memahami betul setiap pembicaraan yang akan dilontarkan. Ajaran agama islam pun menegaskan, *Salamatul al insan fi hifdzi al lisan,* bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh lisannya sendiri.

Dalam dunia politik, menjaga lisan tampak teramat sulit. Dunia parlemen identik dengan retorika. Bahkan bisa dibilang institusi parlemen itu merupakan tempat bagi orang yang ahli bicara. Sebab, mereka harus menyuarakan dan memberikan tahapan solutif terhadap segala aspirasi publik yang diwakili.

Meski aktivis politik parlemen identik dengan tukang retorika, bukan berarti mereka seenaknya berakting. Sekecil atau seringan apa pun pembicaraan yang ada harus berkualitas serta memiliki bobot yang jelas dan terarah. Pembicaraan atau suara politisi parlemen itu sangat mahal. Modal pembicaraan mereka adalah nasib dan kebajikan bagi publik, sesuatu yang bersifat universal dan strategis dan bukan pragmatis-parsialistik.

Retorika bukan berarti rajutan kata-kata diplomatik belaka. Retorika juga bukan semata dinamika bahasa politis. Retorika adalah seni alternatif mengartikulasikan keberpihakan riil terhadap rakyat dan segala kebutuhan primer dan sekundernya. Retorika meminjam bahasa Ali Syariati, merupakan eksplorasi jihad dalam makna yang

luas dan menggugah.

Ekplorasi jihad tentu saja tidak mungkin dilepaskan dari nilai, spirit, dan komitmen kejujuran. Jujur berarti mengedepankan kebenaran. Adapun dusta berarti kemunafikan. Setiap yang munafik, kata Rasullullah SAW dalam haditsnya, tidak dapat dipercaya. Mereka tidak pernah amanah. Mereka hanya mudah mengiklankan janji, termasuk janji-janji politik saat kampanye guna membius hati rakyat. Kecil kemungkinan mereka mempunyai loyalitas tinggi kepada rakyat. Mereka hanya akan sibuk menimbun dan “bersanggama” dengan kepentingan taktisnya sendiri.

Membangun kultur perilaku politik di luar nilai dan komitmen kejujuran tentu akan mempengaruhi sistem dan mekanisme kelembagaan politik. Hal seperti itu juga akan berdampak buruk terhadap eksistensi manusia politik itu sendiri. Artinya, mereka akan menjadi pesakitan dan jatuh secara moral atau tiba-tiba “mesantren” di rumah tahanan, seperti yang dialami beberapa bupati, gubernur, anggota dewan, dan mantan menteri belakangan ini.

Demi tegaknya demokrasi yang bersahaja, memulai kompetisi politik dengan jujur secara internal dan eksternal merupakan kebutuhan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Bersaing bukan berarti saling bunuh, tetapi menguji kualitias eksistensi diri kita sebagai manusia.

Jujur dalam politik bukan hanya sebatas memoles visi dan misi secara naratif, melainkan juga militansi meluruskan niat, memproses cara kerja yang lebih paradigmatik, serta mewujudkan tata rasa politik yang berkebajikan dan berkeadilan secara integral. Politik jujur, rakyat akan segera makmur.

15
Tahu Diri

Kisruh politik kian tidak mencermikan kematangan. Semangat reformasi yang dienduskan sejak 1998 ternyata hanya berjalan di tempat. Sedikit maju tapi banyak pula mundurnya terutama dalam konteks sosio-etiknya. Meniru pepatah melayu, "hanya besar pasak dari pada tiang".

Dengan fenomena politik semacam ini, hampir semua institusi politik sepertinya memang tidak mempunyai komitmen brilian dalam mencerdaskan publik. Sebaliknya, yang sering tampak adalah perilaku parsialis dan egois, dengan banyak melakukan pembelaan secara individual maupun secara komunal.

Apa yang menimpa M. Nazarudin, misalnya, adalah perumpamaan yang nyata dan menggelisahkan dalam perspektif demokrasi. Berkelitnya sebagian elit partai demokrat sedari awal, sangat mudah dibaca oleh publik semata hanya letupan diplomasi yang mengulur-ulur masalah.

Disadari atau tidak, pola dan mentalitas semacam ini tak jarang telah ikut menyuburkan individu-individu yang tidak berkarakter,

yakni individu yang angkuh tapi kehilangan substansi kemanusiaannya. Individu yang kurang tahu diri dan tidak memiliki *passion* atau visi pemaknaan tentang hidup yang berkualitas.

Menyelami Fitrah

Konon, dalam tradisi filsafat jawa ada adagium yang menyatakan bahwa puncak pencaharian bertemu manakala seseorang mulai tahu diri. Falsafah ini juga berarti bahwa setiap individu akan dapat menemukan eksistensinya kalau saja ia sudah menyadari dan mengetahui betul siapa dan mau kemana dirinya dibawa ke dalam kehidupan.

Falsafah tahu diri itu, berarti proses eksistensi untuk menyelami fitrah dan kehadiran setiap manusia dalam sosio-budaya kemasyarakatan dan di hadapan Tuhannya. Dalam ajaran islam, misalnya, sebagaimana disinyalir oleh Al-Ghazali, *man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.* Bahwa siapa saja yang telah mengenali eksistensi dirinya dengan baik dan maksimal, maka ia dapat mengenali eksistensi Tuhannya secara baik pula.

Maka tidak berlebih bila, melalui sajak Gus Mus (KH. Mustofa Bisri) menyatakan bahwa *"kalau tidak karena kata-kata "aku tidak tahu" yang menyebabkan aku tahu, maka aku tidak akan mengatakan "aku tidak tahu"*. Dan dalam tradisi filsafat, ketidaktahuan adalah jalur pertama yang mesti diperah untuk sampai pada rasa atau sikap tahu itu sendiri. Dari ketidaktahuan yang diperah dengan baik, manusia akan mengenal muasal dari kehadirannya dimuka bumi.

Atau, meminjam semangat tradisi sufisme, sikap tahu diri itu akan mudah membimbing setiap individu untuk mereproduksi totalitas iman dan syukur, bukan sekedar iman dan ketabahan (*shabr*). Sebab syukur, seperti yang diuraikan oleh Ali Issa Othman pada taraf tertentu lebih luhur dari pada ketabahan. Bahkan, Al-Ghazali menegaskan bahwa syukur merupakan salah satu *maqam (stasiun/ stage)* yang lebih tinggi dari sabar, *khauf,* dan lain-lain.

Syukur itu membahagiakan, dan bukan menyakitkan. Syukur merupakan sikap positif dalam mencari kebenaran dan kedamaian. Adapun ketabahan hanya menjaga diri agar jangan pernah menyerah pada nafsu dan amarah. Dan pada ruang tertentu, syukur senantiasa

mampu mengantarkan setiap individu kepada Allah dengan penuh kerelaan dan kegembiraan.

Dengan syukur yang optimal, maka pola kehidupan setiap individu dalam dunia politik pun akan enak dilihat dan dirasakan, serta prospektif untuk disupport secara moral. Bahkan dengan kontruksi syukur yang memadai, dinamika politik dan demokrasi akan benar-benar menjadi milik bersama antara rakyat dan penguasa, antara partai politik dan konstituen, antara umat dan petinggi keagamaan.

Solusi Politik

Falsafah tahu diri ini kalau diolah dengan baik dan paradigmatik, disadari atau tidak kelak akan menjadi solusi dalam setiap pergunjingan perpolitikan pada umumnya. Dengan tahu diri, para elit politik dan birokrat tidak lagi rajin menutupi kelemahan, kekeliruan, dan keterbatasan. Mereka akan lebih jujur, bijaksana, dan *positive thinking (khusnuddzan)* dalam membawa diri dan menggulirkan potensi politik kekuasaan, termasuk mendistribusikan dalam kehidupan publik.

Dengan tahu diri pula kesadaran masyarakat dalam memaknai dan menempatkan politik akan sedikit lebih maju dan berkarakter. Sebab, spirit filosofi tahu diri itu akan menuntun mereka agar tidak gampang adufriksi, pobia konflik, cepat memojokan, saling klaim kekuatan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai "dinasti kekeluargaan" atau kekanak-kanakan ketika mendapatkan koreksi dari publik.

Berbekal falsafah tahu diri yang baik, masyarakat yang hobi berpolitik, meniru bahasa Ali Syariati, akan tercerahkan dan terangkat martabatnya. Elit parpol akan berpolitik sesuai amanah konstituen, yang merasa sebagai aktivis LSM akan berdemokrasi secara advokatif dan kontruktif, yang mengusahakan berpolitik dengan kaidah efisiensialnya dan bukan dengan prinsip meraup keuntungan semata.

Bahkan, berangkat dari falsafah tahu diri itu pula percaturan politik yang berasal dari komunitas agamawan seperti Kiai, Pastor, Pendeta, Biksu, akan memiliki kesadaran politik sesuai fitrah idealnya. Yakni sebagai akar sosial keumatan yang tidak boleh tercerabut secara tidak substansial. Mereka adalah simbol dari kekuatan nilai dan moral (*power of morality*). Mereka bukan sebatas manusia "biasa",

melainkan wakil dari (ke)nabi(an) dan (ke)rasul(an) masing-masing.

Akhirnya, falsafah tahu diri ini hendak menyebarkan ajaran moral seperti yang didengungkan oleh Moh. Iqbal, bahwa ujian terberat dan paling nyata terhadap suatu individu adalah, apakah ia cukup berani dan ikhlas dalam memberi tanggapan kepada panggilan individu yang lain dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa. ***

16

Pesan (Politik) Pesisir

Penutupan "Pekan Raya Pesisir" di Kampung Nelayan II Sungailiat tanggal 28 Oktober 2013 lalu, sungguh layak untuk diapresiasi. Bukan saja karena kegiatan ini dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain yang merupakan "manifestasi" dari dua kekuatan struktural, yakni mewakili pemerintah propinsi Bangka Belitung sekaligus kini berstatus sebagai pelaksana tugas walikota Pangkalpinang.

Apresiasi terhadap kegiatan ini sejatinya harus dilekatkan bagi pengelolanya yang berasal dari generasi muda pesisir yang oleh sebagian masyarakat masih "dipersepsi" sebagai kaum berbudaya sedikit "frontal." Semangat dan ketulusan mereka mengemas kegiatan ini dari tanggal 4 sd 28 Oktober 2013, merupakan potensi dan kerja sosial yang patut ditumbuhkembangkan lebih produktif.

Disadari atau tidak, bukan perkara mudah mengelola kegiatan secara massal di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi di lingkungan pesisir(an). Di samping membutuhkan kesiapan mental, *network* (jaringan) yang rapi, tentu juga visi dan misi dari mereka yang

baik, terfokus dan prospektif. Tanpa itu semua, kecenderungan akan terjadinya tawuran atau kekisruhan sosial dalam bentuk lain, tidak bisa dimungkiri.

Sisi Politik

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok muda, baik di wilayah pesisir(an) dan perkotaan, tak jarang sering diidentikkan dengan gerakan berbau politik. Mungkin saja lantaran kaum muda pernah mengibarkan dan menancapkan obor politiknya (baca: Sumpah Pemuda) pada awal kebangkitan bangsa ini sekian tahun silam.

Atau, bisa juga lantaran sejak era Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY, kaum muda tidak henti-hentinya memelopori letupan gerakan-gerakan sosial kebangsaan yang terkadang nyerempet ke jalur politik. Apa yang dilakukan Anas Urbaningrum, dengan melahirkan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), misalnya, merupakan salah satu contoh yang langsung menuai kontroversi politik, terutama dari elit-elit yang (pernah) separpol dengan Anas.

Kalau dibaca dari sisi politik, Pekan Raya Pesisir ini tentu cukup menarik dan menantang. Tokoh-tokoh yang dikategorikan hebat di Bangka Belitung seperti Ismiryadi (Dodot), Kapolres Kabupaten Bangka, Panglima Budi Tikal, perwakilan Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan banyak lagi yang lain, bukan sebatas menghadiri, melainkan juga memberikan apresiasi yang sangat positif sampai masyarakat pun benar-benar beranjak dari lokasi acara.

Potensi sosial kaum muda pesisir(an) ini, tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebab suatu saat, terutama di era demokrasi yang kian mengembang ini, potensi-potensi itu bisa menjadi kekuatan politik (*power of politic*) yang cukup energik dan kontributif. Sekiranya tidak dipapah dengan baik sejak dini, besar kemungkinan semangat maslahatnya terkikis oleh luapan mudaratnya.

Social image bahwa kaum pesisir(an) mudah tersulut emosi sosialnya, mungkin bisa benar dan bisa juga kurang tepat. Budaya frontal yang nempel di kalangan masyarakat pesisir(an) bukan merupakan "tabiat final" kemanusiaannya. Ia hanya efek dari pergaulan

sosial yang sehari-hari dilalui dengan tradisi "bersemangat baja." Sebab kehidupan mereka lebih banyak menyatu dengan dinamika lautan – kalau meminjam istilah sajak D. Zawawi Imron – senantiasa berbantal ombak dan berselimut angin.

Secara politik, manakala potensi kaum muda pesisir(an) ini dialirkan dengan baik, dipastikan mampu mengairi kecengengan politik kebangsaan yang kian hari semakin memilukan. Sebab politik itu tidak semata identik dengan diplomasi, melainkan membutuhkan ketangguhan (ber)oposisi dalam pengertian dan makna fundamentalnya, persis sebagaimana kaum pesisir(an) menjadi oposisi bagi terjangan arus, gelombang, dan angin yang sedemikian kencangnya di tengah lautan.

Manakala potensi ini tidak dirawat dengan cerdas dan cermat, ia akan mudah merasuki jantung sosial masyarakat dengan berbagai virusnya. Dalam istilah agama (Islam), ia akan segera menyebarkan kemudaratan dari pada cepat melahirkan kemaslahatan dalam rangka menjaga kelangsungan sosial berbangsa dan bernegara.

Cukup Signifikan

Terlepas dari latar suku aslinya, yang pasti kaum pesisir(an) di Bangka Belitung ini jumlahnya cukup signifikan. Bahkan secara sosial, kontribusi mereka terhadap kemajuan Bangka Belitung tidak bisa diabaikan, baik dalam konteks perputaran ekonomi, budaya dan juga politik. Tak terkecuali dalam dunia pertimahan akhir-akhir ini.

Sebagai propinsi kepulauan, seharusnya pemerintah segera membenahi struktur sosial kelautannya. Hal ini bukan saja untuk mempercepat lalu lintas sosial masyarakat, melainkan demi memaksimalkan berbagai potensi yang ada di dalamnya. Sebab meniru sinyalemen Hobbes, bahwa masyarakat terkadang mampu berkembang dengan dirinya sendiri meski terbilang lamban, namun seringkali menciptakan konflik sosialnya dengan parah kalau terjauhkan dari rasionalitas kepublikannya.

Masyarakat yang memiliki rasio kepublikan dengan baik, mereka akan senantiasa proporsional dalam membawakan tabiat dari problematika sosialnya sepanjang sejarah. Mereka tidak akan mudah terpancing dengan hal-hal yang kurang produktif secara

sosial. Lebih dari itu, mereka justru lihai dalam mengawal semangat dan nilai-nilai harmoni yang telah diwariskan leluhurnya.

Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan individual dalam bermasyarakat, tidak serta merta ditonjolkan atau ditabrak-tabrakkan dengan kemaslahatan kolektif. Selalu saja dijahit dengan rapi dan berkeadilan. Dievaluasi dan diinternalisasi secara berkesinambungan, bukan bergantung pada kepentingan-kepentingan "sempalan."

Menjadi masyarakat pesisir(an), sejatinya adalah wujud dari masyarakat yang penuh keunikan, kegigihan, keuletan, dan juga kematangan dalam ranah sosial. Di sisi lain, masyarakat pesisir(an) juga merupakan teladan bagi komunitas di luar dirinya, lantaran mempunyai kepekaan dan solidaritas sosial yang tinggih dan jernih. Untuk itulah mereka terbilang sebagai masyarakat "berkarakter."

Bahkan, kalau mau melirik kepada kaum pesisir(an) di pulau Jawa, menjadi masyarakat pesisir(an) ternyata bukan status rendahan. Disamping terkenal gigih dan energik, masyarakat pesisir(an) itu ternyata diidentikkan dengan kaum cerdik dan kreatif, yang memiliki komitmen tinggi secara sosial maupun spiritualitas. Inilah yang menjadi salah satu alasan sebagian besar wali di Pulau Jawa dalam mengembangkan risalah dakwahnya.

Kampung Nelayan II yang berada di wilayah Kabupaten Bangka ini memang hanya kampung kecil. Dan kalau dihitung jumlah penduduknya juga tidak seberapa. Akan tetapi, di tengah percaturan demokrasi yang kian terbuka, dengan berbagai potensi yang bertaburan di dalamnya, kampung ini bisa menjadi modal potensial sekaligus "kabut menakutkan," tergantung pada seberapa jauh kita mengelolanya.

Sekiranya ada *active minority* yang kreatif mengorganisir potensi pesisir(an) yang bertebaran di kepulauan Bangka Belitung ini, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi kekuatan politik alternatif di masa yang akan datang. Sebab disamping soliditas dan solidaritas di antara mereka cukup tinggi, jumlah dan pola sosial mereka pun terus mengalami peningkatan.

17

Tangisan Politik

Tentu saja kita masih ingat bahwa pernah ada calon bupati Ponorogo, Jawa Timur, yang kalah bertarung dalam politik kekuasaan lokalnya lalu berjalan di muka publik hanya dengan mengenakan celana dalam. Lebih parah lagi, dalam hitungan waktu yang tidak seberapa lama kemudian ia diceraikan oleh sang istri.

Ia pun dicibir sebagian orang yang ada di sekelilingnya. Dan sebagai calon bupati, sebelumnya ia pasti merupakan sosok terhormat, bernyali, punya modal politik, memiliki jejaring sosial yang tidak bisa diremehkan, terutama di tingkat lokal kabupaten di mana ia mengukir eksistensi dirinya.

Di beberapa daerah lain, tak sedikit pula pribadi-pribadi yang gagal menuju kursi legislatif baik untuk level lokal maupun nasional yang masuk dalam nominasi pesakitan. Ada yang stres karena tidak kuat menanggung beban hutang pembiayaan politik *(political cost)* selama mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Ada yang tadinya merupakan sosok yang taat beribadah tiba-tiba menjadi pencuri yang ganas hanya lantaran harus mengembalikan modal-modal atau harta-

harta yang terjual saat berkampanye. Ada pula yang melampiaskan kekecewaannya dengan cara menipu tak sedikit orang yang menjadi teman dekat atau saudaranya sendiri, termasuk menjadi penjual obat-obat terlarang di negeri ini.

Itulah fenomena politik dari individu-individu yang belum matang secara sosial dan spiritual namun sudah ambisius untuk menggenggam kekuasaan (politik). Itulah potret nyata bahwa tidak sedikit masyarakat yang masih menempatkan politik sebagai tujuan duniawiyah yang berlebihan. Atau, jangan-jangan sebagian besar dari mereka yang ambisi menduduki kursi empuk di legislatif memang menaruh dan mengedepankan niat yang tidak tulus dan kurang sejalan dengan kapasitas dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Inilah satu diantara sekian akibat dari budaya demokrasi yang kian terbuka namun dibiarkan menjalar ke irisan pola pikir rakyat tanpa sedikit pun disertai rambu-rambu yang dapat dimaknai dengan selektif dan mencerdaskan.

Jalur Alternatif

Politik kekuasaan itu bukan satu-satunya ruang eksplorasi diri yang ideal, terutama bagi setiap hamba yang telah menegaskan diri menjadi bagian dari komunitas beragama (Islam). Sebab politik kekuasaan itu hanya jalur alternatif yang boleh saja dilalui oleh masing-masing manusia guna memacu dan memicu pengembangan potensi-potensi kebajikan yang telah dimilikinya. Dalam Islam, misalnya, seorang umat tidak cukup hanya menyatakan beriman kepada Allah SWT tapi lalai untuk berbuat kebajikan terhadap sesama manusia. Tak terkecuali bagi mereka yang menyandang status politisi atau politikus yang lebih sering bergulat di atas tanjakan friksi dan konflik elitisnya.

Sebagai jalur alternatif dalam mengembangkan hal-hal yang manusiawi, politik itu memang tidak bisa dilepaskan dari kerangka-kerangka dasar *ubudiyah* kepada Allah SWT. Berjalannya politik kekuasaan, menjiblak istilah Ibnu Khaldun, tetap tergantung pada *masyi'ah Allah* (kehendak Allah) disamping berbagai ikhtiar yang dilakukan manusia yang menggelutinya. Karena Allah SWT menegaskan bahwa Ia telah menciptakan kondisi-kondisi dan syarat-syarat perubahan sosial dengan paradigma yang tidak dipunyai oleh manusia. Sehingga Allah berfirman dalam Alquran bahwa Ia tidak akan pernah mengubah situasi sosial suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang melakukan perubahan

dengan maksimal.

Di sisi lain, bahwa politik kekuasaan merupakan jalur alternatif proses aktualisasi sosial kemanusiaan dapat dikategorikan pula sebagai fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia sedari awal. Sebab salah satu sifat dasar manusia adalah senantiasa berusaha untuk mendapatkan sarana-sarana kehidupan secara dinamis. Tak salah kalau di dalam Alquran, sebutan bagi manusia selain *al-Insan*, *al-Nas*, juga ada *"al-Basyar"*; simbol dari makhluk yang mempunyai daya aktif, progresif, dan tidak pernah "pasrah" dengan situasi yang dialaminya sebagai makhluk sosial. Apalagi politik kekuasaan itu merupakan wujud organisasi sosial yang dibangun berdasarkan kesepatakan yang dalam istilah Hobbes disebut "kontrak sosial" dari suatu masyarakat bernegara.

Hidup memang (terkadang) sebuah pilihan. Dan meniru kata-kata J.P. Sastre, di saat tidak memilih pun sebenarnya manusia termasuk yang sudah memberikan pilihan, yakni pilihan untuk tidak memilih. Maka ada manusia yang enggan berpolitik, dan lebih memilih sebagai hamba biasa, bertani, memaksimalkan kebun, dan lain-lain. Akan tetapi terpaan kehidupan modernitas ternyata membuat sebagian besar masyarakat mulai memaknai politik kekuasaan sebagaimana "perawan" yang seksi, menggoda, punya lekuk tubuh yang menggairahkan, dan menjanjikan sejumlah kenikmatan duniawiyah. Wajar saja kalau tak sedikit politisi yang kurang persiapan secara mental dan spiritual tiba-tiba memekikkan tangisan politik dan langsung terkulai di balik jeruji besi.

Kendaraan Akhirat

Sebagai salah satu bentuk aktifitas sosial, politik kekuasaan bukan modal yang paling utama dalam hidup. Ia tetap menjadi bagian dari praktik *ubudiyah* (kehambaan) kita di hadapan sesama manusia sekaligus Allah SWT. Bukankah dalam Alquran Allah SWT sudah menegaskan bahwa tiadalah setiap diri manusia dan jin itu diciptakan kecuali hanya untuk terus mengagungkan dan menyembahNya. Kalau sifat dasar penciptaan manusia adalah demi beribadah kepada Allah, seharusnya tidak ada aktifitas sosial politik setiap manusia yang keluar dari rel ilahiah, baik yang berkait dengan kepentingan individual maupun yang langsung bersentuhan secara komunal dalam konteks berbangsa.

Dengan demikian, berpolitik yang baik tentu adalah menjadikan semua prosesi dan aktualisasi politik kekuasaan itu sebagai kendaraan

akhirat. Sehingga siapa pun yang menjadi politisi, politikus, atau penguasa kursi parlemen, tidak mudah terjebak dan terkatung-katung di tengah kecaman sosial masyarakat. Dan setiap diri yang menjadikan politik kekuasaan sebagai kendaraan akhirat itu tidak akan gampang terbius gesekan kehidupan sosial berlapis kemewahan, terlebih yang berasal dari jalur yang kurang sejalan dengan ridla Allah. Bahkan friksi, konflik, dan intrik-intrik yang ada di dalamnya, akan senantiasa dijadikan *wasilah muhasabah* guna meningkatkan kapasitas kekhalifahannya di muka bumi.

Seperti telah disinggung di awal bahwa politik kekuasaan hanya lintasan sosial yang cenderung diwarnai kepentingan duniawiyah, maka ia harus dikontrol dan diolah sedemikian jernih. Ia tidak boleh dibiarkan liar dan terlepas dari orientasi luhurnya. Sebab hal-hal duniawi itu, meminjam ajaran kaum sufi, sering kali menjebak dari pada menjadi jalan keluar. Ia mudah menyiksa dan memerdaya manusia. Maka tak berlebihan bila melalui sajaknya Raja Ali Haji mengurai bahwa *"barang siapa mengenal dunia/tahulah ia barang yang terperdaya… barang siapa mengenal akhirat/tahulah ia dunia mudharat… barang siapa mengenal yang tersebut/ tahulah ia makna takut…*

Politisi yang memiliki kesadaran keakhiratan ini bukan saja akan mawas diri dalam mengarungi kekuasaan praktis, melainkan juga dapat diandalkan untuk menjadi kekuatan alternatif di tengah hancurnya kredibilitas maupun akuntabilitas birokrasi politik bangsa ini. Sebab politik juga memiliki *adab*, atau dalam bahasa Yunani disebut *paideia*, yakni kerangka kehalusan budi dan budayanya. Dan kalau dikaitkan dengan tradisi Islam, politik seyogianya dibangun bukan dari *girah* (kemauan) untuk berkuasa semata, akan tetapi harus dari dan untuk komitmen imani kita masing-masing.

Melalui komitmen imani, siapa pun yang hendak ikut ambil peran dalam dinamika politik kekuasaan, maka ia segera menghitung diri dengan produktif. Ia akan lebih dulu bertarung untuk mengalahkan egoisitas dirinya sebelum mati-matian menaklukan hati masyarakat. Ia akan menimbang benar *mafsadat* dan *maslahat* dari segala propaganda politiknya. Dan kalau pun suatu saat gagal, tidak mampu menduduki kursi parlemen, ia tidak akan mengeluarkan tangisan politik yang memilukan dan memalukan. Ia akan jeli memaknai pepatah "jangan besar pasak dari pada tiang." Sehingga kebesaran jiwa dan kematangan nurani kehambaan lebih diutamakan dari pada kemauan berpolitik. ***

18

Fawallaituka

KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB NU sempat menyindir bahwa politik itu kalau ditulis dalam huruf-huruf Arab terdiri dari "fa-wau-lam-ya-ta-kaf." Dan sekiranya dibaca oleh orang Arab bisa berbunyi "*fawallaituka*" yang berarti "saya bohongi kamu."

Sindiran ini cukup jelas hendak menyampaikan bahwa yang bernama politik tidak akan pernah bersih dari retorika berdaya manipulatif. Maka tak bisa dipersalahkan bilamana sebagian masyarakat beranggapan kalau politik itu kotor, suka mengeksploitasi dan menghegemoni aspirasi sekaligus hak-hak sosial rakyat.

Jauh di luar itu, politik terkadang lebih banyak melahirkan kekisruhan sosial dari pada kedamaian bagi masyarakat. Dan bahwa politik sejatinya dibangun dari nilai-nilai luhur untuk menciptakan kesejahteraan publik, sama sekali tidak ada yang memungkiri. Akan tetapi fakta menyuguhkan pemandangan yang menggelikan, dimana politik sering kali menjadi alat pendulang korupsi, nepotisme, dan legalisasi isu-isu yang hanya mengganggu psikologi sosial masyarakat secara umum. Tak terkecuali naiknya BBM beberapa bulan lalu dan

juga harga gas elpiji 12 kg yang telah menapikan psikologi rakyat miskin.

Sekiranya konstruksi politik tanah air ini terus bergulir dengan cara-caranya yang kurang aspiratif, tentu saja Indonesia tidak bisa diharapkan sebagai rumah demokrasi publik yang menyegarkan. Sebaliknya, patologi dan virus-virus politik akan bergentayangan di setiap ruang kebangsaan, lalu merasuki jiwa-jiwa masyarakat dan akhirnya membunuh kreatifitas politik publik itu sendiri. Bahkan bisa jadi sebagian politisi yang menduduki kursi legislatif itu akan sering menjelma sebagai "hantu" dari pada menjadi "malaikat" bagi kelangsungan sosial bermasyarakat dan berbangsa.

Partai Politik

Seperti kita mafhumi, bahwa salah satu tiang penyangga demokrasi adalah partai politik dengan segala visi, misi, peran dan fungsinya, baik pada level terendah sampai ruang yang lebih makro. Tanpa partai politik dan dalam perspektif praktis, demokrasi memang dapat diwujudkan namun tidak akan maksimal dan terarah dengan baik. Menapikan peran partai politik dalam membangun kehidupan berdemokrasi, bukan semata salah kaprah melainkan dapat merusak efektifitas dan efisiensi perpolitikan di tingkat kebangsaan.

Partai politik, sedari dulu sudah dikategorikan sebagai wadah sosial dari sekumpulan manusia yang memiliki orientasi (ke)kuasa(an) dengan jelas. Tidak sedikit pula pengamat politik yang menegaskan bahwa partai politik sering kali dijadikan pilihan hidup oleh orang-orang yang memang telah merasakan kenyamanan sosial melalui jalur-jalur dan aktifitas-aktifitas kekuasaan. Dan dalam konteks ini mengemukalah banyak anggapan kalau partai politik itu hanya milik segelintir manusia yang bermental "pemain," "konspirator" atau "predator" dalam beberapa makna dan aspeknya yang kurang baik.

Seorang Miriam Budiardjo, intelektual politik Indonesia, pernah menuliskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok manusia yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional dalam rangka melaksanakan kebijakan yang mereka

putuskan. Uraian Miriam ini tampak sejalan dengan pemikiran Carl. J. Friedrich yang mengurai bahwa partai politik adalah wadah dari sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil guna merebut dan mempertahankan kekuasaan demi eksistensi partainya.

Pada ranah esensialitasnya, apa yang dikemukakan Miriam dan Friedrich dirangkum dengan jelas dan lugas dalam Undang-Undang tentang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 pasal 1 yang berbunyi : Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, cukup nyata kalau partai politik tidak bisa hanya mengedepankan cita-cita dan kepentingan anggotanya. Lebih jauh lagi, partai politik harus tetap memprioritaskan cita-cita dan kepentingan masyarakat sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai kehendak bersama. Dalam istilah yang lain, partai politik harus memiliki nalar politik yang melampaui kepentingan anggotanya dan mampu memberikan jaminan sosial berkelanjutan bagi kemaslahatan publik tanpa pilah-pilahan status, ras, suku, golongan, dan jenis latar sosialnya.

Nalar Politik

Nalar politik parpol setidaknya senantiasa mengacu pada empat hal. Pertama, harus mampu mengelola konflik internal yang sering kali terjadi dengan penuh kejujuran intelektual dan kebesaran jiwa berpolitik. Sebab friksi dan konflik pasti selalu muncul tenggelam dalam dunia politik, baik pada level mikro maupun makro. Dari sini semangat untuk mengedepankan *ishlah* atau rekonsiliasi politik secara internal seakan menjadi keharusan bagi siapa saja yang terlibat aktif dalam dunia politik. Atau, dalam istilah yang lebih kren, paradigma *ishlah* (rekonsiliasi) semestinya dijadikan budaya tersendiri dalam setiap parpol.

Pengelolaan konflik internal itu semestinya dimaknai sebagai bagian dari proses untuk membesarkan parpol kapan dan dimana

pun. Sehingga gesekan berlebih diantara kader parpol atau kemelut sosial lainnya tidak menjadi batu sandungan yang dapat membelah eksistensi parpol secara tragis. Dan krisis manajemen konflik kepartaian yang marak belakangan ini, disadari atau tidak, sebetulnya telah ikut mengantarkan tercerai-berainya kekuatan sosial parpol. Ditambah lagi dengan krisis identitas politik dari masing-masing elit, maka wajar kalau mereka seketika membentuk parpol-parpol baru sebagai penyaluran kehendak politik kuasanya.

Kedua, politik harus senantiasa ditata dari dan untuk nalar *dar ul mafaasid muqaddamun ala jalbil masaalih*. Artinya, segala potensi dan berbagai bentuk kerusakan atau pun hal yang dipandang akan merugikan parpol harus ditolak dengan segera. Sebaliknya, hal-hal yang secara nyata akan melahirkan kebajikan dan kemaslahatan bagi masa depan parpol sekecil apapun harus didahulukan. Sebab yang kecil dan ringan tapi bermanfaat adalah lebih baik dari pada hal besar dan fantastis namun menimbulkan kerusakan bagi parpol, baik pada level citra maupun dalam ranah eksistensialitasnya.

Ketiga, mesti ada paripurna politik dengan konstituen. Disamping memiliki kesadaran dan sistematika kerja politik yang strategis dan efektif, setiap parpol harus rajin bertukar sapa, berbagi rasa, saling menumbuhkan demokrasi dengan konstituen, dan bukan malah memerinci dagelan politik di tingkat elit semata. Sebab, meminjam bahasa Goenawan Mohammad, saat ini adalah era politik, *zaman massa*. Dan karena zaman massa, maka masa depan setiap parpol benar-benar tergantung pada soliditas dan logika konstituen, bukan terbatas pada gerombolan elit dengan pelbagai retorika manipulatifnya.

Keempat, kerja-kerja politik kepartaian harus dijauhkan dari tendensi pragmatisme yang amat berlebihan. Parpol perlu melakukan reorientasi secara bertahap terhadap keberadaan dan capaian politik yang dicanangkan masing-masing kadernya. Dan tanpa kerangka semacam ini, pelan tapi pasti parpol hanya akan menjadi barang gunjingan dan cibiran masyarakat. Konsekuensi logisnya, eksistensi parpol selalu tertekan, terancam dan akhirnya tenggelam oleh perilaku kadernya, bukan karena inkonsistensi konsituen politik itu sendiri. ***

19

Syarah Politik

Diulur-ulurnya pemilihan wakil Gubernur Bangka Belitung pasca wafatnya Eko Maulana Ali, mengindikasikan bahwa tradisi politik sejumlah parpol belakangan ini bukan saja mengabaikan nalarnya, melainkan sudah jauh bergeser dari kesadaran aslinya sebagai media penyambung lidah rakyat. Aneh tapi nyata secara politik, keberadaan parpol lebih sering menjadi pengental ambisi elit-elitnya sendiri.

Padahal ketika memasuki pertarungan formal di setiap pesta pemilu(kada), semangat berkoalisi antar parpol dibangun dan digencarkan di hadapan publik dengan menggebu-gebu. Bahkan semboyan dan istilah "populis" yang dianggap strategis menarik simpati pemilih seperti "Bersama Kita Bisa," "Lanjutkan," "Eko-Trus," "Zaman," "Berkibar," "Nusantara," "Tenteram," dan sejenisnya diburu serta diluncurkan di setiap ruang dan waktu.

Namun demikian, karena diliputi oleh ambisi kekuasaan yang liar, semboyan-semboyan itu hanya berlaku secara parsial guna memuluskan koalisi politik yang oportunistik. Dan wajar saja kalau koalisi politik semacam ini sangat timpang dan tidak banyak mengubah arah sosial

kehidupan masyarakat dalam skala mikro maupun makro. Koalisi seakan dimaknai sebagai mainan belaka, sedikit pun tidak dilandasi prinsip istiqamah maupun amanah.

Alas Politik

Padahal alas politik, dengan prinsip istiqamah dan amanah, sejatinya adalah kesehatan akal dan kematangan batin. Melalui akal yang sehat, politik akan terus mengembang dengan produktif dan aspiratif. Ia tidak akan semena-mena melenceng dari fitrahnya sebagai laboratorium sosial bagi publik. Ia juga tidak akan mudah rapuh dan runtuh lantaran godaan material yang kurang sejalan dengan cita-cita rakyat.

Politik yang dijauhkan dari akal yang sehat, ia bukan semata menggerogoti hak-hak sosial rakyat, melainkan bisa sering melindas kebutuhan primer publik itu sendiri. Sebab tanpa dibasiskan pada akal yang sehat, maka politik itu muncul dengan watak brutusnya. Ia tidak sekadar menjadi "virus amuba" dalam perut sosial publik, melainkan dapat menjelma "racun arsenik" dalam metabolisme sosial keumatan dan kebangsaan.

Dengan membasiskan diri pada kejernihan akal, politik mudah untuk disyarahi (baca: diurai lebih maksimal). Ia tidak akan eksklusif dan menutup diri dengan berbagai apologi dan kerakusannya. Dan meminjam istilah Moh. Iqbal, politik berbasis akal yang jernih ini bisa cepat mengembangbiakkan kandungan etisnya, kemudian menjiwai secara produktif terhadap aspirasi maupun cita-cita luhur setiap umat.

Tidak cukup dengan sehatnya akal, politik juga membutuhkan kematangan batin dari setiap penganut dan pelakunya. Dengan batin yang matang, politik akan senantiasa memprioritaskan obyektifitas dari pada subyektifitasnya dalam mewujudkan tuntutan sosial publik. Ia tidak gampang terseret dalam tarikan-tarikan sosial yang semu, melainkan bergerak dengan cara-cara berbasis falsafi yang menakjubkan.

Melalui kematangan batin ini, maka tradisi politik tidak akan lagi tertawan oleh kepentingan parsialistik dan kehendak kuasa kelompok-kelompok utopis. Atau, dalam bahasa sajaknya Iqbal, dengan kematangan batin ini maka hati para pelaku politik itu tidak akan lagi dipenuhi oleh aspirasi yang sama sekali bukan miliknya sendiri. Dan di sinilah politik akan menjadi "telaga sosial" yang sesungguhnya bagi rakyat.

Manakala sehatnya akal dan matangnya batin ini berjalan serasi di

lingkungan politik praktis pemerintahan, misalnya, maka perilaku-perilaku sosial yang menyimpang dari pelaku politik, pasti dapat diminimalisir. Bahwa dua hal ini bukan satu-satunya resep dalam memperbaiki peradaban politik, memang dibenarkan. Akan tetapi, bahwa keduanya juga merupakan modal potensial dalam pembangunan politik yang lebih prospektif, tidak terbantahkan.

Bukankah pada masa awalnya, terutama di era Yunani Kuno, politik selalu beralaskan produktifitas dari akal yang sehat dan dimensi rohani yang berkualitas? Itulah yang sedari awal telah didengungkan setidaknya oleh Plato dan Aristoteles. Sementara di kalangan Islam, diperkenalkan pula oleh Ibnu Taimiyah, Abu A'la al Maududi, Al Kindi, dan banyak filosof lain. Sehingga politik pada masa itu pun mengalami era keemasan yang mencengangkan.

Koalisi Politik

Salah satu hal yang melekat dalam tradisi politik era Yunani adalah kontsruksi pertimbangan etik yang senantiasa dijadikan patokan oleh hampir setiap pelaku politik ketika merumuskan kebijakan menyangkut kehidupan publik. Maka tak berlebihan manakala Aristoteles sendiri sering menghentakkan bahwa politik yang baik adalah politik yang disandarkan pada semangat kebajikan tanpa kenal ruang dan waktu.

Politik bukan semata pemupukan ambisi-ambisi material-duniawiyah, melainkan media eksplorasi dan kreasi sosial setiap manusia untuk meraih kegurihan imaterial-ukhrawiyah. Dalam istilah yang lain dan sederhana, politik itu merupakan seni untuk mengartikulasikan hasrat, cita-cita, dan visi hidup setiap diri. Karenanya politik itu dinamis dan progresif.

Di sisi lain, politik memang selalu berkait dengan modal sosial yang tidak tunggal. Dari sinilah koalisi politik dapat dimaknai kehadirannya. Meskipun, terutama dalam konteks kekinian, tak sedikit pemain dan pelaku politik mulai menyalahartikan eksistensi koalisi politik yang (terkadang) dibangun secara gamang. Tak terkecuali koalisi yang kemarin mengantarkan pasangan Eko Maulana Ali dengan Rustam itu sendiri.

Ketika Eko berhalangan sepenuhnya, parpol dan elit politik yang katanya ikut membidangi koalisi serta memenangkan "Eko-Trus," tampak kian lepas dari kerangka etiknya. Mereka saling klaim dan tancap berkonsolidasi. Mereka lupa bahwa politik juga menuntut adanya

kejernihan pikiran dan kematangan batin. Akibatnya, mereka tampak semakin mengabaikan semangat keteladanan sosial di hadapan publik.

Sekiranya mereka cukup proporsional dalam memberikan syarah politik terhadap visi dan orientasi substansial dari sebuah koalisi, tentu saja fenomenanya lebih edukatif. Tidak akan terjadi saling tabur pesona, adu citra dan kekuatan, baik di tingkat *grass rood* maupun di level elit penguasa. Sebaliknya, mereka tetap komitmen secara politik dan besar jiwa dalam panggung sosial kebangsaan.

Filosofi koalisi politik adalah transformasi kerja secara kolektif, sesuai kodrat dan potensi masing-masing. Akan tetapi, dalam koalisi pasti ada yang mengomandoinya, tidak seratus persen berdasar pada hasrat berbagai elemen yang ada di dalamnya. Apalagi ini berkait dengan strategi dan peraihan suara dalam pesta politik yang tidak mudah demi mendapatkan kemenangan.

Oleh karena itu, etika dalam berkoalisi harus ditempatkan di atas segala kehendak kuasa yang parsial. Dan semua yang (merasa) punya andil pun harus mengedepankan akal yang sehat dan kematangan batinnya. Hal ini bukan semata menjaga soliditas dan harmoni politik di hadapan publik, melainkan untuk mewujudkan pendidikan politik yang lebih paradigmatik berbasis akal sehat maupun keteladanan.

Akal manusia beda dengan otak sapi yang mudah dieksploitasi, maka seharusnya elemen yang (merasa) berkoalisi, akalnya mesti sehat juga dalam menginternalisasi hakikat koalisi. Eko (Golkar) merupakan komandan koalisi kala itu. Ia bukan semata sosok yang santun dan lengkap, melainkan simbol dari kekuatan politik yang nyata, Ketua Umum DPD Golkar. Maka dalam kacamata yang sehat pula, beban dan risiko sosial politik yang ada di pundak Eko (Golkar) adalah hal yang tidak bisa dinafikan seenak perut, termasuk oleh mereka yang berada dalam koalisinya.

Dalam pandangan Eko (*almaghfurlah*) – hal ini saya dapatkan saat diskusi semasa Eko sehat – bahwa untuk terjun ke dalam dunia politik praktis, bekal yang paling utama bagi setiap diri (kelompok) adalah pencerahan batinnya. Tanpa pencerahan batin, pelaku politik akan mudah terombang-ambing dengusan hal-hal yang tidak produktif, baik yang bersifat material atau yang lain. Sebab politik, masih kata Eko, bukan sekadar berkait dengan gairah transaksional, melainkan mendambakan sentuhan utuh secara spiritual. ***

Bagian II

Lentera (Ber) Demokrasi

1

Pemilih dan Pencoblos

Idealnya, masyarakat pemilih itu adalah masyarakat pencoblos juga. Yang disebut pemilih adalah masyarakat yang mendapatkan hak untuk memilih dalam sebuah pesta demokrasi. Begitu juga dengan yang dinamakan pencoblos; masyarakat yang telah mendapatkan legalitas-administratif untuk memaksimalkan hak politiknya dengan mencoblos gambar partai politik dan wajah para caleg, capres dan cawapresnya dalam proses regenerasi politik kebangsaan. Dua istilah itu, selintas kelihatan tidak ada yang berbeda sama sekali. Namun, dalam perspektif masyarakat politik (political society) setiap istilah itu memiliki makna dan eksistensi yang berbeda secara tersendiri.

Di era Orde Baru, orang agak sulit membedakan mana masyarakat pemilih dan yang mana pula masyarakat pencoblos. Wacana politik kerakyatan terlalu susah untuk dipublikasikan. Sentralisme kekuasaan menjadi alat (remote control) yang paling ampuh untuk membekukan dan menggilas habis wacana sosial politik kerakyatan dari lapisan masyarakat apa saja. Alih-alih transparansi political discourse bisa dikonsumsi oleh masyarakat, untuk sekadar

melahirkan istilah atau menafsirkan kebijakan politik elite saja ruangnya nyaris tidak ada. Itulah watak political power; politik kekuasaan (kekuasaan politik) zaman pra-modern (Orde Baru).

Sebagai salah satu contoh, diera Orde Baru, setiap masyarakat yang menyuarakan bahwa pemerintah dan elite politik telah memanipulasi dan mengeksploitasi aspirasi rakyat, cepat atau lambat ia akan diciduk dan ditekan secara fisik dan nonfisik. Dia akan diburu setiap saat untuk "disel" secara psikologis. Maka wajar dizaman orde baru,tidak sedikit tokoh yang cerdas jadi buronan pemerintah. Dan sebagai konsekuensi logis dari praktik politik kekuasaan (political power) seperti adalah langgengnya kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun lebih dalam "menjinakkan"pola pikir masyarakat.

Sebab, dengan menekan dan menyempitkan ruang ekspresi dan kreasi politik rakyat, bagi Orde Baru adalah strategi yang efektif untuk membutakan penglihatan rakyat terhadap segudang kebudayaan dan kebijakan elite politik tanpa alasan apapun. Dan diakui atau tidak, dalam perspektif masyarakat politik dengan watak kekuasaan dan egoisme politik elite seperti itu. Orde Baru hanya mampu melahirkan masyarakat "pencoblos"dalam kontek suksesi kepemimpinan nasional maupun lokal. Maka cukup jelas bahwa teori politik kebangsaan yang dipraktikan Orde Baru adalah teori kekuasaan yang menjauhkan rakyat dari kemerdekaan politiknya, yang betul-betul menafikan lahirnya rakyat sebagai "pemilih" dalam regulasi politik makro kebangsaan (setiap pemilu) Celaka !.

Pemilu 2004 dianggap memiliki kemajuan secara demokratis ketimbang pemilu 1999 dan diera Orde Baru. Pada pemilu 1999 dan pemilu-pemilu sebelumnya, DPR masih punya potensi yang sangat kuat dan besar dalam menentukan presiden dan wakil presiden bangsa ini. Sedang pemilu 2004 kali ini "rakyat"(teorinya) yang paling berhak menentukan elite-elite yang berhak duduk di kursi DPR dan layak menjadi presiden dan wakil presiden. Rakyat (tampaknya) sudah ditempatkan pada peran dan posisi hakikinya. Dan hampir semua elite politik dan sebagian pengamat maupun praktisi sosial politik sepakat dengan penataan sosial asumtive yang terlanjur terbangun itu. Yang jelas, dari sini, kita tidak bisa langsung mengklasifikasikan mana masyarakat yang cerdas dan yang mana elite sosial politik

maupun pengamat, yang masih banyak mengigau. Itulah realitas social discourse bangsa ini.

Diakui atau tidak, ditengah maraknya wacana demokrasi kebangsaan, ternyata kita masih belum bisa membedakan anatara masyarakat "pemilih" dan masyarakat "pencoblos" dalam kultur makro politik bangsa ini. Elite politik dengan berbagai kendaraan politiknya (partai) juga masih menggunakan cara-cara tipologi yang "kampungan", "klise", dan "kolokan" dalam mengampanyekan visi dan misi politiknya.wajar saja jika sebagian masyarakat juga menganggap bahwa saat ini masih banyak parpol dengan elite politiknya yang tidak cerdas dan tidak pragmatik-programatik. Aktivis elite politik itu tak lebih dari sekedar obral janji-janji politik semu yang tetap membodohkan rakyat. Rakyat yang tetap dianggap sebagai semata komunitas "pencoblos" bukan "pemilih"yang memiliki kontruksi rasionalitas tersendiri. Itulah salah satu bukti bahwa masyarakat kita masih berwatak pseudo-reformation.

Pemilu 2004 ini akan sukses, dalam perspektif demokrasi seutuhnya bila mayoritas elite politik dan sebagian besar elemen demokrasi mampu melahirkan masyarakat pemilih yang sesungguhnya. Masyarakat pemilih adalah masyarakat yang selalu mengedepankan rasional-etis dalam mempergunakan hak politiknya. Masyarakat pemilih adalah komunitas yang hanya senantiasa memaksimalkan "kecerdasan sosialnya" dalam menentukan pilihan politik mereka. Masyarakat pemilih sejati adalah masyarakat yang mampu membedakan antara visi politik berbasis kerakyatan dengan "retorika berbisa" dari para elite politik itu sendiri. Bahkan, masyarakat pemilih itu adalah masyarakat yang mampu menembus batas politik yang mengikat secara tidak rasional, seperti dizaman Orde Baru dimana PNS adalah wajib memilih Golkar. Meskipun itu adalah pilihan keterpaksaan. Tidak sesuai suara nuraninya.

Sedangkan masyarakat pencoblos adalah masyarakat yang sekedar menusuk sebuah gambar partai politik dan nama caleg, capres, dan cawapres, bukan atas dasar jernihnya analisis sosial politiknya. Masyarakat pencoblos itu adalah masyarakat yang antipati dan cuek terhadap substansi politik kebangsaan. Masyarakat pencoblos ialah masyarakat yang ikut- ikutan, sebatas penggembira pesta demokrasi

dan yang selalu mengedepankan "emosio-primordial-nya" dalam menentukan dan mempergunakan hak politiknya. Dan bukankah primordialisme politik itu yang telah menyebabkan krisis politik bangsa ini. Jadi, perbedaan antara masyarakat pencoblos dan pemilih itu sangat tipis. Masyarakat pencoblos berangkat dari dan berpihak pada "ekslusifisme politik" yang kaku, sedangkan masyarakat pemilih adalah masyarakat yang dalam setiap kontruksi politiknya selalu berpegang teguh pada logika "inklusifisme politik"secara holistik.

Sungguh membiarkan masyarakat indonesia tetap menjadi masyarakat pencoblos sebagaimana di era Orde Baru; yang tidak dijamin kebebasan politiknya, yang senantiasa diiming-imingi sosial reward sesaat yang sangat tidak seberapa yang hanya membahagiakan sementara menyengsarakan mereka bertahun-tahun, adalah pengkhianatan terbesar dalam demokrasi. Sebaliknya melahirkan banyak masyarakat pemilih yang rasional dan cerdas yang memiliki sikap kritis-filosofis dalam tradisi politik kebangsaan adalah wujud dari komitmen dan cita-cita demokrasi berbasis kerakyatan. Inilah jihad demokrasi untuk menepis segala kebijakan tirani politik kekuasaan.***

2

Masyarakat Pembaca

Dalam bukunya, *The Sane Society* (*Masyarakat yang Sehat)*, Erich Fromm menulis bahwa "suatu masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang perlu terkait dengan apa yang manusia *rasakan* sebagai kebutuhan-kebutuhannya, sebab kebanyakan tujuan-tujuan patologis pun dapat dirasakan secara subyektif sebagai tujuan yang paling dirindukannya; tetapi apakah kebutuhan-kebutuhan itu *secara obyektif* dapat ditelusuri lewat studi tentang manusia?"

Ulasan Fromm itu memang cenderung bermuatan aspek psikologis. Sebab Fromm mempergunakan pendekatan *psikoanalisa* dalam membongkar apa yang sering dikategorikan *humanism necessary;* kebutuhan (ke)manusia(an) secara makro. Dan apakah hal ini merupakan kelebihan atau kekurangan Fromm, terpulang pada perspektif yang kita tarik. Namun yang pasti, manusia, dari kalangan manapun selalu lekat dengan berbagai kebutuhannya masing-masing.

Tak terkecuali menyangkut kebutuhan (ber)politik yang sepertinya semakin menjadi "trend sosial" bagi masyarakat Indonesia setelah era reformasi. Dan bahwa telah banyak aktifis

maupun pelaku politik yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kasus "manipulasi" proyek dan keuangan negara, tidak juga menyurutkan hasrat sebagian masyarakat untuk terjun bebas ke areal ring politik praktis. Sebab politik bukan saja punya "gengsi," melainkan memiliki "power" tersendiri dalam papan sosial bermasyarakat.

Pola Pikir

Memperhatikan perkembangan pola pikir, laku sosial, serta *cultural action* masyarakat Indonesia, yang kita tangkap seringkali adalah realitas menggelikan penuh patalogi dan ambigu. Itulah realitas sosial peradaban yang kian (ter)jauh(kan) dari misi universal kemanusiaan. Akibatnya, masyarakat hanya (di)jadi(kan) obyek proyek besar dari kepentingan politik dan budaya elite yang sifatnya sesaat. Bahkan, masyarakat tak jarang selalu digiring ke arah konflik sosial yang tidak jelas *reasoning*-nya.

Mereka dikerdilkan dalam banyak ruang dan kesempatan agar tidak banyak "menggugat" realitas sosial yang diciptakan elite. Perpecahan kerukunan kebangsaan menjadi sesuatu yang "dicari" dan bahkan "dibeli" dengan kekuatan material maupun propaganda-provokatif. Inilah *new hegemonic,* hegemonisasi baru yang terlampau kejam. Sedangkan keterbukaan yang dijanjikan dalam setiap aspek struktural, kultural, sosial- politik, sosial-budaya maupun sosial-keagamaan tak lebih sekadar "bisikan berbisa" untuk membekap jiwa masyarakat.

Itulah tipologi sosial-politik kontrahumanitas. Sekalipun era sekarang serba terbuka, tapi masyarakat tetap tidak pernah diberikan wewenang atau hak penuh untuk "membaca" serta memilih solusi efektif bagi kemungkinan-kemungkinan pemenuhan kebutuhan sosial-politiknya. Aspirasi masyarakat hanya keluar masuk keranjang birokrasi (politik) lalu dibakar habis di perapihan kebijakan (*policy*). Dan faktanya, masyarakat tak lebih dari sekadar pelengkap hasrat sosial elite politik dan birokrat(is). Selintas, masyarakat Indonesia tampak sedang kena racun politik yang mengandung bahan *arsenik*. Pelan-pelan mereka terus kehilangan kedaulatan individunya sebagai *social subject* atau pelaku sosial yang berkarakter. Bahkan yang sangat

ekstrim, masyarakat *(grass root)* itu lebih sering tidak diposisikan lagi sebagai warga negara secara proprosional. Sebab elite birokrat, politisi, dengan budaya sosialnya ternyata betul-betul sudah "demam" kekuasaan *an sich* tanpa berpikir amanah luhurnya.

Tidak sebatas itu, masyarakat yang minoritas dalam aspek ideologi maupun kultur keagamaan (masih) sering kali didiskreditkan. Sebagai minoritas, mereka lebih banyak "ditekan" untuk tunduk dan patuh kepada yang dikategorikan mayoritas dengan segala aspeknya. Yang tidak "sedarah daging" dalam kebudayaan dan (ke) agama(an) harus menjadi "pembantu" keberlangsungan kehidupaan sosial yang ada, meski harus membayar "*fidyah*" sosial yang (kadang) jauh dari kerangka rasionalitas. Di sisi lain, dengan alasan maraknya otonomisasi dalam politik dan pemerintahan, yang berhak menjadi penguasa seakan hanya *insider;* orang dalam, keluarga sendiri, putra daerah dan sebagainya. Inilah wujud eksklusifisme yang berlebihan. Itulah sikap antipati terhadap "kesamaan" dalam "keberbedaan." Inilah realitas pola pikir dan pola laku yang kontra-*prularisme*. Inilah bintik-bintik rasis-primordialis yang sangat destruktif.

Disintegrasi

Perasaan dan sikap sosial seperti di atas, merupakan bentuk lain dari egoisme yang dapat melahirkan disintegrasi (ke) berbangsa(an). Dari *streotipe* laku sosial seperti itu tak jarang muncul beraneka mental budaya yang kurang humanis, tidak egaliter dan tidak produktif dalam mengatasi multikrisis yang melanda negeri ini. Padahal berbicara penyelesaian krisis bangsa kita sangat membutuhkan kebersamaan dalam ke-*merasa*-an? Dan disinilah esensi *psikoanalisa* Fromm menemukan ruang maknanya.

Kebersamaan dalam "rasa" adalah wujud dari komitmen humanisme universal. Ia merupakan aktualisasi dari kesadaran *non-class*. Karena diakui atau tidak, bahwa mempertentangkan kelas, ras, komunitas, apa dan dari manapun, jelas sangat bertolak belakang dengan hasrat *global etic* dan *global society*. Bahkan prototipe sosial berbasis "kelas" semacam itu sama sekali tidak sejalan dengan spirit ajaran agama (Islam). Oleh karena itu, mencegah maraknya pola dan laku sosial politik yang mengarah pada lahirnya konflik dan

disintegrasi (ke)berbangsa(an), merupakan prioritas kita sebagai masyarakat. Kita harus tepat, tangkas dan lihai dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik secara fisik-sosial maupun *psikis-budaya,* dan agama. Sebab meniru ungkapan Frued bahwa "... kebudayaan dan perbedaan berkembang dan selalu kontras dengan kebutuhan-kebutuhan manusia ..."

Membiarkan kekontrasan tersebut dengan *back up* konseptual-pradigmatik atau desain pola pikir dan sikap mental budaya yang rasional masih dapat dimaklumi. Akan tetapi mendorongnya berjalan secara "emosional" akan melahirkan banyak jurang sosial yang dapat melumpuhkan eksistensi masyarakat dalam berbagai hal. Maka *reader society* atau masyarakat membaca layak segera diwujudkan. Sebab kata Foucault "siapa yang bisa membaca dan mendefinisikan realitas itulah yang akan mampu melahirkan *"episteme social"* yang siap mengatasi konflik sosial kapan saja."

Masyarakat tidak mungkin dapat mendefinisikan realitas sebelum ia memiliki modal (pem)baca(an) yang maksimal, cemerlang dan integral. Bahkan dalam agama (Islam), setiap umat dianjurkan agar selalu melakukan pembacaan (*iqra*) terhadap lalulintas kehidupan sosial yang dihadapi. Inilah paradigma wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Indonesia memang sempat menjadi masyarakat yang "buta huruf" atau "dibutakan" secara politik oleh rezim Orde Baru. Kreatifitas masyarakat dalam berpikir maupun berinisiatif dalam konteks sosial politik senantiasa "dikontrol" oleh pengguna kuasa. Siapa saja yang tampak cerdas menatap dan membaca kecerobohan sistem Orde Baru saat itu lalu memekikkan suara (protes), bersiaplah untuk dieksekusi, diintimidasi dan "diamankan" dalam "rumah besi."

Padahal untuk membuat bangsa ini besar dan kuat, masyarakatnya harus cerdas, cermat, dan loyal membaca pelbagai fenomena sosial yang ada. Tanpa melahirkan masyarakat pembaca yang baik, sangat mustahil kita bisa menciptakan budaya politik dan demokrasi yang empatik. Sebab masyarakat pembaca (*reader society)* adalah cermin ideal masyarakat politik-demokratis yang terdewasakan. Itulah citra masyarakat masa depan (*open society*). Insya Allah!***

3

Golput Itu Fitrah

Golongan putih (golput) dalam pengertian sebagai sikap merupakan fitrah yang telah dianugrahkan Tuhan kepada manusia sejak awal. Golput adalah manifestasi dari eksplorasi dan kreasi demokrasi setiap masyarat yang mesti direspon dengan bijaksana. Golput tidak perlu dikatikan dengan agama, apalagi sampai difatwakan haram dan sebagainya. Ia adalah wujud asasi dari kebebasan setiap individu masyarakat dalam kontruksi berbangsa dan bernegara. Bahkan, untuk definisi yang sederhana, golput merupakan ekspresi positif masyarakat dalam mentransformasi nilai-nilai kemerdekaannya.

Kebebasan adalah hal yang prinsip bagi eksistensi manusia. Siapa saja yang membatasi kebebasan orang lain, kata Sartre, berarti ia telah menciptakan "neraka" atas dirinya. Kebebasan ikan besar adalah kematian bagi ikan-ikan kecil disekelilingnya. Kebebasan bagi elite politik untuk menentukan gajinya sendiri sebesar-besarnya adalah kematian bagi rakyat bawah yang tidak punya sesuatu kecuali doa dan harapan. Artinya, kebebasan memang tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa tergantung pada pengekangan terhadap orang lain.

Namun, kebebasan merupakan potensi hidup yang sangat indah bagi setiap manusia. Maka, siapa yang merampas kebebasan dari setiap manusia tanpa rasionalisasi dan pertimbangan proporsional sejatinya telah mengingkari nilai fitrah ilahiah.

Chris Panggabean dalam artikelnya Menjadi Beradab Dalam Kebebasan (Kompas, 10 Mei 2008) menuliskan bahwa kebebasan bersifat hakiki dan awali bagi setiap manusia. Prinsip kebebasan merupakan jalan bagi kemajuan peradaban kemanusiaan. Bahkan lanjut Chris, tidak ada emansipasi tanpa kedaulatan dan tidak ada kedaulatan tanpa kebebasan. Salah satu kegagalan paradigmatik dalam kultur sosial masyarakat indonesia belakangan ini disebabkan oleh dikikisnya kedaulatan individu mereka dengan program-program politik yang begitu pragmatis dan parsialistik.

Sambil mengacu pada semangat gagasan Isaiah Berlin, Chris juga menuturkan ada dua jenis prinsip kebebasan;kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif sangat terkait dengan prilaku kebebasan manusia tanpa tekanan oleh sesuatu diluar dirinya. Ia tidak peduli pada hak dan eksistensi orang lain ikut tergilas. Sebaliknya kebebasan positif, senantiasa berkaitan dengan tujuan luhur pencapaian maslahat publik meski sifatnya intrapersonal. Artinya, individu diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi dan kreasi diri secara otonom dengan landasan nilai-nilai kolektif.

Proses Penyadaran

Tesis Chris bahwa individu yang bebas adalah individu yang otonom secara moral dan rasio adalah hal yang sungguh benar. Setiap individu otonom. Ia bersahaja dalam menentukan pola dan kreatifitas hidupnya, termasuk untuk menentukan pilihan sikap politik ditengah maraknya pesta demokrasi akhir-akhir ini. Itulah proses ikhtiar mereka yang layak dihormati dan dimafhumi. Artinya, dilihat secara moral, mengharamkan sikap golput bagi sebagian masyarakat adalah kebijakan (policy) yang menggelikan. Sikap semacam itu tak lebih dari adegan humor keagamaan yang arahnya tidak jelas.

Namun, lain Isaiah dan Chris, lain pula Erich Fromm. Menurut Erich Fromm manusia sebenarnya tidak akan pernah bisa lari

dari kebebasan. Meski kebebasan adalah fitrah, bukan berarti ia dapat diwujudkan sesuka hati. Sebagai bagian dari fitrah manusia, ia selalu berkait dengan keberadaan orang lain. Sebab, bagaimana pun, kebebasan merupakan asasi (ke)manusia(an). Fromm ingin menegaskan bahwa tidak semua orang menjadikan kebebasan individualnya sebagai kebutuhan utama dalam menata eksistensi hidupnya.

Karena manusialah pemilik kebebasan rasional, sikap golput mesti ditempatkan dalam ruang dan substansi yang idealnya dengan jernih. Fenomena golput diberbagai pilkada dan menjelang pemilu 2009 sejatinya merupakan proses penyadaran politik bagi elit-elite yang hanya punya kemauan ambisi pragmatis tanpa bekal yang cukup dalam memahami dan merajut amanah politik rakyat. Faktanya, kebanyakan politisi lebih bersemangat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri daripada kebutuhan riil masyarakat. Bukan solusi sosial produktif yang mereka hidangkan, malah friksi dan konflik klasik yang diperjuangkan.

Sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai era Reformasi, harus diakui bahwa semangat politik sebagian masyarakat telah disuguhkan kepada para elit politik bangsa ini tanpa pamrih. Mereka rela mengorbankan air mata, darah, dan nyawa untuk ikut andil menambal sulam rezimitasi kekuasaan. Namun, hingga detik ini pula rakyat bukan mendapatkan insentif politik yang menyejahterakan, melainkan pengguntingan aspirasi dan hak-hak politik mereka yang kian terjauhkan dari semangat humanisme.

Golput bukan semata wujud antipati rakyat yang irasional. Golput bukan hanya pula luapan ketidakpuasan politik publik terhadap pola kerja dan mentalitas elite. Lebih jauh dari semua itu, Golput merupakan menu otokritik politik yang diolah rakyat secara murni demi ikut andil mematangkan prosesi demokrasi bangsa ini. Artinya, masyarakat ingin menunjukan kepada elite bahwa politik tidak identik dengan retorika, poster, stiker, dan media-media propagandis semata, tetapi sangat berkaitan langsung dengan kualitas moral kehambaan seutuhnya.

Kemerdekaan dan Kebebasan

Semangat Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik dalam bentuk pikiran maupun tulisan, bagi rakyat harus ditegakkan sebenar-benarnya. Pasal ini harus menjadi jaminan terhadap dinamika kemerdekaan atau kebebasan publik menentukan struktur politik kebangsaannya. Tanpa semangat seperti itu berarti kita telah pelan pelan memutilasi potensi kreasi demokrasi rakyat yang baru bersemi. Itu adalah tindakan anarkis yang sangat sadis secara moral.

Dinamika golput memang tidak akan menjadi hambatan utama bagi proses politik pemilu 2009. Ia tidak bisa menjadikan ukuran bahwa masyarakat benar-benar tidak menyukai demokrasi. Sampai hari ini pun belum ada aturan legal yang menyatakan bahwa persentase golput bisa otomatis menentukan rakyat sebagai pemenang dan berhak mengambil alih birokrasi politik bangsa ini.

Namun, realita golput tetap harus diapresiasi secara positif dan produktif, terutama sebagai modal meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat demi membeli sistem demokrasi politik yang lebih canggih dan bersahaja yang bisa memenuhi aspirasi publik secara transparan. Sebab, memilih atau tidak memilih, kata Sartre, tetap sebuah pilihan. Itulah fitrah demokrasi, yakni selalu menjamin pengembangan diri setiap manusia. **

4

Kemenangan Itu Amanah

Dalam tradisi politik, kebenaran hakiki memang bukan hal yang sangat diprioritaskan. Politik senantiasa mencari dan mengabadikan keuntungan pragmatis melalui jejaring sosial yang dimilikinya. Wajar saja kalau politik kerapkali berjalan dengan misi dan ambisinya sendiri di segala ranah sosial.

Misi dan ambisinya yang kadang pragmatis itu, disadari atau tidak, telah menjadi salah satu faktor minimnya empati publik terhadap politik. Kurang maksimalnya partisipasi publik di hampir setiap pesta demokrasi politik, sungguh merupakan pembuktian yang tidak bisa diabaikan.

Namun demikian, politik sejatinya masih menjadi salah satu kekuatan sosial yang layak diapresiasi. Ia tetap harus dimaknai secara produktif agar mampu melahirkan kebijakan strategis-implementatif bagi kelangsungan sosial kemasyarakatan. Atau, ia perlu dipompa peran vitalnya dalam pentas sosial sehingga pelan tapi pasti bisa cekatan dalam mengatasi penderitaan publik.

Dialog Politik

Dalam rangka membumikan cita-cita dan janji-janji politiknya semasa kampanye, Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung memerlukan dialog politik rutin dengan publik untuk memaksimalkan kerja-kerja yang lebih strategis. Sebab dialog, seperti disinyalir Paulo Freire (2008: 77), merupakan kebutuhan eksistensial bagi setiap orang maupun lembaga. Dari dan untuk dialog, otokritik sosial akan mengalami transformasi yang indah.

Melalui dialog politik yang aspiratif, ketajaman refleksi dan keutuhan aksi atau tindakan politik Gubernur dan wakil Gubernur ke depan akan mudah mengenai sasaran. Sehingga sejumlah agenda strategis yang belum terealisir di masa sebelumnya dapat dievaluasi dan diwujudkan secara efektif pada waktu yang akan datang.

Dialog politik, masih meminjam istilah Freire, pada ranah tertentu sesungguhnya merupakan suatu laku penciptaan eksistensi sosial yang sangat menakjubkan. Di dalam dialog yang dibangun dari dan atas dasar keutuhan sosial, persentuhan emosi dan pertukaran rasa kebersamaan secara politik akan menemukan wujudnya dengan baik.

Dialog politik menyediakan bangunan interaksi yang cukup efektif antara Gubernur dengan konstituen yang selama ini ikut memberikan legitimasi politik. Melalui dialog politik ini juga gagasan dan persepsi masyarakat mengenai percepatan kemajuan Bangka Belitung akan terakomodir dengan nyaman.

Bahkan pada dimensi yang sangat spiritualis, meneruskan istilah tradisi Buddhisme, dialog merupakan senjata perdamaian dalam mentransformasikan nilai-nilai dan misi-misi luhur politik di hadapan publik. Artinya, melalui dialog yang jernih dan integralistik itu politik akan terjauhkan dari kecaman sebagai sumber friksi dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Sementara jika dialog politik ini dipilih sebagai metode berhubungan antara kawan dan musuh politik, maka akan ada harapan kita dapat mengenal dan memahami mereka lebih baik. Dan karena perspektif demikian, jalan untuk saling merangkul, menghargai, mendukung, dan membesarkan secara politik akan menjadi napas bersama bagi masyarakat Bangka Belitung.

Teknik atau Seni

Konon, pada era Yunani klasik, kata *politike* itu senantiasa disandingkan dengan kata *techne*, yang berarti teknik atau seni. Maksudnya, politik itu adalah seni atau teknik untuk mengelola berbagai aspirasi dan kebutuhan sosial negara dalam rangka melangsungkan kehidupan masyarakat. Atau, dalam bahasa yang lain, politik diartikan seni lantaran ia merupakan seni mengelola suatu kemungkinan menjadi efektif, posibilitas menjadi realitas.

Dalam pandangan Otto von Bismak, seperti diurai oleh Isidorus Lilijawa (2010: 279), politik merupakan kepandaian membuat pilihan dan memenangkan suatu pilihan dari sedemikian kemungkinan untuk mencapai suatu perjuangan. Sebab dalam politik tak pernah ada kepastian selain kemungkinan-kemungkinan yang telah dibayangkan oleh kaum politikus itu sendiri.

Politik itu dianggap seni, masih menurut Lilijawa, lantaran di dalamnya terdapat kolaborasi berbagai hal, seperti kecerdasaan, keterampilan, kepandaian dan lain-lain yang senantiasa diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang "tidak mungkin" menjadi "mungkin". Atau sebaliknya, membuat yang "mungkin" menjadi "tidak mungkin" atau "dikaburkan" sama sekali.

Politik dimaknai seni juga karena di dalamnya selalu ada kalkulasi yang non-matematis dan tidak kaku. Kalkulasi dalam politik senantiasa mengedepankan perebutan pragmatis sebagai pemenang dalam pertarungan atau kekalahan yang akan menyakitkan. Inilah yang melatari kalau politik itu tidak pernah konsisten, tertutama dalam konteks memosisikan kawan dan lawan.

Sebagai seni, politik memiliki kemiripan semangat dengan sepakbola. Tak berlebihan bilamana kita merenungkan kembali ungkapan mantan Presiden Barcelona, Joan Laporta, bahwa "dalam sepakbola, kami memilih filsafat, dan bukan citra". Maka kerja-kerja Gubernur pun harus tulus, filosofis dan integralistik, bukan semata berada dalam kisaran pencitraan sosial.

Dalam sepak bola juga muncul falsafah *build in regulation*; satu dari dan untuk semua. Kalau falsafah ini diinternalisasi kedalam dunia politik, mungkin tidak akan banyak friksi dan konflik politik yang merusak harmonisasi kehidupan sosial publik. Sebab falsafah seperti

ini senantiasa menekankan pentingnya produktifitas dan kolektifitas dalam berbagai tindakan suatu kelompok.

Semangat filosofi kolektifitas ini, seakan menguatkan apa yang telah ditulis oleh Paul Cartledge. Politik, kata Paul C., dalam pengertiannya yang paling kuat bukan sekadar menyangkut institusionalisasi kepentingan seseorang atau kelompok, melainkan jalur untuk membuat keputusan komunal-substansial yang dibangun dari dan untuk kemaslahatan konstituen.

Ala kulli hal, Gubernur kali ini harus membuka diri lebih elegan dalam memaknai dan merealisasikan program-program sosial menyangkut masa depan masyarakat Bangka Belitung. Sebab disamping wujud aktual dari kejelian strategi, kemenangan politik itu sesungguhnya merupakan pergumulan keringat sekaligus amanah dari konstituen, dan bukan sekadar "hadiah manis" dari langit. ***

5

Upah Demokrasi

Berita kematian anggota masyarakat menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu legislatif 2009. Contohnya adalah A Resyad(62), ketua tempat pemungutan suara IV, Selindung Lama, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dan Mario Bale Mema (46) anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS III Kelurahan Kambajawa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Ditempat lain, anggota KPPS di TPS 8 Cikandung Barat I, Rengas Dengklok, Karawang, Idas Rosadi(57), juga meninggal diduga karena defresi dan kelelahan seusai menghitung suara. Bahkan A Suhenda, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Lembursitu, Sukabumi, meninggal saat melakukan rekapitulasi suara.

Apa yang dialami Resyad, Mario, Idas, dan Suhenda tampak hanya dilihat seperti sebutir debu yang melintas didepan mata. Nilai berita kematian mereka kalah berharga dengan kesibukan elite politik yang sedang menjajaki koalisi menatap pemilu presiden mendatang. Fenomena ini bisa dijadikan indikasi bahwa demokrasi kita masih antirasa dan tidak empatik.

Ketika nilai-nilai empatik tidak ditumbuh kembangkan dalam tradisi demokrasi dengan baik, pesta politik apapun akan senantiasa menjadi virus bagi mental kehidupan bernegara. Bahkan demokrasi yang dijauhkan dari nilai-nilai empatik tidak akan memiliki kepekaan yang baik pula terhadap semangat kolektivitas dan solidaritas politik secara integral.

Esensi Demokrasi

Meniru bahasa Ignas Kleden, pada prinsipnya esensi demokrasi adalah menjamin terjadinya pertukaran nilai-nilai dan kepentingan dari kelompok masyarakat. Sebab, salah satu fungsi demokrasi bagi negara ialah memberikan insentif politik (kekuasaan). Artinya, semakin negara itu tanggap dan aspiratif terhadap kebutuhan mendasar publik bertambah kuat pula kepercayaan rakyat dan negara.

Sebagai sistem politik, demokrasi merupakan realisasi objektif bagi kekuasaan yang berpijak dari kesadaran dan cita-cita rakyat seutuhnya. Pengausa dan elite politik sejatinya hanya merupakan agen sosial yang sedang diamanahi rakyat agar bisa memandu dan mendistribusikan kekuasaan secara baik dan benar guna menjamin kebajikan publik.

Demokrasi bukan sebatas media pengolahan pragmatisme politik elite partai dan legislator. Demokrasi juga bukan semata alat peraga untuk mementaskan citra-citra parsialistik dari komunitas politik tertentu. Akan tetapi, dari makna yang paling tinggi demokrasi merupakan mesin humanisme yang diciptakan untuk mengolah nilai-nilai moral yang mampu melahirkan upah sosial yang layak dan adil bagi kehidupan publik.

Dalam konteks upah ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan melalui sabdanya, "Berikanlah upah kepada setiap pekerja itu sebelum keringat mereka mengucur". Tak terkecuali Resyad, Mario, Idas, dan Suhenda. Sekadar contoh, mereka adalah pekerja atau bahkan sukarelawan yang mesti dipahami secara rasional dan proporsional.

Demi menumbuh kembangkan budaya demokrasi yang lebih aspiratif dan humanistik, tidak berlebihan bila elite partai politik dan pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, sesegera mungkin, memproses jaminan sosial yang layak bagi setiap individu

yang dilibatkan sebagai pelaksana pemilu. Hal ini semata bukan untuk memberikan semangat dalam cara mereka bekerja, melainkan juga meminimalisasi terjadinya "perdagangan" suara di tingkat PPK ataupun kelurahan.

Sebagaimana pengalaman pada beberapa pemilihan kepala daerah atau pemilu yang lalu, kecurangan atau penggelembungan suara rata-rata dirangsang Oleh faktor kelelahan panitia pemungutan suara, baik dalam wilayah kelurahan maupun kecamatan. Sebab, disamping kurang terlatih, saksi yang direkrut parpol juga tidak sepenuhnya mengawal hasil pencontrengan dan rekapitulasi suara sampai ke KPU tingkat kota,provinsi,apalagi pusat.

Mendidik Elite

Diluar itu, demokrasi bukan hanya untuk mendidik pemilih atau pencontreng. Ia mesti diorientasikan lebih optimal dalam mendidik elite dan parpol agar tidak lagi hanya menjadikan konstituen sebagai "santapan" sesaat begitu menghadapi pemilu. Sebab, demokrasi pada dasarnya merupaka media pendidikan politik terbaik bagi sosial kewarganegaraan secara makro.

Artinya, para elite parpol harus memposisikan konstituen sebagai mitra politik strategis, bukan objek politik taktis yang mesti dihegemoni dengan janji-janji. Para elite politik juga tidak boleh membius emosi konstituen dengan "bingkisan" politik yang mengandung kesenangan jangka pendek. Bahkan setiap parpol sejak dini harus mulai memikirkan bagaimana solusi jitu mengelola aneka potensi konstituen sebagai pemilih layaknya basis politik yang berkarakter.

Bagaimanapun, pada tahap nilai dan kualitas, pemilih dan pencontreng itu berbeda. Pemilih sejati adalah mereka yang menjatuhkan pilihan pada pembacaan dan penalaran yang rasional atas setiap parpol dengan segala visi dan sumber dayanya. Adapun kaum pencontreng sering kali tergiur dengan retorika dan propaganda politik partai semata. Bahkan tidak jarang kaum pencontreng itu hanya melihat figur dan popularitas elite partai tanpa menimbang latar sosialnya.

Padahal, melalui demokrasi diharapkan mekanisme

kelembagaan politik dapat terwujud dengan rasional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan nilai-nilai demokrasi pula setiap kebijakan yang diolah diparlement didambakan agar betul-betul memiliki keberpihakan yang riil dan terarah pada publik. Ketika elite parlemen kemarin lebih mudah menaikkan gajinya sendiri ketimbang menambahkan upah buruh, hal itu bisa dijadikan pembelajaran berharga dalam budaya demokrasi kita.

Upah demokrasi harus menjadi bagian paling prinsip dalam setiap kebijakan politik elite. Pasalnya, pencontreng, pemilih, dan petugas pemungutan suara ditingkat kelurahan dan kecamatan hanya bisa menikmati upah demokrasi saat pemilu berlangsung, baik berupa cenderamata maupun uang yang tidak seberapa. Adapun elite politik dan penguasa bisa "mengunyah" upah demokrasi itu minimal selama satu periode jabatannya melalui proyek tertentu, sidang komisi, uang reses, uang kunjungan kerja,gaji pokok dan tunjangan sosial lain.

Karena pengorbanan Resyad,Mario, idas, dan Suhenda bukan semata keringat, melainkan nyawa, upah demokrasi mereka tentu adalah Surga. Amin.***

6

Perilaku Penyelenggara Pemilu

Perilaku PUD Pangkalpinang dalam penetapan calon walikota dan calon wakil wali kota pada pemilukada pada tanggal 26 Juni 2013 mendatang, meminjam Istilah Erich Fromm, sungguh telah menghadirkan gejala-gelaja krisis Psiko-Demokrasi yang sama sekali kurang menyehatkan bagi transformasi nilai-nilai luhur politik.

Bahwa PU mempunyai hak dan keputusan tersendiri tentang penetapan pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota Pangkalpinang 2013-2018, itu sudah tidak bisa dimungkiri. Sebab secara formal, kehadiran, keberadaan, dan lokus kerja sosial KPU memang telah diatur oleh Undang-Undang yang ada di negeri ini.

Namun demikian, KPU tidak boleh jalan seenaknya "rasa Internalitasnya"tanpa melihat, mencermati, dan memaknai dinamika ekternal yang juga menjadi bagian dari proses dan masa depan demokrasi itu sendiri. Fakta dipecatnya tiga dari lima komisioner KPUD Pangkalpinang seharusnya menjadi pembelajaran cukup berarti bagi dua komisioner lain yang telah mendapat "teguran" dalam menjalankan tugas dan pengambilan kebijakan institusional.

Marwah Demokrasi

Secara eksistensial, terbentuknya KPU merupakan bagian dari komitmen kita sebagai bangsa untuk terus menjaga dan mengawal marwah demokrasi, yakni memposisikan setiap individu-individu masyarakat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai rasa, pikiran dan hati serta corak kreasi sosio-politiknya sendiri. Karena disamping termasuk binatang berakal, manusia sejatinya adalah makhluk politik yang lihai dan tangkas.

Spirit lain marwah demokrasi menguatkan jalur aktualisasi dari sikap-sikap politik yang santun dan mampu memberikan ruang kepada setiap masyarakat untuk memerah perbedaan sosial sebagai "hikmah" dan bukan pendorong "tsunami" politik, tak terkecuali pasca pemilukada, misalnya, dan kalau paradigma marwah demokrasi ini diabaikan oleh KPU, maka rakyat hanya akan diartikan semata konstituen politik yang mudah diarak-arak berdasarkan kebijakan-kebijakan parsial dan jauh dari yang dikategorikan profesional.

KPU merupakan simbol utama kehidupan demokrasi. Dan amanah terpenting bagi setiap pelaku demokrasi, tidak terkecuali komisioner KPU, adalah menegakkan independensi, profesionalitas,akuntabilitas dan integritasnya dimata publik sejujur-jujurnya. Sekali abai terhadap beberapa amanah dimaksud, sangat tidak mungkin komisioner KPU mampu mewujudkan kultur demokrasi yang berbasis keadilan dan humanitas.

Manakala KPU tidak lagi profesional dan independen, keberadaannya tentu akan mempertebal friksi, konflik, dan perjudian politik disetiap momentum pesta demokrasi bagi rakyat. Dan ini bukan sekedar menjadi preseden buruk terhadap masa depan demokrasi kebangsaan, melainkan juga akan melahirkan patologi politik dan terus menguburkan aspirasi maupun kehendak rakyat dalam skala makro.

Padahal menurut Erich Fromm sambil mengutip Schumpeter, sistem demokrasi sejatinya adalah susunan institusional dalam rangka mencapai keputusan politis yang sangat luhur dan adil. Sehingga rakyat mendapat haknya dengan baik, dan perjuangan kompetitif dalam proses demokrasi benar-benar menjadi fakta sosial yang menghangatkan, bukan merusak sendi-sendi keharmonisan publik.

KPU itu Mediator

Disisi lain, KPU itu mediator bagi kelangsungan seluruh proses dan pelaksanaan demokrasi ditengah-tengah kehidupan publik. Dengan mediasi dan mewujudkan kompetisi politik yang jujur, sehat dan mengedepankan rasionalitas, dapat dikatakan bahwa KPU bukan saja merawat marwah demokrasi, melainkan benar-benar telah merealisasikan peran dan fungsinya sebagai penyelengara sekaligus wasit handal dalam pemilihan umum (politik) berbangsa dan bernegara.

Salah satu kerja mediator yang baik adalah berlaku objektif dan adil dalam memveripikasi administrasi dan dukungan terhadap pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota yang hendak berpartisipasi dalam pesta pemilukada mendatang. Bukan sebaliknya, tergiur dengan tarikan-tarikan kepentingan-kepentingan sempit yang menguasai situasi kerja dan psikologi sosialnya.

Dengan demikian, sebagai mediator sudah selayaknya KPU memperhatikan hal berikut. Pertama, istiqomah dalam menegakkan rasionalitas dan kebenaran fakta-fakta demokrasi. Menganulir salah satu pasangan calon yang jelas-jelas secara administratif sudah dinyatakan tidak keliru oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dan PTUN, meruapak kecerobohan dan mencederai marwah (ber)demokrasi.

Konsekuensi logisnya, KPU bukan semata mengubur hak politik salah satu pasangan, melainkan sedikit teledor sedang menyiapkan sendiri "genderang konflik" yang tidak mudah dimasa yang akan datang. Padahal pelaksanaan pemilukada ini memiliki keterkaitan yang cukup serius dengan elemen-elemen masyarakat dan juga modal sosial rakyat pada umumnya.

Biaya pemilukada yang katanya berkisar 13.5 Miliar untuk 2 putaran, sungguh bukan ongkos sosial yang murah dimata rakyat. Kita tidak ingin mengatakan fenomena ini merupakan penghamburan kekayaan negara. Akan tetapi anak-anak putus sekolah, fakir miskin, dan pengangguran, dari berbagai kelasnya senantiasa membelalakan mata kita melalui media cetak dan elektronik, adalah benar-benar realitas sosial yang tidak dapat kita abaikan. Dan tentu sangat kurang etis kalau pesta politik yang "pragmatis" ini terus menghabiskan

kekayaan rakyat.

Kedua, KPU seharusnya tidak larut dalam perbenturan mesin-mesin kepentingan dan perjudian politik dengan beraneka bentuknya, baik itu bersentuhan langsung dengan terhadap proyek kecil maupun yang terbesar dipangkalpinang Ini. Dan meskipun berbagai tekanan yang terus memberondong, seyogyanya komisioner KPU tetap tangguh. Sebab disinilah independensi dan profesionalitas KPU sesungguhnya diuji. Matang dan dewasa menghadapi tekanan yang terlampau politis-pragmatis, berarti KPU betul-betul siaga mengawal marwah demokrasi.

Ketiga, sepatutnya KPU mencegah suburnya friksi dan konflik berdemokrasi dipangkalpinang ini sedini mungkin. Dan sangat tidak dibenarkan ketika KPU seakan-akan hanya bertengkar diatas kontruksi apologi-parsialistiknya dalam memposisikan setiap pasangan calon walikota dan calon wakil walikota. Sebab, sekali lagi, KPU itu mediator ia tidak boleh diktator dan terasuki watak manipulator.

Keempat, KPU dengan komisioner didalamnya tidak boleh dilematis dalam menegakan demokrasi. Karena sebagai mediator KPU sebaiknya senantiasa berpijak terhadap kemaslahatan publik (pemilih), bukan hanya bersandar pada bisikan sekerumunan penangguk politik yang berpikiran picik.

Walhasil, memberikan kesempatan kepada semua pasangan yang sesuai jalur dan perspektif demokrasi dan hukum, adalah sikap terpuji dan realistis. Akan tetapi membatasi dan membunuh karakter pasangan terlalu dini, hanya akan membuat KPU akan kehilangan Gigi dikemudian hari.

7

Pilkada (Untuk) Rakyat

Dunia politik belakangan memang kian terbuka. Kontrol sosial masyarakat terhadap praktik politik baik di legislatif maupun eksekutif diakui atau tidak telah ikut memberikan warna tersendiri.

Politikus tampak mulai awas dan menunjukkan komitmen sosialnya meski masih jauh dari yang disebut sepenuh hati. Akan tetapi, inilah proses yang mesti diapresiasi secara proporsional oleh seluruh elemen masyarakat.

Politik bukan lagi bagian propaganda dan cita-cita sosial kaum elit semata. Politik kini telah lebur dalam tarikan napas masyarakat di berbagai kelasnya. Maka tak ada pesta politik seperti pilkada, pemilu legislatif, dan pilpres yang tidak pernah disambut riang gembira oleh masyarakat, terutama elit partai, birokrat, dan mereka yang mulai merasakan sentuhan lain dari keuntungan (praktis) politik.

Namun demikian, politik pun mengalami dinamika rasionalitasnya sendiri. Ia tumbuh dan berkembang disertai dengan letupan-letupan dramatikal dari dan oleh masyarakat yang cukup menakjubkan. Politik, dalam istilah pengamat belakangan ini,

merupakan "gaya hidup" yang kian khas bagi manusia modern. Tanpa politik dengan aneka asesoris di dalamnya, struktur kehidupan sosial masyarakat seakan kehilangan daya tarik.

Rasionalitas Politik

Sebagai budaya sosial yang lebih praktis, tentu saja politik mempunyai tuntutan-tuntutan pragmatis yang tidak bisa diabaikan. Terlebih ketika menyangkut kekuasaan, gairah politik benar-benar menjadi tontonan publik yang bukan saja menggiurkan, melainkan juga membuat mata batin sebagian manusia tampak "lembab."

Pragmatisme dalam politik mesti ditafsir secara rasional dan proporsional. Sebab politik, meniru istilah Al Kindi, tidak sekadar berdimensi duniawi, melainkan juga sangat berkaitan dengan konstruksi amar ukhrawi. Maka kelangsungan politik di hadapan publik akan bergantung pada kesadaran dan sikap dari pada pelaku-pelaku di dalamnya.

Politik yang dibangun dari kesadaran pemikiran dan perilaku yang rasional, akan terus menjadi magnet tersendiri bagi proses pematangan sosio-kehidupan manusia. Meskipun dapat menimbulkan friksi dan konflik sosial di mata rakyat, politik berbasis rasionalitas ini dipastikan mampu memberikan terobosan strategis.

Bahkan, ada yang mengatakan bahwa politik sejatinya merupakan media paling efektif bagi proses humanisasi kekuasaan selama dapat dikontrol dan dimaksimalkan demi kemaslahatan publik. Dan karena sering identik dengan berbagai manipulasi pragmatis, politik benar-benar wajib dikawal dan diarahkan.

Maka dari itu, politik harus dibangun dari dan untuk menegakkan rasionalitasnya yang terbaik. Sebab, meminjam istilah Isidorus Lilijawa, politik itu lebih banyak bergerak di bawah payung hukum dan dasar-dasar argumentatif. Tak heran kalau politik sering kali mempersempit ruang gerak irasionalitas tapi mampu menyingkap hal-hal terselubung.

Salah satu bagian dari rasionalitas politik adalah bahwa politik bukan semata "alat mainan" untuk mencapai kekuasaan dalam struktur sosial tertentu. Politik itu seni untuk mengolah dan menjabarkan akumulasi aspirasi rakyat. Dari dan melalui politik,

seharusnya kehidupan rakyat terarah dengan baik. Bukan saja mereka tidak boleh sengsara, melainkan harus mampu mentransformasikan hidup yang penuh senyum dan kedamaian, bukan hidup berbantal friksi atau konflik yang tidak karuan.

Rasionalitas lain dari politik adalah, ia tidak boleh memproduk suatu kebijakan yang lepas dari pertimbangan etik kemanusiaan dalam skala makro. Ia harus produktif dan prospektif dalam menata struktur sosial masyarakat. Artinya, sebisa mungkin, kebijakan-kebijakan yang dibuat secara politik mesti dijauhkan dari tendensi-tendensi konspiratif-parsialistik.

Disadari atau tidak, otokritik yang diberikan publik terhadap partai politik akhir-akhir ini sesungguhnya tidak terlepas dari cara dan kinerja parpol dalam mengolah aspirasi rakyat yang kian utopis. Sebagian besar (elit) parpol ketika mengalami prahara politik internal semisal korupsi, kasus a-moral, dan sejenisnya, sangat terlihat emosional dan kehilangan acuan rasionalitas dalam berpolitik.

Akibatnya, tak jarang elit parpol itu gampang menjustifikasi bahwa ada kepentingan eksternal yang sedang mengobok-obok partainya. Ada yang cepat tersinggung, lalu segera melempar isu pada komunitas lain. Bahkan ada juga yang menghujat-hujat KPK dan tidak mau mengakui sosok (koruptor) yang pernah memiliki jasa besar terhadap eksistensi partainya. Inilah bukti kalau rasionalitas politik diabaikan, yang terjadi adalah perilaku politik yang kekanak-kanakan sekaligus terlampau hedonis.

Legitimasi Publik

Rasionalitas politik, di sisi lain harus dikuatkan dengan legitimasi publik, baik menyangkut prosedural politik maupun dalam pengambilan kebijakan strategis secara politik. Tanpa legitimasi publik, realitas politik dengan berbagai semangatnya hanya akan menjadi "hiasan retoris" dalam pentas demokrasi. Tampak nyata tapi sia-sia.

Dalam rangka mengaktualkan legitimasi publik itu, maka seluruh pesta politik, mulai dari pilkada hingga pilpres, sejak dari proses administrasi sampai penetapan secara politik, harus benar-benar berangkat dari kemauan rakyat dan bukan drama retorik dari

segelintir elit, pemilik uang, atau pun para "penangguk" demokrasi.

Dipecatnya beberapa komisioner KPU Pangkalpinang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran kurang jernih dalam verifikasi administratif, misalnya, merupakan salah satu bukti hilangnya rasionalitas (ber)politik. Sekelas komisioner penyelenggara pemilu yang semestinya telah teruji integritas dan kredibilitasnya, nyata-nyata mengalami disorientasi dan menjeburkan diri ke dalam pusaran pragmatisme politik semata.

Ketika proses administrasi politik mulai dicampuradukkan dengan kepentingan-kepentingan yang sempit dan parsial, tentu saja kualitas demokrasi kita akan berada dalam igauan, tidak menjadi fakta sosial. Ini sangat mengkhawatirkan. Tidak lagi mendidik, melainkan telah mengerdilkan legitimasi publik.

Bahwa politik memiliki iramanya sendiri, sudah termafhumi. Akan tetapi, politik pun perlu terus membangun kemandirian rakyat, tak dapat dimungkiri. Sebab dunia politik merupakan dunia rakyat. Dunia politik bukan semata milik elit partai dan calon eksekutif, akan tetapi juga kepunyaan rakyat. Maka dalam filsafat politik dikenal dengan istilah "suara rakyat adalah suara Tuhan."

Agar legitimasi publik menjadi fakta rasional dalam perspektif politik, maka pesta demokrasi seperti pilwako Pangkalpinang ke depan, seyogianya ditata dan dikelola berdasarkan cita-cita dan pilihan rakyat seutuhnya. Rakyat perlu kemandirian. Tidak boleh digiring-giring, terus ditekan dan dihegemoni. Mereka itu sama dengan kita, punya harapan dan juga penilaian sembari berpijak terhadap logika sosialnya masing-masing.

Para elit, pemilik uang, dan "pemain politik," sebaiknya tidak merecoki proses menuju pencoblosan dan penghitungan suara. Biarkan rakyat memilih dengan kekuatan nurani dan kesadaran politiknya. Rakyat mulai dewasa, dan kian jernih dalam memilah. Maka pilkada (untuk) rakyat, adalah pilkada yang menghargai, melibatkan, dan menjadikan rakyat sebagai pelaku dan penentu, bukan diposisikan seperti domba-domba politik yang mudah disembelih sesuai kepentingan sekawanan "borjuis." ***

8

Hindari Perilaku Politik Adu Jotos dan Saling Teror

Partai Politik Bebasis Agama (Islam) diprediksi bakal mengalami penurunan suara cukup mengkhawatirkan pada pemilu 2014. Hal ini pula yang mendasari dipercepatnya Mukhtamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan berlangsung mei 2011.

Meskipun tidak (terlalu) berlebihan, terutama untuk internal PPP, alasan itu memang faktual kalau dikaitkan dengan raihan suara PPP yang terus menurun, sejak pemilu1999, 2004, dan 2009. Secara ekternal, penurunan ini bisa diakibatkan banyak partai islam lain yang menjadi kompetitor PPP dengan wajah dan visi politik yang lebih inovatif –realistik, seperti PKS, PAN, dan PKB.

Secara internal, mestinya disadari bahwa tarian politik PPP sudah kehilangan sentuhan dan kharismanya. Selain secara kelembagaan, krisis pendidikan politik kekaderan pun merupakan bagian yang tidak bisa disangkal. Walaupun masih ada kader PPP yang sukses diwilayah politik parlemen dan eksekutif (ketua DPRD dan Bupati), tetapi volumenya tidak seberapa dan kurang mewarnai konstelasi politik secara nasional.

Kekisruhan politik internal PPP kota Bandung dan daerah-daerah lain dijawa barat beberapa waktu yang lalu, misalnya, seakan menegaskan, Partai yang berbasis agama (islam) ternyata tidak selalu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan partai-partai yang sama sekali yang melepaskan dirinya dari kontruksi keislaman. Bahkan, tampak kader-kader partai yang berlambangkan kabah, khususnya di kota Bandung ini bukan saja kurang dewasa dalam berpolitik, melainkan tidak memiliki etos politik yang bagus ketika berkonflik secara internal. Perilaku politik yang memakai pendekatan secar emotional, adu jotos melalui otot semata, dan bahkan saling "teror" diantara kader jelas bukan bagian dari budaya politik agama islam yang luhur dan jernih. Sebaliknya, disamping bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi politik yang sebenarnya juga melenceng dari semangat ajaran alquran "bermusyawarahlah dalam seluruh persoalan sosial kehidupan kamu" (QS. Al- Syura:42:38).

Politik PPP

Sebagai partai umat yang cukup "berumur" yakni lahir pada 1973, perjuangan politik PPP tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip idealnya. Salah sat prinsip tersebut bahwa segala hasrat, cita-cita, dan tarian politik PPP senantiasa didasarkan pada seruan Allah SWT. Dalam alquran bahwasanya setiap makhluk yang diciptakan dimuka bumi tidak lain kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaNya.

Dengan prinsip peribadahannya ini, kejuangan politik PPP sejatinya tidak bisa dilepaskan dari komitmen berdakwah guna menyebarluaskan kebajikan-kebajikan ilahiah demi menstrans-formasikan kemaslahatan bagi seluruh tananan kehidupan publik. Dalam pengertian yang sederhana, sekeras-kerasnya dinamika politik internal dan eksternal kepartaian, selayaknya dimaknai oleh setiap kader dan elite PPP sebagi proses penguatan iman kepada-Nya.

Paradigma politik semacam ini kalau dicermati dan diinternalisasi sebaik mungkin akan menuntun siapa saja yang menjadi kader dan elit (struktural) PPP segera menyadari bahwa kekuasaan dan kedigjayaan politik yang dimiliki merupakan amanah dari Allah SWT. Karena amanah maka seluruh proses ataupun kebijakan politik tidak akan disalahartikan serta disalah gunakan kearah yang tidak

prospektif dalam kontek keumatan.

Di luar itu, sebagai partai yang (masih) menaruh harapan politik kepada konstituen beragama islam, sepantasnya PPP memeragakan dan menancapkan perilaku etis dalam berbagai aktivitas politiknya, baik dilingkungan parlemen, eksekutif, maupun dikehidupan sosial publik pada umumnya. Sebab semangat ideal agama islam, seperti yang diteladankan kanjeng Nabi Muhammad Saw, adalah memapah kesantunan, persaudaraan, dan keluhuran akhlak (al akhlaq al karimah) dalam semua dimensi kehidupan bermasyarakat.

Kematangan politik PPP secara kelembagaan dan kekaderan pun, terutama saat menelaah sekaligus mengolah konflik politik internal ataupun eksternal, akan selalu menajdi cermin rujukan umat dalam mengapresiasi dan menempelkan empati politiknya. Selain masyarakat indonesia sudah kian terbuka dan rasional dalam melihat percaturan politik keagamaan pada saat yang sama, PPP sendiri mesti berlomba dengan partai keadilan sejahtera (PKS)yang kini mulai mapan dengan berbagai jargon politik islaminya.

Politik Islami

Menghadapi tantangan keterbukaan politik dan perkembangan demokrasi yang kadang (agak) melenceng dari norma-norma islam, tarian politik PPP mesti tampil lebih energik-inovatif dan digjaya dihadapan umat. PPP harus benar-benar tangguh menjadi penggagas dan pengampu politik berbasis norma-norma islam dengan tetap tidak mereduksi semangat pluralitasnya. Sebab agama islam adalah agama yang fitrahnya rahmat bagi seluruh alam.

Islam tidak mengharamkan politik akan tetapi, islam juga tidak dengan tidak mudah melegalkan praktik-praktik politik yang tidak sealur dengan esensi keislaman itu sendiri. Singkatnya, islam tidak membenarkan perilaku apapun yang hanya memolitisasi semangat keislaman dalam konteks politik kekuasaan tanpa menyentuh urusan riil tentang keumatan yang lebih bijak dan moderat (*umatan wasathan*). Apapun politik bercorak islami adalah politik yang berpijak pada semangat nilai *akhlakul karimah* atau *akhlakul ubudiyyah,* yakni acuan perilaku yang mampu mencerahkan dan mendamaikan pola sosial kehambaan serta kemanusiaan tanpa sedikit pun dicampuri

sentimentalitas berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Sebab, islam sebagai agama semangat dan nilainya tidak saja untuk umat islam melainkan bagi siapa saja makhluk Allah yang ada dimuka bumi.

Demikianlah akhlak atau etika politik yang sejalan dengan orientasi nilai-nilai dalam islam. Sementara akhlak tau etika politik diperlukan karena semata mengaitkan perilaku politik dengan sangsi neraka dengan kebahagiaan surgawi, seperti yang marak didengungkan dalam tradisi agama. Lebih dari itu agar tidak terjadi pendangkalan politik atau pemaknaan parsialistik-pargmatis terhadap politik sebagai bagian dari seni kehidupan. Bahkan, dengan berpegang pada akhlak politik yang luhur, partai-partai berbasis agama akan semakin memantapkan esensi dan fungsi politiknya pada skala yang lebih makro. Adapun fungsionalisasi politik secara kelembagaan ataupun nilai akan berjalan dengan baik. Meniru istilah A Chozin Chumaidy (wakil ketua umum DPP PPP), kalau bermuara pada tiga dimensi yakni *al-amanah, al mas'uliyyah, dan al-ukhuwwah*. Dengan semangat *al amanah* pergunjingan politik seperti apapun akan tetap diarahkan demi menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah SWT. Dengan demikian kejujuran, kesantunan dan kepatutan akan terus mewarnai dinamika politik dengan elastisitasnya.

Melalui semangat *mas'uliyyah*, perjuangan politik tidak akan dibelokan sedikit pun kearah yang bukan saja kurang aspiratif, melainkan tidak terpuji. Berangkat dari dimensi ini, politik akan terus akan mendahulukan aspirasi dan menegakkan komitmen akuntabilitas keumatan (kepublikan) yang rasional dan produktif. Dengan demikian, politik kotor saling sikut yang secara tidak proporsional, saling membusukkan, saling adu kekerasan, atau perilaku -perilaku politik yang sama sekali tidak terpuji akan terjauhkan dengan sendirinya.

Akhirnya, dengan semangat *al-ukhuwah* yang tinggi dan berkualitas, politik akan menjadi media efektif dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam kebersamaan ataupun dalam mengelola berbagai perbedaan. Bahkan politik bernuansa *ukhuwah* ini tidak akan memperuncing konflik politik dalam bermacam nuansanya. Dia akan terus menjadi "jimat"ampuh yang bisa mempersatukan publik sebagai konstituen seutuhnya.

9

Ketakutan (Dalam) Politik

Hidup manusia tidak selamanya sukses dan bahagia. Ia kadang bergelut diantara berbagai kecemasan dan ketakutan. Seperti kata Heidegger, kecemasan dan ketakutan adalah sebagai konsekuensi kehadiran manusia dialam semesta. Seberani apapun manusia, ia tetap tidak akan bisa melepaskan diri dari kecemasan dan ketakutan akan beberapa hal di dunia ini.

Namun demikian, kecemasan dan ketakutan yang diolah secara maksimal penuh kearifan, akan mengantarkan manusia mendapatkan jalur eksistensinya. Ia bisa bangkit dengan sangat progresif dan konstruktif. Ia akan senantiasa waspada dalam segala ruang, dan tidak akan pernah menjadi pecundang ketika melintasi perhelatan kehidupan bermasyarakat.

Sebaliknya, bila kecemasan dan ketakutan tidak diorganisir dengan bijak, ia akan membuat setiap individu terus berada dalam kegamangan dan kegelisahan. Dan yang muncul pastilah gampang terinfeksi virus iri hati dan antipati terhadap berbagai hal. Bahkan, rasa ketakutan yang dikembangkan menjadi watak, terutama dalam dunia politik, tidak bisa lagi diharapkan untuk melahirkan regenerasi politik yang tercerahkan.

Watak Penakut

Rasa atau watak penakut, sedikitnya akan memunculkan dua hal. Pertama, menjauhkan setiap masyarakat dari nilai-nilai ideal kemanusiaan. Mereka akan mengalami krisis jati diri, cepat tersinggung. Sensitif dan mudah takabbur kalau berada dalam keberuntungan. Dan tidak jarang kehilangan arah manakala berbenturan dengan gesekan-gesekan sosial lain. Akibatnya, meminjam ajaran Buddha mereka sering lepas kendali dari perilaku-perilaku kepatutan.

Adapun masyarakat yang terbiasa hidup dengan prinsip kepatutan, tentu saja mereka akan mudah terjebak pencitraan dalam menata eksistensinya. Mereka abai terhadap hal-hal yang sangat mendasar bagi kemaslahatan publik. Citra diri lebih diutamakan ketimbang akuntabilitas sosialnya. Pilihan-pilihan hidupnya selalu saja semu karena bergantung pada pemolesan citra, dan bukan pada pemilihan realistik yang diberangkatkan dari aspirasi atau kebutuhan primer publik secara utuh.

Kedua, watak penakut itu sulit memapah pribadi menjadi sosok kesatria. Ia akan melahirkan pribadi-pribadi yang letoy,lemah, kurang teguh pendirian dan tidak berkarakter. Ia akan terus mengangkangi praktik sosial pribadi setiap masyarakat dalam keambiguan, yang sering kali ketakutan mengambil resiko dari berbagai dinamika hidupnya.

Dampak lain dari masyarakat berwatak penakut, mereka kadang lalai mengelola hati nuraninya sendiri yang dijadikan kompas hidup adalah egoisme sosialnya. Ia akan mudah terjebak pada pusaran hipokritas. Dengan demikian meniru istilah Paus Yohanes Paulus II mereka kehilangan pusat dalam dirinya.

Bahkan, lanjut Paus, pribadi masyarakat yang kehilangan pusat itu ibarat cermin yang sudah pecah. Ia tidak akan bisa memantulkan bayangan sesuatu dengan utuh. Meminjam bahasa alquran, Wujuduhu ka 'adamihi. Wujudnya ada, tapi fungsinya tidak dapat dirasakan dengan baik.

Santo Agustinus pun mengajarkan bahwa yang dinamakan pusat itu tidak bisa dicari diluar diri seseorang. Ia harus ditelaah dan ditelusuri jauh di dalam hati setiap manusia. Hati adalah inti bagi pribadi manusia. Dalam bahasa Hazrat inayat Khan hati itu kalau dibentangkan akan lebih luas dari semua langit.

Rasulullah SAW menegaskan, "ingatlah, bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah semua isi dan potensi

tubuh serta perilaku sosial kita. Tapi jika ia buruk, maka buruk dan busuklah seluruh isi tubuh dan tata laku sosial kita sebagai hamba. Dan segumpal darah itu adalah hati".

Jalaluddin Rumi, tokoh sufi termasyhur, menyatakan bahwa hati adalah pemimpin setiap diri manusia. Jika hati mengingatkan, mengarahkan dan mengajarkan dan memahamkan manusia pada jalan yang benar, maka manusia akan menjadi arif dalam mentransformasikan nilai-nilai kebenaran. Sebaliknya, kalau hati itu selalu menindih dan menghegemoni manusia, maka ia akan mempersembahkan yang terburuk bagi kehidupan sosialnya. Tak berlebihan pula bila Emha Ainun Najib menegaskan dalam syairnya,

Kembang hati dibersihkan
Terbit kekuatan
Menghembuskan kasih tuhan
Gerak pikir dibeningkan
Lahir kecerdasan
Memenangkan kebenaran

Manusia yang penakut, terutama dalam dunia politik negeri ini pastilah sangat kehilangan esensi humanitasnya. Ia tidak lebih dari seonggok pribadi yang hatinya kurang matang mudah terombang ambing oleh gesekan sesuatu yang partikular-pragmatis. Bahkan ketakutannya untuk turun tanta atau tersingkir dari kursi kekuasaan sedemikian berlebihan, tetapi komitmennya menghargai hak-hak politik setiap masyarakat kian tidak jelas ia picik dan *overconfident*.

Kesatria

Demi menjernihkan proses dan pematangan budaya demokrasi,pembumian politik kesatria merupakan keniscayaan,tidak terkecuali dalam muktamar Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tanggal 3-7 Juli nanti di Bandung. sebab inilah mukhtamar yang cukup menentukan apakah eksistensi politik PPP akan bertumbuh dengan baik pada tahun 2014, atau malah terkubur oleh kerasnya persilatan politik pragmatis itu sendiri.

Politik kesatria adalah wawasan dan perilaku politik yang berpijak pada kebenaran, kepatutan, dan kemaslahatan. Bukan tradisi politik yang dikemas dengan ketakutan-ketakutan yang semata berorientasi atas pencitraan atau memamfaatkan kelemahan pihak tertentu guna

membunuh karakter dan eksistensinya. Karena dalam kaidah demokrasi, hak asasi setiap manusia secara politik adalah sesuatu hal yang harus dihormati.

Dalam perspektif politik ksatria, kekurangan dan kelebihan (potensi) politik benar-benar ditempatkan sebagai wujud dari eksistensi kemanusiaan yang terluhur. Ia harus dikelola secara positif dan produktif, bukan malah dimamfaatkan memicu friksi dan konflik hanya demi targetan kekuasaan yang parsial. Politik kesatria juga mengandaikan terciptanya filosofi bahwa menang dan kalah dalam pertarungan politik itu sama saja. Yaitu sama-sama demi melatih ketajaman batin dan meningkatkan disiplin rohani kita sebagai manusia. Kemenangan tidak dimaknai untuk melahirkan kebencian, dan kekalahan pun tidak menyebabkan berbagai pihak makin menyuburkan permusuhan. Apalagi dalam tradisi politik praktis, faktanya tiada kawan atau lawan yang abadi semua berpulang pada kepentingan (sesaat).

Dengan semangat kesatria, setiap pemenang akan menjalani politik untuk kedamaian, Kemakmuran dan kecerdasan rakyat, bukan dari dan demi memenuhi pragmatisme kelompok kepentingan. Dalam kontek ini politik mesti dikembangkan sebagai panggilan moral kemanusiaan, dan bukan sebatas kewajiban dari struktur politik partai atau sebuah titipan taktis dari sekawan "bandar"

Politik yang ditransformasikan atau direalisasikan dengan ketakutan akan berbeda dengan yang dilandasi oleh sikap kesatria. Politik berbasis ketakutan akan menggiring kita berpikir sempit, parsialistik, penuh curiga, mudah menyalahkan dan mendiskriminasi. Ujung-ujungnya ia tidak akan bisa mendesain merapikan perangkat-perangkat demokrasi secara proporsional.

Sebaliknya, politik yang dibangun dari dan untuk ke-ksatriaan ia akan mampu menggali empati dan simpati masyarakat dengan maksimal. Sebab, politik tanpa empati, hanya akan melegalkan kebencian. Padahal, kata sang Buddha, menyatakan kebencian tidak akan berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci itulah suatu hukum abadi.

Dari benci seringkali manusia bersengketa. Dari sengketa manusia mudah pecah belah, dari pecah belah mereka cepat frustasi. Dari frustasi, akan marak kekerasan-kekerasan berdemokrasi. Dan dari kekerasan berdemokrasi, politik tidak akan bisa berdikari.

10

Falsafah Maaf

"Mengampuni itu adalah Kebenaran"

Itulah salah satu falsafah yang ditancapkan Yudhistira dalam Mahabarata. Pro dan kontra atas kasus soeharto lagi menghangat dan menjadi fenomena "dilematis".ada yang tetap ingin mengadili dan menyiksa soeharto dengan sepuas-puasnya, ada yang sekedar tak tega melihat derita yang dialami oleh mantan presiden kedua tersebut. Bahkan, tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat dan kaum agamawan khususnya dari Ambon yang malah mendoakan kesembuhan soeharto hingga meminta kepada seluruh masyarakat indonesia untuk segera memaafkannya. Sungguhkah sebuah dilema? Tergantung bagaimana kita menempatkan perspektif.

Soeharto, hampir menjadi stigma sosial bahwa ia telah banyak berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa terhadap masyarakat indonesia selama memimpin. Orde Baru, rezim yang pernah ia pimpin dianggap sebagai biangkerok atau "hama" kebangkrutan dan multikrisis (ke)bangsa(an). Begitu canggihnya, kontruksi opini dan stigmatisasi atas soeharto. Kalau dipersentasikan masyarakat lebih

banyak melihat negatifnya ketimbang sekian prestasi kebangsaan yang telah dirintisnya.

Meskipun, tuntutan keadilan itu masih sangat dilematis antara penegakan keadilan dengan diadili secara tuntas, atau keadilan dengan memaafkan sepenuh hati tanpa proses hukum sedikitpun. Ini jualah yang sedang mengganggu pikiran Abdul Rahman Saleh, jaksa agung yang tampak serius yang baru-baru ini menerbitkan keputusan menghentikan semua proses atas pengadilan soeharto dengan seluruh kasusnya. Sejujurnya jika perspektif politik tidak pernah dilibatkan dalam berbagai masalah sosial kebangsaan maka dapat dipastikan bahwa setiap masalah tersebut akan segera menemukan solusinya. Masalah kecil dan sederhana ketika dibawa dan dicampuri oleh perspektif politisasi, ia akan menjadi besar. Sebaliknya, masalah pelik dan sangat besar sekalipun bila ditumpangi pretensi dan penafsiran politik ia akan tiba-tiba menjadi kecil dan tidak pernah serius. Kasus BLBI dan kasus Soeharto sekadar contoh. Disinilah kita menemukan bahwa tradisi pikir dan akar moralitas kebangsaan kita belum sepenuhnya bisa dikategorikan berjiwa "kesatria".

Salah satu sifat kesatria, tentu adalah siap menghadapi masalah dan siap mencarikan solusinya dengan kejernihan pikiran dan integrasi moralitas yang sangat terpuji. Tetapi, sikap kesatria juga tidak semena-mena mencaci maki, menyiksa, dan bahkan membunuh siapa saja yang dianggap musuh besarnya sekalipun. Kesatriaan selalu menjunjung tinggi kejantanan dan kejujuran. Prilakunya diajuhkan dari segala bentuk kecurangan. Memang, tiba-tiba menghentikan proses hukum soeharto,adalah kekeliruan. Namun, seketika memaafkannya juga merupakan sikap kontraproduktif dan ketidakmatangan moralitas kebangsaan kita yang dipagari oleh eksistensi hukum. Mencari jalan tengah dari sikap diatas, mungkin alternatif ideal yang didambakan masyarakat.

Kembali pada apa yang dititahkan Yudhistira, memaafkan adalah kebenaran. Dan sikap memaafkan adalah sesuatu yang mudah diucapkan namun teramat sulit untuk dilakukan. Dalam konteks kemanusiaan, kita boleh dan harus memaafkan soeharto sedangkan dalam wilayah kenegaraan, siapapun orangnya harus menghormati dan menjungjung tinggi aturan dan hukum yang berlaku. Jika tidak,

semua produk hukum kenegaraan akan menjadi sia-sia.

Memaafkan, tentu, membutuhkan kebesaran jiwa dan kematangan moralitas. Sebab maaf adalah nilai esensi yang harus tertancap dalam setiap diri. Memaafkan adalah pengorbanan. Memaafkan adalah adat istiadat manusia. Memaafkan adalah penebusan dosa dan kesucian. Dan memaafkan berarti memelihara keutuhan dunia. Muhammad SAW adalah contoh figur pemaaf yang sangat dikagumi. Allah sendiri selalu mendahulukan kasih dan maap ketimbang murkaNya. Tetapi bukan berarti pengadilan terhadap seluruh kejahatan dan dosa hambaNya Allah biarkan berlalu. Ia mempunyai waktu dan cara pengadilan tersendiri. Disinilah, seyogyanya masyarakat indonesia mendahulukan pertimbangan rasional-etis dan kecerdasan spiritualnya dalam memaknai dan menempatkan kasus soeharto. Jaksa agung dan presiden tidak boleh kekanak-kanakan"dan ketakutan. Masyarakat juga tidak perlu panik dan emosional. Mari kita cermati masalah soeharto dengan kacamata sosial kebangsaan sejati. Baiknya prilaku kader-kader kesatria yang tidak terpicu oleh kepentingan politik atau politik kepentingan. Kesadaran dengan pikir kesejarahan, akan menjadi taruhan dalam konstalasi kasus besar ini.

Dalam islam, maaf atau pertobatan itu ada proses dan tingkatannya. Ketika kasus soeharto mulai kencang lagi, itu tidak semata kesalahan pemerintah sekarang. Rezim Habibie, Gusdur dan Megawati, adalah layak pula dipersalahkan. Mereka tidak pernah serius sejak awal menyelesaikan kasus soeharto ini. Mungkin, klimaknya pada era SBY-JK yang juga ditandai dengan semakin menua dan krisisnya penyakit soeharto. Mari kita adili soeharto dengan segala keadaannya seperti yang kita lihat. Jangan dihentikan. Setelah itu, ia kita diperbolehkan meminta maap kepada semua masyarakat indonesia. Sebab, meminta maap berarti suatu pengakuan atas kesalahan, kejahatan dan dosa yang pernah ia lakukan. Tidak berhenti disitu, ia juga harus jujur, dan terbuka terhadap kesalahan dan kejahatan apa yang pernah ia lakukan. Terutama dalam hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat indonesia pada umumnya. Mencari kebenaran dalam kasus soeharto ialah mengadili sesuai dengan kondisinya saat ini, kemudian memaafkannya sebagaimana

nilai-nilai agama dan kemanusiaan.***

11

Politik Feminis(Me)

Apa yang dialami Ratu Atut baik ketika masih jayanya menjabat Gubernur Banten sampai duka laranya berpredikat sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelas mengandung makna dan hikmah politik tersendiri, wabilkhusus terhadap masyarakat perempuan Indonesia. Bahwa Atut merupakan satu diantara perempuan bangsawan yang lahir dan bertumbuh di tanah Banten adalah kenyataan sosial yang patut diapresiasi dengan cara lain. Sebab Atut bukan semata individu, melainkan juga anggota masyarakat yang kebetulan mencapai derajat terbilang mengagumkan, terutama di wilayah kekuasaan duniawi (gubernur).

Ratu Atut memang cukup fenomenal. Karirnya dalam dunia politik seperti begitu cepat dan mengilap. Tentu saja Atut tidak sendiri dalam memompa dirinya. Disamping faktor dari sang keluarga yang memang termasuk "orang kuat" di Tatar Banten, ia juga memiliki suami (almarhum) yang berkiprah dalam partai politik besar bangsa ini, yakni Partai Golkar. Tidak dapat dimungkiri bahwa sumber daya sosial (politik) itu yang sering kali merangsang gairah dan warna karir politik Atut. Ini normal dalam kacamata demokrasi, namun tidak selalu luhur

dalam perspektif rohani keperempuanannya.

Sebagai perempuan, Atut adalah simbol dari kekuatan spiritual bermasyarakat dan berbangsa. Seyogianya ia terus berada pada garis luhur dan kedigjayaan rohaniah keperempuanannya, yakni mampu memilah mana jalur partikular dan rel esensial dalam membangun eksistensi dirinya di hadapan publik. Sehingga ia akan senantiasa tangguh dan bersahaja mengawal harmoni sosial politik maupun sosial perekonomiannya. Bukan seperti sekarang, tampak lebih mengedepankan pengolahan gengsi kuasanya ketimbang sebagai lumbung feminitas politiknya. Dan ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan aib sosial yang dibuat dan dicederai oleh perilaku berlebih dari dirinya sendiri.

Nyi Ageng Serang

Tak ada yang memungkiri bahwa Banten adalah bumi jawara dan istana bagi kaum tubagus (bangsawan). Banten juga bukan saja tempat lahir dan bertumbuhnya kiai-kiai besar semisal Hadaratu al Syaikh Nawawi al Bantani, Buya Dimyati dan lain sebagainya. Lebih dari itu, Banten pernah disinyalir sebagai asal muasal Patih Gajah Mada yang kelak menjadi sosok menyejarah terhebat melalui kerajaan Majapahitnya. Meskipun catatan ini masih patut ditelusuri dengan maksimal, akan tetapi Banten memang memiliki sejarah berkelas di pentas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia ini.

Banten juga pernah melahirkan dan memiliki sosok perempuan hebat yang kelak dikenal sebagai ahli strategi (perang) di era kolonialisme dan imperealisme, yakni Nyi Ageng Serang. Begitu mumpuninya dalam konteks strategi berperang sehingga Nyi Ageng Serang pernah diangkat sebagai penasihat oleh salah satu pejuang dan pahlawan nasional, yakni Pangeran Diponegoro untuk menghadapi Belanda kala itu. Dan Nyi Ageng Serang adalah perempuan teladan yang mampu mengangkat dan menjadikan Banten sebagai daerah penuh "magis" serta "kekuatan" sosial-spiritual hingga saat ini.

Sayangngya, Atut seperti kurang mencerap dan menginternalisasi kebersahajaan dari Nyi Ageng Serang. Kalau Nyi Ageng Serang istiqamah dalam keahliannya meramu, meracik, dan mengaktualisasikan strategi-strategi jitu dan bertuah dalam melawan penjajahan Belanda, Atut malah lebih ambisi tampil di permukaan dengan model-model sosialnya yang kurang empatik di hadapan publik. Dan meskipun terkenal sebagai ahli

strategi berperang, Nyi Ageng Serang tetap hidup sederhana dan terus menjaga citra dirinya selaku simbol rohani semesta. Sementara Atut, lebih suka bermewah-mewah dan membangun dirinya dari dan untuk hal yang sangat sinistik dan parsialistik-materialistik.

Padahal semesta selalu memiliki hukum tertentu menyikapi dinamika sosial kehidupan umat manusia, walau pun kadang sering dilupakan oleh manusia itu sendiri. Hal inilah yang sebenarnya ikut mengetengahkan "teguran halus" kepada manusia, baik di bidang sosial kemasyarakatan dan kebangsaan hingga pada konteks yang memang berupa bencana alam dengan aneka bentuknya. Alam semesta sebetulnya, terutama menurut para filosof eksistensialis, bukan semata benda "mati" melainkan suatu "kekuatan-potensial" yang terkadang mampu mengalahkan kecanggihan makhluk hidup seperti manusia.

Tak berlebihan bilamana banyak pakar yang mengatakan bahwa alam semesta selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan lembut penuh harmoni dari setiap manusia yang mendiaminya. Dan di Tatar Banten sesungguhnya masih ada suatu komunitas yang terus berpegang teguh pada filosofi maupun kearifan sosial berbasis semesta, yakni masyarakat Badui Luar dan Badui Dalam. Masyarakat ini jua, konon, belakangan tidak banyak mendapatkan sentuhan secara rohaniah dari Atut semasa menjadi Gubernur Banten. Suatu ironi kekuasaan modern yang terlalu banyak bergincu demokrasi.

Dinasti Feminitas

Di kalangan masyarakat Badui, terutama Badui Dalam, perempuan memang masih menjadi simbol yang teramat luhur. Perempuan dimaknai sebagai wujud semesta yang tidak bisa diabaikan semena-mena. Disamping mempunyai kekuatan spiritual yang sangat tangguh, perempuan, meminjam istilah Jalaluddin Rumi, adalah "pencipta" yang maha indah dan menyejukkan. Maka tidak mengherankan ketika Rasulullah Saw menegaskan bahwa salah satu hal yang mesti diapresiasi dengan maksimal adalah kaum perempuan. Mereka bukan sekadar aktualisasi dari kerahiman Tuhan melainkan juga potensi terdahsyat dalam rangka menjaga keharmonisan semesta.

Dengan demikian, masih dalam kacamata kearifan sosial berbasis semesta, perempuan tidak boleh seenak perut mengeluarkan dirinya dari rahim keluhurannya sendiri hanya demi mengejar status

sosial dan kedigjayaan materialistik. Ia harus tetap lentur, lembut, dan lihai menyembunyikan apa yang menjadi hasrat-hasrat sosialnya yang memang jauh dari alur nilai-nilai idealnya. Sebab ketika perempuan kehilangan nalar feminitasnya yang cermerlang, tak jarang hanya akan menjadi fenomena yang tidak akan mampu melahirkan makna-makna transformatif-empatiknya bagi kelangsungan sosial berbangsa.

Bahwa perempuan terjun ke meja politik bukan hal yang haram, hampir disadari oleh banyak manusia. Namun dalam perspektif etiknya, keterlibatan diri mereka dalam ranah-ranah duniawiyah penuh intrik dan friksi seperti politik kekuasaan, sesungguhnya hanya akan menjadi "virus amuba" yang dapat menggerogoti keagungan rohaniahnya sendiri. Sebab perempuan, menurut sebagian psikolog, daya tahannya tidak dapat disejajarkan sepenuhnya dengan kaum lelaki. Inilah fitrah yang telah dianugerahkan Tuhan. Maka tidak terlalu salah jika Islam masih menimbang-menimbang keterlibatan langsung kaum perempuan dalam konteks perpolitikan.

Imaji dan kearifan masyarakat Badui dan suku-suku bertipologi sejenis di Indonesia, tentu saja mulai mengalami perlawanan dari logika sosial-politik modern. Sehingga kaum perempuan pun kian berteriak meminta dilibatkan dalam pergulatan politik dan bahkan menggila ketika hak-hak dasarnya dilecehkan secara politik. Faktanya, sejak Atut berhasil menduduki Gubernur Banten, ia mulai membangun "dinasti feminitas" dalam politik kekuasaan. Walikota Tangerang (Selatan) dan Bupati Lebak, misalnya, merupakan realita dari dinasti feminitas sosial politik ini. Bahkan tidak sedikit pula calon legislator (caleg) yang hendak bertarung dalam pemilu 9 April 2014 mendatang berasal dari kaum perempuan dengan latar psikologi maupun motif politiknya masing-masing.

Politik feminis(me) ini bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan tantangan bagi setiap laki-laki yang menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Meskipun kata Mahatma Gandhi, perempuan itu dalam segala kehidupannya selalu mengedepankan aspek terdalam dari lembutnya perasaan dan ketundukan. Dan perempuan, lanjut Gandhi, sejatinya adalah makhluk yang senantiasa berpegang teguh pada fitrah sosialnya. Minimal, mereka tetap menjadi simbol rohani dan harmoni dari keberadaan semesta, bukan mendeklarasikan diri sebagai tontonan yang menyedihkan seperti ditanyangkan KPK. ***

12

Partai Politik

Kegalauan politik yang kini melanda hampir semua parpol peserta pemilu 2014 yang akan datang, terutama dalam menentukan calon presiden atau wakil presiden, sungguh menandai bahwa sampai detik ini memang belum ada partai politik yang patut diteladani. Bukan saja karena krisis ideologi pengaderan di dalamnya yang kian rapuh, melainkan lebih berkait langsung dengan etos kerja politiknya.

Fenomena penjaringan capres alternatif dalam tubuh PKB, PPP, Golkar, Demokrat, misalnya, semakin menunjukkan kalau mereka lebih mementingkan ambisi pragmatisme dari pada penataan etos kerja sosio-politiknya di hadapan publik. Artinya, sebagian elit partai-partai ini, baik yang duduk di Senayan, atau yang jadi "penadah" proyek di kementerian maupun dinas-dinas, dan lain-lain, masih memosisikan diri sebagai "pengamen hedonis" dari pada pelayan publik dalam makna yang utuh. Atau, tipologi pekerja politik seperti mereka itu kurang mengeja falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara dengan jernih. Mereka masih menempatkan bahwa fasilitas politik yang dikunyah merupakan "warisan" dari rumah tangganya sendiri.

Mereka abai terhadap rakyat yang tulus mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk mencontreng gambar dan nama-nama calegnya di setiap pemilu.

Tipologi Manusia

Sayyid Quthb pernah mensinyalir bahwa sebagian besar manusia itu memiliki tipologi lebih bergairah mengejar "kehendak dirinya" dari pada mengedepankan kemaslahatan terhadap sesamanya. Kecenderungan semacam ini oleh para filosof sering dinamai "ego" yang kadang menjatuhkan kepribadian manusia dari pohon eksistensialitasnya yang luhur.

Di sisi lain, tipologi seperti itu bukan hanya memenjarakan manusia dari keharmonisan antara akal dan hatinya, melainkan seringkali menguburkan potensi-potensi *rabbaniyyah* yang telah dianugerahkan Allah sejak awal. Konsekuensi logisnya, keberadaan manusia dengan tipologi seperti ini tidak jauh berbeda dengan gaya "binatang liar," mudah lepas kendali dari etika sosial kehidupan.

Dalam pemaknaan yang sederhana, mereka akan cepat menjadi congkak, rakus, tamak, dan melalaikan kepekaan sosialnya. Dan mereka juga kehilangan cara hangat dalam membangun interaksi dengan sesama. Bahkan, sedikit pun tidak mempunyai "seni empatik" dalam memahami dan melangsungkan pola-pola berkehidupan. Mereka hanya asyik dengan "kehendak" pribadinya yang tunggal. Mereka mewujud seperti binatang buas yang baru digerogoti oleh kebinalannya.

Barangkali manusia-manusia bertipologi seperti itulah yang kini sedang berada dan menggantungkan hidupnya melalui partai politik yang hendak mengikuti pesta demokrasi 2014 mendatang. Sehingga kegalauan politik dan nafsu berkuasanya lebih menonjol ketimbang kelembutan jiwa dan kegigihan kerja sosialnya. Maka tak ada yang dapat kita apresiasi selain lelucon buruknya yang banyak menenggelamkan aspirasi dan cita-cita luhur publik dalam bernegara.

Mereka hanya mengincar peningkatan elektabilitas-parsialistik dan kemenangan dalam pengertian hedonistik. Adapun menang hedonis, bisa juga menang secara eksploitasi pencontrengan dan penghitungan suara pemilih semata, bukan menang berbasis

etos kerja. Menang hedonis, adalah menang dari "retorika" yang sarat penggiringan opini dan hasil survei, bukan karena kejujuran berdasarkan amanah para pemilih. Inilah pemenang "abal-abal," yang tidak akan pernah abadi dalam kedigjayaan dan kebahagiaan.

Manakala budaya politik dibangun dari kesadaran dan cita-cita manusia bertipologi seperti di atas, maka yang akan ada hanya partai politik musiman berwatak siluman. Muncul saat momentum jelang pesta demokrasi dilaksanakan, dan lalu menghilang ketika publik berada dalam berbagai tekanan dan himpitan sosialnya yang tak berkesudahan.

Kontrol dan Sanksi

Sebagai bagian dari kekuatan negara yang signifikan, tentu saja kita perlu memperjelas kontrol dan sanksi sosial terhadap seluruh parpol bertipe demikian, baik itu milik penguasa atau rintisan individu-individu sempalan beberapa tahun silam. Kita harus bangkit dengan kesadaran tinggi berbasis kedaulatan, bukan tergiur dengan tempelan oportunisme berjangka pendek.

Kalau selama ini kita hanya menggerutu melihat parpol bersama elit-elitnya keluar jalur kerakyatan dan bahkan menggerogoti hak-hak publik, maka ke depan kita harus solid untuk memberikan sanksi secara politik. Setidaknya, dengan memelopori pembubaran parpol-parpol seperti itu melalui mekanisme yang konstitusional, walau harus saling terkam dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang kadang lebih edan dari pada politisi parpol dalam menyelesaikan sengketa pemilu(kada).

Rasanya cukup sudah kita berikan jalan dan kendaraan bagi era reformasi yang dulu kita "demontrasikan" bersama-sama hingga menghujat dan menjatuhkan era Orde Baru yang dinilai hegemonik dan koruptif. Maka seyogiyanya pula kita tidak boleh terlalu lama membiarkan rakyat negeri ini mati dengan kekecewaannya yang tak kunjung terobati oleh perilaku buruk para politisi parpol itu sendiri.

Bahwa dalam negara demokrasi kita tidak bisa menafikan keberadaan parpol, adalah fakta yang sulit terbantahkan. Akan tetapi, parpol yang hanya dihuni dan dimanipulasi oleh individu-individu yang berada dalam struktur kepengurusan secara hedonis

dan abai terhadap nalar etik berbangsa, sungguh bukan parpol yang layak dipertahankan. Sebab, parpol dengan merek ini hanya akan menambah beban sosial politik di hadapan rakyat. Sebaliknya, yang kita butuhkan agar segera keluar dari krisis sosial politik dan kepemimpinan bernegara sekarang adalah munculnya partai publik. Yakni, partai yang siap seratus persen bersama publik dengan pelbagai kebutuhan sosialnya dari aspek primer maupun skunder, bukan partai yang pura-pura ramah dan getol memainkan isu-isu populer hanya ketika menjelang hajatan pemilu(kada).

Partai publik adalah partai yang dibentuk dari dan untuk kontrak produktif dengan masyarakat di segala lapisan. Ia mesti bertumbuh dan berkembang dari aspirasi, visi, misi, dan cita-cita serta harapan sosial masyarakat seutuhnya. Bahkan AD/ART dan platform partai publik ini bukan sebatas lukisan idealitas, melainkan rintihan realitas sosial yang setiap detik bertaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Partai publik merupakan partai yang secara teoritis harus dibangun, dihuni dan dioperasikan langsung oleh figur-figur teladan-berkarakter yang diseleksi oleh rakyat dari berbagai daerah dengan mekanisme yang mirip pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Figur-figur tersebut tidak perlu dibatasi. Mereka boleh berasal dari kalangan buruh, tani, pengamen, pedagang asongan, tukang becak, santri, kiai, intelektual, pengusaha, birokrat, dan sebagainya.

Secara praktis, partai publik ini, melalui figur-figur yang ada di dalamnya, wajib mengolah dan memberikan jalan keluar terhadap aspirasi dan kehendak sosial rakyat sesuai kebutuhan mendasar masing-masing daerah. Mereka tidak boleh mengada dalam ruang retorik semata, melainkan harus sepenuh jiwa dan raganya lebur dalam kemaslahatan publik.

Selintas, partai publik ini sulit diwujudkan. Namun demikian, dalam perspektif demokrasi, tidak ada yang mustahil bila rakyat menghendaki secara kolektif. Sebab dalam pemaknaan yang paling realistik, rakyat merupakan kekuatan politik dan ruh bagi eksistensi demokrasi. Dan melalui partai publik, elektabilitas politik partai tidak akan selalu bergantung pada sosok semata, melainkan tetap terpulang pada etos kerja politik kepartaian itu sendiri.***

13

Ulama dan Politik

Dalam Alquran Allah telah menegaskan bahwa diantara para hambaNya di alam semesta yang dikategorikan pilihan adalah ulama (*Innamaa yakhsyallahu min 'ibadihil 'ulama*).

Karena ulama bukan saja merupakan hamba yang identik dengan kedalaman ilmu dan kearifannya, melainkan sebagai simbol dari kekuatan moralitas kehambaan di hadapan Allah SWT. Mereka dianggap hamba yang benar-benar senantiasa tunduk-patuh kepada hukum Allah dan takut terhadap apa saja yang dilarangNya.

Nabi Muhammad Saw. menguatkan keberadaan ulama yang semacam itu, setidaknya melalui sabda beliau yang menyatakan bahwa ulama adalah pewaris eksistensi dan nalar-etik kenabian, terutama menyangkut aspek tipologi sekaligus loyalitas kehambaan di hadapan Allah. *Al 'ulama-u waratsatu al anbiya.'* Maka tanpa diragukan kalau derajat dan martabat ulama di mata Allah dan RasulNya benar-benar istimewa. Mereka bukan saja diposisikan semata hamba Allah ('*abdullah*), akan tetapi benar-benar telah meraih predikat sebagai *khalifatullah*.

Pada ranah sosio-kultur masyarakat Islam, setidaknya di

beberapa wilayah Indonesia seperti di kalangan masyarakat Madura, Jawa, dan Melayu, keberadaan ulama itu sangat dimuliakan. Ulama bukan hanya didudukkan sebagai simbol dari kematangan nilai-nilai spiritualitas, melainkan telah dinobatkan sebagai pilar peradaban suatu masyarakat selain dari pada "penguasa pemerintahan" yang bernuansa duniawi. Sampai-sampai di dalam Alquran Allah menegaskan bahwa antara *ulama* (ahli ilmu dan agama) bersama *umara* (ahli pemerintahan sosial) harus selalu "senyawa" dalam mengurus rakyat.

Menjelang Pemilu

Belakangan, terutama setiap menjelang pemilu Legislatif dan Eksekutif, mulai di tingkat lokal hingga nasional, peran serta ulama senantiasa mewarnai wacana sosial politik masyarakat Indonesia. Rasanya tak ada satu pun media massa yang tidak (akan) memuat berita tentang perilaku dan propaganda ulama berkaitan dengan pergujingan sosial perpolitikan bangsa ini. Dan kunjungan elit politik (parpol) atau birokrat kepada ulama biasanya terus meningkat menjelang pemilu. Salah satu misinya tentu mengharapkan restu sekaligus dukungan dalam meningkatkan elektabilitas dan raihan suara dari masyarakat, khususnya yang menjadi bagian dari lingkaran sosial ulama tersebut.

Disadari atau tidak, saat menyambut pemilu (lokal dan nasional), ulama kini mulai terseret ke arus eforia politik praktis dalam konteks kebangsaan. Ini memang tidak sepenuhnya keliru, dan tidak juga seratus persen haram. Namun demikian, kapasitas, integritas dan loyalitas ulama terhadap nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moralitas telah berhadapan dengan ujian cukup berarti di dalamnya. Salah mengantisipasi ujian dilematis ini, bukan saja kharisma ulama yang akan terkikis, melainkan eksistensi ulama sebagai *power of spirituality* di hadapan umat dan Allah akan lenyap seketika.

Ulama terlibat dalam lalulintas perpolitikan bangsa memang bukan hal yang aneh dan fenomena baru. Pada era awal berdirinya Indonesia, ulama telah memiliki andil dan kontribusi yang cukup berharga, khususnya dalam melepaskan bangsa ini dari lilitan para penjajah (kolonialisme dan imprealisme). Pikiran, tenaga, dan darah ulama sungguh pernah membasahi rel perjuangan kemerdekaan negeri ini. Setidaknya itulah yang dijalani langsung oleh Syaikhona Cholil

(Bangkalan, Madura), KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Chasbullah, KH. Syarqawi, dan lain-lain.

Akan tetapi, ketika ulama berpolitik itu sesungguhnya sangat berbeda dengan para elit parpol dan birokrat dalam membawakan politik. Sebab ulama adalah tokoh multiperan dan multifungsi. Ulama merupakan tokoh sosial keagamaan yang selalu menjadi penanda dan penentu dalam setiap perubahan masyarakat secara sosiologis maupun dalam perspektif kultural-politis. Titik pijakan peran politik ulama adalah sumbu moralitas-religius, dan bukan politik kekuasaan *un sich*. Atau, dalam istilah yang lebih kren, politik ulama adalah politik paradigmatik-produktif bukan politik pragmatis dengan berbagai intrikalitasnya.

Dengan demikian, perlu kiranya kita merenungkan kembali sabda Rasulullah Saw. bahwa "ulama itu laksana bintang-bintang di langit yang dijadikan petunjuk bagi kegelapan di daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu redup maka sirna jualah petunjuk itu." Hal ini semakin mempertegas posisi strategis ulama dan seluruh fungsi sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai bintang penerang, ulama tak boleh dibiarkan tergelincir menjelang pemilu Legislatif dan Eksekutif 2014 mendatang, apalagi hanya di lintasan politik praktis yang sangat friktif.

Sabda Nabi Muhammad Saw. di atas, tentu bukan saja bermakna dalam urusan sosial keagamaan. Dalam pengertian yang lebih luas, sabda ini merupakan motivasi sekaligus bahan introspeksi bagi kita sebagai bangsa, khususnya terhadap kaum ulama dalam merespon dan "melibatkan" diri diantara pergulatan isu-isu dan fenomena sosial politik kenegaraan. Maka ulama harus kembali kepada fitrah keulamaannya secara utuh dan meyakinkan, sementara elit partai politik dan birokrat hendaknya segera introspeksi dan menata segala perilaku sosial politiknya untuk lebih produktif dan humanistik.

Predikat Ulama

Predikat ulama (keulamaan) merupakan kehormatan dan status sosial yang sangat mahal. Kharisma sosial (keagamaan) ulama tidak bisa diukur dengan paket uang berapa triliun pun. Predikat dan kharisma ulama itu didapat bukan dari sekolah formal, perguruan tinggi dan universitas manapun. Bukan pula hadiah dan kehormatan atas status

sosial yang diberikan sebagai konpensasi maupun konsesi politik oleh kepala negara, birokrat atau para politisi partai politik dari kelas mana saja.

Predikat dan kharisma ulama (keulamaan) itu langsung dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada setiap hamba yang dipandang layak di hadapanNya. Ini sejalan dengan komitmen Alquran bahwa Allah akan memberikan petunjuk, anugerah, dan keistimewaan tersendiri kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan akan memberikan ampunan, dan perlindungan kepada orang-orang yang telah Dia kehendaki pula.

Seiring dengan maraknya keterbukaan demokrasi di satu sisi dan pergunjingan sosial politik kenegaraan di sisi lain, pergeseran peran, fungsi dan kharisma ulama (keulamaan) semakin memprihatinkan. Ulama yang semestinya menjadi penyangga moralitas (*morality force*) kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara, telah terkaburkan diantara kepentingan sosio-politik yang hedonistik. Kebangkitan (*nahdlah*), konsistensi (*istiqamah*), kharisma dan potensi sosial ulama yang sejak awal telah diakui banyak kalangan sebagai kekuatan kultural dalam kancah perpolitikan nasional, kini telah kehilangan aura dan spirit luhurnya.

Dalam realitas kekinian, semakin banyak orang menyebut dirinya "ulama," bertambah tidak jelas pula moralitas dan "magnet" kharisma ulama dimaksud. Masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang benar-benar ulama dan mana pula ulama yang menjadi pebisnis politik praktis. Ulama pada kategori kedua, biasanya tidak lagi menjadi penyangga moralitas (*morality force*), melainkan seringkali berprofesi sebagai "penggadai" identitas keulamaan di hadapan calon legislator maupun calon presiden.

Fenomena sosial ini, meniru istilah Al-Gazali, merupakan indikasi merebaknya *ulama suu'*. Sebab, *pertama,* ulama bukan sekadar mendekati tapi justru meleburkan diri dengan kekuasaan. *Kedua,* banyak ulama yang melalaikan tugas dan fungsi utamanya lantaran sibuk menjalankan tugas sebagai tim sukses salah satu calon anggota legislatif, kandidat presiden dan wakil presiden. *Ketiga,* tidak sedikit pula ulama yang menjadikan "majelis pengajian" sebagai ajang mengampanyekan visi dan misi masing-masing politisi yang mengikatnya. Masya Allah! ***

14

Intelektual Politik

Julien Benda punya sindiran, ketika kaum intelektual mulai melacurkan dirinya pada dunia (politik) praktis dan melupakan loyalitasnya terhadap kebenaran "populis"maka yang akan mengemuka adalah perhelatan (sosial) demokrasi yang syarat pragmatisme. Kebenaran sosial dalam mekanisme kehidupan publik selalu dilihat dari perspektif yang agak persial dan sentimental. Masing-masing individu dan kelompok-kelompok masyarakat diakrabi bukan lantaran visi luhur humanis, melainkan semata demi kepentingan meriah struktur kepentingan politik itu sendiri.

Konsekuensinya, relasi kepublikan antara yang disebut rakyat dengan mereka yang "menobatkan" diri sebagai elite politik semakin lebar dan ekslusif. Padahal keberhasilan sebagian besar elite politik menempati kekuasaan tidak pernah lepas dari peran publik dengan berbagai ketulusan sosio-demokrasinya. Bahkan dalam banyak khasus justru kaum elite politik seringkali mudah abai terhadap aspirasi publik yang sedari awal telah dititipkan oleh publik baik melalui forum-forum langsung dan terbuka maupun yang tidak langsung dan terbatas.

Maka dari itu, realitas sosial yang mengelilingi rakyat belakangan ini bukan realitas berbasis produktif-humanistik, melainkan fakta sosial eksploitatif berbau ambiguitas atau kesemuan elitis yang sama sekali kurang maslahat bagi mas depan rakyat.

Realitas sosial demikian, disadari atau tidak, ternyata juga mulai merasuki tradisi demokrasi politik bangsa ini. Hiruk pikuk kampanye politik janji dan sosial claiming yang berbusa-busa dari sejumlah fungsionaris parpol seakan kian menguatkan rumor bahwa mereka memang krisis secara intelektualitas dan minus kapasitas tapi sangat bernafsu memburu kekuasaan dan membius publik. Padahal krisis intelektualitas merupaka awal dari keroposnya mentalitas berdemokrasi dan rusaknya moralitas berpolitik. Lebih dari itu, krisis intelektual macam ini tentu dapat menyuburkan prilaku kolutif, koruptif, dan nepotistik yang amat mengganggu kematangan demokrasi kebangsaan.

Pengamat

Berbicara semangat dan kualitas intelektual, tidak terkecuali dalam tradisi politik, umumnya berada pada mereka yang memposisikan diri sebagai pengamat. Mereka itu simbol intelektual politik. Mereka sosok yang amat memiliki pemikiran, pencermatan, analisa, dan otokritik mendalam terhadap fenomena maupun realitas sosial politik yang terus berkembang dalam sebuah bangsa. Dan tanpa pengamat, rasanya suguhan pergunjingan politik itu kurang menggugah untuk dilihat dan didengarkan atau tidak begitu gurih untuk dicicipi. Dari ulasan pengamat terkadang nalar masyarakat tersentuh dan mulai menghangat. Namun tidak jarang juga lantaran analisa pengamat, penghelatan politik kian membisingkan dan friksinya semakin runcing.

Dalam bahasa yang lebih gamblang, kualitas intelektual itu jarang sekali melekat pada individu-individu yang menjadi "pemain" atau "elite politik" dari kebanyakan parpol. Bukan saja mereka teramat sibuk memola tugas dan amanah politik dari konstituen, melainkan secara eksistensial mereka hanya pandai mengfriksi dan melobi tapi kurang utuh mengharkati konsepsionalitas berdemokrasi.

Dari sini (kadang) perbedaan antara pengamat dan pemain serta fungsionaris parpol itu mengemuka. Mereka saling beradu dari

dan untuk kontradiksinya masing-masing. Meskipun, terutama dalam kecamata filosofis antara pengamat dan pemain politik serta elit parpol sesungguhnya telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika politik yang ada.

Peran pengamat tidak bisa diabaikan, mereka sedang memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam proses berdemokrasi dan kedewasaan berpolitik. Sekali lagi, khususnya dalam perspektif intelektual politik, pengamat adalah penyalur nilai-nilai demokrasi yang paling produktif. Disamping pelan-pelan melakukan koreksi elegan, pengamat sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung telah ikut merancang paradigma berdemokrasi. Dan bahwa analisa pengamat bukan satu-satunya pijakan terbenar dalam mengoperasikan mesin-mesin politik adalah realitas yang dapat dimafhumi, sebab mereka juga manusia, memiliki keterbatasan dan kelemahan untuk mendeteksi ataupun mengurai dilema-dilema publik dalam menyikapi pertarungan politik.

Namun demikian, apapun yang dilakukan pengamat itu merupakan modal tersendiri guna merenungi realitas sosial politik, baik dipentas lokal maupun diranah nasional. Sehingga politik betul-betul dapat dijadikan media sosial alternatif yang humanis dalam rangka penataan berbangsa dan bernegara. Tidak seperti sekarang dimana tradisi dan kehidupan politik sekan terus melegitimasi perpecahan atau konflik sosial yang amat destruktif dikalangan publik yang secara ideologi politik memang berada pada pilihan yang berberda. Padahal kehidupan sosial kata Aristoteles, adalah pola eksistensial yang selalu berdasarkan diskursus rasional bersama, pertimbangan kolektifitas bahkan perdebatan secara kritis antara elemen masyarakat.

Aneh tapi nyata, belakangan ini tidak sedikit pengamat yang menjadi simbol inteletual politik itu malah lebur dalam struktur partai politik dengan asumsi dan "konspirasi" sosialnya sendiri. Untuk sekedar contoh, Mas Ulil Abshar Abdalla masuk partai demokrat, Indra J. Piliang bergabung kepada partai Golkar, Anies Baswedan pun nyemplung ke kolam konvensi politik partai demokrat, dan Andi Malarangeng yang dulu pengamat sudah lama mengawinkan diri dengan demokrat. Hal ini memang tidak terlarang dan tidak haram. Akan tetapi kurang etis dalam perspektif esensi berdemokrasi. Sebab, ketika kaum intelektual politik itu menjadi bagian formal dari parpol,maka objektifitas analisa

dan loyalitas demokrasinya akan mudah disangsikan.

Kampanye Negatif

Disisi lain, maraknya kampanye negatif (*Negative Campaign*) antar parpol dan elite-elite yang berada didalamnya menjadi bukti bahwa tradisi politik nasional kita masih dijauhkan dari semangat intelektualitas. Fenomena ini semakin menguatkan kalau partai politik dengan segala ambisi sosialnya semata dibangun dari dan untuk pragmatisme meraih kekuasaan dan bukan ditata dari dan untuk pencerdasan intelektual publik dalam berdemokrasi. Tidak berlebihan bila friksi dan konflik politik setiap jelang pemilu (lokal maupun nasional) kian keluar dari kerangka rasional dan nilai-nilai luhur demokrasi. Dan lahirpun pasca pemilu adalah politik elitis-tendensius-hedonistik, bukan pemimpin publik yang jujurbersih akuntabel dan humanistik.

Paradigma sosial politik pragmatisme ini pula yang menyebabkan budaya demokrasi kita sulit berkembang kearah yang maslahat. Demokrasi politik kebangsaan sepertinya hanya berjalan ditempat, terus melaju dan tampak baik secara teknis namun sangat mengerikan dari aspek pelebaran dan pembumian substansialitasnya. Bahkan banyak korupsi yang melibatkan kader dan petinggi parpol akhir-akhir ini merupakan fakta sosial politik yang terjauhkan dari komitmen intelektualitas. Itulah citra dari proses demokrasi yang dilahirkan dan dikembangkan semata pragmatisme kekuasaan dan bukan untuk pencerahan intelektualitas berdemokrasi.

Tanpa peran dan komitmen utuh kaum intelektual politik, demokrasi hanya akan bertumbuh dengan nalar yang parsial atau emosinya yang tidak stabil. Proses demokratisasi yang tampak juga akan selalu paradoks pada setiap pemilu pun kampanye politik akan senantiasa dihiasi pengerahan massa musiman, dan masing-masing jurkang saling tuduh dalam keburukan saling teror secara pencitraan. Saling melebih-lebihkan dalam menyangkut program, saling bunuh berkaitan dengan karakteristik kepartaian saling kikis dari aspek moralitas, saling merasa populis disetiap iklan dan saling klaim paling bisa menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Inilah potret demokrasi tanpa intelektual politik. Teramat propagandis. Tidak produktif. Sungguh lebai dan menjenuhkan. ***

15

Politik Nama Besar

Layangan gugatan keberatan atas pemasangan gambar Gus Dur dalam praga kampanye politik sejumlah calon legislator (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh pihak keluarga Gus Dur menarik untuk dicermati. Ini bukan semata menyangkut friksi dan konflik internal PKB yang mulai hangat menghadapi pesta demokrasi 2014.

Lebih dari itu, fenomena ini merupakan pembelajaran (*'ibrah*) politik yang sangat bernilai, terutama bagi para caleg yang memang tidak memiliki "trah biru" dalam dunia politik.

Bahwa dalam konteks perpolitikan praga kampanye itu diperlukan untuk mengenalkan diri lebih jauh kepada masyarakat, sulit sekali dibantah oleh siapa pun, khususnya mereka yang benar-benar demam kekuasaan politik. Apalagi dalam pentas politik modern seperti sekarang dimana keterbukaan demokrasi semakin dirasakan dan diaplikasikan oleh masyarakat. Tak berlebihan kalau politisi modern senantiasa dituntut cakap secara intelektual, loyal secara sosial, dan tercerahkan secara spiritual. Intinya, politisi modern itu benar-benar harus baik tapi juga kreatif dan inovatif.

Politisi yang baik adalah ia yang tidak pernah menggantungkan masa depan politiknya pada kekuatan di luar dirinya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ia bukan saja selalu optimistik melainkan benar-benar mempunyai kapasitas dan integritas yang telah teruji dengan meyakinkan. Bahkan politisi yang bijak, meminjam istilah filosof macam Aristoteles, sesungguhnya adalah pribadi yang memiliki kesadaran bahwa eksistensi diri di hadapan publik senantiasa terpancar dari kematangan dan keteladanan yang melekat pada dirinya sendiri sebagai makhluk sosial.

Esensi Politik

Siapa saja yang hendak memasuki pentas politik praktis, seyogiyanya telah memahami esensi politik terlebih dahulu. Sebab politik bukan semata mainan sosial *(social game)*. Politik bukan sekadar alat untuk dapat hijrah dari status yang kere menuju posisi sosial yang lebih bergengsi di mata publik. Politik juga tidak bisa dipandang sebagai lompatan untuk memperbaiki "aura" diri di hadapan masyarakat secara pragmatis belaka. Lebih jauh dari itu, politik merupakan salah satu bentuk aktualisasi kehambaan kita kepada Allah SWT di luar konstruksi ibadah *mahdlah* yang telah ditetapkan agama (Islam).

Esensi politik itu amanah kekhalifahan dalam konteks transformasi (ke)kuasa(an) sosial bermasyarakat. Dan kekuasaan sosial bagi setiap manusia bukan hal yang naif dan terlarang. Sebab sedikit mengopi pernyataan Nietzsche bahwa "Dunia ini adalah Kehendak-untuk-Berkuasa – dan tak lebih dari itu! Dan Anda sendiri pun adalah Kehendak-untuk-Berkuasa ini – dan tak lebih dari itu!" Bahkan menurut Schopenhauer, Kehendak-untuk-Berkuasa itu tampil dengan seluruh keberadaannya dimana saja di dunia ini. Maka daya hendak berkuasa dari setiap manusia sebenarnya bukan daya tunggal, melainkan kesatuan dinamis dari keberadaan kosmos itu sendiri.

Tak ada juga yang salah dengan hasrat masing-masing individu manusia untuk berkuasa atau terlibat lebih praktis lagi dalam gelombang (ke)kuasa(an). Sedari awal manusia itu sudah dianugerahi potensi untuk berkuasa oleh Allah SWT, meskipun sebatas menguasai apa yang memang merupakan fitrah kemanusiaannya. Dan yang menjadi problem sesungguhnya adalah pemaknaan maupun cara setiap manusia dalam membawakan kekuasaan itu di hadapan publik sekaligus di mata Tuhan. Islam pun langsung menegaskan bahwa setiap diri manusia adalah

penguasa dan akan dimintai pertanggungan jawab perihal apa yang dikuasainya.

Kalau esensi politik itu adalah “vitamin” terbaik dalam menggerakkan kekuasaan sosial, sudah tentu politik tidak boleh dibiarkan keluar terlalu jauh dari nilai-nilai luhurnya. Ia tidak bisa hanya menjadi alat kepentingan pragmatis kaum politisi, akan tetapi harus menjadi sarana pengolahan kemaslahatan bagi masyarakat secara makro. Ia, meminjam bahasa Karl Marx, harus menjadi jaminan sosial dimana setiap individu benar-benar dapat mewujudkan aspirasi maupun imajinasi politiknya yang murni. Sehingga rakyat tidak lagi menjadi penonton dalam demokrasi dan terjauhkan dari saling curiga serta tidak lagi terjebak diantara klaim-klaim sosial yang parsialistik.

Pencerahan Diri

Dengan latar dan nalar keamanahan itu, maka politik sejatinya menjadi media pencerahan diri setiap manusia. Sedangkan diri yang tercerahkan dalam hal pikiran maupun tindakan, maka ia akan terus melahirkan hal-hal yang produktif secara sosial. Sebab ia bertumbuh dengan potensi dan kesadaran manusiawinya yang berkualitas. Atau secara internal, ia sudah mampu mengurai jalur eksistensialitasnya di hadapan publik tanpa harus bergantung pada pernak-pernik liar apalagi citra sosok atau figur atau nama besar seseorang yang ada di luar dirinya.

Termasuk ketika pasar politik praktis mulai ramai pun, diri yang tercerahkan ini tidak akan menjadi diri politis yang latah, hedonis, utopis dan skeptis. Ia akan tetap menjadi dirinya sendiri, sebagai pribadi yang senantiasa siaga terhadap kelemahan, kekurangan, kelebihan serta keistimewaan yang dimiliki sebagai makhluk sosial. Dan diri yang mengalami pencerahan ini jua yang dalam bahasa Alquran (QS. Al Nisa : 79) akan menandai kekurangan dan kegagalan politiknya sebagai yang timbul karena keterbatasannya selaku manusia biasa. Ia tidak *over-confident* atau *over-dosis* dalam mengonsumsi kekuasaan politik. Sementara kalau meraih kesuksesan, keistimewaan, dan kebahagiaan politik, ia menempatkan sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga sedemikian rupa. Bahkan, diakui atau tidak, kelak ia akan menempatkan politik sebagai eksplorasi jihad sosial-kuasanya di hadapan publik. Karena dengan berpolitik praktis, ia sangat menyadari kalau segala ikhtiar politik yang dilakukan selama ini sebagai wujud dari

pemompaan eksistensi dirinya yang terbaik. Maka ia sesungguhnya telah menginternalisasi semangat Alquran (QS. Al-Nisa:114) bahwa melakukan gerakan berbasis jihad sosial untuk mengubah tampilan sekaligus transformasi (ke)kuasa(an) semacam terjun dalam dunia politik praktis akan lebih baik dari pada hanya bersandar pada "nasib" yang selama ini kurang kontributif di mata umat.

Itulah tipologi politisi yang layak diteladani. Meskipun dunia politik penuh dengan intrik, friksi, konflik, godaan pragmatisme sosial yang berlebih, ia tetap tangguh dengan kejujuran dan loyal terhadap kemaslahatan publik. Ia tidak mudah terjerumus ke dalam jurang koruptif, kolutif, dan terbuai pada tindakan-tindakan yang spekulatif. Ia akan tampil sebagai "rosul" yang senantiasa menghitung masa depan politiknya melalui kelembutan hati dan ketajaman spiritualitasnya. Kalau pun harus melakukan propaganda atau kampanye politik, maka ia tetap mengedepankan apa yang ia bisa dan ia miliki. Sehingga ia terhindar dari pengultusan akan sosok atau figur tertentu, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Intinya, diri tercerahkan ini tidak mudah mengekor terhadap nama besar tokoh tertentu sepanjang karir politiknya. Ia betul-betul akan menjadi diri yang kuat secara karakter, bukan diri imitatif, tidak juga diri yang sempalan. Atau, dalam istilah Karl Marx, ia pasti menjadi diri efektif dan pribadi yang produktif. Dan setiap pribadi selalu berada dalam ruang, waktu, dan era yang berbeda dengan tokoh-tokoh terdahulu. Bahkan dalam konteks gerakan politiknya, dapat dipastikan kalau ia akan konsisten terhadap hal-hal yang sangat populis, humanis, dan realistis. Ia akan tersepikan dari krisis karakter maupun kekroposan identitasnya, terutama sebagai elit partai politik yang pernah berjaya dalam pentas kebangsaan.

Dengan demikian, ia akan sangat awas untuk mempromosikan kepribadian politisnya secara murahan dan tidak esensial dengan hanya memampang potret dirinya di batang-batang pepohonan, di halaman surat kabar, di layar televisi, di dinding-dinding rumah publik, di kaca mobil angkutan umum dan lain-lain. Sebaliknya, ia akan mengakrabi publik dari berbagai aspek sosial kehidupannya tanpa kenal ruang dan waktu. Ia akan berdikari, menyalami dan menyelami nurani publik dengan kapasitas dirinya sendiri yang utuh, bukan dengan kicauan politisnya yang kadang tampak keruh. ***

16

Kedaulatan Rakyat

Negara kita yang konon menjungjung tingggi nilai-nilai religius dan komitmen dasar demokrasi, tampak kian mengalami kebangkrutan sosial politik yang cukup mengenaskan. Rakyat, sebagai kekuatan politik, semakin (ter) jauh(kan) dari arti dan ruang sosial kemanusiaannya selaku warga negara. Di sisi lain, politik elit dengan ganas dan sengitnya telah memorak-porandakan konstruksi emosionalitas, keseimbangan psikologis dan hak politik rakyat di berbagai ruang.

Rakyat sepertinya tidak lagi diposisikan sebagai "subjek politik" yang produktif dan progresif sebagaimana diidealkan dalam demokrasi. Ketulusan sosial rakyat terus ditekan dan nalar kebebasannya pun "dibius" sehingga (merasa) kurang nyaman saat mengaktualisasikan aspirasi maupun hak politik mereka di berbagai lini. Bahkan, rakyat betul-betul mulai dijadikan "obyek politik" atau "pelengkap penderita" yang tidak bernilai sama sekali dalam seluruh tatanan tradisi dan sisitem sosial kenegaraan.

Secara fenomenologis, hampir semua masyarakat tahu kalau

bangsa Indonesia belakangan mengalami krisis multidimensi dalam ranah sosio-kebangsaan, tak terkecuali berkait dengan penyadapan "rahasia" yang dilakukan Australia. Pangkal persoalannya berawal dari runtuhnya komitmen moral kerakyatan dari banyak elit (politik) bangsa ini. Bahkan, besarnya nafsu "hedonisme" sosial elit (politik) telah menjadi faktor penentu yang tidak bisa diasangkal sedikit pun.

Sebatas simbol

Disadari atau tidak, realitas semacam itu yang ikut menyebabkan merajalelanya korupsi, nepotisme, kolusi, manipulasi dan ketidak adilan sosial politik kenegaraan. Itulah yang melahirkan buasnya politisi busuk meraup pragmatisme politik dan utofisme kekuasaan di setiap lapisan birokrasi. Sedangkan rakyat dengan seluruh aspirasi dan problematika sosialnya tidak melekat dalam pikir jernih para elit (politik) untuk segera diberdayakan dan diringankan beban sosialnya. Rakyat selalu dihargai sebatas simbol dan dikonsumsi sesuai kepentingan elit (*elite of interested*).

Berkaitan dengan realitas politik elit yang tidak lagi akrab dan kurang sinergis dengan aspirasi dan kepentingan rakyat, ada baiknya kita sama-sama merenungkan kembali apa yang telah diucapkan Bung Hatta; "bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (*souveriniteit*). Karena rakyat adalah jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat bangsa kita. Dengan rakyat kita akan mati dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam. Hidup atau matinya rakyat Indonesia bergantung pada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan terpelajar baru ada artinya, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya."

Penegasan Bung Hatta bahwa rakyat menjadi standar (ukuran) tinggi rendahnya derajat dan martabat suatu bangsa sepenuhnya memiliki kesinambungan filosofis dengan "kaidah demokrasi," yakni "suara rakyat adalah suara Tuhan." Maka visi dan misi demokrasi itu bertolak dan berujung pada kepentingan dan eksistensi rakyat. Sedangkan pada fitrahnya, negara mana pun dibentuk dan didirikan oleh dan untuk mengayomi serta mengurusi kepentingan sosial rakyatnya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, mencari dan menemukan karakter serta sistem politik berbasis kerakyatan, yang serius menjamin dan menegakkan kedaulatan rakyat, merupakan keharusan yang tidak boleh ditangguhkan demi mencegah ambruknya tatanan sosial politik kebangsaan yang lebih parah lagi. Disinilah kaidah politiknya kaum Nahdliyin bahwa "mencegah sebuah kerusakan (penyakit) politik itu lebih baik daripada mengobatinya", menemukan relevansinya.

Adapun penyingkiran, penumpasan dan pembunuhan terhadap karakter dan hak politik rakyat adalah kezaliman politik yang sah untuk diperangi. Bahkan perilaku dan kultur politik yang selalu mengerdilkan dan melibas kebebasan serta jati diri politik rakyat sangat kontra produktif dengan filosofi maupun esensi demokrasi kebangsaan kita ; demokrasi yang harus dibangun, diolah dan dimaksiamalkan di atas aspirasi dan kepentingan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat).

Semakin kontra

Bahkan, meminjam bahasanya Daniel Dhakidae, "semakin kontra produktif suatu situasi sosial politik elit, dia akan lebih memilih istilah yang lebih halus, tetapi lebih menipu" bagi kehidupan rakyat. Padahal dalam tatanan kehidupan kenegaraan yang ideal, seharusnya seluruh kekuatan dan potensi apapun yang ada di negara ini harus diperuntukkan semata-semata demi hajat hidup orang banyak, termasuk menata demokrasi politik kebangsaan. Bukan sebaliknya, yakni diorientasikan untuk pengolahan *hedonisme* maupun *utopisme* elit politik belaka.

Rakyat, pada dimensi substansial, adalah bangsa atau negara itu sendiri. Rakyat adalah "tuhan" dalam ruang sosial kenegaraan. Dan eksistensi rakyat pada hakikatnya, merupakan "stempel" sah atau tidaknya keberlangsungan sebuah demokrasi politik kenegaraan. Maka menempatkan suara rakyat secara etis-proporsional berarti juga, pada konteks moral praktis, telah menjamin tegaknya kedaulatan dan hak politik rakyat.

Untuk meminimalisir kekisruhan situasi (kultur) politik kenegaraan dan mengembalikan fitrah kedaulatan politik kerakyatan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. *Pertama,* semua

komponen bangsa perlu mempertegas garis gerakan sosial politiknya demi mewujudkan pencerdasan dan transparansi politik bagi rakyat. Hal ini bisa diaplikasikan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan politik alternatif di berbagai lini sosial secara massif.

Pemberdayaan dan pendampingan politik secara produktif adalah agenda terpenting dalam setiap ruang dan konstalasi perpolitikan. Pendidikan politik transformatif yang berjalan selancar mungkin akan menjadi penyegar bagi situasi (kultur) demokrasi kebangsaan. Bahkan, kedalaman pikir politik serta kedewasaan penyikapan rakyat terhadap dinamika atau pergujingan politik, akan sangat ditentukan oleh seberapa maksimal kita menyediakan ruang (lembaga pendidikan) bagi kreasi politik rakyat.

Kedua, reideologisasi politik. Hal ini membutuhkan sikap yang proaktif dalam penyadaran politik bagi rakyat. Sedangkan kerja penyadaran mengandaikan proses yang bersifat internal dan psikologis, dan perubahan-perubahan bagaimana individu-individu memahami dunia mereka. Akan tetapi, setiap perubahan internal dan psikologis dalam individu-individu itu juga memiliki efek eksternal yang cukup signifikan.

Ketiga, seluruh komponen bangsa ini harus berjuang sepenuhnya untuk mengembalikan ruang publik (*public sphere*) kepada rakyat. Sebab, meniru alur pikir Rabindranath Tagore bahwa "kalau kita bermaksud mengembalikan kepercayaan rakyat, siangi dan bersihkan dulu ruang-ruang publik kita sebagai bangsa dan umat manusia." Dan konsekuensi logisnya, tak boleh lagi terjadi manipulasi dan eksploitasi terhadap aspirasi dan kebutuhan sosial rakyat.

Keempat, setiap perilaku politik kenegaraan harus dilahirkan dan dipijakkan pada naluri dan situasi batin sosial rakyat secara menyeluruh. Disini mengandaikan penciptaan ruang komunikasi yang efektif dan strategis antara rakyat dan elit politik. Media-media politik dengan segala perangkatnya perlu dijalankan di atas keseimbangan psikologi sosial masyarakat. Sebab, demokrasi politik akan terwujud manakala kedaulatan rakyat dan kedaulatan setiap individu dalam politik dijamin secara transparan dan profesional. ***

17

Guru Politik

Menjadi guru adalah hal mulia. Ia senantiasa didamba dan diteladani oleh tak sedikit sesama manusia. Dari guru ada banyak ilmu, pemikiran, konsep, dan perilaku atau tatakrama yang dapat dijadikan patokan dalam menjalani dan mengembangkan tipologi diri sebagai makhluk sosial. Bahkan dari guru sering kali kita mengambil *'ibrah* (pelajaran) amat berharga dan bermakna sepanjang masa. Sebab peran dan fungsi guru adalah tindakan pencerdasan sekaligus pencerahan, sehingga setiap diri yang dididiknya semakin terbuka dan peka terhadap realitas hidup secara makro.

Sedemikian mulia dan luhurnya guru dalam pentas kehidupan sosial, tak berlebihan bilamana Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa seorang anak kecil sekalipun yang mampu memberikan satu ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu (kebajikan), maka ia telah menjadi guru bagi kita. Ia tidak boleh disia-siakan. Ia mesti dihormati, diteladani, dimaknai dan ditempatkan pada kedudukan yang proporsional secara berkelanjutan. Ia adalah pembawa hikmah yang tak ternilai dari dan untuk eksistensi kita sebagai hamba Tuhan di muka bumi.

Salah satu hal yang paling menonjol dalam konteks keguruan adalah ketekunan, kesederhanaan, ketegasan, kejujuran, dan kebesaran jiwa dalam memaknai apa saja yang mengiringinya pada setiap ruang kehidupan. Guru itu senantiasa jernih dalam berkata, bening dalam bersikap, dan sahaja dalam bertingkah. Tak terkecuali tingkah dalam wilayah berpolitik. Sebab kalau pun guru terlibat dalam pergunjingan politik, ia akan selalu mengedepankan kejujuran dan kebesaran jiwanya. Ia akan malu meneruskan langkah politiknya bila sudah dianggap cela oleh masyarakat, apalagi dinyatakan berstatus "tersangka" korupsi atas uang rakyat.

Sadar Diri

Ciri dari guru yang baik itu selalu awas dan sadar diri ketika menjalani kehidupan. Ia tidak asal melangkah tanpa arah dan tujuan yang maslahat. Ia selalu awas dan menjadikan hati maupun jiwanya sebagai cermin untuk dirinya sendiri sebelum bercermin pada situasi di luar dirinya. Bahkan dalam perspektif yang lebih arif, ia akan menempatkan pelbagai fenomena dan realitas sosial sebagai "teks hidup" yang segera ditelaah sekaligus diinternalisasi. Dan individu yang menerus sadar diri ini, kata sebagian leluhur, akan mudah memanjati tangga-tangga eksistensialitasnya di hadapan sesama.

Senantiasa awas dan sadar diri bukan semata bekal utama bagi setiap pribadi untuk mengayunkan langkah sosialnya. Lebih dari itu, sadar diri akan mampu mengantarkan masing-masing pribadi pada jalur fitratinya sebagai makhluk sekaligus hamba Tuhan dalam maknanya yang universal. Ia bisa terjauhkan dari hal-hal friktif dan konfliktif yang kadang hanya menambah duka lara diri dan sesamanya, baik yang ditimbulkan oleh kekhilafan selaku manusia maupun yang muncul karena kecerobohannya dalam memegang status (jabatan) sosial tertentu di hadapan publik.

Dalam tradisi Islam, semangat awas dan sadar diri itu mengalir dari falsafah "cermatilah dirimu sebelum engkau mencermati sesuatu di luar dirimu." Falsafah ini seakan hendak menegaskan kalau citra diri mesti terlebih dahulu dicermati sebelum dicitrakan di hadapan yang lain. Kalau diri kita baik dan terbuka pada diri sendiri, tentu mudah sekali untuk baik dan berbagi pada orang lain. Sebab setiap diri yang

hadir ke muka bumi ini pun tidak sepi dari keterlibatan orang lain. Sehebat sangatnya seorang diri, ia bukan hanya berada dengan dirinya sendiri, melainkan pasti berkait dengan peran atau kontribusi orang lain baik langsung maupun tidak.

Menurut catatan pribadi-pribadi yang arif dan bijaksana, masing-masing diri manusia adalah cermin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Ia harus menjadi cermin yang baik dan bersih serta bercahaya terhadap apa yang ada di luar dirinya. Ia tidak boleh menjadi cermin yang retak dan kusam. Sebab kata Paus Yohanes Pualus II, setiap cermin yang retak dan pecah-pecah tidak akan bisa lagi memantulkan bayangan sesuatu secara utuh. Perlu diperbaiki. Karena itu, lanjut Paus, setiap diri memerlukan satu pusat yang kuat dan kokoh di mana ia bisa mempersatukan berbagai nilai (pengalaman) yang ada di luar dirinya.

Dari sadar diri orang akan cepat mawas diri. Dari mawas diri, masing-masing pribadi akan segera mengatrol dirinya dalam berbagai kondisi. Dan alat katrol yang baik itu seringkali disebut pusat setiap diri, yakni sanubarinya sendiri. Kalau saja alat katrol ini diperankan dan difungsikan dengan baik, terutama dalam pentas perpolitikan menjelang pesta demokrasi 9 April 2014 mendatang, tentu prosesi dan cara-cara berkampanye seluruh calon legislator (caleg) tidak akan segeli sekarang. Tak terkecuali dalam memamerkan gambar-gambar dirinya yang (tampak) pura-pura senyum, pura-pura ramah, pura-pura santun, tapi menyimpan "keganasan" di balik desain politik pencitraannya.

Hijrah Diri

Ketika diri, khususnya diri "politis," telah menjadi cermin yang baik dan mampu menampilkan bayangan sesuatu di dalam dan di luar dirinya secara utuh, maka ia pasti dapat melakukan hijrah diri dengan maksimal. Sedikitnya, diri semacam ini akan terbuka dalam menempatkan pola kecintaan pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menjadi pecinta diri yang membabi buta lantas melabrak batas-batas rasionalitas dan spiritualitas sosial bermasyarakat. Ia pasti lebih mengedepankan nilai-harmoni ketimbang sekadar pentas nilai-pragmatisme melalui pencitraan politiknya. Atau, ia akan hijrah dari dirinya yang kaku, pasif, dan hedonis menuju diri yang supel, aktif dan spiritualis.

Cinta diri itu, versi Aristoteles ada dua jenis. Pertama, cinta diri

yang buruk. Kalau seorang diri menginginkan uang, kedudukan terhormat dan nikmat jasmani hanya bagi dirinya sendiri tanpa loyal pada diri yang lain, itulah cinta yang buruk. Dan yang demikian, kata Aristoteles, sebetulnya bukan tipologi orang yang mencintai dirinya, melainkan telah menggali lubang kegagalan bagi dirinya sendiri. Inilah cinta yang sempit, dangkal, tidak bermutu, dan kurang etis ditumbuhkembangkan di areal sosial berbangsa dan bernegara. Istilah lainnya, itulah cinta diri (yang) paradoks. Cinta diri yang bergairah secara materialistik, namun kerontang dalam aspek spiritualitasnya.

Jenis yang kedua adalah cinta dari dan untuk diri sendiri sekaligus diri lain yang bersama-sama menarik napas dalam kehidupan. Dalam konteks ini, cinta diri itu dibasiskan pada hal-hal yang utama, bijak, bernilai, indah, dan membahagiakan diri maupun sesamanya. Inilah cinta diri yang tidak pernah berpaling dari nilai-nilai luhur yang menakjubkan dan mengagumkan. Inilah cinta yang bertumbuh dari dan untuk keuntungan sekaligus kebahagiaan yang universal. Inilah cinta diri berbasis harmoni, bukan semata bernuansa parsialitas dan hedonistik. Dan cinta diri jenis ini sesungguhnya adalah manifestasi dari cinta diri yang *uswah hasanah*.

Guru politik sejatinya adalah orang yang mencintai dirinya pada jenis kedua ini. Ia bukan semata politisi kawakan, atau aktifis politik yang terbilang senior, melainkan juga contoh bagi dirinya sendiri. Ia bukan seorang (calon) tersangka, melainkan (calon) pribadi yang benar-benar terbuka pada dirinya sendiri sebelum giat mengampanyekan visi dan misi politiknya di hadapan orang lain. Sebab guru adalah sosok penyejuk dan pembangkit potensi terdalam dari setiap diri manusia, bukan individu yang hanya mengerti soal memerintah dengan paradigma korupsi, kolusi, dan nepotismenya.

Guru politik, meniru istilah Paus, sejatinya adalah pribadi yang senantiasa ikhlas melangkahkan kaki dan menyebarkan cita-cita sosio-politiknya. Ketika ia tidak ikhlas, maka yang tampak semata ambisi oportunistiknya. Ia akan terus terjerat oleh hasrat duniawinya ketimbang menginternalisasi visi-misi ukhrawinya. Bahkan dalam berkampanye pun, ia cenderung memilih cara-cara instan-koruptif dari pada strategis-humanistik. Tak pelak, ketika terpilih sebagai pejabat publik (anggota legislator), ia menghisap aspirasi rakyat secara hegemonik. Ia seperti pribadi "kerasukan," tidak lagi menebarkan kebajikan. ***

18

Irama (Politik) Rhoma

Sesuai raja dangdut, Rhoma Irama tentu memiliki tempat tersendiri di hati publik Indonesia. Terlebih karena Rhoma bukan semata penyanyi biasa, melainkan dapat dikategorikan dai (penyampai risalah keislaman) yang cukup unik dan mumpuni. Atau, dalam bahasa yang sedikit trend, Rhoma Irama itu seniman di bidang dakwah. Tak heran kalau bersama KH. Zainuddin MZ (almarhum) dan beberapa tokoh lain, Rhoma sempat melahirkan sebuah film "Nada dan Dakwah." Inilah film yang memadukan antara semangat musik, seni tarik suara, dengan spirit Islam sebagai agama rahmat.

Di sisi lain, lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Rhoma tak bisa dimungkiri lebih banyak dinapasi oleh nilai-nilai dan nalar etik dakwah (ke)Islam(an). Beberapa judul lagu itu, misalnya, "Begadang," "Perjuangan dan Doa," "Hari Kiamat," "Isteri Saleha," "Laa-ilaha illallah," "Judi," "Lari Pagi," "Haram," "Nyanyian Setan," "Quran dan Koran," "Darah Muda," dan "Gelandangan," sungguh merupakan artikulasi nalar etik dan etos seni dakwah dari Sang Rhoma. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Rhoma bukan sembarang sosok di negeri ini. Ia adalah figur yang

punya “magnet” tertentu, khususnya di kalangan masyarakat bawah *(grass root)* yang sebagian besar adalah umat Islam.

Rhoma memang tidak pernah menduduki kursi “panas” di legislatif, baik di tingkat lokal (DPRD) maupun nasional (DPR RI). Ia, terutama dari kaca mata politik, terbilang bukan siapa-siapa. Kalau ibarat pemain sepakbola, Rhoma bukan “naturalisasi.” Ia asli bermuka dan berdarah Indonesia. Hanya saja, ia masih masuk kategori pemain yang baru dipanggil untuk diasah dan dipompa potensinya sehingga layak menempati pemain inti yang siap diturunkan dalam pertandingan besar. Namun demikian, sebagai masyarakat yang telah belajar berdemokrasi, tampak kurang elegan kalau kita buru-buru membatasi dan menjustifikasi bahwa seseorang, termasuk Rhoma, adalah figur yang tidak layak mengisi ruang kompetisi politik negeri ini.

Dalam Survei

Meski baru masuk areal percaturan politik praktis, Rhoma kini mulai mewujud sebagai fenomena. Ia mendapatkan respon cukup positif-variatif di kalangan publik Indonesia. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Rhoma selaku manusia biasa, sekarang ia telah menjadi “ikon politik,” setidaknya di kalangan konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan sosok Rhoma merupakan “darah segar” bagi metabolisme tubuh politik PKB yang semakin kehilangan “kebugaran”nya pasca ditinggalkan Gus Dur dan tokoh-tokoh cerdas-kharismatik yang lain di internal NU.

Dalam survei, ternyata Rhoma memang fenomenal. Beberapa lembaga survei tentang elektabilitas calon presiden pada pemilu 2014 mendatang menempatkan sosok Rhoma Irama terbilang dapat bersaing dengan tokoh-tokoh lain yang dikenal lebih senior secara perpolitikan, baik itu Megawati Soekarno Putri, Probowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Jokowi. Lembaga Klimatologi Politik, misalnya, menempatkan Rhoma pada posisi 3,4%, Pusat Data Bersatu 10,4%, Lembaga Survei Jakarta 1,7 %, Pusat Penelitian Politik LIPI 3,5%, dan Alvara Research Centre 20,8 %.

Prosentase elektabilitas Rhoma itu didapat oleh lembaga-lembaga survei selama tahun 2013, meskipun secara temporalitasnya berbeda-beda. Lembaga Klimatologi Politik, contohnya, mensurvei sejak tanggal

12-18 Agustus 2013 dengan 450 responden di 33 propinsi. Adapun Pusat Data Bersatu mensurvei popularitas Rhoma dari tanggal 13-18 Januari 2013 dengan 1200 responden di 30 propinsi. Dan sebanyak 1225 responden dilibatkan oleh Lembaga Survei Jakarta dalam kurun 9-15 Februari 2013 di 33 propinsi. Sementara Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan survei sepanjang 10-31 Mei 2013. Dan Alvara Research Centre, mensurveinya semasa 24 September-13 Oktober 2013 dengan 1.533 responden dari 10 kota besar di Indonesia.

Data survei ini menunjukkan bahwa konstituen politik Indonesia tidak sepenuhnya apatis terhadap sosok Rhoma untuk maju sebagai calon presiden 2014 nanti. Hal ini kian menguatkan bahwa rakyat sudah memiliki nalar demokrasinya sendiri. Retorika elit politik tidak selalu bisa membius dan mengubah respon publik seratus persen. Sebaliknya, tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa retorika elit itu tak ubahnya "igauan" pragmatis yang terus menambah kebisingan politik kebangsaan. Apalagi elit yang mulai santer diincar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PKB dan Rhoma

Konon, sebelum merapatkan diri ke barisan politik PKB, Rhoma pernah menjadi "jurkam" dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bedanya, ketika menjadi bagian dari PPP Rhoma hanya ikut serta untuk membesarkan raihan suara PPP sebagai partai Islam yang diyakini cukup bersih kala itu. Sementara dengan PKB, Rhoma terang-terangan melakukan konsolidasi politik untuk meraih kursi kekuasan nomor wahid di negeri ini. Sampai-sampai putranya yang baru "populer" beberapa tahun terakhir, Rido Rhoma, juga direstui menjadi calon legislator DPR RI dari PKB untuk daerah pemilihan Kabupaten Bogor.

Bahwa pilihan politik Rhoma jatuh ke barisan PKB, bukan hal yang aneh. Sebab Rhoma adalah sosok yang dilahirkan dalam keluarga bertradisi NU, berlingkungan Pondok Pesantren, dan juga sempat "diasuh" langsung oleh beberapa kiai NU, baik di tatar Sunda, Jawa, dan lain-lain. Semangat keislaman Ahlussunnah wal Jamaah itu pula yang membuat Rhoma "tangguh" dalam belantika seni dakwahnya, terutama untuk konteks bangsa Indonesia. Sehingga Rhoma tidak takut "dibid'ahkan" hanya karena mengolah dakwah melalui lagu-lagu berkhas

dangdut. Dan "seruling" yang selalu menjadi bagian dari kombinasi musik Rhoma, di mata beberapa mazhab masih dianggap haram.

Selintas, PKB dan Rhoma ibarat syair dengan liriknya dalam konteks sosio-kebangsaan. Keduanya merupakan pasangan harmoni yang sempat terpisah dari dan untuk proses eksistensial masing-masing lalu "dijodohkan" kembali oleh Allah SWT. Apakah hal ini bisa menjadi anugerah atau bencana politik, tergantung bagaimana cara PKB dan Rhoma membawakan diri. PKB tidak boleh menempatkan Rhoma semata "pemancing elektabilitas" partai di tengah kompetisi politik yang kian berat. Sebab Rhoma bukan satu-satunya figur alternatif yang penuh empati di mata publik. Bahwa Rhoma memiliki basis, tidak bisa dinapikan. Akan tetapi Rhoma juga bukan "bola politik" yang menakjubkan di kancah tanah air, adalah realitas yang tidak bisa disangkal.

Demikian halnya dengan Rhoma, ia tidak boleh merasa lebih superior dari pada PKB. Ia harus senantiasa santun, jernih, dan *istiqamah* dalam mengawal niat luhurnya untuk memperbaiki harkat dan martabat politik Indonesia di masa yang akan datang, setidaknya melalui gerakan politik PKB. Rhoma juga tidak boleh latah dan norak dalam merintis karir politik praktis untuk posisi capres atau cawapres. Sebagai seniman, ia bisa saja unik dan sensasional, tapi selaku "dai," Rhoma tidak boleh ngawur dan emosional, termasuk menyikapi fenomena krisis hukum dan moralitas penegak hukum di negeri ini. Meskipun ingin tampak kontroversial, namun irama politik Rhoma harus tetap mengutamakan *ketawadhuan* dan *kewaraan*-nya. Sehingga Rhoma dan PKB, benar-benar menjadi figur dan partai teladan yang dapat dibanggakan di hadapan publik.

PKB dan Rhoma harus menjadi realitas politik berbasis kebesaran jiwa. Ketika PKB tidak meraih suara sesuai target, atau tiba-tiba tidak lolos ambang batas (*electoral trhesold*), ia tidak bisa menyalahkan Rhoma lalu mencampakkannya. Sebab Rhoma tetap manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Sekiranya PKB mampu mendongkrak perolehan kursi di parlemen, namun Rhoma tidak ditetapkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, Rhoma pun tidak boleh memaki-maki dan "mengutuk" PKB. Karena Rhoma merupakan kompetitor Mahfud MD, Jusuf Kalla atau siapa saja yang telah masuk dalam rumus konvensi "tradisional" yang dilaksanakan PKB itu sendiri. ***

19

Generasi Politik

Keinginan Megawati untuk mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan hasrat Hatta Rajasa merebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) kedua kalinya, adalah fenomena yang kurang enak disuguhkan dalam konteks mengolah dan melahirkan generasi politik yang lebih produktif. Keduanya seakan melegalkan ungkapan filosof sekelas Mandeville, bahwa manusia rata-rata cenderung mengejar kepentingan dirinya sendiri dan abai terhadap keinginan publik yang akan menghadapi zaman berbeda.

Istilah kepentingan, apalagi dalam dunia politik kepartaian dan kekuasaan, hingga kini masih identik dengan hal yang kurang baik. Ia cenderung dilabeli sebagai gelembung "kerakusan" licik-pragmatis yang hegemonik, eksploitatif, manipulatif, dan destruktif. Maka siapa saja yang bergerak dari dan untuk sebuah kepentingan, terutama dalam wilayah politik, dapat dipastikan bukan bagian dari individu yang terbuka (inklusif). Sebaliknya, mereka adalah simbol dari ketertutupan (eksklusifitas) yang pada saatnya akan memasok kepentingan pragmatis

terhadap struktur sosial yang ada di bawah kendali kuasanya.

Adalah betul bahwa tanpa kepentingan setiap diri akan lemah, konsumtif, dan tidak visible dalam mengarungi kehidupan. Akan tetapi, *overlood* dalam (ber)kepentingan, sering kali banyak melahirkan perilaku-perilaku sosial provokatif-destruktif (merusak) dan bahkan dapat menghalalkan pelbagai cara maupun pola hidup yang keluar dari jalur fitratinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Dari sini muncul friksi dan konflik sosial (politik) yang senantiasa mengabaikan aspirasi publik dengan ketulusan yang dipersembahkan dan saat yang sama juga menaburkan bius-bius politik kuasa yang menjijikkan di hadapan rakyat.

Hanya Media

Apapun nama dan bagaimana pula bentuknya, partai politik itu hanya media untuk memompa, melatih, dan mengembangkan potensi politik dari masing-masing individu yang tergabung dalam lingkaran institusionalitasnya. Partai politik bukan tujuan akhir dari cita-cita sosio-kuasa elit yang mengada dan terus menerus mengibarkan misi kepartaian yang dianut. Lebih dari itu, partai politik seyogianya menjadi laboratorium politik bagi seluruh konstituen yang tanpa syarat terus meniupkan ruh demi kejuangan dan eksistensialitasnya sebagai sebuah partai politik di hadapan publik.

Sebagai media pemompaan potensi politik maka partai politik mesti dikelola secara terbuka dan senantiasa diarahkan melahirkan generasi politik yang sehat, paradigmatik, kritis, kreatif, dan produktif dalam membawa masa depan bangsa berbasis semangat regeneratif. Kalau saja diperuntukkan untuk melegalkan otoritarianisme, nepotisme, koncoisme, kubuisme, persekongkolan elit-elit, dan dinasti kekeluargaan semata, partai seperti ini tidak akan pernah melahirkan generasi politik alternatif yang berkarakter. Sebaliknya, partai bertipologi macam ini akan terus terombang-ambing diantara arus kepentingan sosial politiknya yang parsial tapi sangat utopis. Kalau keberadaan dan peran partai benar-benar dijadikan media latih-tanding bagi setiap individu yang bergabung di dalamnya, dapat dipastikan tidak akan ada partai yang strukturnya digilir oleh segelintir elitnya semata. Dengan prinsip media latih-tanding, generasi-generasi

politik yang progresif dan visioner akan terus bertumbuh sehat dan cakap. Dan salah satu manfaatnya, partai tidak mudah kehabisan stok dalam kepemimpinan secara internal maupun eksternal.

Layaknya media latih-tanding, partai-partai perlu menyiapkan dan mewujudkan ruang kompetisi berbasis kinerja dan loyalitas ideologis dan bukan transaksi-transaksi pragmatis. Ada banyak fakta sosial politik yang terang-terangan menyuguhkan bahwa tak sedikit elit partai tertentu hanya lantaran hal-hal sederhana atau sepele melompat ke partai lain dengan segala propaganda politiknya. Ini merupakan bukti betapa kroposnya ruang kompetisi (internal) berbasis kinerja dan loyalitas ideologis dari praktisi partai politik yang ada. Oleh karena itu, setiap elit dan praktisi parpol mesti segera bermuhasabah agar keluar dari kepengapan sistem sosio-kekuasaan yang masih lekat dengan kuman-kuman dinasti-hegemonik menuju halaman kekuasaan politik kepartaian yang ramah-generatif sekaligus mencerahkan. Tanpa langkah ini, parpol memang akan terus berada tapi pelan-pelan dipastikan kehilangan momentum dan progresifitas generasinya. Ini adalah preseden buruk bagi reproduksi kepemimpinan kebangsaan kita di masa yang akan datang.

Perlu Rasionalitas

Untuk mendukung langkah-langkah politik generatif ini, tentu saja yang diperlukan bukan sekadar kemauan. Jauh di balik itu, perlu rasionalitas yang terbangun dengan baik dan argumentatif. Yang dimaksud rasionalitas di sini bukan semata mentradisikan legalitas argumentasi berbasis kepentingan-kepentingan parsial sehingga elit-elit yang tergolong "kuat" bisa terus mempertahankan diri menguasai struktur kepartaian. Rasionalitas yang dimaksud adalah bagaimana semua komponen parpol sepaham sungguh-sungguh dalam memberikan ruang-ruang kompetitif proporsional yang berpijak dari dan demi keadilan politik perkaderan.

Hanya melalui keadilan politik perkaderan, antrian panjang dari barisan generasi politik akan menemukan irisan solutifnya. Mereka tidak akan terjebak lagi dalam friksi dan konflik kepentingan politik yang *mis-ideologis* dan kontraproduktif. Mereka akan sportif menjadi petarung-petarung politik yang kreatif dan berjiwa kinerja. Sebab dengan ruang

kompetisi yang rasional dan proporsional, kader-kader "minimalis" dalam arti males bekerja atau sedikit karya pada ranah politik (bisa) tereleminasi secara elegan. Sehingga kader-kader potensial, kapabel, dan bersih akan dapat mewujudkan cita-cita politiknya melalui porsi-porsi politik yang legal.

Di sisi lain, secara praktis politik, tidak akan ada lagi elit yang menjadi pemimpin "seumur hidup" bagi struktur (internal) sebuah parpol. Dengan demikian, persaingan di dalam dan antar parpol beralih dari sekadar membesarkan orang karena keturunan (dinasti) ke arah pencetak generasi politik berbasis kematangan kejuangan dan karya sosial politik yang realistis. Dus, hal ini pasti mewujud sebagai kekuatan politik tersendiri di hadapan publik. Sebab dengan ruang yang ketat dan kompetitif, sulit bagi elit maupun praktisi parpol untuk tidak melakukan hal-hal produktif dan regeneratif di hadapan publik dengan maksimal.

Terlebih dalam kancah masyarakat politik modern, konstituen atau rakyat semakin matang membaca, menimbang, mengapresiasi dan menjatuhkan (suara) pilihannya terhadap sebuah partai politik. Fakta terus merosotnya perolehan suara partai sekelas Golkar dan Demokrat belakangan ini sudah cukup untuk dijadikan *ibarah* (perumpamaan) oleh segenap elemen parpol. Friksi dan konflik yang kadang terlihat keras di dalam dan antar parpol, disadari atau tidak, sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan secara struktur dan distribusi serta akomodasi kepentingan politik.

Dalam rangka melahirkan dan menyiapkan generasi politik yang prospektif, tak ada kata lain bagi siapa saja yang telah menyicipi suka duka kuasa politik kepartaian untuk segera berbagi kepemimpinan baik secara internal maupun eksternal. Sebab melalaikan keadilan politik perkaderan adalah sama artinya dengan mengeksploitasi dan membunuh karakter maupun karir politik generasi yang ada. Artinya, kader-kader parpol tidak akan banyak menikmati apa yang sering diistilahkan dengan kemenangan dan kemerdekaan politik. Mereka hanya akan tetap menjadi "korban" dari peradaban politik yang tidak peka terhadap pemompaan potensi dan kreasi kemanusiaan secara utuh. ***

20

Krisis Keteladanan

Mencuatnya isu reshuffle kabinet beberapa hari ini hingga soal kesaksian Ahok terkait diendapkannya Perda Reklamasi DKI Jakarta, seakan menunjukkan bahwa pejabat publik dan elit politik memang tak *ngetren* tanpa perebutan citra dan kuasa.

Ditangkapnya sebagian hakim, jaksa, politisi, bupati, pengacara, eks menteri, hingga arus bawah seperti 6 staf kecamatan Tanjung Bumi di Bangkalan yang melakukan pemotongan dana desa, merupakan suatu bukti krisis keteladanan di kalangan pejabat publik kian melebar.

Krisis keteladanan itu terus memiriskan dan menjenuhkan mata. Menjenuhkan mata karena sedemikian terlihat bahwa mereka sulit sekali melibatkan kebesaran jiwa dan kebeningan hatinya manakala berada dalam jabatan sosial keberbangsaan. Padahal sebagai pejabat publik mereka tidak sekadar mewakili aspirasi dan kepentingan diri sendiri melainkan mesti memahami situasi batin sekaligus harapan utama mayoritas rakyat di negeri ini. Bahkan, ada diantara mereka masih bisa tertawa di hadapan publik, seakan menganggap apa yang

dilakukan bukan hal merendahkan dan menjijikkan.

Pikiran Positif

Untuk sedikit mengatasi krisis keteladanan ini diperlukan terbangunnya pikiran positif (*khusnu al-dhan*) dari setiap pejabat publik yang ada. Pikiran positif akan mengantarkan masing-masing diri, termasuk pejabat publik, untuk senantiasa siaga menyelami kediriannya dengan pelbagai perilaku sosial yang dilahirkan. Sebab menurut ajaran Sang Buddha, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Dan, lanjut Sang Buddha, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya.

Sebaliknya, kalau seseorang berbicara dan berbuat dengan pijakan pikiran yang lembut, jernih, baik, maka pelan tapi pasti kebahagiaan akan mengikuti sepanjang hidupnya.

Sebagian kalangan beragama malah menilai bahwa pikiran dan perbuatan baik itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan eksistensi (ke)malaikat(an). Adapun pikiran dan perbuatan yang buruk dan kotor adalah bagian dari sifat dan dorongan perilaku (ke)setan(an). Dari pikiran baik akan lahir kebajikan yang menyejukkan dan bersifat solutif. Dari pikiran buruk dan kotor selalu merajalela kekejian dan kerusakan. Atau, dalam istilah yang lebih sederhana tapi mendalam, dari pikiran dan perbuatan baik akan memancar ketulusan, sedang dari pikiran buruk dan perbuatan jahat akan membuncah hal-hal yang merugikan banyak orang.

Hindari Kebencian

Agar tidak berada dalam pikiran dan perbuatan jahat, hindari kebencian dalam bentuk apapun. Benci adalah awal dari dengki. Keduanya hanya akan mengakibatkan manusia terjerembab dalam kesedihan dan penderitaan. Lantaran benci dan dengki perselisihan maupun pertengkaran sengit merebak di kalangan masyarakat bangsa ini, terutama mereka yang tergolong elit politik. Sehingga solidaritas dan kerukunan sejati sebagai sesama makhluk dan khalifahNya kian jauh dari harapan. Dari benci dan dengki terus berlangsung

penindasan dan hegemonisasi. Dari benci dan dengki tatanan sosial kebangsaan kita pun tak kunjung matang dan dewasa.

Akibatnya, generasi bangsa seperti sebagian siswa di bangku sekolah menengah dan atas juga ikut tidak terdidik dengan baik dan maknawi. Mereka mudah tawuran, cepat saling jegal, saling menyudutkan, gampang anarkis dan tidak peduli lagi norma-norma kolektifitas dan harmonitas bermasyarakat. Bahkan jauh di balik itu, dengan tanpa merasa berdosa mereka suka sekali menyiksa teman sebanyanya dan menghemoni gadis-gadis seumuran dengan perilaku-perilaku destruktif. Hal ini tentu merupakan salah satu akibat dari suburnya pikiran-pikiran jahat di kalangan mereka.

Selama masih menyimpan dan merawat benci dan dengki, sejauh itu pula perbuatan jahat akan merajalela. Sebab kata Sang Buddha, kebencian tidak akan berakhir apabila disikapi dan dibalas dengan kebencian. Dan sekira setiap diri kita masih menumbuh-suburkan pikiran jahat, maka tak akan ada ketulusan dalam berbuat dari dan untuk kepentingan sesama. Paling-paling yang akan terus dikedepankan adalah kecurigaan, ketidakpuasan, gesekan-gesekan, keributan, friksi, konflik, dan pertengkaran sepanjang belum mendapatkan apa yang dinafsui. Ini pasti mencederai kodrat kemanusiaan dan mengganggu integrasi kebangsaan kita.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keteladanan sosial yang baik, diperlukan pula kesediaan dan ketulusan kita memfungsikan mata dan hati semaksimal mungkin. Sebab mata, kata Gus Mus – sapaan akrab KH. A. Mustofa Bisri – (1994: 58), adalah wajah hati. Maka, lanjut Gus Mus, kita mesti memejamkan mata dengan baik dan tulus agar dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di hadapan kita. Sehingga kita tidak mudah benci dan dengki, tidak gampang curiga, tidak suka merampas kehidupan orang lain, dan tidak semena-mena melegalkan pikiran-pikiran jahat sekaligus menjahati sesama makhluk Tuhan di alam semesta.

Atau, dalam semangat ajaran Buddha, keteladanan selalu mengandaikan adanya pikiran jernih dan besar yang mencerahkan. Yaitu pikiran yang dijauhkan dari anggapan-anggapan sentimentil berlebihan. Sebab, menirukan filosofi Sang Buddha, ketika kita masih berpikir "ia memukul saya, ia menghina saya, ia mengalahkan saya,

ia merampas milik saya, maka selama itu pula kebencian tidak akan berakhir." ***

21

Berani Itu Manusiawi

Masyarakat tidak terlalu memperhatikan bagaimana Jokowi terus menjalin komunikasi dan merajut dukungan dari segelintir elit politik bangsa ini, baik itu dari Prabowo yang merupakan kompetitornya pada pemilu 2014 kemarin maupun dari BJ Habibie selaku mantan presiden di Indonesia. Yang lebih diinginkan masyarakat dengan segera adalah sikap berani dan tegas Jokowi menyelesaikan banyak masalah bangsa ini, terutama menyangkut friksi dan konflik yang diseret-seret pada ranah kelembagaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih secara demokratis, Jokowi dan Jusuf Kalla tak perlu sering tebar manuver politik (lagi) di hadapan publik. Pelbagai krisis sosial kebangsaan senantiasa bertambah bukan menurun. Proses pencitraan bukan ruangnya lagi. Rakyat sudah memilih dengan jelas dan legal. Maka kerja dan kerja yang efektif, efisien, dan peka aspirasi rakyat itulah yang paling mendesak diwujudkan. Sebab, kata kaidah usul fikih, "ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan," siapa saja yang sangat banyak perbuatannya

maka ia lebih banyak mendapatkan keutamaan atau maslahatnya.

Terlepas dari benar tidaknya tekanan partai pendukung dan sebagian elit sosial (politik) dalam konteks kisruh KPK-Polri, tentu yang diharapkan masyarakat adalah sikap tegas dari Jokowi selaku Presiden. Melarut-larutkan kisruh yang diidentikkan dengan (ke) lembaga(an) antara KPK-Polri semakin lama sama sekali tidak akan menguntungkan baik bagi Jokowi secara pribadi maupun mayoritas rakyat Indonesia. Bisa-bisa *social image* yang akan terus merebak adalah bahwa terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini benar-benar prematur.

Tak Patut Takut

Jokowi tak patut takut pada siapapun kecuali kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan anugerah maupun kepada rakyat yang telah mendaulatnya. Kalau Jokowi bertindak dari dan untuk kebenaran sekaligus kemaslahatan publik secara menyeluruh, maka keberuntungan pasti menyertainya. Akan tetapi bila Jokowi bertindak hanya dari dan untuk kepentingan partai politik maupun segelintir elit, maka bukan saja amanah rakyat yang akan terkhianati melainkan visi, misi, dan revolusi mental kebangsaan Jokowi sendiri yang patut dipertanyakan.

Bahwa kekuasaan itu amanah dan berat, berbagai ujian menghadapi krisis sosial politik dan hukum seperti ini yang dapat dijadikan salah satu buktinya oleh Jokowi. Menjadi pemimpin dan memimpin tidak selalu mudah. Tapi ketika ketulusan dan kewaspadaan tingkat tinggi yang dijadikan sandaran utamanya tentu saja kemudahan akan selalu hadir. Mudah dalam mendapatkan masukan positif dan konstruktif maupun mudah dalam mengeksekusi kebijakan yang sejalan dengan kehendak publik. Di sini simpati, empati, dan loyalitas publik akan deras mengalir juga. Sebab yang didambakan publik adalah kenyamanan sosial, ketegasan hukum dan kesejahteraan secara ekonomi.

Dengan fakta dukungan rakyat Jokowi tak patut takut. Jokowi punya hak untuk menerima dan menolak intervensi dari segelintir elit selama memang menyangkut kepentingan dan kebutuhan rakyat serta bangsa secara menyeluruh. Jokowi harus berani. Dan berani itu

manusiawi. Tidak melanggar fitrah. Berani, terutama dalam konteks kebenaran dan keadilan, justru sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Sampai-sampai dalam Alquran Allah menegaskan sampaikan kebenaran (walau satu ayat) meskipun sangat pahit. Ini menunjukkan betapa Allah SWT telah memberikan potensi keberanian bagi setiap diri diantara kita sejak awal.

Berani (terkadang) menjadi kunci dari keberhasilan. Tak sedikit orang yang hanya bermodalkan keberanian lalu dengan segera meraih kesuksesan. Mereka berkarakter. Mereka unik dan menakjubkan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sebetulnya memiliki potensi tapi tidak bernyali. Mereka seperti kehilangan obsesi dalam mengarungi kehidupan ini. Mereka terlemahkan oleh situasi. Mereka mengalami krisis (kekuatan) diri sebagai hamba sekaligus khalifahNya. Mereka pasif dan konsumtif, dan jauh dari kerangka jalur-jalur hidupnya yang produktif. Berani bukan pilihan. Sekali lagi, berani itu manusiawi (fitrah).

Imam Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah* mengajarkan begini : "Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan katakan pada Allah aku mempunyai masalah yang besar, tapi katakan pada 'masalah' bahwa aku memiliki Allah Yang Maha Besar." Ajaran yang dalam, indah, menakjubkan dan menggetarkan.

Ajaran Imam Ali ini sangat realistis. Cukup filosofis sekaligus spiritualis. Satu sisi menghimbau kepada kita untuk membuang jauh-jauh rasa takut selaku manusia di hadapan realitas kehidupan. Sang Imam seakan hendak menuntun kita untuk benar-benar memasuki nalar aliran eksistensialisme. Namun pada sisi lain, ajaran Imam Ali ini menekankan agar kita senantiasa berpegang pada prinsip religiusitas yang menempatkan Allah SWT dalam kerangka ideal dan super kuatNya. Sehingga kita tidak boleh takut selama masih menyadari sekaligus memiliki Allah SWT sepenuh jiwa.

Hidup adalah Mati

Hidup itu gerak. Hidup adalah aktifitas. Tak berlebihan bilamana penyair Islam terkemuka, Moh. Iqbal, menyatakan bahwa kalau kita mau tetap hidup berarti tidak boleh diam, jangan pasif, apalagi sekadar

menunggu takdir dan lain-lain. Sebaliknya, lanjut Iqbal, untuk menjaga agar senantiasa hidup kita wajib produktif dan progresif. Sekali kita berhenti meski sejenak saja maka itu berarti kita mati seketika. Sebab, masih dalam prinsip ideal Moh. Iqbal, hidup adalah mati yang menaklukkan, dan mati adalah hidup yang ditaklukkan. Keduanya saling mencerahkan, terutama bagi manusia yang menyadari dirinya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Aristoteles, filosof yang terkenal perintis logika (rasional) pernah mensinyalir bahwa siapa saja dari diri kita ini tidak akan bisa melakukan apapun di dunia tanpa keberanian. Sebab keberanian, dalam padangan Aristoteles, adalah kualitas pikiran dan hidup itu sendiri. Keberanian sangat besar pengaruhnya terhadap eksistensi kita sebagai makhluk sosial yang dikaruniai akal dan mampu bernalar. Keberanian, disadari atau tidak, merupakan pisau pengiris kabut dan kemelut hidup yang betul-betul dibutuhkan sepanjang sejarah manusia dan kemanusiaannya. Atau, dalam bahasa yang lebih gaul, keberanian adalah "mesin" utama bagi setiap manusia untuk membelah dan mengartikulasikan hidup.

Dorothy Thompson pun tak ketinggalan memberikan suntikan mengenai keberanian dalam hidup ini. Ia sedikit lebih gamlang, bahwa pada saat kita tidak lagi takut ketika itu sebetulnya kita mulai mengenali dan mengaktualisasikan hidup dengan ritme yang lebih elegan dan empatik. Dari dan untuk keberanian, tegas Dorothy, kita tidak akan terjebak dalam ranah ambiguitas parsial melainkan bisa melaju cepat menuju kematangan hidup secara universal. Kita akan menjadi pejuang sejati dan terjauhkan dari sisi kepengecutan sebagai makhluk rasional.

Kehadiran Jokowi, seperti telah diimpikan publik sedari awal, adalah untuk mewujudkan banyak perubahan bagi bangsa ini. Dengan demikian, ada baiknya Jokowi mencermati pesan Rosanne Kas, bahwa kunci untuk dapat melakukan perubahan adalah melepaskan rasa rakut berlebihan dari dalam diri. Atau, mengamini istilah (perang) Imam Ali untuk memilih salah satu diantara dua pilihan; memuaskan pedang politik kuasa Jokowi dengan darah jahat atau memuaskan haus kemanusiaan Jokowi sendiri dengan komitmen moral kebangsaan yang luhur, terutama sekali dalam menyikapi konflik KPK-Polri saat ini.***

22

Rakyat (Yang) Merdeka

Rakyat Selalu dijadikan objek. mereka dipotret (kadang) berdasarkan momentum sosial belaka. Mereka jarang ditempatkan pada posisi luhur sesuai dengan harkat dan martabatnya dihadapan publik maupun dihadapan Allah SWT. Mereka diangkat, dikait-kaitkan, ditarik-tarik, dibangggakan, tapi sekaligus dibodohi,dimanipulasi, dieksploitasi, dipolitisasi, dimarginalisasi, ditelikung dan ditinggalkan dalam banyak kesempatan. Rakyat konon suaranya merupakan artikulasi simbolik dari suara Tuhan, realita sosialnya tidak pernah mengalami kejayaan secara utuh.

Dari dulu rakyat memiliki kekuatan dan kekuasaan besar dalam panggung sosial tapi tokoh dan pemimpin yang ditampilkan oleh rakyat selalu lupa darat, egois sulit diajak silaturahmi, menempatkan diri paling sibuk dibandingkan tuhan. Penuh janji, saling lempar tanggung jawab, mudahganti program tanpa mengetengahkan pertimbangan rasional-etik dan praktik-empirik. Lebih memprioritaskan citra sosial ketimbang kerja riil sesuai kebutuhan primer publik. Bahkan, berulang kali rakyat hanya dijanjikan kesejahteraan dengan penantian

panjang yang membosankan.

Rakyat adalah manusia. yang memiliki kesadaran historis dan kesadaran eksistensial dengan tingkat volumenya masing-masing. Bagi rakyat yang cara pandang dan pola hidupnya yang dibangun dari kesadaran dinamis maka mereka pasti menemukan ruang artikulasi hidup yang terarah.

Sebab, meminjam istilah Paulo Faire, rakyat dalam kategori merupakan makhluk yang memiliki kesadaran bahwa mereka hidup didalam (in) dan dengan (with) dunia. Dengan bekal kesadaran ini, rakyat tidak akan mudah dimanipulasi, dihegemoni, dan diekploitasi oleh dunia (kuasa) yang mengitarinya.

Kesadaran dalam kontek ini yang perlu kita tumbuhkan suburkan dari dari untuk rakyat kita. Mereka tidak boleh boleh tenggelam dengan cara pandang dan dentuman sosial yang dihentakan elite dan para pemimpin sosial politik. Melalui kesadaran historis, rakyat akan mengingat , menemukan, dan mentransformasikan model eksistensinya dengan produktif. Pelan-pelan rakyat akan menggeser peran sosialnya sendiri dari (ter)objek(kan) menuju kontruksi subjek –produktif.

Rakyat tidak sekedar di dunia (pasif), melainkan bisa bersama dunia, bahkan mengolah dunia (aktif). Rakyat dapat telibat langsung dalam dinamika pasar zaman rasional dan transaksional.

Di sisi lain, rakyat yang memiliki kesadaran ini dapat mentransendensikan diri secara objektif, memaknai transformasi pikiran dan aspirasi sosialnya penuh otokritik, mampu memproduksi kreasi dan komunikasi hidupnya dengan kualiatas maksimal. Dari sini pula rakyat bisa menentukan makna merdeka dan kemerdekaan.

Rakyat tidak akan lagi berjarak dengan geliat zaman. Bahkan, rakyat macam ini tidak akan mudah dicaplok dan diperjualbelikan secara demokratis-politis oleh elite-elite sosial (kekuasaan). Artinya, rakyat dengan mental kesadaran ini tidak akan diposisikan semata pelengkap administrasi kependudukan, tepai bisa memompa dan mengatur alur sosial dalam kontek makro.

Itulah gambaran rakyat (yang) merdeka. Rakyat yang tidak sekedar disentuh dan diarahkan menjadi peserta pawai sosial, melainkan benar-benar dapat memilah dan memilih mana produksi

bangsa yang merdeka mana pula perilaku sosial yang tidak bisa memerdekakan rakyatnya. Merdeka dan kemerdekaan (rakyat), seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945, adalah hak segala bangsa. Dan karenanya ia bukan semata kata benda, akan tetapi kata kerja yang membutuhkan disiplin sekaligus loyalitas kebangsaan yang benar-benar penuh kejuangan.

Memeriahkan ulang tahun kemerdekaan bangsa, butuh refleksi dan kreasi kemanusiaan. Dengan demikian kita dapat mewujudkan hal-hal produktif berbasis orientasi maupun nilai-nilai kemerdekaan, bukan pola-pola aksidentalisme penuh kesemuan dan kontradiksi yang terkadang tampak sebagai pentas dehumanisasi. Semangat kemerdekaan 1945 adalah kemerdekaan yang tidak semata dari hegemoni penjajah(an) akan tetapi kemerdekaan yang digali, ditelaah, dan diurapi, dari dan oleh moralitas luhur memanusiakan harkat, martabat, keringat sosial mereka.

Penguatan

Dalam rangka mencapai semangat menyemarakan kemerdekaan sebagaimana diatas, diperlukan penguatan secara masif dan prospektif. Seluruh lapisan bangsa harus benar-benar mengerahkan potensi, refleksi, kreasi dan interaksi sosialnya dari dan dari untuk rakyat (yang) merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali berbuat harus menyejarah, dan jangan menodai esensi kemerdekaan. Bahkan, sekali mengisi kemerdekaan, isilah dengan karya kebangsaan dan kemanusiaan. bukan dengan hal-hal yang menghabiskan energi, waktu, materi, dan bersifat hiburan semata.

Penguatan orientasi kemerdekaan bagi rakyat dapat ditempuh, Pertama, dengan menempatkan rakyat sebagai bagian dari sistem sosial budaya dan ekonomi bangsa yang vital dan esensial. Oleh karena itu, merdekakan rakyat dari sengkarut sosial budaya yang kadang dicampur dalih-dalih globalisasi, industrialisasi, kapitalisasi, dan materialisasi murni. Merdekakan rakyat dari krisis ekonomi yang tidak kunjung aspiratif-humanistik. Merdekakan rakyat dari jerat-jerat adu kebijakan mengolah dan mengelola pendidikan. Kembalikan sistem ekonomi khas pancasila bersemangat gotong-royong dan kekeluargaan, Bukan dengan lonjakan manipulasi kroni kuasa dan

perbuangan.

Kedua, kembalikan kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum secara fundamental. Rakyat merindukan keadilan bukan menginginkan suguhan demokrasi dan akrobat politik kuasa menggelikan dengan hanya mengadili yang lemah tapi mengawani yang kuat. Rakyat mendambakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kooperatif, dan edukatif, bukan birokrasi kebal kritik, manipulatif, hegemonik, dan koruptif. Rakyat mengidamkan kemerdekaan esensial menyeluruh dan menghidupkan demi kelangsungan harkat dan martabat sebagai manusia, bukan kemerdekaan prosedural, penuh kepentingan yang mengerdilkan.

Kemerdekaan esensial akan terwujud, meniru sentuhan Robindranat Tagore, kalau setiap diri kita sentiasa memasuki kedalaman suara hati rakyat secara sungguh-sungguh. Langkah ini menuntun kita melahirkan cara dan perilaku memaknai kemerdekaan dari dan untuk rakyat secara integralistik.

Dalam istilah Paulo Freire, rakyat tidak disuguhi kesadaran kemerdekaan yang semi intransitif, yang melemahkan dan menjarakkan dengan realitas kemerdekaan, akan tetapi dilebur dalam kesadaran penuh, yang edukatif, menumbuhkan, menguatkan, membesarkan, menyehatkan, dan mensejahterakan. Itulah fitrah sekaligus esensi rakyat (yang) merdeka dalam (ke)bangsa(an).***

23

Wisata Kita, Wisata Rakyat

Salah satu perangsang perekonomian modern, terutama di Indonesia belakangan ini adalah pemompaan aspek kepariwisataan. Semangat ini pula yang sedang disentuh dan dicarikan bentuk artikulasinya oleh pemerintah Sumenep, dengan mulai memasarkan keindahan beberapa pulau, situs bersejarah, dan lain-lain. Bahkan, pulau Gili Labak yang dulu tak diramaikan, kini mulai digencarkan bukan saja oleh mereka yang menjadi bagian birokrasi melainkan juga oleh aktifis media massa dan masyarakat yang mencintai potensi Sumenep.

Disadari atau tidak, hal ini merupakan realitas prospektif untuk mengangkat dan mengembangkan potensi serta aset sosial pariwisata yang dimiliki Bumi Sumekar. Langkah visioner dan kerja produktif dalam rangka mewujudkan dinamika perekonomian kepariwisataan yang baik tapi tak lepas dari akar tradisi Madura, tentu harus diprioritaskan dari pada sekadar daya tarik pragmatisme finansialnya.

Pada ranah lebih jauh, bisnis dan perekonomian pariwisata

juga tidak boleh mengikis simbol-simbol kebudayaan dan peradaban Madura yang amat kental dengan religiusitasnya. Ini sangat urgens diantisipasi sebelum terlambat. Sebab ketika ekonomi pariwisata hanya sibuk dengan sentuhan-sentuhan materialitasnya, dipastikan dapat meruntuhkan konstruksi tradisi dan karakter budaya Madura yang mengakar sedari leluhur. Padahal semua itu merupakan khazanah sosial kebudayaan Madura yang tidak boleh lenyap oleh gelombang zaman.

Tiga Catatan

Menyimak tulisan A. Busyro Karim, *"Tantangan Nyata Pembangunan Pariwisata Daerah"* (*Jawa Pos*, 13/07/16), setidaknya ada tiga catatan yang mesti diketengahkan. *Pertama*, Busyro tak menampik bahwa tren globalisasi khususnya dalam kepariwisataan, memunculkan kekhawatiran dari berbagai komponen masyarakat. Paling tidak, usai Jembatan Suramadu beroperasi, perubahan sosial di tengah masyarakat Madura secara umum kian bergeser dari keluhuran tradisi dan budayanya. Remaja yang dulu rajin ngaji, di rumah-rumah kini beralih getol main *Hand Phone* (HP) dengan beraneka game yang melekat di dalamnya.

Tak cukup di situ, generasi muda Madura yang terkenal tak banyak tingkah dan taat ibadah, lantaran tren globalisasi, belakangan semakin lepas kendali secara moral, semisal pergaulan bebas hingga mengonsumsi narkoba. Bahkan, remaja yang masih duduk di bangku sekolah pun tak malu-malu memperagakan perilaku sosial yang sejatinya keluar dari norma dan nilai-nilai religiusitas ke-Madura-an. Ini nyata akibat tren globalisasi.Apalagi kalau ekonomi kepariwisataan kian dibuka lebar. Maka interaksi kultural dan pergulatan sosial politik akan hiperaktif.

Kekhawatiran Busyro adalah kegelisahan kita.Teknologi media komunikasi menciptakan aras baru interaksi sosial kemanusiaan tanpa pandang bulu. Dunia sosial kemasyarakatan seakan tak mengenal jarak dan batas. Semua bisa mencerna, meramu, merusak, memaksa, menyentuh, dan menyita dalam berinteraksi seketika.Yang potensi dan ahli akan menguasai, yang kurang bekal secara sosial komunikasi tersisih dan tereksploitasi. Konsekuensinya, berlomba

saling menyentuh, menyita, menyapa, dan menguasai. Saling melandasi dan melintasi. Dan realitas sosial ini tak bisa dipandang sebelah mata, butuh kesungguhan semua pihak mengimbangi dan memagarinya.

Kedua, kesinambungan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, diketengahkan Busyro penuh optimistik. Wajar dalam posisi selaku bupati. Tak masalah kalau dilihat dari kacamata sebagai bagian penting pemerintah yang membutuhkan support swasta. Akan tetapi, Busyro perlu meletakkan jaminan kepada publik ketika pihak swasta yang digandeng melanggar komitmen sosial dan moralitas dalam perspektif ke-Madura-an. Bukan sekadar keuntungan finansial atau devisa negara dari jalur pariwisata yang dikejar, melainkan integritas kita sebagai masyarakat Madura pun layak diunggulkan.

Keuntungan finansial jelas hanya akan berdampak positif terhadap birokrat (birokrasi) dan tambahan devisa. Namun belum tentu bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tak usah jauh-jauh, selama Busyro memerintah hampir dua periode, pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumenep berjalan di tempat. Atau, bisa juga dikatakan tak berprestasi. 10 tahun lalu, masyarakat Sumenep jarang merantau hanya untuk cari nafkah ke negeri luar. Akan tetapi, setidaknya 5 tahun belakangan, masyarakat Sumenep, khususnya di Pesisir Legung, Dapenda, Masalembo, kini mengais rejeki penuh risiko di Batam, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, dan sebagainya.

Lantas apa yang patut dibanggakan? Jangan-jangan program komersialisasi potensi dan aset pariwisata Sumenep yang sedang digalakkan pun hanya menambah beban sosial dan moral masyarakat Sumenep? Atau, ini hanya untuk memenuhi pencitraan dan pengejaran terhadap tren globalisasi tadi? Pelabuhan di beberapa daerah kepulauan saja tak terurus dengan baik. Sekadar contoh, menjelang Idul Fitri kemarin, seorang nenek terjatuh ke laut di pinggir pelabuhan Masalembo karena pelabuhan yang sempit dan tidak dipagari dengan baik. Apakah bupati sadar hal ini?

Ketiga, mempermudah perizinan dalam mengeksploitasi pariwisata sejalan dengan regulasi makro dan tidak merusak alam. Ini tampak baik, tapi mengandung banyak kejanggalan. Faktanya, cemara udang yang menjadi ikon wisata Lombang dan menggerakkan perekonomian masyarakat, belakangan dimusnahkan oleh investor

yang diizinkan membuat tambak udang. Bahkan di Desa Dapenda, tanah-tanah yang ditumbuhi cemara udang kabarnya masih terus dilobi oleh segelintir bawahan pemda untuk diserahkan kepada investor, lagi-lagi untuk kepentingan tambak udang. Ambigu. Paradoks.

Untuk Siapa

Wisata untuk siapa? Untuk rakyat atau pemerintah atau swasta? Kalau untuk rakyat, mari kembali dahulukan aspirasi dan rasa sosial rakyat. Seluruh dinas yang ada, terutama dinas perizinan, mesti diajari mengeja fakta dan rasa sosial rakyat, bukan sekadar jasa kuasa dan getol berinteraksi dengan investor. Rakyat punya mata dan telinga juga. Lebih dari itu, rakyat memiliki nurani dan realitas kehidupan masing-masing. Dan pemerintah ini bagian dari negara, milik rakyat, bukan milik satu keluarga yang (kebetulan) ada di lingkaran pemda.

Wisata kita, wisata rakyat. Wisata yang mesti dibangun dengan kenyataan sekaligus kebutuhan nyata rakyat, bukan oleh imajinasi kuasa dan politik ekonomi penguasa semata. Lombang adalah aset wisata dengan cemara sebagai ikonnya. Kenapa kini direcoki tambak udang yang jelas hanya ngejar keuntungan finansial dan tak berkelanjutan serta akan menyemburkan karbondioksida setiap saat lalu meracuni napas rakyat? Inikah yang dimaksud kesinambungan dan melibatkan budaya lokal seperti disinyalir Busyro?

Bahwa orang semua akan mati itu sunnatullah. Akan tetapi meracuni udara dan napas manusia dengan karbondioksida dan pelan-pelan melahirkan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang sama sekali diluar jalur rel nilai-nilai ilahi. Kalau wisata menjadi alternatif pemompaan ekonomi Sumenep, sebaiknya dirancang (dibangun) dengan hati, dan tidak semata ambisi ekonomi. Yakni, prioritaskan penyerapan dan pengolahan aspirasi maupun kebutuhan primer publik, bukan terlebih dahulu memberikan ruang lebar kepada investor (swasta). ***

Bagian III

Spiritualitas Politik

1
Kearifan Kolektif

Mentalitas politik kita seakan terus berada dititik nadir. Para pelaku politik bangsa ini seakan tidak henti-hentinya mencederai amanah demokrasi dengan mengabaikan aspirasi publik. Yang mereka dengungkan tidak lebih dari arogansi politik klaim bukan perwujudkan keteladanan politik dihadapan rakyat. Mereka kurang arif dalam merealisasikan jalan tengah dengan menyeimbangkan antara struktur nilai (*value*) dan kepentingan politik itu sendiri.

Memang seperti doktrin Aristoteles, memilih jalan tengah (the golden mean) diantara dua unsur yang ekstrim senantiasa riskan. Kemurahan hati, misalnya, adalah jalan tengah antara boros dan kikir, keberanian adalah jalan tengah antara kenekatan dan ketakutan, menghargai diri sendiri juga jalan tengah antara sombong dan rendah hati, dan rendah hati adalah manifestasi dari sikap pemalu dan tebal muka.

Fenomena dilematis seperti itulah yang marak terjadi dan mewarnai sebagian besar praktik pilitik elite kita akhir-akhir ini. Para kandidat capres dan cawapres yang sedang saling pamer kekuatan

pun sering memperlihatkan Perilaku-Perilaku politik yang boros, sombong dan tidak mengerti cara kerja hati, baik melalui survey-survey yang diseponsori maupun beberapa iklan politiknya yang kerap tendensius. Padahal, ketika pemimpin tidak bisa mengolah cara kerja hati nuraninya, kecil kemungkinan mereka dapat mengabdi kepada rakyatnya dengan baik.

Kerja Hati

Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu mendahulukan kerja hatinya ketimbang motivasi kepentingan politik semata. Sebab, hati adalah kompas dalam kehidupan manusia yang paling penting, vital. Hati merupakan tempat bertumbuhnya makna dan kebenaran. Hati yang seperti itulah yang oleh Immanuel Kant, diistilahkan sebagai *categorical imperative* yang telah melekat pada diri manusia.

Nabi Muhammad SAW agar menyerukan agar hati senantiasa ditempatkan sebagai sumber ideal dari segal perbuatan kita (*fastafti Qalbaka)*. Sebab, hati adalah potensi terbaik yang dimiliki manusia. Menurut imam Al-Ghazali hati itu merupakan *Ruhatun Rabbaniyah* jiwa yang berdimensi keilahian yang bisa mengantarkan manusia pada jalan kedamaian. Maka suara hati adalah suara kebenaran yang tak bisa diragukan lagi.

Pada prinsipnya, kerja hati melatih manusia agar kreatif dan produktif dalam memilih jalan tengah diantara sktuktur nilai dan kepentingan politik untuk bisa tampil menyakinkan dan mampu mentransformasikan kerendahan hatian berpolitik. Berbagai tantangan politik akan diharkati secara arif dan toleran dan tidak terjerumus pada gaya adu gertak saling untuk egoisme dan mudah tersulut pernyataan yang kurang proporsional.

Budaya maupun kompetisi politik yang diwarnai oleh sentuhan kerja hati yang baik, akan menuntun pelaku politik mampu bersikap realistis dan proporsional atas pesimisme (*khauf*) dan optimisme (*raja')* melalui berbagai ikhtiarnya. Mereka tidak akan overconfident, berlebihan dalam kenekatan sehingga melahirkan tipologi politik yang meneror psikologi publik.

"Shuchi" dan "Sunao"

Politik yang dilandasi kerja hati seperti itu akan menciptakan budaya maupun Perilaku demokrasi yang siap berderma dan berkhidmat demi kebajikan publik, bukan demokrasi yang selalu mengabdi pada pragmatisme suatu kelompok kepentingan. Dari sinilah akan lahir politisi-politisi yang dapat memahami paradigma kepantasan dan keetisan dalam memperebutkan kursi kekuasaan.

Lebih jauh dari itu, kaum politisi ini akan menyadari pentingnya *Shuchi* dalam berpolitik. *Shuchi* adalah bahasa jepang yang memiliki arti kearifan kolektif. *Shuchi* ini menyiratkan bahwa setiap orang termasuk pelaku politik mesti mendasarkan seluruh tindakan dan pola pikirnya atas pengetahuan yang terkumpul dan pengalaman dari semua masyarakat, bukan atas kemauan segelintir orang yang sangat terbatas.

Bahkan *Shuchi* itu, tulis Konosuke Matsushita (1997), akan membawa manusia dalam dunia diluar perseorangan kedalam wilayah yang melebihi kearifan dan dari tingkat tertinggi inilah, ia dapat mencari dan menemukan jalan autentik hidup dalam dunia.

Dengan menyuburkan *Shuchi* dalam berpolitik setiap pesta demokrasi akan terasa nikmat untuk kita rayakan, dan tidak akan menjelma sebagai beban sosial yang selalu harus diperdebatkan. Ia akan menjadi lumbung pengolahan aspirasi yang benar-benar prospektif dan akuntabel.

Melalui Shuchi, pelaku politik akan terpanggil mengibarkan nilai ideal moral dalam memperebutkan kekuasaan. Mereka akan selalu menjadi kontestan politik yang arif dan ikhlas. Meminjam nasihat Paus Yohanes Paulus II (2005) jalan sempurna dalam mewujudkan kemerdekaan pribadi adalah panggilan menyerahkan diri secara ikhlas.

Politik yang digerakan hati dan disertai *Shuchi* akan mudah melahirkan kebajikan bagi konstituennya. Sebaliknya politik yang dikemas dengan berbagai macam kepentingan (pragmatis) kekuasaan itulah yang seirng kali menyuburkan friksi dan konflikdan budaya konfrontasi di kalangan publik.

Melalui *Shuchi* ini, politik tidak hanya akan melahirkan keikhlasan, tetapi ia akan mampu menaburkan *Sunao*, yakni sikap

kelembutan dan kepatuhan. *Sunao* juga bisa berarti pola pikir yang jernih, tenang dan tidak kosong. Dengan *sunao* para kandidat capres dan cawapres pun tidak akan larut dalam "debat-mendebat" hanya demi pamor dan citra politik, tetapi mulai mengerti sesuatu yang primer dan sekunder dari kebutuhan publik.

Bahkan *sunao* mengandung nilai-nilai kecintaan bukan saja bagi mereka yang menjadi bagian dari komunitasnya, melainkan pada orang atau komunitasnya, melainkan pada orang atau komunitas yang dibenci sekalipun. Ia mendampingi manusia untuk terus mengaktualisasikan dengan dirinya sendiri. Sebab *sunao* memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membimbing kita kearah yang benar. Dengan *sunao* pula kita terus belajar mendengar dari orang lain dan bersifat fair meski terhadap pandangan-pandangan lawan politik. ***

2

Iman dan Politik

"Duka itu doa/Doa itu iman/Iman itu kebenaran", begitu sajak yang ditulis Kuntowijoyo dalam *Makrifat Daun Daun Makrifat* (1995).

Sebagai bangsa yang mendeklarasikan diri menganut nilai-nilai ketuhanan, selayaknya kita menempatkan iman sebagai bagian dari sistem maupun perilaku politik di mana dan kapan pun saja. Menjauhkan iman dari pola dan mentalitas demokrasi, sudah tentu akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan) bagi konstituen politik itu sendiri.

Menyisihkan iman dalam perilaku dan budaya politik hanya akan menjadikan politik sebagai alat menimbun pragmatisme (kekuasaan) dan memutilasi seluruh cita-cita ideal publik. Termasuk brutalisme dan anarkhisme politik akhir-akhir ini, disadari atau tidak sebenarnya merupakan akibat dari meranggasnya iman dalam kedirian kita selaku bangsa (manusia). Dan Tuhan tidak lagi dihadirkan sebagai inspirasi sekaligus motivasi dalam berbagai medium dan struktur perpolitikan.

Tanpa dikonstruksi oleh nilai-nilai keimanan, politik hanya akan

menciptakan individu-individu yang korup, hegemonis, eksploitatif, hedonis, dan sejenisnya. Bahkan produk-produk politik pun akan terus mencederai aspirasi publik. Dalam skala lebih makro, politik tidak lagi dikaitkan dengan prinsip-prinsip moralitas atau etika itu sendiri. Adapun etika atau moralitas, tak akan tumbuh dengan baik di luar lingkungan individu-indvidu yang tidak memiliki komitmen keimanan.

Makna Politik

Bagi Aristoteles, etika dan politik bukan dua hal yang berbeda, melainkan obyek yang satu dan sama. Politik, menurut Aristoteles, berarti sebuah nama dari pengetahuan praktis yang sasaran akhirnya sama dengan etika, yaitu demi mencapai *eudaimonia* atau kesejahteraan vital dari individu manusia. Ia adalah bagian dari etika yang berkait langsung dengan aktifitas dalam kelompok-kelompok manusia. Sebab, masih kata Aristoteles, kecenderungan alamiah manusia adalah membentuk kelompok-kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai sebuah kelompok.

Tak kurang Paul Cartledge, dalam artikelnya *Pemikiran Politik Yunani : Konteks Sejarahnya*, menulis bahwa politik dalam pengertiannya yang paling kuat, yaitu pembuatan keputusan komunal yang diberlakukan kepada publik setelah mengalami pembahasan substantif oleh atau di depan para pemilih yang dianggap sama, dan pada isu-isu yang prinsip serta hal-hal yang murni bersifat teknis operasional.

Politik juga bermakna sebagai sesuatu yang erat hubungannya dengan pemerintahan, yang mengatur masalah-masalah kebijakan publik, atau bidang studi yang berurusan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan berbagai pendekatan demi solusinya.

Pemaknaan politik seperti ini selayaknya diinternalisasi oleh setiap pelaku dan aktifis politik baik dari dalam maupun di luar parpol. Sebab kalau hanya memaknai politik sebagai "syahwat" memangku kekuasaan dengan segala ambisi atau kepentingan parsialistiknya, maka politik akan terus menjauh dari harapan (*hope*) dan kemaslahatan publik. Ia akan menjadi bius sosial yang hanya dimiliki dan dikendalikan oleh elit politik sesuai dengan waktu serta

arah berdasarkan dinamika retorik yang direkayasa.

Artinya, politik bisa menjelma sebagai hama atau bahkan monster yang menakutkan bagi masyarakat. Ia tak akan pernah bisa memberikan jaminan keadilan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi seluruh proses kehidupan rakyat seperti yang disinyalir Aristoteles. Bukan pula pencerdasan dan pendewasaan yang akan terjadi dalam budaya politik, melainkan penyuburan sikap antipati dan anarkhi yang kian melaten.

Teologi Politik

Guna mencegah kebangkrutan demokrasi yang lebih parah, selayaknya kita menyegarkan kembali teologi politik itu sendiri. Pembumian basis-basis teologis dalam politik menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Basis dasar teologi politik sejatinya adalah rajutan esensial dari konsep Tauhid atau Ketuhanan sebagaimana telah dikuatkan dalam sila pertama dasar negara kita (Pancasila). Dengan mengembangkan semangat tauhid atau ketuhanan, bukan berarti teologi politik otomatis mengedepankan aspek formalisme agama melalui segala simbolisasi atau pun ritualitasnya.

Akan tetapi, meminjam bahasa Paus Leo XIII, teologi politik mesti senantiasa menempatkan bahwa kekuasaan publik itu berasal dari Tuhan. Ini sejalan dengan teori demokrasi yang sering mendedahkan kalau suara rakyat adalah suara Tuhan *(Vox Populi Vox Dei)*. Sementara kekuasaan akan mewujud dengan baik dan mampu menjamin eksistensi masyarakat dalam berbagai kebutuhan mendasarnya bila dinakhodai oleh individu (politik) yang berdaya jernih secara rohaniah.

Dalam pengertian yang sederhana, ketika menjalankan roda kekuasaan, mereka melibatkan Tuhan bukan sebatas simbol, melainkan sebagai motivasi dan inovasi praksis-produktif dalam politik kuasanya. Sebab, meminjam sajak Kuntowijoyo, "*mereka yang melupakan Tuhan, tak berhak mendengar burung bernyanyi*" sekalipun. Apalagi sampai memerintah dan memutuskan suatu hukum bagi komunitas besar yang bernama rakyat.

Maka, teologi politik, sebagaimana ditransformasikan Munawir

Syadzali, sangat bersifat substansialistik, yakni berorientasi pada nilai-nilai keadilan (*al 'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*al musawah* atau *equality*). Di sini tidak ada ruang bagi simbolisasi ideologis yang formalistik dan legalistik, melainkan benar-benar menegakkan semangat politik yang berdimensi universal dan memanusia.

Basis teologi politik berikutnya adalah *al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*, menganjurkan kebaikan dan melarang kejahatan. Dalam hal ini, peran politik mesti diarahkan untuk tak henti-henti menetapkan perlunya penciptaan yang dapat disempurnakan demi realisasi diri moral manusia atau pelaksanaan perintah Tuhan. Manusia perlu menciptakan sejarah dengan usahanya sendiri, dan membentuk dunia seperti pola yang telah diwahyukan Tuhan.

Dengan konstruksi teologi politik seperti ini, pesta demokrasi tanggal 9 April nanti tidak akan menjadi perjudian politik atau perdagangan suara yang mengenaskan. Pelaku politik (calon legislatif) maupun konstituen (masyarakat), seyogiyanya menyadari *al rasyi wa al murtasyi fi al nar*, bahwa yang membeli dan yang menjual suara sanksinya adalah neraka.

Untuk itu, iman dalam politik amat perlu ditancapkan. Karena pemilu 2009 ini masih tahap penanaman bukan musim panen benih-benih demokrasi itu sendiri.***

3
Khalifah Politik

Disadari atau tidak, fenomena sosial politik bangsa ini terus menunjukan tabiatnya yang menggelikan. Betapa tidak, para elite partai memeragakan akrobat politik yang lepas dari amanah rakyat. Remang-remangnya kasus Century maupun Gayus, tereliminirnya usulan hak angket (mafia) perpajakan dan semakin pragmatismenya koalisi kepartaian seakan menjadi bukti bahwa politik hanya ditampilkan sebagai "sensasi-propagandis".

Padahal menurut perspektifnya Aristoteles, politik juga merupakan rumusan ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari tujuan tertinggi dari eksistensi manusia pada umumnya. Ia bukan semata alat praktis untuk meraih dan membangun kekuasaan duniawiyah. Ia juga bukan sebatas media permainan dalam melepaskan kepenataan sosial berdemokrasi. Pada ranah yang lebih jauh politik memiliki fungsi ideal sebagai sistem alternatif dalam mengartikulasi kearifan-kearifan ketika menyikapi realitas sosial dan menyusun kebijakan demi tegaknya kebajikan secara utuh bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hadirnya seorang khalifah (pemimpin)

politik berkualitas dan berkarakter merupakan keniscayaan. Ia dibutuhkan bukan semata untuk menghimbau, mengintruksi, dan memerintah, melainkan harus mampu menciptakan terobosan-terobosan kebijakan-kebijakan politik yang sangat kharismatik dan paradigmatik. Bahkan seorang khalifah politik yang berkarakter dan tangguh, dalam kondisi serumit apapun tidak akan pernah mengeluh atau mengklarifikasi masalah-masalah parsial dihadapan publik. Sebab, hal itu kurang mendidik baik bagi rakyat maupun dirinya sendiri.

Makna Khalifah dalam alquran kata khalifah disebutkan setidaknya dua kali. Pertama dalam ayat yang berbunyi "sesungguhnya aku hendak menciptkan Khalifah dimuka bumi" (Qs.Albaqarah:2:30). Ketika Allah SWT sedang menyerukan kepada salah seorang Nabinya yaitu, "Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah dimuka bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah"(QS. Shaad:38:26).

Namun demikian, masih cukup banyak manusia yang kurang kental memaknai kata "Khalifah"ini. Sebagian besar diantara mereka pun masih menganggap bahwa khalifah itu "pengganti Tuhan"dimuka bumi. Inilah pengertian harfiah yang ambigu atau kurang tepat. Kalau Tuhan bisa diganti berarti ia tidak maha kuasa dan karenanya membutuhkan sesuatu yang lain dalam dirinya. Padahal Tuhan maha suci hal seperti itu.

Afif Muhammad guru besar teologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sempat menyatakan dalam suatu diskusi (2008) bahwa yang dimaksud khalifah adalah "kreator"dimuka bumi. Ia merupakan penerus pilihan dari dan untuk kreasi-kreasi ideal Tuhan sebagai yang maha karya di alam semesta. Oleh karena itu siapa saja yang menyadari dirinya adalah hamba Tuhan sudah selayaknya mentransformasikan lompatan-lompatan produktifitas yang kontruktif demi kemaslahatan bagi semua makhluk.

Bagian dari paradigma kreator, tegas afif sambil mengutip Iqbal, bahwa ketika Allah menciptakan tanah liat maka tugas manusia itu menjadikannya sebagai kendi-kendi elok yang bisa bermanfaat menampung air guna memenuhi kebutuhan makhluk lain. Mana kala Allah menciptakan bambu, pekerjaan riil manusia ialah mengupasnya

untuk dijadikan seruling-seruling yang berkualitas yang kelak bisa memberikan "bunyi" pencerahan bagi telinga-telinga sesama makhluk semesta.

Kalau manusia mengakui dirinya merupakan manifestasi dari khalifah Tuhan, atau kreator pilihan, sudah saatnya mereka mewujudkan hal-hal yang senantiasa mengarah pada tegaknya kebajikan termasuk dalam dunia politik. Mereka tidak boleh abai sedikit pun terhadap amanah dan aspirasi konstituennya. Mereka mesti terus komitmen memberikan yang terbaik menyangkut kebutuhan dasar dan kepentingan riil bagi kehidupan publik. Bukan malah sibuk menghitung-hitung kenaikan gaji dan tambahan fasilitas (mewah) demi diri dan kelompok masing-masing.

Maka perilaku kekhalifahan secara politik adalah realisasi maksimal dari seluruh potensi, kekayaan politik (*Political Wealth*), dan kejujuran sosial yang telah dianugrahkan Tuhan sejak azali demi martabat rakyat itu sendiri. Bahkan perilaku kekhalifahan politik sejatinya, merupakan pematangan dari jihad sosial guna mewujudkan kultur dan struktur kehidupan yang cukup mencerahkan, bukan pola kehidupan yang penuh kecengengan.

Bukankah dalam alquran dinyatakan bahwa "sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar"(Qs. Al-Hujurat:49:15).

Waspada

Manusia yang menjadi khalifah politik, pelan tapi pasti akan memiliki kepekaan yang tinggi, sikap kesatria dan visioner dalam menangani problematika sosial (politik) masyarakat. Dan setidaknya mereka akan terus berupaya membumikan nilai-nilai dari sabda Rasulullah SAW, untuk menjaga lima perkara sebelum lima perkara lainnya. Pertama, menjaga kehidupan rakyat sebelum kematiannya. Kedua, menjaga kesehatan konstituen sebelum sakitnya. Ketiga, menjaga kemudaan sebelum ketuaan mereka dan segenap generasi politiknya. Keempat, menjaga kesenggangan melayani umat sebelum kesibukan memenuhi kepentingan pragmatismenya sendiri. Kelima,

menjaga kekayaan dengan jalur yang rasional sebelum kemiskinan karena berhadapan dengan gelombang friksi dan konflik sosial-politiknya.

Hadits Nabi Muhammad SAW diatas bisa juga dilihat dari dua perspektif. Pertama, sebagai penguat terhadap semangat, pepatah “sedia payung sebelum hujan” dalam dinamika politik yang tidak akan pernah lepas dari friksi dan pertikaian atas nama kepentingan. Kedua, mengajarkan kepada setiap praktisi parpol dan elite birokrasi untuk senantiasa waspada dalam menata eksistensi politiknya.

Dengan waspada mereka akan produktif dalam mengukur segala potensi dan kelemahan yang ada dalam dirinya secara objektif. Dan menyangkut kewaspadaan ini, sang Buddha pernah berujar “kewaspadaan adalah jalan menuju kekalan:kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati”.

Melalui kewaspadaan yang tinggi pula, setiap pelaku politik akan memiliki manajemen pengendalian diri yang rasional dan proporsional dalam mengaktualisasikan kepentingan sosialnya. Mereka akan menemukan cara pandang konstruktif dalam menjalankan aktifitas politiknya di tengah kehidupan bermasyarakat. Sebab apapun yang terjadi secara sosial terus menerus dimaknai sebagai bagian dari misi luhur kekhalifahannya dimuka bumi.

Sebagai khalifah politik sejati yang senantiasa waspada, meminjam filosofi ajaran leluhur Sunda, tentu saja para praktisi dan elite parpol itu *“teu naon-naon, kunaon-naon”* tidak akan merasa apa-apa oleh apapun jua. Mereka tidak akan mudah meniru ”seni kodok” dengan banyak melompat dan menyaring suaranya ketika air hujan tergenang-genang. Bahkan meniru Istilah Jeihan Sukmantoro yang dicampur dengan “kecerdasan” Si kabayan, bahwa manusia yang selalu mawasdiri, mereka akan tulus menyelami situasi batinnya sedalam mungkin sehingga segera menertawakan perilakunya sendiri sebelum ditertawakan orang lain. Mereka akan berbesar hati menerima kritik dan kekalahan dalam pergulatan politik. Sebab, berbagai dinamika sosio-politik yang dialami selalu dimaknai sebagai mikraj kemanusiaannya yang teramat luhur.***

4

Tuhan Parlemen

"Tuhan telah mati" begitu kata Friedrich Nietzsche. Lantaran konsep ini. Kelak Nietzsche disesatkan dan dikutuk oleh tidak sedikit kalangan intelektual dan agamawan diberbagai penjuru dunia. Ia dicap sebagai filosof atheistik yang provokatif.

Apa yang dinyatakan Nietzsche, tampaknya sedang terjadi dalam masyarakat elite parlemen kita belakangan ini. Tuhan dimasjid dan pengajian mungkin masih hidup tapi Tuhan diparlemen hampir mati diperkosa oleh kecerdikan dan retorika politisi. Maka wajar kalau perilaku pragmatisme dan korupsi dengan berbagai bentuknya, sedemikian menjamur diparlemen. Tuhan sudah tidak direken lagi.

Tuhan parlemen telah digilas habis oleh roda kepentingan politik dari berbagai parpol baik yang berwatak nasionalis hingga yang selalu memasang merek paling religius. Kalau Tuhan dimasjid dan tempat pengajian selalu jujur pada umatnya, Tuhan parlemen terbukti tidak bernyali dihadapan politisi yang lihai membuai dan mengelabui rakyat. Diakui atau tidak, sebagian politisi parlemen telah akrab dengan penyimpangan dan kemunafikan. Sebagai mana sabda

Rasul bahwa tanda-tanda orang munafik itu manakala ia berbicara ia berbohong. Bila berjanji ia selalu menyalahi. Dan ketika diberi kepercayaan ia berkhianat.

Spirit Politik

Dalam politik menghadirkan Tuhan bukan perkara mudah. Dibutuhkan banyak potensi dan kematangan nurani. Salah satunya dengan memahami ulang spirit politik bukan semata raihan pragmatisme kekuasaan, politik merupakan panggilan ibadah dalam bentuk lain. Ia adalah bagian dari amanah Tuhan bagi individu yang mampu dan dapat dipercaya memanaj aset sosial demi kebajikan politik.

Khwajah Nashir, ketika membahas politik dalam buku Akhlaqi Nashiri-nya menjelaskan ada dua dimensi penting dalam otoritas politik. Pertama, Siyasat al-fadhilah (politik kebajikan) dan siyasat i'naq-ishaq (politik ketidaksempurnaan).

Politik kebijaksanaan tentu diorientasikan untuk membekali dan mengawal setiap individu konstituen atau pelaku politik menuju keselamatan dan kebahagiaan didunia dan diakhirat. Konstituen dan pelaku politik mesti terus berupaya menjauhkan diri dari amal politik yang merugikan umat. Dan mereka benar-benar harus bekerja mewakili aspirasi rakyatnya dalam segala kondisi dengan perspektif kebajikan universal.

Dengan politik kebajikan, relasi konstituen dan elite politik akan tumbuh secara dinamis dan produktif. Prinsip saling menasihati antara masyarakat politik dalam hal kebenaran dan kebajikan akan menjadi warna tersendiri.

Spirit ini sejalan dengan ajaran Alquran, "Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Qs. Al- Ashr: 1-3).

Adapun politik ketidaksempurnaan dibutuhkan guna menghukum dan mengurangi kesalahan serta kekurangan manusia. Dengan politik ini terutama pelaku politik diharapkan untuk selalu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah manusia yang serba

terbatas mempunyai nafsu kuasa yang tinggi, namun harus senantiasa siap berpegang teguh pada amanah politik rakyat.

Spirit politik ketidaksempurnaan bisa menjadi salah satu sarana pengendali hasrat pragmatisme berlebihan dari elite politik. Retorika berbisa dan korupsi berjamaah pun setidaknya bisa diminimalisir. Sebab, dengan spirit politik seperti diatas, Tuhan akan selalu dihadirkan dalam ruang parlemen yang sesak dengan *social bargaining* dan padat kompensasi.

Tauhid Politik

Upaya lain menghadirkan Tuhan dalam parlemen, adalah menancapkan Tauhid politik. Yang dimaksud Tauhid politik ialah meyakini sepenuhnya bahwa proses politik dalam seluruh lini merupakan artikulasi dan aktualisasi dari nilai *syahadah* (kesaksian akan keberadaan Tuhan), iman dan tata laku ketakwaan kita.

Dengan Tauhid politik, asesoris pragmatisme politik baik sebelum dan sesudah menduduki parlemen harus dijauhkan. setidaknya, hal itu akan memompa para pelaku politik untuk benar-benar memikat hati rakyat dengan kinerja dan kejujuran bukan dengan retorika, patronase politik dan utopisme yang menggelikan.

Tauhid politik, memang tidak akan menjamin bebas konflik dan intrik seratus persen. Akan tetapi, dengan nilai-nilai Tauhid apapun akar dan bentuk konflik politik internal maupun eksternal dalam parlemen, akan disikapi dengan moral ilahiah, yaitu tetap mengedepankan paradigma kemaslahatan dari pada kemudharatan.

Tauhid politik akan senantiasa menghadirkan Tuhan secara produktif dalam gagasan hingga kebijakan kolektif politik parlemen. Maka tidak koruptif bukan lagi karena khawatir akan sergapan KPK, melainkan memang didasari oleh kualitas kehambaan di hadapanNya. Itulah yang dimaksud dengan tahalluqu bi al akhlaqillah: berakhlak dengan akhlak Tuhan.

Berpijak atas nilai Tauhid politik, kekeliruan secara politis ataupun kebijakan opertunis, baik karena kepentingan fraksi atau individual, hendaknya dijelaskan kepada konstituen dengan sejujurnya. Yang berlebihan menggiring kompensasi politik secara finansial, harus lapang dada mengaku dihadapan KPK sejantan

mungkin. Kalau penglihatan KPK terbatas, penglihatan Tuhan sama sekali tidak disortir.

Guna membumikan Tauhid politik, sudah selayaknya setiap kader parlemen memahami pesan Tuhan dalam alquran : "sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar" (Qs. Al- Hujurat:15).

Ala kulli hal, seperti kata Multatuli, "Berjihad dengan orang lain kadang menimbulkan perang, tapi berjihad dengan diri sendiri bisa mendatangkan perdamaian". Perdamaian akan nyata, jika kita mampu berdamai dengan Tuhan seutuhnya termasuk di parlemen.***

5

Puasa Politik

Dalam tradisi katolik, konon Yesus mengajarkan kepada umatnya tentang tiga disiplin rohani, yaitu sedekah atau amal kebajikan (Matius 6:1-4), doa (Matius 6:5-13), dan puasa (Matius 6:16-18).

Khusus puasa, masih dalam tradisi katolik, dimaknai dan diposisikan sebagai ungkapan tobat dan masa efektif dalam rangka ulah doa yang hangat. Sebab, kata Paus Yohanes Paulus II, hanya melalui doa setiap diri kita akan mengenal Tuhan secara benar dan personal.

Bahwa puasa adalah media terampuh untuk melatih disiplin rohani, tampaknya tidak ada kontroversi cukup berarti antara tradisi katolik dan islam. Seperti kita tahu pula bahwa diantara disiplin rohani yang baik ialah menjadikan diri kita berhias kesabaran . Dalam islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*al shaumu nisfu al shabri,* puasa adalah separuh dari sabar.

Umum dan Khusus

Dalam Atlas Budaya Islam (Mizan;2003), Ismail R Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Fariqi menulis bahwa Ramadhan merupakan bulan disiplin dan kontrol diri selama kebanyakan naluri dan kebutuhan dasar jasmani dinafikan. Kalau naluri itu disalurkan pada malam hari, hal itu mesti dinafikan lagi pada subuh berikutnya. Begitulah dinamikanya. Sebab, pengulangan yang demikian secara ideal memenuhi syarat pendisiplinan diri. Jadi naluri dan hawa nafsu bisa dikontrol, dikendalikan, lalu dinyalakan pada tempat dan waktu yang baik.

Memang sebagai manusia, kita tidak akan lepas dari desakan naluri dan dorongan hawa nafsu, termasuk naluri kepolitikan dan nafsu kekuasaan.

Tujuan rasionalitasnya, antara lain, meminjam bahasa Al-Quran, agar kita tidak mengalami kejatuhan dan kesesatan lebih fatal daripada binatang. Sebab, fenomena kejatuhan (moral) semacam itulah yang marak terjadi pasca Pemilu Legislatif 2009. Saat itu tidak sedikit calon anggota Legislatif, lebih-lebih yang tidak mendapatkan tiket ke gedung DPR / DPRD, tiba-tiba melakukan melakukan perbuatan yang tidak terhormat, seperti bunuh diri, mencuri karena dililit hutang untuk biaya konsolidasi dan kampanye, meminta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada konstituen dan menghancurkan fasilitas publik.

Disamping berdimensi pengontrolan diri, Ismail dan Lamya menegaskan, khusus bagi muslim, Ramadhan adalah bulan untuk menghitung-hitung eksistensi mereka secara maksimal. Inilah bulan unik dalam rangka menghitung aset serta pertanggungjawaban moral dan spiritual bagi kaum beriman. Oleh karena itu, bulan ini senantiasa diakhiri dengan pesta kemerdekaan diri yang dinamai idul fitri.

Menurut Al-Ghazali, ada kategori puasa terkhusus dari yang umum dan yang khusus, yakni puasa hati dari niatan-niatan rendah dan pikiran duniawi serta memalingkan diri secara keseluruhan dari segala sesuatu selain Allah SWT. Inilah puasa orang-orang salih (*shiddiqiin*),yang tulus dan puasa mereka yang *muqarrabin*, yang benar-benar didekatkan kehadirat rabbul alamin . itulah puasa yang bersifat batini. Ia lebih dalam dan menusuk, lebih bermakna dan integral.

Panggilan Kehambaan

Ketika membahas nilai-nilai batiniah dari puasa Ramadhan, Al Ghazali menegaskan bahwa sedikitnya ada enam hal yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pertama, menjaga lidah dan ucapan sia-sia, dusta, gunjingan, fitnah dan caci maki;menyinggung perasaan orang lain;serta menimbulkan pertengkaran dan melakukan perdebatan berlarut-larut. Persoalan lidah memang tampak ringan, tetapi menyulitkan. Pepatah mengatakan, "lidah tidak bertulang". Ia lembut tetapi membahayakan. Dalam perspektif agama, lidah sering menjadi awal lahirnya perbuatan fitnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda,*" salamatu al insani fi hifdzi al lisani".*Artinya, keselamatan manusia itu sejatinya juga ditentukan oleh lidahnya.

Sebagaimana kita tahu, bahwa dunia politik, terlebih politik parlemen, memerlukan kelihaian lidah. Sebab lidah bisa menjadi salah satu media mendesain retorika atau diplomasi politik. Baik saat beradu argumentasi dalam konteks persidangan diparlemen secara langsung maupun sekedar menyangkut pencitraan (kepentingan) politik diluar parlemen. Terlebih dalam menyikapi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yang penuh sengketa, friksi dan konflik.

Maka, dalam Bulan Ramadhan ini secara mendesak diperlukan kebeningan pikir dan kesehatan perilaku politisi dalam mendisiplinkan rohani masing-masing untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kurang proporsional. Hal itu dimaksudkan agar kita setidaknya bisa menghargai hadirnya bulan ramadhan sebagai bulan yang penuh hikmah bagi kaum beriman.

Para politisi juga perlu menghela nafas sejenak, lalu mengeja kembali salah satu sabda Rasulullah SAW "sesungguhnya puasa adalah tabir penghalang (dari perbuatan dosa). Maka apabila seseorang dari kamu sedang berpuasa, janganlah ia mengucapkan sesuatu yang keji dan janganlah ia berbuat jahil. Dan seandainya ada orang lain yang mengajaknya berkelahi ataupun menunjukan cercaan kepadanya, hendaknya ia berkata, "aku sedang berpuasa'. Aku sedang berpuasa".

Kedua, masih kata Al-Ghazali, menahan pendengaran dari mendengarkan segala sesuatu yang dibenci oleh agama. Sebab segala sesuatu yang haram diucapkan haram pula didengarkan. Bahkan Allah

langsung menyamakan orang yang sengaja mendengarkan sesuatu yang diharamkan dengan orang yang memakan harta haram.

Disinilah saatnya para politisi parlemen menemukan waktu "istirahat" yang tepat dan efektif guna melatih rohaninya mendengar bisikan hatinya sendiri dan jerit tangis masyarakat kecil. Jadi pasca ramadhan, mereka bisa optimal mengolah aspirasi dan komitmen tinggi memberikan jaminan terhadap berbagai problematika sosial masyarakat dimana pun.

Maka, pergunjingan atau pertengkaran politik mesti diendapkan dulu dengan baik supaya kita bisa membedakan mana nilai dan spirit (perilaku sosial) yang keruh serta mana yang benar-benar bening dan jernih sesuai dengan tuntunan ilahi. Sebab, kata Rasul, orang yang menggunjing dan suka mendengarkan pergunjingan adalah serupa dalam dosa.

Dengan demikian, agar spirit ideal ramadhan dapat diselami secara maksimal, sudah selayaknya kita melakukan puasa politik. Puasa politik yang dimaksud adalah menahan diri dari prasangka (dugaan) politis, misalnya menyangkut penggelembungan suara, kekisruhan daftar pemilih tetap, dan penjatahan kursi menteri dalam kabinet 2009-2014. Kemudian, secara kolektif-spiritual kita memasuki relung kehidupan sosial sepenuh hati.

Bahkan, agar lebih mampu membatinkan spirit ideal dan nilai-nilai puasa itu, meminjam istilah tradisi katolik, seyogyanya kita menempatkan puasa sebagai panggilan kehambaan, bukan sekadar kewajiban dogmatis dalam agama. **

6

Lapar dan Politik

Politik praktis negeri ini tampak semakin tambun tapi keropos. Ia mengalami krisis kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan publik. Bahkan energi politik perwakilan yang semestinya yang dipersembahkan demi penguatan demokrasi kerakyatan tampaknya berbalik seratus delapan puluh derajat dengan hanya menjadi topik pembiasan dari perilaku-perilaku politik yang menyimpang.

Fenomena semacam ini ikut melahirkan benih-benih ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi maupun program-program yang dicanangkan institusi politik diberbagai level. Dan tidak jarang, politik pembiasan itu pula yang merangsang praktik-praktik hegemoni sosial di ruang-ruang tertentu

Disadari maupun tidak, politik kadang tidak ubahnya sebagai virus yang makin memperparah kelaparan-kelaparan ditingkat grass root. Maka situasi kelaparan di bulan Ramadhan kali ini patut dijadikan momentum terbaik untuk menjiwai praktik politik yang berbasis kerakyatan seutuhnya.

Secara esensial, ada dua hal penting yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadhan. Pertama, mendalami keikhlasan dalam menjalani hidup. Kedua, memaknai lapar secara produktif. Sebab lapar disinyalir Rasul, bukan sekedar menghindari diri dari memasukkan makanan dalam perut, melainkan agar setiap diri mampu menginternalisasi kepekaan sosial secara empatik.

Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan dunia dan segala perhiasannya, Rasul langsung menolak dan bersabda "tidak, aku lebih baik merasakan lapar satu hari dan kenyang sehari. Jika lapar aku akan bersabar dan merendahkan diri kepada Allah, jika aku merasakan kenyang aku akan bersyukur kepada-Nya.

Dalam tradisi sufistik, salah satu fungsi dari lapar adalah untuk menajamkan kesadaran spiritual dan mencerahkan akhlak. Karena melalui akhlak yang tercerahkan, setiap manusia akan mudah mewujudkan interaksi dengan sesama dan lingkungan sosialnya.

Al-Ghazali mengurai sedikitnya ada sepuluh fungsi lapar, diantaranya. Pertama, membersihkan hati dan menguak tirai yang menutup mata hati. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Abu Yazid al Busthami, bahwa lapar itu laksana mendung. Ketika seseorang dalam keadaan lapar niscaya hikmah akan menghujani persada hatinya.

Kedua, melembutkan hati, sehingga dapat merasakan kegurihan dalam berdzikir. Tidak berlebihan bahwa Syekh Junaid Al baghdadi menegaskan bagaimana mungkin seseorang yang menjadikan perutnya keranjang makanan bisa merasakan gurihnya dzikir kepada Allah SWT.

Ketiga, menyebabkan hawa nafsu menjadi hina sehingga tidak mampu menyombongkan diri dan mengkufuri nikmat Allah. Sebab, pada titik tertentu hawa nafsu bisa menjerumuskan manusia dalam kepongahan yang memilukan. Bahkan, cengkraman hawa nafsu yang begitu kuat, sering kali membuat manusia mudah lalai dan abai terhadap kebajikan-Nya.

Keempat, dengan lapar itu sebenarnya nafsu dapat mudah di taklukkan. Dan kelima lanjut Al-Ghazali, lapar pada dasarnya akan menyehatkan manusia baik dari aspek raga maupun jiwa.

Berberda dengan imam Al-Ghazali, Syekh abu Nasr as Sarraj

berkata bahwa rasa lapar dibedakan menjadi empat. (1) bagi para pemula (murid), adalah sebagai latihan spiritual (*Riyadhah*). (2) bagi orang-orang yang bertobat, sebagai ujian atau cobaan. (3) bagi orang-orang yang *dzuhud* sebagai siasat. (4) bagi orang-orang yang arif sebagai kehormatan. Adapun Abu Sulaiman menegaskan bahwa lapar menurut Allah adalah barang simpanan yang ada dalam gudang yang tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang tertentu yang dicintai-Nya.

Tidak berlebihan melalui hadits qudsi Allah menegaskan bahwa bagi mereka yang berpuasa Ramadhan itu pahalanya ada dua:satu untuk diri hamba dan yang lain langsung hanya Allah yang maha mengetahui.

Namun demikian ada dua kategori lapar. Pertama, lapar kefakiran, ini kategori lapar yang lebih paradigmatik dan produktif. Kedua, lapar kebakhilan, yakni lapar yang berdimensi kurang baik. Lapar kefakiran senantiasa merangkul kelaparan disaat kenyang. Sehingga ketika lapar, maka kelaparan itu menjadi teman yang sangat menyenangkan. Lapar jenis ini yang mampu mendorong manusia melahirkan tindakan secara filosofis dan spiritual.

Adapun lapar kebakhilan adalah kelaparan yang dibalut oleh kerakusan dan kepura-puraan. Inilah lapar yang sangat membahayakan karena bersanding dengan kerakusan. Maka orang lapar seperti ini meniru bahasa alquran, akan mudah mengeluh kalau mendapat bencana dan gampang sekali bakhil atau kikir manakala dianugerahi kebaikan.

Manusia diciptakan bersifat berkeluh-kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan manakala ia mendapatkan kebaikan ia amat bakhil dan kikir (Qs. 70:19-21). Ilustrasi dalam alquran ini seakan tidak jauh beda dengan realitas politik praksis akhir-akhir ini. Selagi politisi kenyang, mereka tidak banyak menaburkan propaganda-propaganda, pura-pura ribut, atau berkeluh kesah pada publik. Akan tetapi, ketika didera musibah, baik dalam wilayah individual, kepartaian, dan terutama menyangkut patronase industri politiknya, mereka langsung saling cerca dan saling ancam.

Artinya ketika bersentuhan dengan lapar, kebakhilan pada aspek (politik) materialisme tertentu, tanpa diminta mereka

mengeluh dan memohon dukungan publik dengan berbagai cara. Ada yang kadang bersumpah demi kepentingan rakyat, ada juga yang tiba-tiba menghadirkan moralitas agama sebagai panduan propagandisnya, untuk menarik simpatik masyarakat.

Demikianlah politik kelaparan di era modern, semangatnya sudah jauh dari kaidah-kaidah insaniyah (humanitas), politik semacam ini memang dilatari oleh akal-akal cerdas, tapi kering secara spiritual. Politik seperti ini, sebagian didesain dengan fisik yang sehat dan berfasilitas lengkap, namun tidak disadari orientasi mentalnya sedang sakit. Bahkan politik praksis modern yang mengklaim dibangun diatas wawasan luas, ternyata kontruksi perasaan atau kepekaan sosialnya sangat sempit.

Salah satu konsekuensi lapar (politik) kebakhilan ini,sering kali juga menciptakan ruang-ruang hegemonik bagi keberadaan publik. Mudah mengabaikan hak-hak primer dari komponen konstituen. Sepintas terlihat paling gigih membela penghematan anggaran negara, meski disela-sela tertentu kepekaan sosialnya terhadap kemiskinan yang kian menjerat konstituen sangat minim.

Itulah sandiwara politik lapar yang teramat bakhil. Lapar yang terus menebalkan egoisme. Lapar yang tidak lagi memiliki kualitas harmoni perpolitikan, lapar yang kehilangan arah pemaknaannya. Padahal kata sufi, lapar itu adalah sebuah pisau terbaik untuk membelah mata rantai egoisme sosial kehidupan kita.

Melalui puasa Ramadhan ini, para elite politik hendaknya bersungguh-sungguh dalam memaknai lapar dan sabar. Terutama lapar kefakiran, sangat tepat untuk dijadikan media guna menyehatkan pencernaan-pencernaan politik yang sudah bertahun-tahun mengalami gangguan. Sehingga eksistensi politik kebangsaan kedepan tidak mengalami kerusakan yang teramat parah. ***

7

Manusia Politik

Akhir-akhir ini politik kian identik dengan korupsi atau mesin kejahatan sosial yang sarat retorika. Fenomena terkuaknya kasus korupsi dilingkungan politik parlemen (DPR /DPRD) dan eksekutif (Gubernur / Walikota / Bupati) serta para elite partai politik seakan membenarkan tesis ini. Pelbagai aktivitas politik yang dikemas dalam bentuk apapun tetap saja dianggap tidak lebih dari gerakan pragmatisme yang diorganisasi berdasarkan struktur kepentingan masing-masing. Bicara politik bagi sebagian besar warga masyarakat mulai dimaknai sebagai wacana menumbuhkan antipati tersendiri.

Namun, dunia politik belakangan ini juga menjadi tren sosial baru pencarian eksistensi sebagian masyarakat. Meski tanpa pemahaman dan bekal cukup, kaum agamawan hingga pegiat *infotainment* semakin memburu industri politik dengan modelnya sendiri. Jalur politik dianggap sebagai alternatif ideal yang cukup strategis mengangkat prestise sosial mereka, terutama oleh kaum selebriti yang telah mengantongi popularitas diberbagai level.

Dari satu aspek, tren berpolitik memang tampak

menggairahkan. Akan tetapi, dari lain aspek, budaya politik semakin jauh dari kontruksi nilai-nilai luhurnya, kurang produktif, dan tidak prospektus. Politik hanya dijadikan batu lompatan utopisme yang sama sekali tidak dikaitkan dengan pemompaan iman dan kemanusiaan pada skala yang lebih makro. Kecenderungan rasionalisasi politik boleh dibilang benar-benar terdistorsi dari kualitas nalar kepublikan. Artinya, politik diburu dan dicipta hanya untuk melayani diri sendiri. Dengan setumpuk ambisi, bukan untuk memapah rakyat dengan totalitas pengabdiannya. Problem ini berkaitan erat dengan keberadaan politik itu sendiri.

Hakikat Manusia

Meniru istilah Driyarkara, manusia senantiasa dipandang dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani manusia dianggap sebatas kerangka simbolik. Adapun rohani manusia dimaknai sebagai penentu eksistensi. Jasmani atau badan hanyalah sinar dari roh.

Menurut pandangan agama (islam) yang disebut manusia adalah akhlaknya, bukan status, badan, harta dan karier sosial yang dimiliki. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya aku diutus kemuka bumi hanya untuk memperbaiki Akhlak umat manusia". Tanpa moral dalam pandangan Alquran manusia disamakan dengan binatang. Bahkan lebih rendah. Artinya, orang yang hanya puas dengan badan belum bisa disebut manusia tetapi ia baru sampai pada posisi *basyar*. Itu baru cangkang makhluk yang tidak memiliki visi dan belum mengenal nilai.

Dalam tradisi filsafat dikenal dengan tiga tahap proses eksistensi manusia. Pertama, tahap estetis. Dalam konteks ini orientasi hidup manusia hanya digantungkan pada apa saja yang dianggap menyenangkan. Naluri-naluri hedonistik menjadi ciri utama manusia pada tahap ini. Ia sama sekali tidak mempunyai passion dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan. Ia mengalami krisis aktualisasi dalam makna sebenarnya.

Manusia estetis hanya hidup untuk kebutuhan dan kesenangan diri. Ia tidak berjiwa atau tidak mempunyai kepekaan sosial. Ia individualis-Utopis. Satu-satunya kemauan yang menonjol adalah hanya terus mengikuti tren zaman tanpa sedikit pun melakukan

otokritik.

Kedua, tahap etis. Manusia etis itu mulai menempatkan pikiran dan kesadarannya sebagai salah satu media mengukir eksistensinya.

Yang ketiga, adalah tahap religius. Inilah tahap paling tinggi, ia benar-benar telah mengenal dirinya. Bagi setiap orang yang mampu mengenali dirinya, ia akan mudah mengenal Tuhannya menurut imam Al-Ghazali. Manusia religius ini mulai bisa diandalkan untuk mentransformasikan spirit kemanusiaan dan kehambaan.

Ia sudah bisa hidup dalam Tuhan serta mau berbagi kebajikan terhadap sesama tanpa pandang bulu. Sekat primordialisme, dan komunalitas. Kepentingan dirinya bisa dikalahkan oleh kepentingan orang lain yang dianggap lebih pantas mendapatkannya. Manusia religius sejatinya adalah manusia khidmat, manusia penderma, dan manusia yang menjadikan komitmen ketuhanan sebagai kiblat prilaku sosialnya.

Memaknai Politik

Berdasarkan tiga tahap eksistensi itu, manusia juga mengalami perberdaan dalam memaknai politik dengan segala aksesori didalamnya. Manusia yang pada tahap estetis tentu lebih cenderung memaknai politik sebagai alat untuk memenuhi hasrat dan budaya hedonistiknya. Ia akan menempatkan politik semata sebagai sesuatu kekuatan untuk meraih kekuasaan dan kesenangan parsialistik. Bahkan, bisa jadi ia terus mengeksploitasi segala sesuatu tanpa sedikit pun berpikir tentang nilai dan kebijakan.

Sangat mungkin pula para koruptor itu termasuk dalam kategori manusia estetis, manusia yang egois-materialistik, atau manusia yang hanya hadir sebagai problem dan bukan mendermakan diri sebagai rahmat dan solusi bagi konstituen dan lingkungan yang ada. Mereka tidak saja rakus, tetapi juga benar-benar telah mencederai fitrahnya sebagai manusia.

Adapun manusia etis, yang sudah mengenal dan menerima nilai-nilai kebajikan moral, sedikitnya akan menempatkan politik sebagai proses mematangkan kualitas solidaritas sosialnya. Ia akan menganggap politik sebagai seni.

Sebagai seni, politik menuntut ekspresi dan apresiasi produktif

dari setiap manusia yang mendandaninya. Ia harus menciptakan jalur-jalur alternatif dalam mengartikulasi empati sosialnya terhadap aspirasi dan dinamika publik, tidak hanya bisa memanipulasi dan mengkomersialisasi legitimasi sosial konstituen. Bahkan, meminjam istilah Jakob Sumardjo, sebagai seni terkadang politik harus bersentuhan dengan pendustaan, tetapi dusta yang bisa mengungkap kebenaran.

Disisi lain seperti kata Aristoteles, politik adalah bagian dari etika, yang berkaitan dengan orang-orang dalam aktivitas kelompok. Secara alamiah, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membentuk dan bertindak secara berkelompok. Meski demikian, sebagai seni, esensi politik tidak mesti dibatasi aspirasi dan kepentingan komunalisme semata, dan seni politik adalah seni menjahit. Harmoni kehidupan publik seutuhnya.

Maka, manusia politik masa depan bukan manusia propagandis dalam tahap estetis atau manusia *maido* yang hanya pandai (diplomasi) membantah kebenaran, melainkan manusia yang benar-benar memiliki kapasitas dan kejernihan meramu serta menyuplai kedalaman empati bagi perbaikan kehidupan rakyat.

Bahkan manusia politik bukan sebatas selebriti televisi atau vokalis parlemen melainkan mereka yang betul-betul sadar dan memahami sabda Rasulullah SAW, "*khairunnas an fa'uhum linnas* atau sebaik-baiknya manusia ialah yang bisa mentransformasikan manfaat bagi semuanya dalam setiap ruang dan waktu. Itulah manusia yang telah mencapai tahap etis sekaligus religius. ***

8

Perempuan Dalam Politik

Belakangan ini, kaum perempuan seakan berada dalam tarikan berliku antara tetap mengada dengan kodratnya yang azali atau berkarir di pentas sosial dengan segala tantangan sekaligus *reward* -nya. Sejak era modern hadir dalam peradaban manusia dengan pelbagai tawaran pragmatisnya, kaum perempuan mulai hidup dalam "*social pressure*" yang terbilang rumit.

Rumit karena satu sisi perempuan harus berpegang teguh pada semangat tradisi dan mitologi yang telah menjamin kodratnya; sebagai pendamping kaum lelaki, pengasuh anak-anak, dan pengelola dapur dalam masing-masing keluarga. Sedangkan pada sisi lain, kaum perempuan harus memaksimalkan hak-hak sosialnya, yakni sebagai makhluk yang memiliki peran dan kedudukan sama di pentas publik dengan kaum laki-laki.

Dalam dunia politik, misalnya, perempuan kini terus mengepakkan sayap sosialnya. Parlemen tidak lagi hanya diisi kaum lelaki. Bahkan dalam pemerintahan eksekutif pun, kaum perempuan telah membuktikan keunggulan eksistensialitasnya. Megawati

(mantan presiden RI) dan Ratu Atut (Gubernur Propinsi Banten), merupakan salah satu bukti yang telah berbicara dengan dirinya sendiri pada publik.

Diskriminasi sosial di antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif modernitas dan demokrasi, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih lagi karena demokrasi bukan sistem yang hanya memilah-milah atau membedakan jenis kelamin dan status sosial. Lebih dari itu, demokrasi adalah sistem sosial yang hendak memberikan makna terhadap keberbedaan dalam kehidupan.

Kedewasaan penyikapan terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik, memerlukan kejujuran pemikiran dan juga kematangan nurani. Ego kaum lelaki tampaknya masih sulit menerima realitas sosial ini dengan lapang dada. Padahal mengabaikan kenyataan persamaan secara sosial, sejatinya telah bertentangan dengan semangat kemanusiaan secara universal.

Dalam perspektif agama (Islam) pun, antara laki-laki dan perempuan diangap satu jiwa. Yang berbeda di antara mereka hanya menyangkut kualitas ketakwaan dan integritas moralnya dalam mengarungi kehidupan. Bahkan menurut Alquran, pada dimensi yang sangat esensial, mereka adalah pasangan makhluk yang sangat ideal *(hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna).*

Suatu Pilihan

Konon, Edith Stein, filosof dari Jerman, pernah berkata "Hidup ini merupakan sebuah rangkaian pilihan dan perjuangan. Perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan harapan." Sementara pilihan adalah ruang dimana konsistensi dan inkonsistensi saling berpacu mengolah kualitas nilai-nilai kebenaran yang dimilikinya.

Memilih, kata Sartre, adalah bukti kecerdasan dari setiap manusia. Manakala manusia dihadapkan pada suatu pilihan, baik atau tidak, menguntungkan atau menyusahkan, membahagiakan atau menyedihkan, dan saat ia tidak memilih pun, tegas Sartre, tetap sebuah pilihan. Yakni, memilih untuk tidak memilih. Itulah seni kehidupan.

Isidorus Lilijawa lalu menerjemahkan semangat Stein dan

Sartre dengan menyatakan bahwa setiap pilihan dari kita telah menampakkan ketentuan kita di hadapan yang lain. Pilihan kita, lanjut Lilijawa, merupakan keunikan dan keistimewaan diri. Dengan pilihan itu, kata Lilijawa, setiap diri kita dapat mengenakan predikat makhluk hidup yang dinamis, bukan manusia statis.

Perempuan yang terlibat aktif dalam dunia politik, tentu harus dimaknai secara positif. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu adalah sebuah pilihan. Bukti dari keunikan dan keistimewaan yang telah ditunjukkan oleh kaum perempuan. Membatasinya, berarti juga membunuh karakter dan mencabut fitrahnya di muka bumi.

Dalam tradisi spiritual terdahulu, ada falsafah yang menyatakan bahwa kaum lelaki tanpa didampingi kaum perempuan, sepanjang hidupnya tidak akan menemukan kedamaian dan keindahan. Bahkan, menurut falsafah Ibnu Arabi, kerinduan seorang laki-laki pada perempuan adalah cerminan kerinduan Tuhan kepada manusia.

Peradaban politik kebangsaan kita yang tampak patriarkhistik ini mesti diimbangi dengan politik bersemangat matriarkhistik. Sehingga friksi dan konflik yang terus mendera kehidupan sosial tidak kian jauh dari kepekaan humanitas dan keadilan. Sebab kaum laki-laki cenderung egoistik-pragmatis, sementara kaum perempuan itu sensitif-kompromistik.

Tak berlebihan bila Mahatma Gandhi dalam satu catatannya mengatakan bahwa "perempuan itu dalam segala kehidupannya selalu mengedepankan aspek terdalam dari lembutnya perasaan dan ketundukan. Perempuan adalah makhluk yang senantiasa berpegang teguh pada fitrah sosialnya."

Pernyataan Gandhi, tentu bukan hendak menegaskan bahwa keterlibatan perempuan adalah alternatif terbaik bagi masa depan politik kita. Namun sekiranya praktik politik senantiasa dikemas dengan spirit kelembutan seperti yang menjadi perangai kaum perempuan, mungkin berbagai problematika sosial mudah teratasi.

Kalau kaum lelaki biasa berjalan dengan rasio-kritisnya, kaum perempuan lebih cenderung mengada dengan ketajaman dan kecemerlangan nuraninya. Kalau laki-laki dalam bekerja hanya mengandalkan capaian parsialistik, kaum perempuan senantiasa konsisten mengedepankan nilai-nilai universal.

Akhirnya, seperti disinyalir Annie Lecrec, bahwa “jika kebajikan lelaki adalah kekuatan, maka kebajikan perempuan disebut pengabdian. Dan yang menindas perempuan sebenarnya bukan kekuatan lelaki melainkan perilaku perempuan sendiri yang selalu dianggap sebagai bernilai tinggi: Pengabdian.”***

9

Ksatria Politik

Ismiryadi alias Dodot memang bukan siapa-siapa. Ia manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan sebagai hamba Tuhan sekaligus "makhluk politik".

Dan salah satu kelebihannya kini adalah mengaktualkan diri sebagai kstaria politik, terutama dalam konteks dinamika pesta demokrasi rakyat Pangkalpinang beberapa hari ke depan.

Sebagai pelaku politik, Dodot tentu sadar bahwa politik senantiasa sarat dengan tekanan, rekayasa, bahkan konflik yang seringkali menanjak. Terlebih fenomena politik belakangan ini, warna dan aromanya disamping menggugah pikiran juga telah memberikan fakta sosial yang kurang sedap dirasakan, khususnya menyangkut pemanipulasian hak dan kekayaan rakyat.

Terlepas dari itu, Dodot seakan menyadari betul apa yang pernah dikatakan oleh salah satu filosof bahwa kalau Anda mau menjadi orang yang hebat, Anda harus mengawali karya sejak saat ini dengan cara yang hebat pula. Sebab dengan memulai sedari awal, kelak Anda akan mengetahui apa yang akan Anda capai. Jika tidak

demikian, Anda tak bisa banyak berharap selain gulungan angan-angan yang terus berterbangan.

Langkah Dewasa

Meskipun disingkirkan dari ring pilwako Pangkalpinang sejak dari pengujian administrasi dukungan partai politik, Dodot tidak pernah melakukan pengerahan massa untuk meresponi ketidakpuasannya. Ia mengambil langkah dewasa, yakni memproses kejanggalan itu melalui jalur hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan kepemiluan. Sebab demokrasi tanpa perwujudan hukum yang baik dan adil, meniru istilah Mahfud MD, hanya akan melahirkan kanibalisme-kanibalisme berkedok demokratisasi.

Pesta demokrasi politik dimana pun tidak akan mengalami kemajuan berarti manakala para kontestan dan penyelenggara di dalamnya juga tidak memahami betul nilai-nilai luhur demokrasi, seperti kesamaan hak politik setiap warga. Sekiranya demokrasi dikembangkan dengan spirit dan cara kerja yang bergantung pada pesanan kepentingan segelintir "borjuis-politik", tentu saja hasilnya akan menjadi sandungan bagi ketertiban sosial masyarakat.

Konsekuensi logisnya, politik akan terus dipahami dan ditempatkan oleh masyarakat sebagai budaya kekuasaan yang sangat hegemonik, manipulatif, dan koruptif. Tidak cukup disitu, bahwa politik itu kotor dan menjijikkan akan semakin melekat di lintingan memori publik. Ini sangat tidak produktif bagi proses humanisasi demokrasi, dan tidak akan pernah mencerahkan rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

Adapun humanisasi demokrasi itu selalu memerlukan hadirnya kstaria politik secara maksimal. Sebab ksatria politik bukan saja sosok yang gila (ke)kuasa(an), melainkan figur yang terus menerus loyal terhadap kematangan daya pikir dan perilaku politik masyarakatnya. Dalam istilah yang lain, ksatria politik adalah "nabi peradaban" berbasis kemanusiaan bagi seluruh elemen masyarakat, bukan "teroris politik" yang egois dan hedonistik.

Soekarno dan Gus Dur, kalau kita mau jujur, sejatinya merupakan contoh ksatria politik yang pernah hadir di negeri ini. Di Era Soekarno, tradisi politik lebih kental dengan falsafah kejuangan

yang dahsyat, bukan dengan tarikan keuntungan (finansial) yang sesaat. Makanya Soekarno disegani di dunia internasional. Ia tidak sekadar seorang presiden yang lincah, melainkan filosof sekaligus ideolog politik yang menakjubkan melalui Marhaenismenya. Ia bukan semata teladan pencerahan politik bagi bangsanya, melainkan "dewa demokrasi" bagi dunia melalui rumusan bernegara sebagaimana tertuang dalam sila-sila PANCASILA-nya.

Sementara Gus Dur, adalah kiai nyentrik yang lihai menata taktik dalam berpolitik. Bersama NU dan loyalitas kebangsaannya, ia tak pernah lelah membumikan nilai-nilai luhur demokrasi meski paradigma maupun kejuangan politiknya yang religius dikandaskan oleh arus politik pragmatis yang sangat norak. Akan tetapi Gus Dur tetaplah Gus Dur, pejuang demokrasi yang selalu kaya humor.

Kearifan Politik

Di mata sebagian besar masyarakat, Dodot mungkin dianggap sosok yang kalah sebelum berperang. Walaupun ia dinyatakan berpegang pada kebenaran di hadapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pengadilan Tinggi Negeri (PTUN) Palembang, tetap saja Dodot "ditaruh" di luar ring oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang dalam konteks pilwako 2013.

Ini menjadi fenomena menarik bagi kita sebagai elemen tervital menyangkut pesta demokrasi. Langkah politik dan jalur hukum yang ditempuh Dodot yang telah membuahkan hasil dengan dipecatnya tiga dari lima anggota KPU Pangkalpinang ini semoga tidak merembet pada dua komisioner yang masih tersisa. Dan sebagai ksatria politik, Dodot pun masih istiqamah tidak melibatkan barisan massa pendukungnya berdemo atau mengepung kantor KPU dengan perilaku anarkis atau yang sejenis.

Sungguh, apa yang dilakukan Dodot, baik sebagai individu maupun mewakili kelompok politik yang hendak bertarung di pilwako, patut diapresiasi oleh para elit politik dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu bentuk kearifan politik yang layak kita transformasikan sebaik mungkin. Sebab tanpa didasari kearifan dalam berpolitik, tentu saja konstruksi demokrasi akan kehilangan

arah dan auranya.

Di sisi lain, dengan berbasis pada kearifan, politik akan senantiasa sejuk dipandang dan dijadikan rujukan sosial. Ia akan berjalan dengan bangunan paradigmanya yang elegan dan terarah. Bahkan, kesadaran dan kekuatan intelektual dipastikan terus diprioritaskan di dalamnya daripada dorongan emosional yang sempit dan destruktif.

Sebagaimana kita mafhumi, dalam setiap pertarungan, tak terkecuali pada ranah politik kekuasaan, mesti ada yang dianggap menang dan dinyatakan kalah. Dan secara teoritik, sangat mustahil semua petarung pasti menang atau kalah. Namun yang lebih penting dari kemenangan atau kekalahan adalah penyikapannya secara matang-cemerlang dan arif-produktif. Bahwa kalah itu terasa sakit, dan menang itu cukup menyenangkan, tak bisa dinafikan.

Pepatah menang jadi arang kalah jadi abu, sepertinya mulai kurang pas dijadikan sandaran dalam kehidupan, tak terkecuali bagi dinamika politik. Sebab politik itu hanya media untuk mengatur lalu lintas kekuasaan, bukan tujuan utama dalam berkuasa. Politik itu seni memola imajinasi dan kreasi sosial, bukan semata alat membangun konspirasi (kekuasaan) horizontal.

Terlepas dari karakteristiknya sebagai petarung tangguh, Dodot tetaplah manusia biasa yang rindu rasa rindu sapa, terbatas sekaligus memiliki potensi spiritualitas. Dan sebagai kstaria politik, tidaklah keliru bilamana Dodot juga memasuki ruang substansial ajaran Sang Buddha bahwa kemenangan menimbulkan kebencian, sementara yang kalah berada dalam ruas penderitaan. Manakala mampu melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan dalam arti yang parsial, setiap diri akan hidup damai. ***

10

Iktikaf Politik

Pepatah "pengalaman adalah guru yang paling berharga" layak menjadi siraman batin bagi sebagian besar pegiat partai politik dan kandidat legislator yang baru selesai bertarung tanggal 9 April kemarin dengan berbagai trik politiknya.

Dalam pertarungan, kalah dan menang merupakan tradisi tersendiri. Meski demikian yang kalah tidak berarti buruk, hina, kurang berprestasi, dan sama sekali tidak bisa bekerja. Adapun yang menang pun bukan otomatis paling baik, paling berjaya, sangat terhormat, dan paling mampu berkarya.

Guna memaknai realitas pertarungan dengan baik, maka parpol beserta kandidat legislatornya yang tampak menang atau pun yang merasa kalah hendaknya melakukan iktikaf politik sesegara mungkin. Dengan iktikaf politik mereka dapat berdialog atau memasuki situasi batin kemanusiaannya secara jernih, damai dan produktif. Bahkan mereka bisa mengevaluasi proses konsolidasi dan memerah kembali janji-janji politiknya selama kampanye baik dari yang sembunyi-sembunyi hingga yang bersifat terbuka.

Dalam tradisi agama Islam, iktikaf sering kali dimaknai sebagai proses yang amat tekun dari setiap orang dalam mengadukan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menyendiri di tempat yang dianggap sakral seperti masjid dan semacamnya (QS. Al Baqarah [2] : 2).

Iktikaf politik dalam konteks ini mesti dimaknai dan ditempatkan sebagai jembatan mengasah niat, misi, dan motivasi politik dari seluruh parpol dan kandidat legislatornya. Niat (*al niyatu*), meminjam istilah kaidah fikih, merupakan kunci segala amal perbuatan *(innamal a'malu bi al niyati)*. Suatu perbuatan meski pada dasarnya baik kalau dilaksanakan dengan niat, misi dan motivasi yang kurang bagus tentu akan sulit memberikan maslahat bagi publik.

Lurusnya niat dan luhurnya misi politik setiap parpol maupun legislatornya pelan tapi pasti akan ikut mewarnai budaya dan mentalitas politik parlemen itu sendiri. Budaya politik yang dilandasi komitmen ibadah akan menghasilkan karya politik yang cukup bersahaja. Ia akan memancarkan aroma rahmat dan bernilai ukhrawi.

Selain mengasah niat, iktikaf politik ini secara esensial merupakan proses penyucian diri setiap kandidat legislator dari patologi politik dan virus demokrasi. Tanpa penyucian diri secara utuh, sangat mustahil kita bisa menghasilkan legislator yang *amanah* (kredibel dan akuntabel) dan *fathanah* (visioner). Bahkan budaya politik yang paradigmatik dan benar-benar aspiratif terhadap kebutuhan mendasar publik pun tidak akan pernah terbangun dengan baik. Penyucian diri berarti juga pengolahan nilai-nilai eksistensial dan modal terbentuknya jati diri legislator yang benar-benar memiliki kepribadian *uswah hasanah*, yakni yang senantiasa mampu menjadi teladan bagi publiknya. Semangat eksistensial dan keteladanan itulah yang disinyalir Jeihan Sukmantoro, Maestro Pelukis Indonesia melalui sajaknya, *mari kita cuci/diri kita dengan/peluh sendiri/di siang hari//dan/ mari kita basuh/hati kita dengan/air mata sendiri/di malam hari.*

Khauf dan Raja'

Iktikaf politik ini juga dapat diorientasikan dalam rangka menghitung ulang takaran *khauf* (pesimisme) dan *raja'*(optimisme) setiap parpol dan kandidat legislator menjelang pemilihan

presiden mendatang. Dalam perspektif kaum Sufi, *khauf* senantiasa berhubungan dengan kejadian yang akan datang. Bahkan Abdul Qasim al Hakim menyatakan bahwa khauf itu memiliki dua bentuk, yaitu *rahbah* dan *khasyyah*. Yang pertama berkaitan dengan eksploitasi hawa nafsu, dan yang kedua menunjuk pada pengendalian oleh ilmu.

Yang dimaksud pesimisme (*khauf*) adalah keadaan diri yang tidak menginginkan sebuah harapan dan keterlambatan (Abu Ali Ad-Daqaq), atau menantikan sesuatu yang tidak menyenangkan (Imam Al Ghazali). Adapun *raja'* (optimisme) adalah kegembiraan hati akibat menanti datangnya sesuatu yang diingini dan dicintai, demikian kata Al Ghazali. Dan tanda *raja',* menurut Al Kirmani adalah kebaikan taat kepada Allah Swt, termasuk dalam konteks politik.

Namun, masih menurut para Sufi, *raja'* itu berbeda dengan *tamanni* (berangan-angan). Perbedaan keduanya terletak pada nilai dan dampaknya. *Tamanni* lebih sering mengakibatkan orang itu pemalas dan tidak mau berjerih payah. Tipologi ini tampaknya dimiliki oleh sebagian parpol maupun kandidat legislator yang hanya mengandalkan politik uang tanpa mau bersungguh-sungguh menjalin ikatan emosional dengan konstituen. Adapun *raja'* kebalikan dari *tamanni*, disamping menaruh optimisme tetap tidak pernah berhenti melaksanakan prosesi ikhtiari.

Dengan iktikaf politik yang baik dan realisasi dari *khauf* dan *raja'* yang matang, maka menang atau kalah dalam pertarungan politik akan diterima sebagai anugerah terbaik dari Allah Swt. Bahkan kekalahan akan dimaknai sebagai pengalaman (hikmah) berharga dan kesuksesan yang masih tertunda.***

11

Meditasi Politik

Euforia politik ternyata banyak menimbulkan patologi berpolitik. Friksi dan konflik politik tidak hanya berbenturan ditingkat elite, melainkan telah merasuk sampai ruas kultur akar rumput. Dan terlepas dari faktor-faktor kekalahan atau kekecewaan dalam pesta demokrasi-politik, baik eksternal maupun internal, tawuran politik mereka telah mengkikis nilai-nilai harmoni kehidupan bermasyarakat seutuhnya.

Euforia tidak menambah pelaku politik lebih cerdas dan sehat. Perpecahan ditubuh partai politik belakangan lebih banyak dilatari oleh perebutan jatah pragmatisme kekuasaan daripada nalar politik yang paradigmatik. Mentalitas politisi banyak yang rusak. Bukan saja tidak aspiratif, melainkan juga semakin koruptif.

Bahkan tidak sedikit politisi yang menjadikan dunia politik sebagai "profesi" hidup. Dan bukan soal kalau mereka memang tidak begitu peduli dengan nalar moral dalam praksisnya. Sebab eksistensi mereka bukan dibangun diatas kecerdasan atau integrasi politiknya, melainkan seberapa dekat dengan elite struktur partai yang bisa

menggaransi nomer urut ideal dalam setiap pesta politik yang digelar.

Alhasil, cukup banyak politisi yang tidak bisa membawa dirinya dihadapan publik. Mereka kurang kreatif dalam berpolitik, lemah inisiasi, dan visinya kusut. Akibatnya, mereka abai terhadap janji-janji populisnya saat kampanye. Mereka mulai elitis dan utopis ketika berbicara masalah kemaslahatan publik. Modal mereka hanya cukup berwacana di media, namun tak maksimal bekerja di pelataran sosial masyarakat.

Meditasi

Demi terwujudnya kultur politik yang lebih produktif dan mencerahkan, otokritik menjadi kebutuhan mendesak dikalangan politisi. Dan otokritik akan maksimal kalau para politisi berbenah dengan meditasi yang sempurna.

Meditasi sering kali diartikan sebagai proses menenangkan diri. Dalam masyarakat awam, mediasi tak jarang di identikan dengan pola bertapa. Hijrah untuk menyepi atau mengasingkan diri dari keramaian.

Meditasi merupakan sebuah proses lunak untuk meningkatkan kualitas spiritual. Dengan meditasi setiap manusia bisa menyelami sublimasi yang ada dalam dirinya. Bahkan dengan meditasi, penginderaan manusia akan lebih tajam, lebih jernih, dan juga lebih murni. Dan hanya lewat meditasi manusia akan menemukan sisi terdalam dari kemanusiaannya yang mulai acak. Terlebih bagi manusia politik yang memang tak henti-hentinya dihadapkan pada konflik dan friksi bercampur kepentingan.

Dalam ajaran Buddha, seorang yang ingin melakukan meditasi harus memiliki keteguhan hati. Meditasi bukan semata untuk memperoleh kekuatan batin, melainkan demi menyirami dan membubuhi sifat-sifat mulia dari kedalaman kemanusiaan kita. Sebab meditasi adalah upaya membersihkan batin dari berbagai bercak dan kotoran seperti dendam, marah, sikap tidak rela melihat realitas, dan sebagainya. Melalui meditasi, batin yang gelap akan terang, pikiran yang kusut akan bening kembali.

Dan meditasi politik diperlukan agar pelaku politik lebih jujur kepada dirinya, lebih terbuka pada komitmen kebenaran dan

terciptanya kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan meditasi politik, para pelaku politik bukan hanya akan meraba aspek rasionalitas politik, akan tetapi akan masuk seutuhnya kedalam spiritualitas politik itu sendiri. Bahkan dengan meditasi yang baik, para politisi diharapkan tidak lagi pandai berkonflik dan bergulat demi pragmatisme kekuasaan semata, melainkan benar-benar mampu menguasai diri dan bekerja atas dasar darma bagi rakyat.

Menguasai Diri

Didunia ini, kata Mahatma Ghandi, hanya ada satu kekuatan, satu jenis kemerdekaan, dan satu bentuk keadilan, yaitu kuasa untuk mengendalikan diri. Siapa yang mampu menguasai dirinya, ungkap Ghandi, akan dengan mudah menguasai dunia. Menata dan membawa diri dalam seluruh lirik kehidupan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Disamping ketulusan dalam memaknai segala realitas, ketajaman akal budi menjadi taruhannya. Sebab, dalam setiap diri manusia, potensi baik dan buruk senantiasa berkejaran dengan kualitasnya masing-masing. Kalau potensi baik yang tumbuh maksimal, eksistensi manusia akan mirip malaikat. Akan tetapi, jika potensi buruk yang dikembangkan, pelan tapi pasti setiap diri manusia itu akan mirip setan dan melebihi iblis.

Setiap manusia yang bisa menguasai dan membawa diri, meminjam bahasa kaum kebatinan, akan menjadi pribadi yang kuat, “kebal” dan tangguh. Ia tidak akan goyah dengan berbagai isu atau pragmatisme kehidupan. Manusia seperti itu akan memaksimalkan amanahnya sebagai khalifah Tuhan dimuka bumi. Dan ia akan selalu positif menghadapi realitas kehidupan.

Kalau meditasi politik dilakukan dengan baik, para politisi itu akan tulus mengevaluasi kerja-kerja politiknya. Mereka akan mengakui berbagai kesalahan dan ketidakjujuran yang telah membuat masa depan sosial konstituen tercabik-cabik. Termasuk friksi dan konflik politiknya yang telah menodai amanah rakyat.

Hanya bisa menciptkan konflik dalam berpolitik, berarti tidak paham politik. Politik untuk konflik bukan politik, melainkan sirkus egoisme yang kehilangan arah. Konflik dalam politik bukan untuk membelah aspirasi dan idealisme politik. Sejatinya, konflik itu

mempertajam analisa dan paradigma berpolitik. Tanpa konflik politik memang tidak akan dinamis. Akan tetapi, overkonflik, terlebih yang tidak sehat, hanya akan membunuh berbagai karakter ideal dalam politik. Itulah yang tidak diharapkan oleh rakyat.

Hanya dengan membaca dan menguasai diri melalui meditasi politik secara khidmat, politisi akan sadar dan mengenal medan kerjanya dengan produktif. Ia akan senantiasa menempatkan penderitaan rakyat diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Ia akan komitmen memenuhi janji dan misi politiknya dihadapan publik. Sekali ia berbuat culas dan tidak jujur, ia akan menghukum dan meng-audit diri sendiri sebelum dihukum dan diaudit orang lain. Bahkan, ia tidak akan tergesa-gesa menafsir atau menilai perilaku politik dari aliran ideologi yang berbeda.

Dan meditasi politik bukan euforia. Ia adalah ritual pertobatan politik yang harus dilakukan setiap politisi. Sebab, Tuhan tidak akan memberikan pengampunan atas dosa kemanusiaan mereka sebelum mendapatkan pengampunan dari sesamanya. Artinya, audit Tuhan terhadap perilaku buruk politisi akan berlangsung setelah audit publik (konstituen) dilakukan.

Maka dengan meditasi politik yang baik, setiap elemen politik, terutama anggota legislatif di Jawa Barat ini akan arif dalam memaknai kemenangan dan kerja-kerja pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) kedepan. ***

12

Ukhuwah Politik

Meski telah terbentuk tiga kutub koalisi politik yang hendak berkompetisi pada pemilihan presiden tanggal 8 Juli mendatang, yakni Golkar-Hanura, PDI-P-Gerindra, Partai Demokrat-PKS, PAN, PPP, dan PKB, namun friksi dan konflik sebagian parpol akibat raihan suaranya menurun pada pemilu 2009 mulai mengemuka lagi.

Fenomena ini seakan memberikan gambaran bagi kita bahwa sebagian besar elit partai (politik) hanya punya minat jadi pemain atau pengendali kekuasaan di parlemen dan sama sekali belum siap melatih diri sebagai kader politik sejati. Friksi dan konflik politik internal atau eksternal partainya sering kali dimaknai sebagai modal awal untuk saling menyalahkan dan legitimasi paling strategis guna menggusur kelompok yang dianggap bukan faksi politiknya. Mereka lupa bahwa pertengkaran hanya akan melahirkan kerusakan bagi eksistensi budaya politik maupun tatanan demokrasi.

Politik Sehat

Manakala friksi dan konflik tidak ditelaah secara jernih akan

mudah menampakkan perilaku politik reaktif, emosional dan utopis. Inilah ciri dari aktualisasi politik yang kurang sehat. Hal yang demikian akan lebih cepat menafikan amanah konstituennya dan terjebak pada pertikaian hingga perdagangan politik elit semata. Di sinilah maniak klaim politik terjadi melalui rajutan koalisi taktisnya seperti yang marak dilakukan beberapa elit parpol akhir-akhir ini.

Politik reaktif dan emosional, tentu bukan politik sehat dan menyehatkan bagi regulasi demokrasi. Ia akan terus mendera dan mengeksploitasi aspirasi publik, dan tidak akan pernah memberikan pencerahan maupun jaminan bagi kebutuhan dasariah masyarakat. Bahkan ia akan sering menjadi "hama" demokrasi yang cukup membahayakan terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Adapun politik sehat adalah budaya dan perilaku politik yang senantiasa dilandasi oleh nalar dan spiritualitas politik bersahaja. Yaitu perilaku politik yang rasional dan proporsional, dimana friksi dan konflik tidak dipahami kerugian dan pemicu pertengkaran tetapi ditempatkan sebagai mesin otokritik yang produktif demi terbangunnya eksistensi partai yang lebih solid, progresif dan akuntabel.

Politik sehat juga merupakan manifestasi dari budaya politik yang cakap dan tulus dalam memaknai niat, visi, misi, dan komitmen besar bagi kemaslahatan konstituen. Politik sehat akan memapah kita mendalami seluruh ritualitas demokrasi dengan jernih, yaitu menempatkan rakyat sebagai "sumbu" yang sangat vital dalam peradaban politik dan bukan seperti kata pepatah : *habis manis sepah dibuang*.

Maka menyehatkan politik berarti memompa dan membilas seluruh potensi diri demi menyegarkan pola dan etos kerja dalam politik. Karena politik sehat bukan semata realisasi cara cepat meraih kursi dan membangun kutub politik pragmatis, melainkan harus memiliki basis yang kuat dan etis untuk membumikan semangat ukhuwah politik secara universal.

Ukhuwah Politik

Ukhuwah, meminjam penjelasan Moh. E. Hasim, berarti

kerukunan atau persaudaraan. Dalam perspektif Islam, ukhuwah bermakna sebuah komitmen kerukunan yang didasarkan dari nilai-nilai cita ideal Islam demi tegaknya persaudaraan umat seutuhnya.

Namun, ukhuwah politik yang dimaksud adalah prinsip *political paradigm* yang sistem dan mekanisme politiknya lebih berpijak pada nilai-nilai humanisme dan etika dalam politik. Ia bukan sebatas *political performan*ce yang hanya dikemas dengan pertemuan taktis antara elit parpol melalui berbagai media seperti diskusi, makan siang, 'berkerumun' menyikapi realitas politik tertentu atau sekadar menjajaki perkoalisian-parsialistik.

Ukhuwah politik ini merupakan realisasi obyektif secara paradigmatik dari pelbagai manuver dan sikap politik yang lebih memprioritaskan kemaslahatan publik dari pada sekadar memenuhi pragmatisme politik elit. Kalau koalisi hanya berkait dengan cara "perselingkuhan" politis demi penjatahan kekuasaan, adapun ukhuwah politik adalah "pernikahan" misi dan amanah politik yang sesungguhnya demi transformasi derma kemanusiaan dalam konteks kebangsaan secara makro.

Manakala berpijak dari dan pada spirit ukhuwah politik seperti di atas, maka friksi dan konflik politik berbagai parpol tidak akan melahirkan pertengkaran dan perpecahan yang berlebihan. Sebab dalam pertengkaran, menurut ajaran Buddha, terdapat kebinasaan. Dan hanya orang yang dapat menyadari kebenaran itu yang akan cepat mengakhiri semua bentuk pertengkaran maupun perpecahan.

Ukhuwah politik, meminjam bahasa Mahatma Gandhi, adalah perilaku etis secara universal untuk mencegah benih-benih keserakahan dari setiap elit dalam berpolitik. Sebab keserakahanlah yang membuat kebanyakan manusia, termasuk aktifis dan elit politik mudah sekali melupakan hal yang esensial dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara.

Maka semangat ukhuwah politik ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana melatih diri memahami dengan baik tali kasih berdemokrasi dan meluruskan orientasi kemitraan politik yang cerdas dan menyehatkan kehidupan publik. ***

13

Saatnya PPP di Depan

Politik kepartaian sepertinya terus dalam tekanan dan ancaman. Bukan saja lantaran banyak kasus (korupsi) yang kini menyeret kader-kader dari beberapa partai politik, melainkan karena publik mulai jenuh dengan friksi dan konflik sebagian parpol yang tak pernah tuntas. Mereka bertengkar hanya ketika beda penjatahan (pragmatis) menyangkut kepentingan sendiri, bukan soal komitmen kerja bagi kesejahteraan konstituen.

Elit-elit parpol di Indonesia belakangan mudah "bercerai" di tengah jalan karena sesuatu yang kurang prinsip dan parsial. Tak berlebihan bilamana suatu saat Romo YB Mangunwijaya berkata bahwa "orang-orang sekarang cenderung tidak bisa membedakan mana yang prioritas. Akal sehatnya ditinggalkan, yang dikedepankan emosi, sehingga lantaran soal singkong pun orang bisa saling membunuh".

Sindiran Romo Mangunwijaya di atas sangat layak dijadikan modal *muhasabah jam'iyah* (introspeksi kelembagaan) oleh semua kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini lagi

melangsungkan Muktamar. Sehingga pasca Muktamar, tidak ada lagi kekisruhan akibat sisa-sisa pertarungan yang bisa melemahkan posisi PPP di hadapan umat.

Kalah dan Menang

Kandidat dan tim yang kalah dalam perebutan kekuasaan di Muktamar kali ini, bukan saja mesti *legowo* atau berbesar hati. Demi masa depan PPP, mereka harus tetap menjadikan dinamika yang terjadi sebagai instrument untuk mensolidkan kekuatan internal menghadapi pemilu 2014 dan seterusnya. Sebab kalah tidak berarti tercela. Dan menang pun bukan lantas dapat menguasai segalanya.

Dalam ajaran Sang Buddha dinyatakan bahwa kemenangan bisa menimbulkan kebencian, dan yang (merasa) kalah akan hidup dalam penderitaan. Akan tetapi, setelah setiap individu dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, ia akan hidup penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Kemenangan dan kekalahan, termasuk dalam pertarungan politik keumatan, tampak kurang etis kalau tidak dimaknai sebagai amanah dan proses pematangan kekhalifahan. Sebab politik bukan sebuah tujuan abadi dalam kehidupan duniawi. Ia hanya salah satu perangkat praktis bagi pertumbuhan kualitas kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara.

Bahwa kemenangan akan mengantarkan seseorang pada status sosial yang lebih prestise, bisa dibenarkan. Dengan kemenangan seseorang akan dianggap kuat dan berjaya. Namun, kekalahan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan segalanya di muka bumi. Selama seseorang masih mampu mengenali identitas dirinya dengan baik, maka ia tidak akan mengalami kekurangan sedikit pun.

Seorang yang kalah secara jantan dan ksatria akan menemukan banyak pengalaman berharga. Dari kekalahan, ia akan belajar untuk mengarifi kelemahan diri sendiri dan menghargai kelebihan orang lain. Dengan kekalahan pula ia akan sangat mawasdiri menjalani masa-masa berikutnya. Ia akan lebih perkasa dan bijaksana. Ia akan belajar bagaimana cara terbaik untuk mencintai dan dicintai di hadapan publik.

Sang Buddha pun mengingatkan, bahwa keperkasaan yang

dilengkapi dengan kebijaksanaan akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan sejati. Dan berbekal kebijaksanaan, seseorang juga bisa menjaga keseimbangan manusiawiyahnya. Sebab manusia, kata Sachiko Murata, ia bisa menjadi jahat ketika tidak mampu lagi menata keseimbangan antara potensi lahiriah dan kekuatan batiniahnya.

Menjadi manusia yang mulia dan berguna pun, masih meminjam istilah Sachiko Murata, bukan ditentukan oleh kemenangan dan kekalahan seperti dalam pertarungan politik kepartaian. Lebih dari itu, lanjut Murata, manusia mulia dan sempurna adalah mereka yang mampu mengaktualisasikan semua kualitas yang ada dalam dirinya, baik yang secara alami intrinsik (ada) dalam ciptaan.

Demokrasi Partai

Kalah dan menang sesungguhnya hal yang biasa dalam dinamika politik kepartaian, tak terkecuali bagi kader-kader PPP. Namun demikian, semua dinamika politik itu sejatinya merupakan cerminan awal dari konstruksi demokratisasi politik dalam konteks kebangsaan maupun kenegaraan. Sebab partai politik apa pun nama dan bentuknya adalah bagian dari pilar demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi akan berjalan tak tentu arah atau bisa saja "mati mendadak".

Adapun demokrasi partai politik yang baik, sejatinya berangkat dari asas-asas ideologi yang mampu menyegarkan publik dalam ranah sosial seutuhnya. Tanpa komitmen penyegaran yang paradigmatik, ritualitas formal organisasi (Muktamar) dan regenerasi hanya akan menjadi isapan jempol semata. Tidak akan membumi dan kian menjauh dari kehidupan sosial konstituen.

Di luar itu, dinamika politik harus senantiasa ditata dengan kompetisi yang fair dan produktif, bukan dengan pola intimidatif dan hegemonik. Sehingga politisi dan konstituen (PPP) benar-benar mampu menggiling gabah politik menjadi beras demokrasi yang bersih dan harum, yang bisa dinikmati publik dengan segurih mungkin.

Para elit PPP pun tidak pantas terbuai dalam kegilaan utopisme dan hedonisme sosial. Mereka tak boleh lagi saling sikut dan menjatuhkan dengan cara-cara yang keluar dari apa yang disebut

spirit normalitas, yakni proses yang mengedepankan kualitas dan akuntabilitas dari pada senioritas dan sejenisnya. Mereka tidak boleh juga hanya berpikir "jalan pintas" dalam memperebutkan kemenangan sebuah pertarungan politik. Etika berdemokrasi harus menjadi sikap semaksimal mungkin. Sebab PPP adalah partai umat, bukan partai pengusaha dan kaum penyamun.

PPP adalah partai berbasis keislaman dan keindonesiaan, yang mesti ramah dalam menyambangi umat, santun ketika melayani aspirasi dan kebutuhan publik. Dan sebagai partai Islam, peran PPP sendiri dalam kebangunan demokrasi kebangsaan adalah media reproduksi moralitas politik.

Politik tanpa nilai-nilai moral, tak ada bedanya dengan akrobat kanibalisme. Ia akan menjadi alat tercanggih bagi elit dengan segala rupa kepentingannya. Dan umat maupun rakyat, sebagai pemegang saham demokrasi akan tergilas oleh ketidakberdayaannya sendiri. Mereka akan dibuai dan dibuat miskin kreasi dengan tindakan eksploitatif dan referesif elit partai.

Sebagai partai umat Islam sedari *baheula*, yang identik dengan spiritualitas dan kematangan batinnya, PPP juga tidak boleh terjebak dalam model-model partai yang lapar uang. Atau, partai yang hanya dihiasi dengan retorika, sikap kepura-puraan secara politik. PPP harus *istiqamah* dalam kejuangan politik, tapi wajib *qana'ah* dalam urusan-urusan publik.

Kini, saatnya PPP di garis depan. PPP harus bangkit dan bersaksi bahwa kejuangan politik yang didasari semangat kekhalifahan, akan menjadi solusi bagi berbagai kemelut sosial kebangsaan. ***

14

Mikraj (Politik) PPP

Menyambut Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-7 Juli nanti di Bandung, setidaknya ada tiga hal yang mesti dicermati oleh semua kader dan simpatisan PPP.

Pertama, inilah Muktamar penentuan bagi eksistensi politik PPP di era politik modern. Takdir politik PPP sebagai partai umat yang sudah berumur akan sangat ditentukan dalam Muktamar kali ini. Kalau Muktamar tidak bisa mencermati isu-isu aktual dan prospektif dalam perabadan politik modern, atau tidak cerdik ketika menciptakan terobosan kerja-kerja politik keumatan, maka dapat diprediksi PPP akan terdegradasi dalam Liga Politik Indonesia ke depan.

Kedua, terus merosotnya perolehan suara partai pada beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) di Era Transidi Demokrasi (1999, 2004 dan 2009), bukan semata karena pergeseran visi dan misi Partai. Yang mesti disadari bahwa kegagalan demi kegagalan itu terjadi disebabkan oleh hilangnya kualitas *jihad keumatan* dan

kolektifitas kerja politik PPP di beberapa lini. Pola permainan politik PPP akhir-akhir ini bukan saja pincang, melainkan kehilangan karakternya sebagai partai umat Islam.

Ketiga, Muktamar ini juga akan menjadi pembuktian apakah kader dan simpatisan PPP benar-benar mampu menginternalisasi nilai-nilai keislaman, baik menyangkut politik internal kepartaiannya atau yang langsung berkaitan dengan kemaslahatan publik. Sebab Muktamar sekarang bertepatan dengan momentum Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad Saw.

Dengan demikian, PPP perlu melakukan mikraj politik secara holistik. Yaitu merevolusi kesadaran dan sikap politik yang "ambigu" menuju konstruksi politik yang lebih menjamin kemaslahatan bagi umat. PPP tidak boleh ragu dan cari selamat sesaat dalam menyelesaikan friksi dan konflik politik kebangsaan, meskipun harus tetap mengedepankan kearifan *(al hikmah)* dan kesederhanaan *(al'iffah)*.

Sebagai Bagian dari kesungguhan melakukan mikraj politiknya, maka Muktamar tidak boleh lagi hanya dijadikan ritualitas formal organisasi kepartaian, atau malah "komoditas politik internal" musiman. Muktamar seharusnya ditempatkan sebagai *halaqah* menuntaskan mikraj politik keumatan dalam skala yang sangat universal.

Reorientasi

Mikraj politik mengandaikan terjadinya reorientasi dan refungsionalisasi politik, baik dalam tataran teoritis maupun dalam wilayah praksisnya. Reorientasi itu didasarkan atas kenyataan dimana masalah yang melanda sebagian besar parpol belakangan ini, salah satunya adalah krisis intelektualitas dan otokritik ideologis di antara kader-kader partai yang kurang terarah.Konsekuensinya, tak jarang mereka hanya aktif menjelang pemilihan umum, pemilukada, atau pada saat Musda, Mukerwil dan Mukernas. Di luar itu, mereka seperti asyik di dunia lain.

Padahal sebagai bagian dari intelektualitas-ideologis, politik adalah medan pengasahan nalar etika dan perilaku individu dalam aspek kemanusiaannya. Di sini setiap individu dituntun memahami

irisan etis berkaitan dengan teori-teori kekuasaan dan pemerintahan. Seperti disinyalir Al Farabi, bahwa orientasi politik adalah menyucikan jiwa dan memperbaiki watak manusia dengan pengetahuan tentang hal-hal intelektualitas (*al umur al-'aqliyah*).

Secara insititusional, politik kepartaian bisa jadi hanya mengada dari dan untuk kepentingan para pengurus dan anggota serta simpatisannya. Akan tetapi, ketika memasuki areal kekuasaan, apapun nama dan bentuk partai itu sudah seharusnya menempatkan seluruh paradigma dan gerakan politiknya demi pemberdayaan sosial seluruh masyarakat.

PPP mesti lihai ketika mengurai dunia politik sebagai *fenomena* dan *nomena*. Sebab politik terkadang bukan semata basis suara, melainkan juga menyangkut mental individu atau komunitas dalam menjalani pertarungan. Bahkan dalam konteks yang lebih riil, politik memang bukan hanya soal kekuatan uang, tetapi berpulang pada taktik, strategi dan kualitas kerja di berbagai lini.

Meminjam istilah Karl Marx, sejatinya politik bukan semata bergelut dalam sekat-sekat keberadaan sosial konstituen, melainkan terus menata kesadaran mereka sedemikian cemerlang. Karena kesadaran berpolitik yang tercerahkan akan ikut memberikan warna positif dalam mematangkan proses demokratisasi.

Juru Damai

Hal mendesak yang selayaknya dilakukan PPP sekarang adalah merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Pertama, segera menjadi juru damai dalam kemelut keislaman dan kebangsaan. Meniru bahasa Arkoun, sudah saatnya PPP melakukan *Rethinking Keislaman* dan *Keindonesiaan* yang lebih produktif. Berani menancapkan kebenaran meski dalam himpitan kekuasaan yang hegemonik.

Kedua, tunjukkan melalui kerja politik yang riil, bahwa PPP bukan institusi politik-fundamentalis yang melegalkan perilaku sosial di luar Sunnah Nabi dan Ajaran Alquran. Bilamana ada kader partai yang menyimpang dari jalur ideologi dan nilai-nilai luhur partai, adili ia dengan semangat keadilan seutuhnya.

Ketiga, buktikan pula kepada umat, PPP dan kader-kadernya senantiasa komitmen memerangi radikalisme, kebatilan dan

kejahatan atas nama agama, serta tak gugup menegakkan kebajikan melalui politik keumatan. PPP secara kelembagaan di parlemen, harus selalu senyawa dengan apa yang dinyatakan melalui media massa. Bagaimana pun umat (Islam) kian rasional dalam menilai dan menarik garis ideologi kepartaian.

Terkait dengan maraknya radikalisme keagamaan, PPP tidak boleh sebatas memberikan himbauan moral. PPP harus berada di jalur depan untuk memberikan pemahaman yang jernih dan indah kepada kaum radikalis sampai mereka melakukan *taubatan nasuha* di hadapan publik. Sebab, kata Ibnu Taimiyah, orang mukmin adalah mereka yang memberikan jaminan kedamaian bagi setiap manusia, baik menyangkut darah dan harta.

Waba'du, politik PPP ke depan sejatinya adalah politik keberanian dan kemaslahatan. Politik yang terus mengangkat harkat dan martabat keumatan. Politik yang filosofi dan geraknya bermula dan bermuara pada amanah kekhalifahan, bukan semata tergantung pada kontrak politik perkoalisian. ***

15

Menjadi Pemimpin

Kullukum raa'in, wakullu raa'in mas ulun 'an raa'iyatihi. Setiap diri merupakan pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban kelak terhadap apa yang diembannya, baik menyangkut urusan personalitas maupun yang langsung bersentuhan dengan publik.

Menjadi pemimpin itu tidak pernah mudah. Sebab ia akan menjadi kompas-etik struktur dan kultur kehidupan yang dipimpinnya. Tindakan dan kata-kata pemimpin, selalu diamati dan dijadikan ukuran kualitasnya. Ucapan dan perilaku pemimpin akan terus dinilai sebagai kontrak sosial dengan masyarakat.

Pemimpin bukan semata menguasai struktur sosial kehidupan, apalagi dengan modal retorika dan propaganda yang parsial. Jauh di balik itu, pemimpin harus senantiasa siap lahir batin untuk menjunjung tinggi semangat ketulusan dalam mengabdi dan pengorbanan luhur demi kemaslahatan publik. Sebab pemimpin adalah pengembala (*raa'in*), bukan penguasa.

Empat Prinsip

Agama (Islam) menekankan bahwa pemimpin itu setidaknya memiliki empat hal yang sangat prinsipil. Pertama, sikap jujur (*al siddiq*). Kedua, selalu amanah (*al amanah*). Ketiga, komunikatif; cakap dalam menyampaikan sesuatu (*al tabligh*). Dan keempat adalah memiliki kecerdasan spiritual dan kepekaan sosial tinggi (*al fathanah*).

Jujur diartikan bukan saja berkata benar, melainkan harus bertindak pula dengan benar dan kualitatif. Jujur dalam konteks ini tidak bisa dimaknai sebagaimana propaganda atau konsesi sosial politis yang penuh "pernak-pernik", akan tetapi mesti ditempatkan seperti kejujuran alam semesta terhadap kehidupan kita.

Bagi alam semesta, kalau kita menanam biji padi maka tidak mungkin yang ditumbuhkan adalah tembakau. Dan jikalau kita menabur biji jeruk, alam sendiri tidaklah menyuguhkan kepada kita sebatang pohon kelapa. Sebab semesta senantiasa jujur dengan potensi idealnya yang asli."Mengibu" secara sifat, meski kadang kurang tampak gesit di mata manusia.

Demikian halnya prinsip amanah. Bukan sekadar mencari, menampung, dan mengaduk-aduk aspirasi rakyat, melainkan benar-benar bertindak realistik dan konstruktif sesuai dengan kebutuhan primer bagi rakyat. Ukuran amanah ini bukan hanya sealur dengan nurani sang pemimpin, akan tetapi mesti menyatu dengan nurani rakyat itu sendiri. Sebab (ke)pemimpin(an) adalah kualitas amal (kerja) dan moralitas, bukan drama "pelipur kuasa" belaka.

Sedangkan komunikatif tidak berarti sebatas tebar pesona dengan janji-janji sosial (politis). Meminjam bahasa Alquran, komunikatif adalah *qaulan ma'rufa;* menyatakan apa yang selayaknya sesuai dengan kondisi riil yang ada di tengah kehidupan publik. Tidak pakai cara-cara pembungkusan, apalagi didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang kurang sealur dengan kebutuhan publik.

Pemberian grasi yang menuai kontroversi, penyelidikan kasus Bank Century dan proyek Hambalang yang tak kunjung terang, sungguh memerlukan kejujuran dan keamanahan serta komunikasi yang *ma'rufan*. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah ucapan dan tindakan pemimpin yang berkualitas, bukan retorika dan propaganda taktis yang membosankan.

Adapun yang dimaksud bahwa pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual, bukan dalam kategori ahli zikir dan rajin haji atau umrah berkali-kali. Kecerdasan spiritual ini sangat berhubungan dengan kualitas filosofi pikiran dan sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah rakyatnya. Paradigma kebijakan dan tata laku sosial seorang pemimpin, merupakan lambang dari semangat dan keluhuran nilai-nilai ukhrawiyahnya.

Termasuk kecerdasan spiritual adalah konsistensi memilah dan memilih mana fasilitas yang mesti dipergunakan untuk diri dan keluarganya dan fasilitas apa saja yang mutlak untuk publik. Melalui paradigma hidup seperti itu, pemimpin akan terus melahirkan etos kerja yang sangat aktual; ia akan istiqomah menata tujuan duniawi dan mewujudkan taruhan ukhrawinya. Sehingga ia lihai mengiris problematika sosial yang dihadapi rakyat dan senantiasa tepat menyuguhkan solusi-solusi produktif demi kemaslahatan terhadap publik.

Figur Pemimpin

Figur pemimpin itu ibarat cermin. Sebuah cermin yang pecah, agak sulit menampilkan bayangan secara utuh. Maka figur pemimpin yang tidak memiliki integritas dalam mengolah kepentingan publik, amat mustahil menjadi pemimpin sejati. Ia tidak mempunyai nilai kepemimpinan. Ia krisis secara karakter, dan sulit sekali dijadikan teladan bagi publik.

Pemimpin sejati itu, secara etik tidak ingin menjadi pemimpin. Meniru bahasa Jakob Sumardjo, pemimpin sejati justru akan merasa menjadi korban kalau terpilih atau dipilih sebagai pemimpin (formal). Ia kontras dengan tipologi manusia modern akhir-akhir ini, yang malah berebutan dengan berbagai upaya pragmatis untuk dinobatkan sebagai pemimpin, terutama dalam konteks politik (kekuasaan).

Fenomena dan prosedur untuk menjadi pemimpin belakangan ini mulai tampak "binal"; teramat agresif-destruktif. Dominasi pragmatisme kekuasaan telah memorak-porandakan struktur nilai ideal (ke)pemimpin(an). Akibatnya, setelah menjadi pemimpin dalam kekuasaan, sebagian diantara mereka takut kehilangan kursinya. Tak pelak lagi berbagai upaya meski kurang sehat dan tidak "halal"

dilakukan demi mempertahankan kepemimpinannya. Inilah cermin pemimpin yang kurang bernilai dan tidak berkarakter.

Sementara pemimpin sejati, dengan keluhuran moralnya akan lebih memilih menjadi pemimpin dalam konteksnya sendiri. Sebab ia telah berbaur dengan nilai-nilai transenden (ukhrawiyah). Ia mulai melampaui nilai-nilai material (duniawiyah) dalam kekuasaan sosial. Dan dengan nilai transenden itu meski ia berkuasa tapi tidak pernah "menguasai". Bahkan ia lebur dalam jerit-tangis rakyatnya. Ia arif dan lentur dalam mendinamisir psikologi sosial masyarakatnya.

Pemimpin sejati tanpa ditekan akan langsung memahami tugas utamanya sebagai pendidik dan pembimbing bagi masa depan sosial rakyat yang digembalanya. Ia akan memompa energi spiritualitasnya untuk meluruskan dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi semua lapisan masyarakat. Ia akan tumbuh dengan dukungan, bukan dioplos dengan cacimakian.

Dalam bahasa Ali Syariati, pemimpin sejati adalah pemimpin yang selalu memperhatikan yang lemah, menyantuni yang miskin, memudahkan jalan bagi yang menderita dan kesusahan, menyejahterakan yang tertindas hingga memenuhi tujuan akhir dari pribadinya. Atau, dalam istilah lain, pemimpin sejati itu sebenarnya adalah "tuhan lain" bagi setiap individu masyarakat yang dipimpinnya.

Di tengah multikrisis ini masyarakat membutuhkan kehadiran figur pemimpin yang berpribadi luhur dan berbudi pekerti agung. Yakni, pemimpin yang tidak mudah mengomersilkan "penderitaan" rakyat, melainkan selalu mematangkan jihad-produktif untuk membebaskan rakyat dari berbagai kenestapaan sosial dan friksi-friksi parsialnya.

Dalam istilah yang lain, masyarakat merindukan pemimpin prospektif. Pemimpin yang memiliki nalar iman jernih dan ketajaman hatinya senantiasa berhiaskan syukur, sehingga tindakan sosialnya merupakan pengkhidmatan yang tak ternilai demi kebajikan publik. Di tangan pempimpin seperti itu, konflik dan kebencian akan segera digantikan dengan keharmonisan dalam kebersamaan. ***

16

Paradoks (Ke)Pemimpin(An)

"Setiap diri adalah pemimpin dan akan senantiasa dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya" begitu serpihan dari sabda Nabi Muhammad SAW.

Masalah pemimpin dan kepemimpinan dengan segala artikulasinya, sejak jaman azali senantiasa menjadi perbincangan yang tidak putus-putus. Para nabi dan rasul sekalipun mereka dikirim oleh Allah dalam posisi sebagai pemimpin dunia (Khalifah fil Ardi).

Karakter dan moralitas pemimpin, sangat mempengaruhi realitas kultur sosial kehidupan yang melingkupinya. Dalam perspektif sebagian pakar masih cukup banyak perbedaan tentang definisi, fungsi, orientasi dan ruang kerja hingga "legitimasi" kepemimpinan itu sendiri. Sunni dan Syiah saja, sedikit mengalami perbedaan. Paradigma imamah dikalangan Sunni masih "kurang senyawa" dengan paradigma yang dikembangkan penganut Syiah.

Banyaknya varian, corak dan kultur kepemimpinan, itu sangat lumrah dikalangan komunitas gerakan islam maupun kebangsaan. Soekarno, adalah figur pemimpin cerdas dan memiliki otonomi

individu yang luar biasa. Beliau banyak menyontoh Rasul dan Imam Ali Krw, integralisme pemikiran yang jernih dan progresif selalu menjadi asesori kepemimpinannya. Lihat saja warisan intelektualnya: "Dibawah Bendera Revolusi".

Eksisnya NASAKOM diera Soekarno merupakan salah satu bukti bahwa dinamika pemikiran dan pencerdasan dijunjung tinggi. Itulah kerangka dasar untuk menjadi bangsa besar dan memiliki peradaban yang menakjubkan. Iran, misalnya, hingga saat ini merupakan negara islam yang eksistensinya mulai diperhitungkan bukan saja oleh sesama negara islam, melainkan juga negar-negara adikuasa dibelahan dunia ini.

Dalam kancah geopolitik dan megademokrasi dunia, iran seakan menjadi fakta kenegaraan yang disegani dan diperhitungkan. Sebabnya sederhana, iran membangun bangsanya dengan pencerahan intelektualitas dan produktifitas sosial-politiknya yang terarah. Jauh berbeda dengan bangsa kita yang membesarkan kehidupan sosial rakyatnya dengan konflik politik parsialistik, skandal korupsi dengan hutang besar-besaran kepada negara-negara pencekik.

Diakui atau tidak,(ke)pemimpin(an) kita belakangan ini banyak mengalami paradoks. Pemimpin tidak lagi berperilaku sebagai pemimpin. Jarang sekali yang memiliki visi intelektualisme dengan kualitas moralnya. Lebih banyak asyik dan bangga dengan bangunan pencitraan yang disebut "popular" "kharismatik" "merakyat"dan sebagainya.

Yang lebih parah lagi, pemimpin dan pola kepemimpinan tampak sering ditukangi dan dipoles oleh kepentingan-kepentingan diluar nilai maupun spirit kepemimpinan yang sebenarnya. Tidak perlu heran, bila banyak konflik kepemimpinan yang banyak impuls. Disinilah sering terjadi pengkerdilan kepemimpinan oleh kelompok kepentingan yang mensponsorinya.

Memimpin negara, misalnya, kadang dianggap sama dengan memimpin sebuah perusahaan.Apa saja"digadaikan" dan"dibisniskan" pada kepentingan asing. Fenomena Freeport, Newmon, XXON, dan lain-lain adalah pemandangan tersendiri. Sehingga tidak ada perluasan kesejahteraan bagi lokalitas kekayaan alam kita. Yang sering muncul malah limbah dan "pemelaratan" atas nama kepentingan bangsa dan

pajak negara.

Mewabahnya moralitas kepemimpinan yang tidak sejalan dengan semangat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, telah menciptakan banyak keresahan ditengah kehidupan masyarakat. Ini akan terus berlangsung hingga kita betul-betul menemukan akar dari menghujamnya paradoks kepemimpinan itu sendiri.

Apa yang disinyalir Goethe, seperti dinukil kembali oleh Julien Benda, "Biarlah politik itu dilakukan oleh kaum diplomat dan militer" tampaknya perlu jadi bahan koreksi bersama. Sebab, banyak intelektual yang kita miliki dan kita banggakan, belakangan mudah tergoda dan terlena dalam kemolekan politik dan eforia demokrasi.

Ada pemimpin yang kita acungi jempol dan sepertinya memiliki integritas atau moralitas luhur, malah kadang terdepak, tersisihkan, oleh gaya hidup dan kultur kebangsaan yang kian hedonis. Wajar saja kalau bangsa ini belum bisa melahirkan pemimpin besar.

Oleh karena itu, mengembalikan fitrah kepemimpinan pada visi dan posisi yang sebenarnya akan sangat membantu mengangkat derajat dan martabat bangsa. Sebab, jika banyak intelektual berbondong-bondong mencumbui kemolekan politik dengan segala dinamika dan potensinya, dapat dipastikan harmonisasi sosial kebangsaan dan kemanusiaan tidak akan pernah bertumbuh sehat.

Paradigma kepemimpinan yang berbasis intelektualisme ternyata tidak cukup berkibar dikalangan akademik. Justru banyak terjadi pergolakan yang naif dan memilukan dimana lingkungan akademik dan kependidikan pun sering dijadikan pentas kreasi politik dengan belbagai kepentingan elitnya.

Kepemimpinan intelektualisme, akan menjadi senjata dan kultur kebangsaan bila telah dikonstruk dan ditransformasikan secara strategis dalam setiap lini sosial. Maka yang kita perlukan adalah kekuatan re-konsolidasi intelektualisme. Sebab, intelektual sejati, akan senantiasa lahir dan besar dari dan untuk kemaslahatan universal, bukan untuk melegitimasi retorika politik kepentingan yang parsialistik.

Kepemimpinan yang tidak dikemas dari visi intelektualisme, ia akan cenderung menempatkan atau menyelesaikan masalah dengan "jalan pintas". Watak kepemimpinan yang dimaksud akan tampak

sering "idiot". Tidak akan pernah memiliki terobosan-terobosan strategis bagi kultur dan peradaban kebangsaan (kemanusiaan).

Ali Syariati, Sosiolog Muslim Iran, dengan gigih menyatakan "kaum intelektual harus ingat, bahwa merupakan kesalahan serius bagi mereka jika sampai mengambil kepemimpinan politik". Bukankah gairah-gairah politik, entah karena eforia, telah merasuk hampir pada semua perwatakan kepemimpinan masyarakat kita. Artinya, dengan mengonsumsi paradoks kepemimpinan, kita tetap tidak akan bisa keluar dari multikrisis bangsa yang makin mengkhawatirkan.

Paradoks kepemimpinan akan cair setidaknya ketika kaum intelektual berkenan melakukan internalisasi bait-bait sajak Wiji Thukul ini : "tidurlah kata kata / kita bangkit nanti / menghimpun tuntutan-tuntutan/ yang miskin papa dan dihancurkan/ nanti kita akan mengucapkan/ bersama tindakan/bikin perhitungan/tidak bisa lagi ditahan-tahan".

Paradoks kepemimpinan juga akan segera diatasi bila setiap individu;rakyat, kelas menengah atau elit, menyadari posisinya secara arif dan tidak "mendua". Yang seniman, jadilah seniman terbaik, yang jadi budayawan, silahkan jadi budayawan terhormat, yang akademisi, jadilah akademisi yang jernih, kredible, dan progresif. Yang penyair, jadilah penyair pemberani dan tanpa pamrih. Yang politisi, jadilah politisi yang aspiratif dan visioner.

Adapun kaum intelektual, mesti segera menginsyafi keluhuran misi dan tanggungjawab sosialnya. Sebab jika tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini berjalan dengan kontruksi intelektualisme, maka kultur dan sikap kekanak-kanakan, fasisme, dan diskriminatif, eksploitatif dalam kepemimpinan, tidak akan banyak berseliweran didalam realitas kehidupan kita. **

17

Teks (Ke)Pemimpin(An)

Jauh di masa lalu tokoh sekaliber Napoleon telah mensinyalir bahwa "a leader is a dealer in hope." Pemimpin bukan sekadar figur yang ditonjolkan, diangkat, diperkenalkan, dicitrakan, dilegalkan dan dikultuskan, baik melalui proses sosial murni, gesekan dan pertikaian politik, sentuhan ekonomi, kompetisi berdemokrasi maupun doktrinasi religius. Proses-proses sosial dari dan untuk (ke) pemimpin(an) dalam perspektif manusia, merupakan bagian imaji budaya dan konstruks dinamis dari peradaban bermasyarakat.

Sebagai bagian imaji budaya, pemimpin seringkali hadir dalam waktu atau momentum yang tidak diduga. Seakan natural tapi praksisnya membutuhkan perangkat sosial tersendiri, tidak selalu sejalan dengan logika dan cita rasa mayoritas publik yang terpimpin. Bahkan ada banyak pribadi yang ingin jadi pemimpin tapi tersendat oleh faktor-faktor sosial-humaniora seperti kedekatan emosional dan kepercayaan (*trust*) dari publik, daya spiritualitas, garis tangan atau takdir yang tidak terbayangkan sebelumnya. Selalu saja ada faktor dan sentuhan vertikalitas atau horizontalitas yang menghampiri dengan

kodrat masing-masing.

Bagi yang memahami filosofi dan amanah (ke)pemimpin(an), tentu tidak gampang tergiur untuk merengkuh posisi tersebut. Disamping tanggungjawab di pentas dunia material, pemimpin juga akan disidangkan di akhirat kelak. Sedemikian berat eksistensi dan akuntabilitas (ke)pemimpin(an), Nabi Muhammad Saw sedari dulu wanti-wanti agar kita tidak terperdaya oleh sosok ambisius menjadi pemimpin. Sebab ambisi (berlebih) hanya akan melahirkan hal-hal kontradiksi di kemudian hari, baik langsung maupun tidak. Dari sini muncrat kepentingan-kepentingan sosial keduniawian yang kadang keluar dari jalur kepantasannya.

Imaji Budaya

Kisah, cerita, data, dan fakta (ke)pemimpin(an) lintas perspektif ideologi, budaya, paradigma dan nilai-nilai, telah berhamburan di hadapan kita. Ada yang tradisional, postradisional, rasional, modern, spiritual, kharismatik, politis, religius, campuran dari tradisi yang ada dan lain sebagainya. Ada juga yang militeristik, civilian, hegemonik, eksploitatif, transformatif, toleran, intoleran, eksklusif, inklusif, demokratis, otoriter, akademik-intelektual, organisatoris, dan masih banyak yang lain. Ini menunjukkan imaji budaya tentang (ke) pemimpin(an) merupakan sesuatu yang tidak mengada-ngada.

Imaji budaya muncul dengan potensi dan peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat, khususnya menyangkut eksistensi (ke)pemimpin(an). Masyarakat yang budaya sosialnya tergolong tradisional, mereka tak ambil pusing dengan hiruk pikuk pemimpin rasional-modern. Imaji budaya tradisional selalu menempatkan pemimpin bukan semata sosok yang diunggulkan secara material dan lobi-lobi kuasanya, melainkan sejauh mana ia mampu mencerahkan dan menaburkan maslahat berbasis rohaniah (spiritualitas) di hadapan rakyat.

Sebaliknya, masyarakat modern (rasional), menepikan jauh-jauh apa yang bersifat rohani atau spiritual. Imaji budaya mereka mengedepankan realitas material dan kuasa politis, meski sering dibingkai tarian yang dikategorikan demokratis-hedonistik. Dan pemimpin yang baik di mata masyarakat rasional adalah pemimpin

yang mampu meyakinkan program-program melalui propaganda, pencitraan, dan mobilisasi kepentingan. Dalam imaji budaya kepemimpinan seperti ini, kuantitas citra dan suara, seakan menjadi esensi unggulan yang harus diakui dengan mutlak.

Itulah realitas paradoks kepemimpinan era modern. Ambigu. Satu sisi tampak mengemong, mengayomi dan menyayangi publik, di kesempatan lain memenjarakan aspirasi publik melalui mobilisasi kepentingan elitisnya. Di hadapan rakyat seolah paling jago menumbuhkan dan mengembangkan potensi sosial kemanusiaan, di lain kesempatan justru menilap aspirasi publik dan menggantinya dengan proganda-proganda pragmatis dan antikritik. Mengkalim bagian dari visi dan kerja pemimpin modern, segala bentuk kearifan lokal dan tradisi leluhur dianggap tidak menguntungkan secara matematis, lalu dipetikemaskan. Sungguh, ini bangian dari paceklik (ke)pemimpin(an). Hidup masih lekat dengan spiritualitas disamping tarikan materialitas. Realitas sosial masyarakat juga diwarnai nilai-nilai ukhrawi diantara kecentilan mode dan gaya duniawinya. Pemimpin yang lahir dari peradaban modern pun tak sedikit yang membutuhkan doa dari publik, sering berangkat umrah, menunaikan haji, mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Paceklik ini tidak akan berlanjut jauh jika kita sadar bahwa pemimpin bukan yang pinter gerilya dan berkampanye, melainkan sosok yang dari pikir hingga laku sosialnya penuh kerja.

Pulihkan jiwa

Dalam rangka mengatasi paceklik (ke)pemimpin(an) itu, sebagai entitas publik kita mesti pulihkan jiwa setiap diri. Sebab masing-masing diri fitrahnya adalah pemimpin. Ia mempunyai rasa, pikir, lokus, ruang, dan potensi sosial tersendiri sedari hadir ke muka bumi. Ia bukan batangan daging kosong belaka. Ia memiliki tubuh sekaligus ruh. Ia dibekali otak sekaligus hati. Ia dipenuhi nalar-logis maupun kacamata kesadaran spiritual dalam kemenyatuan dirinya. Dan atas khazanah ini, jiwa kita sebagai publik tidak boleh tergerus oleh pergulatan sosial pragmatis-politis diantara pribadi-pribadi lain.

Hiruk pikuk regulasi (ke)pemimpin(an) baik berskala lokal maupun nasional, tidak akan menyeret kita ke lembah kesemuan

kalau proses pemulihan jiwa sebagai hamba dan pribadi tangguh menjadi potret nyata. Sentuhan hedonis dari mereka yang ambisi menjadi pemimpin tidak akan merasuki jiwa dan kemauan parsial kita. Sebab kita adalah pemimpin juga. Kita punya cara pandang, keyakinan, nalar, kesadaran spiritualitas dan harapan ideal tersendiri. Itulah teks (ke)pemimpin(an). Layaknya sebuah teks, maka cara pandang, nalar, kesadaran spiritualitas dan harapan ideal kita pun patut dicermati, diapresiasi, diharkati dan ditransformasi, termasuk mereka yang ambisi menjadi pemimpin.

Meminjam istilah Arkoun dan Hassan Hanafi, aspirasi, nalar dan kesadaran spiritual publik, merupakan teks atau korpus terbuka. Tidak misterius. Sangat bisa dikenali dengan pendekatan-pendekatan humanis, saluran kerja-kerja produktif dan kultur kuasa yang empatik. Cara kerja sosial kuasa yang parsial, semisal membeli legalitas partai dengan harga fantastis (baca: milayaran), atau memberikan royalti material berlebih untuk kursi legislatif demi administrasi (prosedural) politik, tak ayal akan melahirkan mentalitas pemimpin parsialis dan pragmatis pula. Teks (ke)pemimpin(an) macam ini harus segera dihindari, dimuseumkan, dan dijauhkan dari peradaban (ke) pemimpin(an).

Pemulihan jiwa (ke)pemimpin(an) dari dan untuk kita, adalah keniscayaan. Bukan semata mengantisipasi pesta demokrasi tingkat gubernuran yang akan datang, melainkan untuk jangka panjang kemanusiaan. Nalar (ke)pemimpin(an) rasional-modern, merupakan teks yang layak dibaca dan diambil saripatinya. Demikian nalar (ke) pemimpin(an) tradisional-rohaniah tetap patut dipertimbangkan. Sebab bangsa kita adalah bangsa religius. Bangsa yang menyandarkan konstruksi asasinya pada esensi dan nilai-nilai ilahiah.

Sebagai bangsa religius, meniru alur Jakob Sumardjo, kita mesti menentukan pemimpin yang mementingkan keunggulan rohaniah dan mengorbankan kemewahan duniawiyah. Pemimpin yang tegas menolak keuntungan demi kepentingan dan pemenuhan hasrat duniawi pribadi dan mendahulukan kebutuhan publik tanpa tendensi pragmatis-politis. Dan teks (ke)pemimpin(an) bangsa religius adalah teks yang dipenuhi kesadaran bahwa hidup ini tidak matematis dan statis, melainkan dinamis dan juga mengandung unsur-unsur spiritualis.***

18

Kesalihan Struktural

Agama, tidak bisa dipungkiri merupakan 'obat' bagi peradaban modernisasi yang kian mengalami kemerosotan. Sementara degradasi akhlak, menguatnya individualisme, merebaknya keserakahan dalam berbagai manifestasinya adalah sebagian kecil implikasi negatif dari perkembangan dunia modern saat ini.

Secara normatif, agama telah menawarkan bermacam formula pengembalian kesejatian fitrah manusia dalam skala makro. Salah satunya adalah berbagai sarana ibadah ritual yang diharapkan akan bisa mengubah perilaku hidup manusia supaya menjadi *khalifah* Allah yang maksimal.

Namun ironisnya, normatifitas dan laku ritualitas formal keagamaan di kalangan umat tampak baru sebatas jargon atau idealitas yang masih "keropos." Peningkatan formalisme keberagamaan, semisal rajin umroh dan melaksanakan ibadah haji, tidak sebanding dengan kedewasaan spiritual bermasyarakat dan bernegara. Maraknya dinasti dan korupsi dalam struktur sosial berbangsa dan bernegara belakangan ini, adalah fakta krisis pemerataan sosio-

struktural berbasis spiritualitas agama dan kemanusiaan.

Kesalihan Sosial

Setiap ajaran agama menekankan pentingnya membentuk pribadi yang salih secara ritual (individual). Hal itu disepakati sebagai fondasi bagi eksistensi kehidupan manusia yang beragama. Akan tetapi, kesalihan individual tidak mempunyai makna yang berarti bagi kemanusiaan ketika tidak tercermin dalam kesalihan sosial, yakni kerukunan dan kebersamaan dengan sesama. Sebab kesalihan sosial merupakan manifestasi lanjutan dari kesalihan ritual keberagamaan manusia itu sendiri.

Dalam konteks ibadah puasa, misalnya, ketika Rasulullah bersabda "*shumu tashihhu*" (berpuasalah kamu, niscaya engkau sehat). Kata 'sehat' disini bukan sekadar sehat fisik, namun juga sehat ruhani, sehat akhlak yang berimbas pada kematangan dalam pergaulan sosial yang tidak merugikan kepentingan umum. Begitu pula dengan ibadah salat, haji, dan lain-lain.

Sebagai penguat dari kesalihan ritual, maka kesalihan sosial menekankan tentang pentingnya kepedulian, keharmonisan, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Kedermawanan, sikap saling tolong-menolong, penuh toleransi dan berbagai tindakan positif lainnya menjadikan infrastruktur bagi terciptanya distribusi keadilan terhadap golongan yang membutuhkan.

Dalam kenyataan, terdapat salah satu fenomena menarik sekaligus membuat miris, misalnya saja soal antrian panjang untuk bisa berangkat berhaji. Tidak sedikit diantara mereka yang kurang puas kalau hanya berhaji satu kali. Satu sisi, bisa jadi hal ini merupakan fenomena positif atas tingginya '*ghirah*' umat Islam menjalankan doktrin agamanya. Di sisi lain, justru sangat kontras dengan kondisi kebanyakan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hingga sekadar untuk makan terkadang mempertaruhkan nyawa.

Kesadaran formalistik-legalistik dalam memaknai ritual ibadah membawa sebagian dari mereka yang tergolong 'mampu' itu, lebih mementingkan 'keselamatan pribadinya' dalam menjalankan ritual keagamaan dibandingkan untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya secara lebih produktif.

Semakin jelas bahwa di kalangan kita masih terus berlangsung manipulasi kesalihan, setidaknya dalam konteks kesalihan sosial. Padahal hal ini kurang sejalan dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa menyerukan agar kita mengada dari dan untuk kemaslahatan berbasis humanistik, ''khairunnas 'anfa'uhum linnas.''

Dilema Ambiguitas

Dilema atas ambiguitas keberagamaan semacam ini harus terus-menerus diperbaiki. Sebab untuk membuat bangsa ini bangkit dari keterpurukan, selain kesalihan sosial yang wajib ditumbuhkembangkan, tentu saja ada hal lain yang selama ini jarang sekali dilirik dan diolah, yaitu kesalihan struktural.

Kalau kesalihan sosial sifatnya perbaikan (*ishlah*) di tingkat horisontal, atau kita sebut 'kesalihan infrastruktur,' maka kesalihan struktural sebagai bentuk kesalihan suprastruktur. Kesalihan struktural itu terkait langsung dengan sistem dan penyelenggaraan bernegara. Shabbir Akhtar (2002), seorang teolog pembebasan Islam, menegaskan bahwa kesalihan individual maupun sosial tidak akan dapat memecahkan masalah-masalah struktural yang didasarkan atas distribusi kekuasaan dan kesejahteraan yang timpang atau tidak adil.

Dalam upaya menegakkan kesalihan struktural, saat ini merupakan momentum yang sangat tepat. Sebuah laporan dari *Transparency International Indonesia* (TII) memperlihatkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih tidak mengalami perubahan dan terbilang stagnan. Indonesia menduduki posisi 110 dari 178 jumlah negara yang terkategorikan korup. Media massa sendiri tiap hari menyuguhi kita berbagai fenomena maraknya korupsi di tingkatan elit kekuasaan negeri ini, tak terkecuali di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK).

Fakta-fakta di atas merupakan sebuah indikasi yang memprihatinkan di tengah euforia kesalihan keagamaan yang melimpah namun tanpa dibarengi konsistensi di tingkat sistem dan penyelenggaran negara yang baik. Dan bahwa pejabat yang berhaji semakin banyak, itu nyata. Akan tetapi, dalam konteks korupsi, jumlah pejabat pun tidak bisa dianggap sedikit.

Kesalihan struktural tentu saja mensyaratkan adanya sebuah

sistem yang transparan, akuntabel, melaksanakan prinsip-prinsip *clean and good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih), bebas korupsi dan juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, baik pada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Fenomena lain sebagai cermin dari absennya kesalihan struktural adalah persoalan politik APBD di berbagai daerah. APBD di berbagai daerah ternyata menjadi 'permainan' para politisi dan penguasa lokal untuk mengambil hak rakyat secara 'konstitusional.' Kita bisa melihat misalnya, formasi anggaran yang ada di berbagai daerah menempatkan jumlah yang sangat besar, rata-rata hampir 70% untuk anggaran rutin (gaji pegawai, perlengkapan, dan lainnya).

Adapun belanja pembangunan yang *notabene* adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat hanya sekitar 30% dari total APBD yang ada. Meskipun secara peraturan belum tentu menyimpang, namun dalam perspektif moralitas, fenomena ini jelas mencederai etika publik. Disinilah pentingnya memperjelas visi dan aplikasi kesalihan struktural, yakni membentuk sistem penyelenggaraan negara yang berbasis transparansi dan keadilan seutuhnya.

Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus merajut kembali kesenjangan antara nilai-nilai agama yang ideal dan luhur dengan praktik-praktik keagamaan yang sangat parsialistik. Dan keberagamaan yang holistik tentu saja dibutuhkan dalam rangka menjahit secara dinamis ketiga bentuk kesalihan tersebut, yaitu kesalihan ritual-individual, kesalihan sosial dan kesalihan struktural.

Untuk memperbaiki pola penyelenggaraan negara ke arah yang lebih adil, akuntabel, transparan dan berpihak kepada masyarakat banyak, maka kesalihan struktural yang dilandasi semangat keberagamaan wajib diamalkan. Sebab, *tasharruf al-imaam 'ala al-ra'iyyah manuuthun bi al-mashlahah,* bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan dan kesejahteraan publik!

19

Belajar Pada Abu Bakar

Sebagian kalangan Islam masih beranggapan bahwa Sayyidina Abu Bakar Al Shiddiq sangat tidak ingin dirinya ditunjuk sebagai khalifah pasca Nabi Muhammad Saw wafat. Pertemuan luhur antara sahabat Ansor dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah kala itu memang terbilang mendadak tapi sangat tepat. Sebab setelah Nabi Muhammad Saw wafat, umat Islam tetap harus mempunyai figur (khalifah) anutan untuk melangsungkan Sunnah yang telah digariskan Sang Nabi.

Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al Shiddiq, Umar Ibn al Khattab dan Abu Ubaidah Ibn al Jaroh terlibat dalam pembicaraan yang amat penting. Diantara mereka saling menunjukkan ketawaduan dan kebesaran jiwa ketika diminta untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad Saw mengurusi dan melanjutkan kejuangan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi. Di hadapan sahabat Ansor dan Muhajirin, Abu Ubaidah dengan lantang menyatakan "Aku ajukan dua orang terbaik dari kalian (Abu Bakar dan Umar). Pilih salah satunya untuk memimpin kalian."

Di tengah keramaian itu tiba-tiba Umar Ibn al Khattab angkat

bicara dan menyatakan "Demi Allah, lebih baik kalian memenggal leherku dari pada aku mesti maju menjadi pemimpin kalian, sedang-kan di hadapan kalian masih ada Abu Bakar al Shiddiq." Tanpa diduga-duga, apa yang ditegaskan Umar ini seketika mendorong sahabat Ansor dan Muhajirin untuk segera membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang harus mentransformasikan nilai-nilai Sunnah Nabi Muhammad Saw sekaligus menjaga kelangsungan umat Islam secara makro.

Pidato Politik

Dalam *tarikh al-khulafa*, Jalaluddin al Suyuti konon mencatat pidato politik Abu Bakar. Sepanjang sejarah kekhalifahan, pidato politik ini dianggap memiliki aura religi kepemimpinan yang luar biasa. Bukan saja lantaran Abu Bakar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw yang terbilang matang secara usia dan juga prinsip berkehidupan. Lebih dari itu, karena pidato politik Abu Bakar benar-benar menyimpan rajutan makna luhur terkait dengan esensi kepemimpinan dalam perspektif Islam itu sendiri.

Pidato politik Abu Bakar itu berbunyi "Wahai sekalian manusia, kini aku diserahi untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik. Bantulah jika aku dalam kebaikan dan nasihatilah jika aku tidak dalam keadaan baik. Jujur merupakan sikap amanah dan bohong merupakan bukti khianat. Orang lemah di antara kalian, bagiku adalah orang yang kuat sehingga aku harus memberikan haknya. Dan orang yang kuat di antara kalian hakikatnya adalah orang lemah sehingga aku akan mengambil hak darinya."

Itulah pidato padat tapi berisi. Menyimpan spirit-etik kepemimpinan tingkat tinggi. Dan lebih lanjut Abu Bakar menegaskan bahwa "Suatu bangsa yang mengabaikan jihad mereka akan ditimpa kehinaan. Jika suatu bangsa membiarkan keburukan merajalela, maka akan ditimpa kehancuran. Taatilah sepanjang aku taat kepada Allah dan RasulNya. Dan seandainya aku durhaka kepada Allah dan tidak taat kepada RasulNya, kalian tidak wajib taat kepadaku. Tegakkanlah salat niscaya Allah akan merahmati kalin."

Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah memang berbeda dengan realitas pemilihan pemimpin umat saat ini. Era Abu Bakar merupakan masa awal peralihan kepemimpinan dari seorang "manusia super"

yang memiliki kecakapan dan keluasan sikap sosial tak tertandingi. Inilah era awal dimana kepemimpinan sosial umat Islam benar-benar akan dijalankan oleh manusia-manusia biasa yang tidak mendapatkan tugas khusus sebagai Nabi dan RasulNya. Ini sungguh masa murni kepemimpinan berbasis *insaniyah* bukan berbalut kenabian dan kerasulan. Tak berlebihan jika Abu Bakar menyadari kelemahan diri dan beratnya tugas sebagai pemimpin umat dan bangsa.

Abu Bakar hendak menegaskan bahwa mengajukan diri menjadi pemimpin sejatinya bukan hal yang baik dan luhur. Terlebih kalau dalam prosesnya sudah disertai dengan langkah-langkah yang jauh dari kerangka kebajikan dan kebesaran jiwa, seperti yang marak dijalankan oleh caleg-caleg dari berbagai partai politik belakangan ini. Adapun pengajuan diri dalam konteks kepemimpinan yang tanpa didasari oleh ketulusan dan kebesaran jiwa, tentu saja hanya akan menambah kerusakan bagi masa depan kepemimpinan itu sendiri. Sebab menjadi pemimpin ada kaitannya dengan anugerah Allah SWT, dan bukan merupakan pemaksaan dari kehendak diri yang berlebihan.

Pemimpin luhur adalah ia yang tidak terjebak oleh hembusan hasrat kuasa yang parsialistik-hedonistik. Atau, meminjam tradisi pikir kaum arif, pemimpin idaman yang produktif dan prospektif ialah mereka yang lebih mengutamakan kerja-kerja nyatanya ketimbang hanya sibuk ingin menduduki kursi formal kuasa di pentas sosial. Dalam banyak fenomena, pemimpin yang lahir dari rekayasa formal seringkali cenderung "friktif" dan minus inisiasi maupun inovasi. Pasalnya jelas, mereka semata berambisi dari dan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk kebajikan sosial seutuhnya.

Dua Hal

Sedikitnya ada dua hal yang dapat dipetik dari pidato politik Abu Bakar. Pertama adalah ketawaduan untuk menjadi seorang pemimpin. Kedua, keikhlasan dalam mengabdikan diri sebagai pemimpin. Dua hal ini mesti berpadu-harmoni dalam setiap jejak langkah dan karya kepemimpinan siapa saja. Tawadu dan ikhlas, merupakan kunci keluhuran pikiran dan perilaku sosial setiap pemimpin. Akan tetapi faktanya, tawadu dan ikhlas acapkali dihilangkan oleh sebagian sosok yang belakangan ini rajin mendesain dirinya untuk dijadikan

pemimpin, setidaknya terlihat dari media-media propagandis atau alat peraga politik yang dipilihnya.

Tawadu, meminjam napas kaum sufi, ialah wujud nyata dari orientasi integral manusia agar senantiasa memagari dirinya dari hal-hal yang dapat melampaui kemampuan eksistensialnya. Tawadu itu merupakan aktualisasi pikiran dan sikap sosial yang bermula sekaligus bermuara pada filosofi bahwa "di atas langit masih ada langit." Karena sebagai manusia, kekuatan kita sesungguhnya bukan berasal dari diri kita *un sich,* melainkan lantaran ada campur tangan Dzat Yang Mahakuat dan Mahaperkasa. Tawadu juga merupakan sikap yang lebih berdimensi pada penguzlahan diri dari pelbagai sesuatu yang bisa mengakibatkan takabur dan congkak, tak terkecuali dalam konteks kepemimpinan. Sikap takabur dan congkak, mudah sekali menggiring setiap manusia cepat merasa besar. Dan manakala sikap merasa besar ini dibiarkan berlangsung tanpa penyaringan yang cerdas dan mencerahkan, tentu tidak bisa dimungkiri kalau akan selalu melahirkan hal-hal yang tampak kasar. Padahal Raja Ali Haji sudah bersajak *"barangsiapa yang sudah besar/janganlah kelakukannya membuat kasar."*

Paradigma tawadu pada setiap diri pemimpin akan lebih paripurna kalau dikembangkan bersama keikhlasan. Syaikh Mustafa Al Galayani menegaskan *ruhul 'amal al-ikhlas*, bahwa ruh dari perbuatan itu adalah ikhlas. Hilangnya keikhlasan pada setiap perbuatan sebagian pemimpin kita akhir-akhir ini, disadari atau tidak, telah ikut menimbulkan "erupsi sosial" di kalangan masyarakat. Potret pemimpin yang kurang ikhlas itu minimal dapat dicermati dari sikapnya yang egois dan kurang tulus dalam menyikapi otokritik yang disampaikan rakyatnya.

Walhasil, pemimpin macam ini tidak bisa untuk *tawasau bi al-haq wa tawasau bi al-shabr*. Justru ia akan gampang sekali melemahkan yang lemah dan memanjakan yang terbilang kuat, terutama dalam perspektif sosial ekonomi. Padahal semestinya ia belajar pada Abu Bakar supaya mengedepankan kejujuran, dan mengutamakan hak-hak rakyat yang (di)lemah(kan), kemudian berlaku adil dan tegas terhadap pribadi maupun kelompok borjuis tapi banyak melumat hak rakyat dan merugikan negara. Sebab pemimpin yang adil meskipun kafir, akan mempunyai nilai maslahatnya sendiri di mata publik. ***

Bagian IV

Nilai-Nilai Agama dan Fenomena Politik

1

Agama Itu Perilaku

Sang Buddha menuturkan bahwa "biar pun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan Ajaran, maka orang yang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci." Ia akan berputar-putar di area subyektifitas doktrinasinya yang tidak dapat menyuntikkan makna terhadap kelangsungan hidup. Dalam bahasa pegiat hermeunetika, ia tak lebih sebagai pembaca teks yang (di) suci(kan) dan bukan pelaku dari dan untuk aktualisasi nilai-nilai sebuah ajaran yang luhur dan mencerahkan.

Apa yang dilontarkan Sang Buddha adalah mata air spiritualitas yang berkualitas tinggi. Ajaran ini seakan mengingatkan kita pada prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. bahwa agama bukanlah tumpukan wacana (*al-maqaliyah*) keimanan yang semata dilekatkan dengan istilah-istilah, simbol-simbol, dan ritus-ritus. Akan tetapi, agama itu perilaku yang tidak pernah menjarakkan antara kalimat-kalimat bertajuk keimanan dan keislaman semisal mari kita tegakkan salat, tunaikan zakat, beribadah haji, dan lain-lain dengan *amaliah* (sikap) integral kita atas istilah atau

kalimat tersebut sepanjang hayat.

Menyangkut salat, misalnya, Alquran menegaskan bahwa salat bukan sekadar manifestasi ritualistik yang tidak menuntut kejelasan sikap sosial bagi pelakunya. Justru di antara tahapan-tahapan prosedural salat telah tertancap keharusan perilaku mencerahkan bagi yang melaksanakan *(mushalli)*. Dalam bahasa yang lebih gamblang bahwa usai melaksanakan salat setiap *mushalli* (pelaksana salat) harus mampu mencegah kemungkaran dan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang terbilang keji dan merugikan terhadap sesama makhluk Tuhan (QS. Al-'Ankabut [29]: 45). Dari sini telah cukup terang kalau agama itu perilaku, bukan semata rumusan doktrinasi yang kaku dan ambigu.

Kitab Suci

Setiap agama pasti memiliki kitab suci yang berisikan ajaran-ajaran luhur dan hukum-hukum aspiratifnya bagi kelangsungan sosio-kemanusiaan. Dari dan untuk kitab suci masing-masing penganut agama memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam perilaku di hadapan sesama makhluk Tuhan. Oleh karena itu, keberadaan dan peran kitab suci sangat-sangat penting bagi para pemeluk agama. Sekiranya ada agama yang mempunyai kitab suci tapi menjauhkan diri dari pencerahan manusia, dapat dimungkinkan bahwa agama dimaksud tidak lahir dalam locus *historical God* atau kesejarahan ilahiah yang teruji. Tak pelak lagi, agama macam ini dipastikan sebentar "nongol" di hadapan (ke)manusia(an).

Kitab suci oleh sebagian besar kalangan masih dianggap sebagai kumpulan teks dimana narasi ajaran keberagamaan tertera dan tersusun rapi. Sebagai teks, kitab suci menempati posisi sedemikian vital dan strategis terutama bagi setiap manusia yang dengan sengaja dan sadar mempercayai kedigjayaan maupun keistimewaan yang dikandungnya. Sebab kitab suci dianggap mampu menawarkan dan mentransformasikan pesan-pesan yang diletakkan Tuhan untuk kemaslahatan manusia. Kitab suci adalah media yang dapat mengantarkan kita berdialog langsung dan memahami cita ideal maupun langkah praktis Tuhan dalam kesemestaan dan kesurgawian.

Dalam konteks kesemestaan, kitab suci tentu harus menyatu padu dengan reka dan rancang besar kehidupan sosial penganutnya.

Kitab suci tidak boleh memosisikan diri hanya sebagai pelarian legitimatif bagi setiap diri yang mengaku beragama. Lebih dari itu, kitab suci mesti benar-benar berfungsi sebagai teks produktif dan empatik terhadap prosesi realitas sosial (ke)manusia(an) kapan dan dimana pun. Dan kurang tepat kalau menempatkan kitab suci sebagai sesuatu yang elitis, sakral, dan dogmatik *un sich*. Sebab akibatnya akan menjadikan kitab suci asyik dengan wacananya sendiri dan tidak mengindahkan lagi perilaku sosial penganutnya.

Padahal dengan cita-cita dan nilai-nilai kesurgawiannya, kitab suci benar-benar menjadi kompas sekaligus pertaruhan kedamaian dan keindahan imani setiap penganut agama di akhirat kelak. Apa saja yang digerakkan dan ditransformasikan para penganut agama di alam kesemestaan ini sebetulnya merupakan tiket memasuki istana ketuhanan dan sekaligus untuk menyaksikan wujud Tuhan seutuhnya di akhir zaman. Namun demikian, antara aspek kesemestaan dan kesurgawian sebagaimana termaktub dalam kitab suci sebuah agama, satu dan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Kedua hal itu merupakan pasangan fitrati yang sudah terukur, teruji, dan menjadi wujud (utuh) keharmonisan abadi.

Siapa saja penganut agama yang berperilaku baik dalam kesemestaan, irisan makna dan maslahatnya sudah ditetapkan dalam ruang kesurgawian.Apa yang dipentaskan di alam ini merupakan ilustrasi dari potretan kesurgawian. Tak berlebihan kalau dalam tradisi Islam dinyatakan bahwa setiap manusia semula berasal dari "surga" dengan pelbagai atribut atau identitas idealnya. Mereka akan dikembalikan ke alam asalnya dengan tumpukan perilaku yang dilakukan selama di muka bumi.Yang mujur (*al-muflihun*) dan sesuai fitratinya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Tuhan dengan lancar, sedang yang perilakunya meliuk-liuk dan dipandang kurang sejalan dengan fitratinya sebagai *khalifatu fi al-ardhi* akan mendapatkan pengadilan tersendiri dari Tuhan berdasarkan amal (perbuatan) selama di alam semesta.

Amal Baik

Allah lebih mengutamakan kualitas hati dan amal baik dari setiap hambaNya.Allah tidak menjadikan bentuk tubuh dan kekayaan (material) setiap diri manusia sebagai jaminan mendapatkan ridla, pengampunan,

dan kasih sayang dari Allah. Semua manusia dan makhluk lain di muka bumi dipandang sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka tiada lain adalah ketakwaan yang diinternalisasi ke dalam perilaku baik (*al-'amal al-shalih*) dan kebeningan hati mereka. Pun yang melebihkan antara masing-masing diri manusia dengan sesama makhlukNya adalah sejauhmana mereka saling berlomba dan optimal menyebarkan amal baik di muka bumi (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Dengan sangat terang Alquran mengulang-ulang bahwa setiap manusia yang beriman pasti diserukan untuk langsung beramal salih. Perhatikan di dalam Surat Albaqarah [2] ayat 25, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya." Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal salih betul-betul akan menjadi penghuni surga *(ashabu al-jannah)* di akhirat nanti (QS. Al-Baqarah [2] : 82). Cermati pula dalam surat yang sama pada ayat 277, Surat Al-Imran [3]: 57, Surat al-Nisa [4]: 57, 122, 173, Surat al-Maidah [5]: 9, 93, dan seterusnya.

Beragama berarti berkomitmen untuk meleburkan diri dengan realitas sosial kemanusiaan secara universal. Beragama bukan sekadar memeragakan ritus-ritus dan simbol-simbol, apalagi propaganda-propaganda yang cenderung destruktif. Meminjam istilah Ismail Raji al-Faruqi, kalau kita memang mendasarkan diri pada prinsip bertauhid dalam beragama, maka pelibatan diri semaksimal mungkin dari dan untuk interaksi konstruktif dalam kemanusiaan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Inilah yang oleh Rasulullah diserukan dengan istilah "khairu al-Nas an-fa'uhum li al-Nas."

Akhirnya, mari kita bergerak dan berbuat dari dan untuk kolektifitas dalam berbangsa dan bernegara. Tak perlu terus menerus adu citra, saling klaim paling baik, cepat membanggakan keberhasilan (program) diri dan barisan, terlebih bagi mereka yang pernah dan sedang berkuasa. Kalau pun ada program Kartu Sehat, Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kesigapan dalam penanganan bencana alam, keberhasilan membuka borok korupsi dan lain-lain, semua kita tempatkan sebagai panggilan jiwa dan tanggung jawab kehambaan. Sebab agama itu perilaku, terutama menyangkut *ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa* atau progresifitas dalam kebajikan dan ketakwaan. ***

2

Agama (Untuk) Manusia

Ada banyak cara memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah mengingat kembali situasi dimana suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat. Manakala rombongan kaum Yahudi yang sedang membawa mayat salah seorang di antara mereka hendak lewat di depannya, beliau seketika berdiri santun.

Keruan saja para sahabat bertanya kepada Nabi, "Kenapa baginda berdiri?" Dengan penuh kesantunan Nabi menjawab, "Saya berdiri karena menghormati mereka." Para sahabat semakin penasaran dan terus bertanya, "Tapi bukankah yang meninggal itu adalah orang Yahudi, Ya Rasul?" "Betul", jawab Nabi.

Sebelum para sahabat melontarkan pertanyaan lebih lanjut, Nabi terus bersabda. "Meskipun yang meninggal adalah orang Yahudi, apa salahnya kita menghormati dan ikut belasungkawa? Sebagai muslim, imbuh Sang Nabi, walau secara agama kita berbeda tapi pada hakikatnya kita sama dengan mereka, yakni sama-sama manusia".

Itulah dialog ringkas tapi mengharukan antara Nabi Muhammad Saw dengan para sahabatnya. Dialog ini merupakan ilustrasi perilaku (ke)islam(an) yang cerdas dan menakjubkan. Islam betul-betul berpijak pada akar asalinya sebagai agama pembawa kedamaian bagi semua kalangan.

Islam Cerdas

Ibnu Taimiyyah telah mensinyalir adanya riwayat yang menyatakan bahwa sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah *aqal* (akal). Ada juga, masih menurut Ibnu Taimiyyah, riwayat Tirmidzi yang menegaskan bahwa sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah *qalam* (pena).

Akal dan pena, adalah simbol dari intelektualitas. Akal, terutama dalam pandangan para filosof, potensi terbaik yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Bahkan akal dalam maknanya sebagai pengetahuan, merupakan pembeda yang paling prinsipil antara kita dan makhluk Allah yang lain.

Tanpa akal manusia tidak akan mampu berbuat banyak dalam mengembangkan pola kehidupannya. Karena akal itulah manusia senantiasa dikategorikan sebagai makhluk yang dapat menciptakan budaya dengan perangkat nilai-nilainya. Dan tak berlebihan bilamana dalam Alquran Allah menamakan manusia itu dengan sebutan "ulul albab", yakni penerus dari kecerdasan dan kreatifitas ilahi sendiri.

Sementara pena, dalam makna yang sangat sederhana, merupakan *wasilah* (sarana) untuk mematangkan apa yang menjadi cita-cita ideal akal. Dengan dan melalui pena, pengetahuan yang dilahirkan akal dapat bertransformasi demi kelangsungan hidup manusia secara maksimal.

Baik akal dan pena, semuanya adalah bagian dari dunia intelektualisme. Hubungan keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keberadaannya bukan saling menegasi, melainkan untuk saling melengkapi. Yang satu bisa memosisikan diri sebagai sumber pengetahuan, yang satu lagi dapat berfungsi sebagai media paling efektif untuk mengembangbiakkan pengetahuan itu sendiri.

Oleh karena itu, akal dan pena harus dijadikan potensi dan modal prioritas untuk merevitalisasi keislaman dalam berbagai

aspeknya. Sehingga kebajikan dan kesantunan Islam betul-betul teraktualisasi dalam keseharian kita sebagai bangsa dalam segala kebhinekaannya.

Melalui akal dan pena ini, eksistensi keislaman harus terus diproduksi secara terarah. Islam tidak boleh hanya dijadikan sarana propaganda melawan kegenitan peradaban modern. Sebab, menjiplak istilah sepak bola, kalau Islam itu kuat dan sehat, ia akan menjadi *play maker* terunggul dalam seluruh dinamika sosial keumatan. Ia akan tampil di muka publik dengan kecerdasannya, bukan dengan emosionalitasnya.

Melahirkan dan membumikan Islam cerdas dalam konteks keindonesian, merupakan keniscayaan tak terbantahkan. Islam cerdas adalah Islam yang elegan, aspiratif, komunikatif, rasional dan universal, bukan Islam yang emosional dan parsialistik.

Islam cerdas merupakan aktualisasi dari keluhuran akhlak Muhammad yang santun, yang tidak mudah melakukan diskriminasi berbasis ras, agama, golongan, status sosial dan sejenisnya.

Islam cerdas sejatinya adalah Islam yang mampu menempatkan dirinya sebagai rahmat bagi seluruh tatanan sosial kehidupan manusia, bukan Islam yang sering menebarkan ancaman (teror) dan bencana bagi proses kebangsaan sekalipun. Sebab, kata Gus Dur, Islam itu nilai. Ia begitu lembut dan harum. Ia tidak boleh dibengkokkan dan "disablon-sablon", apalagi dengan campuran warna yang tidak artistik sama sekali.

Pemberi Warna

Karena Islam itu nilai, ia tidak boleh dikakukan. Ia tidak bisa dibatasi. Ia dapat dimiliki oleh siapa saja yang menyukainya. Ia harus selalu menjadi perekat keharmonisan sesama manusia. Dan Islam nilai inilah yang patut diprioritaskan dalam konteks kebangsaan.

Eksistensi Islam pun kurang tepat kalau diukur dengan semata-mata menjadi minoritas atau mayoritas. Sebab, keberadaan Islam itu bukan hanya untuk kelangsungan hidup beberapa golongan, melainkan demi ketenangan, kenyamanan, dan kesejahteraan semua makhluk di muka bumi.

Dengan demikian, inklusifitas tak baik hanya dijadikan

wacana (*discourse*). Inklusifitas Islam harus menyatu dengan perilaku keseharian kita sebagai umat dan masyarakat bangsa. Persis seperti yang disampaikan Gus Dur, bahwa eksistensi Islam akan diukur sejauh mana ia mampu melayani masyarakat bangsa sebagai individu-individu tanpa harus dikelompokkan.

Islam, bukan agama eksklusif. Islam juga bukan agama apatis terhadap problematika sosial kebangsaan. Kehadirannya sedari dulu telah ditakdirkan untuk mengangkat harkat kemanusiaan dalam skala makro. Termasuk menghapuskan budaya perbudakan, melawan tradisi eksploitasi dan penindasan antar sesama, dan lain sebagainya.

Bahkan sebagai agama yang berbasis pada keluhuran akhlak Muhammad, Islam harus senantiasa memberikan jaminan sosial bagi siapa saja yang menganutnya maupun bagi mereka yang bernaung di sekelilingnya. *Al mu'minu man a-manahunnasa 'ala dima-ihim wa amwalihim, wal muslimu man salama al muslimuna min lisanihi wayadihi.*

Untuk itu, Islam harus dikembalikan pada fitrahnya, yakni sebagai agama manusia yang mengutamakan kebajikan dan kemaslahatan. Agama yang benar-benar mengada untuk keselamatan seluruh manusia dan bukan hanya menguntungkan beberapa suku dan etnis.

pantaslah kita renungkan penyataan Gus Dur bahwa: "Kalau Islam di negeri ini mau benar, lihatlah ia sebagai pemberi warna, tak lebih dari itu. Jika Islam difungsikan sebagai satu-satunya kebenaran, sedangkan yang lain harus mengalah, maka ia menjadi eksklusif."

Manakala islam diekslusifkan, ia akan berada dalam dilema tersendiri

Satu sisi ia harus konsisten sebagai pembawa rahmat bagi sebagian alam, namun pada aspek lain ia mesti mengabaikan kebajikan dari umat yang berada diluar barisan islam. Dan ini tentu bukan citra dari spiritualitas keilahian.***

3

Beragama Itu Indah dan Penuh Harmoni

Program kemaritiman yang digalakkan Jokowi dengan tim handal dalam kabinetnya layak dicermati. Pertama, hal ini memang tidak mengada-ada dan bukan program langka. Negeri ini wujud dari eksistensi kepulauan.

Kedua, sejak negeri ini dinyatakan merdeka, hampir sebagian besar kepulauan tidak dalam kondisi layaknya bagian dari bangsa yang merdeka. Ketimpangan sosial terutama dalam infrastruktur, pemompaan kualitas sumber daya manusia (SDM) apalagi menyangkut kesejahtraan sosial masih terbilang jauh dari harapan masyarakat kepulauan. Disamping perhatian (kebijakan) negara yang belum maksimal, pengenyampingan fungsi dan peran Agama bagi eksistensi kepulauan merupakan salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi.

Sachiko Murata dan William C. Chittick dalam the Vision Of Islam (2005) menengarai bahwa siapa saja yang melalaikan Agama dalam konteks kehidupan berhamba dimuka bumi, maka tidak patut dikategorikan sebagai manusia. Ia sungguh hina dan sama sekali tidak

memiliki kehormatan apalagi untuk sampai “dihormati”. Ia bukan semata akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaan melainkan telah “kufur” atau mengingkari fitrah dirinya sendiri sebagai Khalifah Allah sekaligus bagian dari elemen penting sebuah bangsa dan negara.

Padahal dalam konteks tujuan hidup secara makro antara agama dan negara banyak memiliki kesamaan. Salah satunya diantaranya bahwa agama dan negara sama-sama mendambakan kelangsungan dan kesejahtraan sosial setiap individu dan umat yang menjadi bagian di dalamnya ke arah yang lebih baik. Meskipun perlu disadari pula kalau agama mempunyai nilai lebih terutama dalam aspek sakralitas dan keluhuran misinya. Agama tidak hanya memandang aktifitas sosial manusia dari ranah lahiri (materialis) tetapi juga dari sudut batini (spiritualitas).

Berbagi Kebajikan

Semangat dan fungsi utama agama,khususnya islam, Adalah berbagi kebajikan terhadap semua makhluk Allah SWT, ta’awanu ala al-birri, (Qs. Almaidah[5]:2). Atau dalam istilah yang lebih keren tanpa menebar kebajikan dengan nilai-nilai luhur yang lain agama hanya akan tinggal nama dan dapat dipastikan diajuhi oleh banyak manusia. Karena sebagai mediator ideal antara tuhan dan manusia agama harus senantiasa mentransformasikan kebajikan dalam segala ruang dan waktu bagi siapa saja yang telah berdiri dan sekaligus berbaris rapi didalam spirit jiwa maupun formalitas doktrinatifnya.

Kebajikan itu merupakan esensi sekaligus eksistensi dari agama. Kebajikan (al-khair, al-bir, al-hikmah, al-rahmah) benar-benar adalah potensi dan kekuatan paling fundamental dari dan untuk sebuah agama. Alquran, misalnya, menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa islam berarti juga penabur rahmat bagi seluruh semesta (Qs. Al- Anbiya [21]:108). Dan rahmat, baik oleh masyarakat biasa (awam) maupun yang digolongkan kaum terpelajar hingga saat ini terus dimaknai dengan kebajikan. Maka tidak sedikit kalangan masyarakat memandang barang siapa yang mendapatkan rahmat ditletakkan sebagai yang dilimpahi kebajikan.

Sungguh terang bahwa siapapun yang beragama, termasuk para pemimpin sosial dan elit politik dinegeri ini seyogiyanya

memekarkan kebajikan diberbagai ruang dan waktu, lebih-lebih ketika mereka menjadi penguasa. Sebab Allah SWT Sang Penguasa Jagad Raya senantiasa memulai aktifitasnya dari dan untuk kebajikan. Dan sama sekali tidak berlebihan kalau Allah menekankan kepada kita selaku khalifah-Nya untuk tidak kenal lelah membumikan kebajikan terhadap sesama dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, hingga kemanusiaan secara integral.

Dengan menebarkan kebajikan sesungguhnya telah ikut mengaktualisasikan salah satu dimensi agama (islam) yakni ihsan. Dan istilah ihsan, dalam catatan Sachiko Murata dan William C. Chittick (2005:400), merupakan kata kerja yang berarti melakukan atau membangun apa yang baik dan indah. Kata ihsan, berasal dari kata husn, berbeda dengan kata "Khayr" sebab Khayr adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat konkrit meskipun bukan keindahan. Adapaun husn atau ihsan adalah perbuatan bajik yang tetap lekat dengan keindahan atau keharmonisan dalam konteks sosial kemanusiaan.

Berbagi kebajikan, sekali lagi, merupakan fitrah bagi kita sebagai hamba sekaligus khalifahnya. Dan ada banyak ayat dalam Alquran yang menegaskan bahwa Allah sangat dekat dan mencintai siapa saja yang loyal berbagi kebajikan". "Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Qs. Al-Baqarah[2]:195) "sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan"(Qs. Al-Nahl[16]:128). Perhatikan pula dalam surat Al-Hud[11]:115, Al-Ankabut[29]:69, An-Nisa[4]:125, Al-A'raf[7]:56, Al-Maidah[5]:85, Al-Zumar[39]:34 dan lain sebagainya.

Menegakkan Keadilan

Salah satu bentuk kebajikan adalah menegakkan keadilan. Sebagian kalangan pun malah mensinyalir bahwa menegakkan keadilan sebetulnya merupakan puncak dari sikap berkebajikan. Namun diluar asumsi-asumsi tersebut komitmen menegakkan keadilan menurut ajaran Alquran lebih dekat pada status dan kualitas ketaqwaan. (Al-Maidah[5]:8). Sebab berkeadilan disamping sebagai bentuk penghambaan tingkat tinggi dihadapan Tuhan juga sumber dari terwujudnya keharmonisan dengan sesama dalam kehidupan

sosial antar umat dan masyarakat (hablu min al-nas).

Keadilan, diakui atau tidak, menjadi pijakan bagi transformasi persamaan (equality) dalam berkemanusiaan, berkemasyarakatan, berkeumatan, berkebangsaan dan berkenegaraan sekaligus. Dari dan untuk keadilan ini agama selalu memulai kontruksi maupun seruan moral sosio-religiusitas. Bahkan dalam pandangan Murtadha Muthahhari, bahwa tujuan dari semua Agama Samawi tiada lain untuk menegakkan keadilan. Dalam perspektif yang lebih jauh lanjut, Murtadha Muthahhari keadilan (al-adl) merupakan rukun dalam agama, bukan sekadar etika seperti diramaikan oleh sebagian filosof (Barat).

Cita-cita luhur keadilan, terutama dalam perspektif agama (Islam) adalah terwujudnya persamaan berkemanusiaan secara universal dan meluntukan seluruh pribadi. Beragama tidak identik dengan garis lintang dan garis bujur belaka sebagaimana menyangkut wilayah kepulauan. Beragam itu indah dan penuh harmoni. Di dalam agama nilai-nilai ilahiah tumbuh jernih dengan kerangka universalitasnya. **

4

Seni Beragama

Selama agama dimaknai semata tumpukan doktrinasi dari dan untuk pelembagaan formal keagamaan, sejauh itu pula agama akan terus tampak mengekang pola kehidupan masing-masing pemeluknya.

Sesekali pola semacam ini tampak seperti biasa-biasa saja. Namun tanpa kita sadari, pada saat-saat tertentu dapat mengeksploitasi paradigma sosial kehidupan umat itu sendiri. Efeknya, agama benar-benar (terus) dikategorikan sebagai hal yang kurang mampu memberikan kontribusi positif terhadap dinamika, pergulatan dan kelangsungan sosial umat yang mendambakannya.

Kecenderungan pola doktrinatif ini juga akan sangat mengganggu masa depan agama dikancah peradaban global (*global civilization*). Agama yang seyogiyanya menjadi modal, model dan kekuatan sosial bagi siapa saja yang menganutnya justru hanya akan berbenturan dengan cibiran dan caci maki atas realitas yang ia suguhkan. Bahkan dalam konteks yang lebih jauh, pelan-pelan agama (doktrinatif) akan mudah disepelekan dan disia-siakan oleh masyarakat global (*global*

Society). Dan agama meniru Karl Mark akan terus tampak sebagai candu bagi manusia yang (masih) menganggapnya mempunyai arti.

Salah satu resiko sosial dari pola doktrinatif, agama dapat dipersalahkan dan dianggap tidak pernah aspiratif serta tidak realistik mendampingi masyarakat dihadapan fakta-fakta modernitas. Beragama lalu dinyatakan sebatas arah untuk menghilangkan kegelisahan penganutnya dalam kondisi sesaat yang terkadang tidak banyak memberikan makna lebih produktif setelah kegelisahannya memudar. Inilah ironi religiusitas yang tidak boleh dibiarkan berlangsung lama sebab bukan saja mengikis nilai-nilai luhur daripada agama, melainkan akan merusak tatanan kelangsungan agama dimasa yang akan datang.

Dua Dimensi

Sebagai pegangan hidup dan sistem sosial, agama mempunyai dimensi-dimensi yang melekat sejak awal kelahirannya. Yakni dimensi profanitas (keduniawian) dan sakralitas (keakhiratan). Dua dimensi ini adalah "fitrah" agama apapun yang hadir ditengah- tengah kehidupan umat manusia. Dua dimensi ini pula yang sejatinya merupakan salah satu kelebihan agama dibandingkan sistem sosial lain yang terus digelindingkan banyak aktifis, praktisi, intelektual, ideologi, teologi dan filosofi sekalipun.

Dimensi profanitas bukan sesuatu yang negatif. Dimensi ini mata berguna dalam rangka kebangunan tahapan eksistensial manusia beragama secara sosial bermasyarakat. Kenyataan hidup didunia adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ia mesti dihadapi melalui berbagai kemampuan dan keahlian sosial dengan aneka ragam perspektifnya. Sebab, menurut semangat ajaran Islam, bahwa kehidupan dunia ini sejatinya merupakan ilustrasi akan kehidupan akhirat (*al-dun-ya mazra 'atu al-akhirati*).

Beragama didunia, sejatinya adalah seni mengolah kehidupan sosial berbasis religiusitas. Bukan semata menegakkan spiritualitas agama akan tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai keseluruh ruang sosial bermasyarakat. Dari dan untuk aktualisasi nilai-nilai spiritualitas itu maka kehidupan setiap penganut agama tidak akan terlalu "berjarak" dengan realitas bermanusia, berbangsa dan bernegara. Dan, penganut

agama semestinya dapat mengusung laku kehidupan sosialnya dengan maksimal dihadapan sesama makhluk Tuhan yang sama-sama berada dan mengada sebagai hambaNya.

Artinya, penganut agama tidak boleh hanya berpangku tangan dan menunggu takdir menyikapi status sosial. Ia harus proaktif dan progresif mengolah dan mengelola aspek-aspek kehidupan. Ia mesti terus bergerak dari ruang satu keruang lain untuk bertumbuh dalam konteks bermasyarakat. Tidak boleh mandeg dan menganggurkan kehidupan dengan mengatasnamakan bahwa nasib sosial sudah ditentukan oleh Tuhan sedari awal hingga akhir hayat. Karena hidup itu, sebagian filosof adalah "vivo" rumusan nilai dan eksistensialitas yang sedemikian dinamis. Bukan wujud dari kepasifan apalagi kemalasan (*al-asl*).

Dimensi sakralitas agama, disadari atau tidak, merupakan pematangan dari pada paradigma dan praktik kehidupan masing-masing penganutnya sejak didunia hingga ke alam lain kelak. Dimensi ini adalah "pelumas" dan "molto" bagi rasa, pikiran, karsa, dan karya nyata kehidupan sosial setiap pemeluk agama. Seperti diuraikan diatas bahwa kehidupan duniawi merupakan media bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Maka memompa kualitas kehidupan duniawiyah tidak akan lepas dari rumusan nilai-nilai ukhrawiyah yang telah ditekankan oleh agama. "*Wa la al-Akhiratu Khairullaka min al-Ula* (Qs. Ad-Dhuha[93]:4).

Kelenturan beradaptasi.

Disisi lain dimensi sakralitas adalah bagian dari seni dalam beragama (*the art of religion*) menuju kelenturan beradaptasi dengan realitas sosial masyarakat. Paradigma kehidupan duniawi tidak akan menemukan makna cukup lezat manakala dilepaskan dari estetika nilai-nilai ukhrawi. Agama bukan semata ritualitas formal dan kaku. Agama juga nafas dari kreasi sosial umat manusia yang berbasis imani. Tidak ada aktifitas umat beragama yang bisa menjarakan diri dengan rumusan nilai-nilai spiritualitas (ukhrawi). Sebab fitrah manusia terdiri dari raga sekaligus jiwa material-lahiri dan esensial-batini.

Ibadah salat saja yang jelas-jelas bersifat wajib dikalangan umat

Muslim, meminjam istilah Moh Iqbal, semangatnya tetap perluasan makna dan loyalitas sosial skala makro. Ia tidak berdiri sendiri secara nilai dan orientasi esensialitasnya. Bahkan, Alquran tegas menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat namun tidak mampu mencegah kemungkaran dan perbuatan buruknya dihadapan masyarakat, mereka bukan pelaku shalat sejati, (Qs. Al-Ankabut[29] :45). Mereka tidak lebih sebagai pribadi yang menyibukan diri dengan gerakan-gerakan olah fisik belaka.

Jelas bahwa ritualitas berbasis semangat batini dapat menjadi seni memompa kualitas nilai laku sosial-lahiri setiap penganut agama. Struktur gerakan dalam shalat pun merupakan simbol bagaimana kita mengaktualisasikan perilaku keagamaan dihadapan Tuhan sekaligus sesama manusia. Atau, masih dalam pandangan filosofis Moh. Iqbal, shalat merupakan suatu proses penemuan diri manusia yang unik, dimana ego yang mencari menyakinkan dirinya sendiri justru disaat penolakan diri, dan dengan demikian menemukan harga dan pengesahan dirinya sebagai faktor dinamik dalam kehidupan alam semesta. Lagi-lagi penekanannya adalah mengontekstualisasi dengan realitas sosial. **

5

Memaknai Bencana

"Hendaklah ada seolongan orang-orang diantara kamu yang mengajak pada kebaikan dan memerintah yang makruf dan melarang yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang bahagia (Qs.Al-Imran:104).

Apakah banjir, longsor, jatuhnya pesawat dan bentuk bencana lain dimuka bumi ini merupakan cobaan atau musibah dari Allah SWT? Terpulang bagaimana kita memaknainya dalam konteks kehambaan. Setiap hamba yang memaknai cobaan dan musibah dengan jernih dan lapang dada bebasis keimanan melalui substansi "inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un,"tentu akan menjadi hamba pilihan dimata Allah (Qs. Al-Baqarah[2] :155-157). Sedangkan hamba pilihan itu senantiasa menempatkan proses dan dinamika kehidupan sebagai bagian dari transformasi seni kasih sayang Allah SWT terhadap kita selaku hamba-Nya.

Sebagai hamba, tugas dan fungsi manusia sangat jelas, yakni mengabdi kepada-Nya "tiadalah manusia itu aku ciptakan selain hanya untuk menyembah kepadaku'(Qs. Al Dzariyat[51]:56). Inilah sifat dasar yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia secara

fitrati dari masa kandungan hingga hadir kemuka bumi. Dan dalam aspek fitratinya, manusia tidak akan pernah mempunyai kekuasaan, kekuatan, keistimewaan yang dapat melebihi kekuasaan dan kekuatan Allah SWT, termasuk membendung datangnya banjir yang banyak menggenangi banyak wilayah dinegeri ini. Atau menghalau longsor dan mencegah jatuhnya pesawat seperti beberapa hari yang lalu.

Layaknya hamba, manusia tidak bisa semena-mena mengangkangi norma-norma kehidupan yang telah digariskan oleh Allah yang telah menciptakan dirinya sebaik-baiknya ciptaan (Qs. Al-Tin:4). Manusia harus mentransformasikan pencerahan iman dan kepekaan sosial sepanjang eksistensialitasnya dimuka bumi. Jika melihat dahsyatnya banjir, ganasnya longsor dan hancurnya pesawat ditengah lautan sekalipun, manusia tidak boleh saling menyalahkan baik diantara sesama rakyat hatta terhadap pemimpin-pemimpin sosial yang mereka angkat sendiri melalui mekanisme demokrasi (duniawi). Sebab sikap saling menyalahkan yang berlebihan hanya akan merusak rajutan esensial dari dan untuk berkemanusiaan.

Mengelola Esensi

Eksistensi (ke)manusia(an) ditentukan seberapa baik ia mengelola esensinya diantara sesama sekaligus dihadapan Tuhan. Nama (badani) dari setiap manusia secara pribadi menegaskan akan sebutan "Khusus" dan bukan sebagai "identitas" yang sangat menentukan kualitas kemanusiaannya. Kalau ada manusia yang bernama "Abdullah" bukan berarti ia akan betul-betul menjadi hamba Allah yang paling taat. Itu hanya sebutan badani-duniawi agar mempunyai panggilan yang tidak sama dengan manusia lain. Dan sebuah nama, meminjam kaidah filosof eksistensialisme, memang tidak akan melahirkan makna yang bagus tanpa dibarengi dengan aktualisasi-kreatif dari sang diri (manusia) dengan baik.

Dalam Alquran manusia disebutkan dengan berbagai pujian yang cukup mulia dan celaan yang sedemikian tajam juga. Akan tetapi, hal ini tidak berarti kalau setiap manusia dipuji dan dicela oleh Allah dalam waktu yang sama terus menerus. Kepada setiap manusia Allah pun mengaruniai keistimewaan berupa akal agar mampu membedakan mana yang baik dan maslahat serta mana yang

buruk dan merugikan. Melalui potensi dan peran akal ini manusia bisa mengaktualisasikan akuntabilitas sosialnya dimata sesama dan dihadapan Allah SWT. Sebab manusia, kata alquran, adalah makhluk yang bertanggungjawab terhadap apa yang ia kerjakan (Qs. Ath-Thur:21).

Pada ayat lain juga diuraikan bahwa masing-masing manusia akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Tidak diperoleh oleh seseorang kecuali apa yang ia usahakan. "Tidak diperoleh oleh seseorang kecuali apa yang diusahaknnya, dan tidak pula dibebani oleh seseorang akan beban orang lain" (Qs. Al- An'am:164). Maka sangat jelas ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia telah dijadikan makhluk yang bertanggungjawab terhadap apa yang telah mereka lakukan sendiri. Dan untuk memahami tanggungjawabnya didunia dengan baik, manusia tidak cukup hanya menyadari sebagai makhluk-Nya. Setiap manusia harus mengakui sepenuh jiwa bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT yang terus merajut derajat kekhalifahannya dimuka bumi.

Tugas Kekhalifahan

Diantara tugas kekhalifahan adalah menyerukan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang menggelinding di muka bumi. "*Hendaklah ada seolongan orang-orang diantara kamu yang mengajak pada kebaikan dan memerintah yang makruf dan melarang yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang bahagia (Qs. Al-Imran:104).* Bagian dari amanah kekhalifahan adalah tidak membuat kerusakan dimuka bumi baik yang akan berpengaruh terhadap dirinya maupun yang langsung berakibat pada dimensi kehidupan sesamanya (Qs. Al-Baqarah:11, Qs. Ar-Rum:41, Qs. Qashash:71, Qs. Al-Maidah:64). Dan semua itu merupakan tindakan dari dan untuk menjadi hamba Allah dalam maknanya yang teramat luhur.

Ciri lain dari hamba Allah yang baik itu senantiasa berbagi kemudahan dan kebajikan dengan sesama. Rasullulah SAW menerangkan bahwa "barang siapa yang melonggarkan suatu urusan diantara kesukaran-kesukaran dunia terhadap sesama manusia (mukmin), maka Allah akan melonggarkan padanya salah satu kesukaran dihari kiamat" Sebaliknya, barang siapa yang menyulitkan

urusan sesama manusia dimuka bumi, kelak diakhirat Allah bakal menyusahkan urusannya disertai siksaan yang amat pedih. Sebab dalam islam diajarkan bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat (al-dun-yaa maz-ra-atun lil akhirati).

Ciri hamba Allah berikutnya yang mencerahkan yaitu yang memiliki kesadaran bahwa setiap diri itu hidup dalam keadaan yang tidak bermodal. Senyatanya ia hadir ke alam semesta ini tidak pernah sedikit pun membawa bekal dan modal selain daripada kebesaran kasih Allah yang tidak terhingga. Maka sebagai hamba Allah, kita tidak boleh melampaui batas ketika menjalani kehidupan. Kita tidak boleh lupa diri bila mendapatkan kesuksesan dan kejayaan sosial, sebab kata Sayyid Hussein Nasr, dosa utama menurut pandangan islam adalah lupa, terlebih lupa akan asal muasal kita sebagai hamba Allah. Sifat pelupa dan acuh tak acuh, membuat kita terlena dan mengabaikan arti eksistensial kekhalifahan kita dihadapanNya.

Paus Yohanes Paulus II ikut menguatkan makna ungkapan Nasr, bahwa kita menerima hidup ini Cuma-Cuma. Sebagai balasan kita harus mempersembahkannya secara Cuma-Cuma untuk saudara-saudari kita. Melalui kesadaran kehambaan semacam ini, pasti ada transformasi persaudaraan sejati yang akan menjamin bahwa manusia-manusia yang kaya, berada, sukses dan penuh kemewahan, tidak lagi egois dan menutup diri. Begitu juga manusia-manusia yang terkena banjir, longsor, naas bersama pesawat, atau mereka yang miskin, tidak akan merasa terhina karena cobaan atau musibah dan kemiskinan yang melilitnya. Kita sama-sama hamba, harus saling berbagi dan mencintai dari dan untuk Tuhan yang Maha Pemurah. **

6

Remaja (Malam) Kamisan

Kalau tradisi bercengkrama pada malam kamis(an) yang dijalani remaja Bangka Belitung akhir-akhir ini berasal dari kebiasaan yang didesain kaum penjajah (Belanda) berkait dengan pengupahan pekerja timah ratusan tahun silam, layak untuk dicermati ulang. Kita perlu memerah kembali semangat, spirit dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, terlebih dalam perspektif religiusitas. Sebab kita, khususnya masyarakat Melayu-Bangka Belitung, telah dikenal sebagai masyarakat yang kental dengan nilai-nilai sosial-religius. Sebuah keistimewaan yang patut diapresiasi dengan jernih.

Fakta sosial menyiratkan, bahwa (hampir) setiap kampung yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah sepi dari bangunan masjid dan keakraban sosial religius di kalangan masyarakatnya. Demikian pula bangunan klenteng (simbol keluhuran ajaran Buddha), bertengger di setiap sudut perkampungan. Bahkan perayaan hari-hari besar dalam tradisi Islam, seperti *Ruwahan* (menyambut bulan Ramadan), *Mauludan* (memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw), *Muharraman* (bulan Muharram), "*buka puasa*

enam" (puasa bulan Syawal selama enam hari pasca Idul Fitri), dan lain-lain telah menjadi bagian dari napas kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.

Namun demikian, fakta sosial dan kearifan lokal ini akan kurang nyaman terlihat kalau teracuni dengan interaksi sosial kaum remaja yang cenderung berkemodernan secara berlebihan. Bukan semata lantaran kaum remaja adalah potensi dan aset generasi bangsa dan negara yang sangat didambakan publik sedari dulu. Lebih dari itu, kaum remaja ini merupakan "amanah" Allah SWT yang harus dirawat dan diselamatkan dengan semaksimal mungkin, terutama di hadapan agama (Islam).

Masa Remaja

Masa yang indah, masa di kala remaja. Berbagai ruang potensialnya selalu diperhatikan dan mendapatkan simpati dari sesama manusia. Masa remaja, dalam istilah agama diindetikkan dengan masa yang menjadi penentu di kala tua. Sampai-sampai Nabi Muhammad Saw menyerukan agar pencerahan keilmuan dan perilaku luhur ditanamkan dan diolah semaksimal mungkin saat remaja. Dan Syaikh Mustofa al-Ghalayani ikut menegaskan bahwa masa remaja adalah masa keemasan setiap insan dalam mengarungi kehidupan.

Semangat di atas berbanding terbalik dengan realitas sosial kaum remaja belakangan ini. Remaja mulai lepas dari potensi aktual kediriannya. Di tengah tarikan modernitas kaum remaja sering kali mengabaikan *ghirah* dan mengebiri dimensi luhurnya sendiri. Mereka mudah terjebak dengan kecentilan peradaban modern yang penuh ambigu; terbuai dalam huru-hara fisik, terjerat Narkotika, gampang saling menghancurkan baik lantaran soal persepakbolaan atau pentas musik, geng-gengan, terjerumus dalam pergaulan kurang empatik, serta meluntunkan etika kemaslahatan yang menjadi proses masa depannya.

Sebelum tahun 1980-1990-an, remaja Indonesia di berbagai pelosok masih sulit untuk menikmati malam dan hari "bebas" kecuali di kota-kota besar yang tergolong maju saat itu. Salah satunya karena agama dimaknai dan diinternalisasi bersama nilai-nilai sakralitasnya oleh mayoritas publik dengan cukup kuat. Tempat-tempat yang

disebut "lokasi wisata" susah dijumpai. Lampu penerangan di berbagai rumah, perkantoran dan ruang publik jauh dari yang dikategorikan nyaman. Bahasa lugasnya, fasilitas penerangan dan perwisataan tahun 1980-1990-an tidak seterbuka sekarang. Ruang dan pergaulan sosial kaum remaja jua masih lekat dengan simbol dan nilai-nilai (yang) "ter-sakralkan."

Jangankan malam kamis (an), pada malam minggu(an) saja remaja era 1980-1990-an cukup hati-hati dalam interaksi sosialnya. Apalagi di daerah terpencil dimana masyarakatnya masih terbilang "fanatik" terhadap norma dan adat istiadat maupun doktrin keagamaan. Tokoh-tokoh agama dan leluhur mereka cukup kuat dan tulus berpengangan terhadap apa saja yang diserukan Allah SWT dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, terutama berkait dengan kehidupan para remaja yang lebih diarahkan ke masjid untuk ngaji dan ke madrasah demi mendalami agama.

Sementera belakangan ini, irisan sosial keremajaan semakin melabrak-labrak dan gampang sekali keluar dari konstruksi nilai luhur budaya, adat istiadat, dan doktrin agama mereka masing-masing. Sehingga bukan hanya mereka telah mengkhianati makna dan sifat fitrahnya sebagai generasi bangsa dan negara, melainkan telah abai terhadap kewajiban bersyukur dan menghamba di hadapan Allah SWT. Rencana "pesta bikini" pasca kelulusan sebagian remaja (SMA dan sederajat) dari tangga ilmiahnya (Ujian Nasional) yang baru-baru ini mendapat sorotan publik adalah contoh nyata dari "keabnormalan" sebagian remaja yang terbuai "kecentilan" modernitas ini.

Malam Kamis

Malam minggu(an) atau malam kamis(an) seperti diakrabi kaum remaja Bangka Belitung di era modern ini, sebetulnya bukan suatu masalah kalau dimaksimalkan untuk hal-hal yang maslahat dan baik dalam kacamata budaya, adat istiadat maupun agama. Malam minggu(an) bukan "malam panjang" seperti dalam lirik lagu (pop) tahun 1980-an. Malam minggu(an), meminjam semangat tradisi Islam, adalah malam awalan (dalam istilah Arab : *ahad*) yang berarti "permulaan" untuk "perhitungan" dalam tahapan hari-hari kehidupan

manusia secara Masehiyah. Malam minggu(an) merupakan malam pemompaan daya hidup setelah beberapa hari sebelum/sesudahnya yang dilalui setiap diri, tak terkecuali kaum remaja yang merasakan padatnya aktifitas di sekolah, di tempat kursus, di pelatihan, dan lain-lain.

Malam kamis(an) pun demikian. Ia bukan malam yang tidak punya makna. Ia tidak berdiri sia-sia. Ia tidak boleh diabaikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang kurang menyehatkan secara psikologis, "tradisionalis," maupun agamis. Dalam bahasa Rasulullah Saw., malam kamis adalah malam dimana cahaya keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT ditaburkan. Bahkan, ada sebuah hadis Rasulullah tentang malam kamis yang sering kali dijadikan rujukan oleh banyak kalangan dalam rangka "menyiapkan" generasi. Dengan lugas Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja yang kelahirannya berada dalam aroma malam kamis maka ia akan dijamin oleh Allah SWT sebagai penguasa yang adil dari seluruh penguasa dan ulama yang cerdas-kharismatik dari kaum ulama.

Oleh karena itu, filosofi dan spirit malam kamis tidak boleh ditarik-tarik ke arah yang kurang empatik. Yang mendesak adalah bagaimana remaja (malam) kamisan ini tidak dibiarkan menari di pentas sosial dengan tarian yang kian jauh dari kaidah budaya, adat istiadat dan agama. Artinya, sebelum menjadi "virus sosial" beracun yang menyakitkan bagi masa depan bangsa dan negara, maka pemerintah, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, seniman, dan seluruh elemen masyarakat, khususnya di Bangka Belitung segera merapatkan barisan mencarikan solusi alternatif tanpa mengabaikan potensi-potensi dan dinamika psikologis serta mentalitas religiusitas remaja itu sendiri.

Atau, bisa saja *strategic elite* (tokoh-tokoh diatas) menempatkan dan mengolah malam kamis(an) sebagai media penempaan skill dan imajinasi sosial kedirian kaum remaja. Misalnya, setiap malam kamis kita sediakan panggung humor-religius kontemporer khas remaja untuk meminimalisir "ketegangan sosial" di kalangan mereka (tidak untuk menciptakan Abu Nuwas kontemporer). Sebab kata kaidah usul fikih, *al-muhafadzatu ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlahi*, kita perlu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil dari tradisi baru yang lebih baik. ***

7

Islam (Bagi) Remaja

Setiap diri yang beragama, tak terkecuali mereka yang muslim, tentu pernah muda dan mengalami masa-masa (ke)remaja(an). Ini masa-masa yang indah dan menyenangkan. Masa yang bukan saja penuh dengan kepolosan, melainkan juga masa dimana potensi emosional, intelektual, dan spiritualnya sedang bertumbuh menuju kematangan sesuai kadarnya masing-masing yang mengasyikkan. Dalam istilah yang lain, masa inilah yang mulai mengaliri "kepribadian" remaja sebagai generasi bermasyarakat, berumat, berbangsa, dan bernegara dengan bibit-bibit rasionalitasnya yang ranum.

Atau, dalam kacamata psikologis, inilah masa dimana sebagai bagian dari makhluk bernama manusia, mereka yang tergolong remaja baru mengalami "pubertas" pertama yang sangat menggiurkan. Dan karena "pubertas" pertama itu, maka setiap diri remaja maupun yang memiliki ikatan dekat dengan mereka pantas untuk betul-betul hati-hati dalam melihat, mencermati, dan memaknai segala tindak-tanduknya. Jika tidak, akibatnya akan sangat fatal; dapat menghancurkan sekaligus menguburkan mimpi ideal hidup remaja sebelum merekah.

Tak berlebihan jika hampir sebagian manusia di muka bumi selalu mengemas dan mengenang masa remajanya. Dari masa remaja kebanyakan manusia memulai untuk lebih bersungguh dalam menata eksistensi dirinya. Dan sejak masa remaja, biasanya mayoritas individu dapat diprediksi akan warna sekaligus orientasi sosio-kehidupannya. Bahkan mulai dari masa remaja tidak sedikit orang sudah menghitung-hitung capaian ideal sebagai makhlukNya di alam semesta ini. Masa remaja (memang) terkadang tampak indah meskipun penuh dengan tanjakan-tanjakan terjal.

Rute Penentu

Masa remaja merupakan rute penentu bagi perjalanan eksistensial setiap diri manusia dari golongan dan kelas manapun, baik sebagai entitas individual maupun entitas komunal. Ketika masa remaja diolah sedemikian baik, produktif, inovatif, dan penuh orientasi sosial kehidupan yang cemerlang, maka ia akan menjadi modal mengagumkan sepanjang hidup manusia. Dalam pengertian yang gamblang, kaum remaja akan hidup dengan rangkaian masa depan yang menjanjikan, terutama secara sosio-religius dan sosio-kebangsaannya.

Sementara kalau salah dalam mengolah dan mengembangkan masa ideal remaja, seperti diwarnai dengan hedonisme atau gaya hidup yang "dibuai" oleh kesenangan artifisial, materialistis, krisis-nilai, dan tidak produktif (lebih cenderung hura-hura dan foya-foya), tentu akan menjadi awal yang memilukan. Dalam tradisi Islam, mungkin gaya semacam ini mirip dengan model *jahiliyyah*. Inilah model sosio-hidup yang tampak "maju" tapi menyimpan banyak "racun" di dalamnya, terlebih berbasis modernitas dan globalisasi yang belum disterilisasi. Realitas inilah yang kian memorak-porandakan tatanan sosial kehidupan kaum remaja di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Padahal disadari atau tidak, masa remaja merupakan lintasan potensial bagi setiap diri untuk masuk pada tangga yang sering disebut "pemuda." Adapun pemuda, meniru istilah Syaikh Mustofa al Ghalayani, adalah kader harapan bagi keberadaan sebuah bangsa dan agama. Pemuda yang baik, kreatif, inovatif, biasanya sering ditempa dari remaja yang imajinatif dan progresif. Tanpa karakteristik semacam ini, remaja maupun pemuda tidak akan banyak mewarnai tarian-tarian sosial

kehidupan umat dalam skala makro. Dan manakala remaja maupun kaum muda lepas dari karakter kreatif, inovatif, imajinatif, dan progresif, seringkali mereka akan melahirkan sesuatu yang kontradiksi dengan budaya sosial masyarakat kebanyakan.

Konsekuensinya, mereka mudah dilabeli sebagai "benalu" yang membahayakan pohon-pohon keharmonisan umat dan bangsa. Terlebih bagi remaja yang memang sedari awal lahir dan tumbuh di lingkungan tradisi berbasis agama (Islam). Ini sungguh akan menjadi "buah bibir" yang kadang membengkakkan telinga kita.

Meskipun, mendorong dan mengawal pertumbuhan emosi, intelektual dan spiritual remaja benar-benar tidak gampang. Sebab keberadaan mereka ibarat ranting pohon yang masih belia, kalau ditekan sekaligus pasti retak atau patah. Namun jika dibiarkan melenggak terlalu "bebas," sering kali mengganggu tatanan keindahan sosial berbangsa dan bernegara.

Islam dan Remaja

Islam adalah agama rahmat. Agama yang senantiasa berada dan mengada demi memancarkan kebajikan bagi sesama sekaligus menjaga keseimbangan semesta. Ajaran-ajaran Islam tak pernah mengenal perbedaan "kasta" baik dari aspek umur, bentuk tubuh, dan status sosial setiap manusia. Sebagai agama rahmat, Islam juga menekankan bahwa masing-masing manusia itu sama di hadapan Allah. Dan kalau pun ada perbedaan, jelas lebih mengarah pada hal-hal substansial, menyangkut kualitas ketakwaan di hadapan Allah.

Bagian dari wujudnya sebagai rahmat, Islam juga menempatkan martabat remaja dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad Saw. sejak ribuan tahun silam telah menegaskan bahwa barang siapa yang tidak menyayangi yang muda (anak-anak, remaja, dan pemuda) dan tidak juga menghormati yang tua, maka mereka dianggap bukan barisan dari golongan beliau. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Saw. menguraikan pula agar kita senantiasa menjaga lima hal dari pada lima perkara, yakni masa muda sebelum masa tua, masa hidup sebelum mati, masa kaya sebelum miskin, masa sehat sebelum jatuh sakit, dan masa senggang sebelum era sibuk.

Cukup jelas kalau masa remaja dalam Islam merupakan amanah.

Karena amanah, tentu harus dijaga sedemikian baik dan terarah. Kelalaian sejenak saja, kadang memang akan berakibat fatal. Inilah yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad Saw, para ulama, dan pemikir-pemikir besar di kalangan Islam. Sedangkan menyangkut aspek belajar saja, masa muda dianggap yang paling prospektif. Pepatah menyatakan "Belajar di waktu kecil (remaja) bagai mengukir di atas batu. Sedang belajar di waktu besar (tua) bagai mengukir di atas air." Artinya, belajar di masa remaja akan membuahkan makna dan kualitas yang luhur dan menakjubkan di kemudian hari. Dan belajar di kala besar (tua), sulit sekali melahirkan hal-hal progresif-produktif.

Namun demikian, Islam sebagai agama juga perlu diperkenalkan dengan baik kepada para remaja. Dan mengenalkan Islam kepada mereka tidak harus rumit, sangat doktrinir, keras, atau juga terlalu "tendensius." Sebab disamping sebagai pijakan keyakinan (religius), Islam sendiri merupakan pemompa potensi bagi bangunan intelektualitas maupun moralitas remaja. Maka sewajarnya kalau Islam mesti memasuki situasi psikologis remaja terlebih dahulu dengan jernih sebelum memasukkan "taring-taring" ideologisnya. Karena sebagai umatNya, tentu Allah Mahatahu kadar emosi, cita-cita, pikiran dan sikap sosial setiap remaja.

Meminjam istilah Murtadha Muthahhari, kita boleh memiliki fisik remaja itu tapi tidak bisa memiliki jiwa mereka. Masa mereka adalah masa mereka, bukan masa kita. Kepribadian remaja adalah hak mereka. Tugas kita terhadap dinamika sosial mereka adalah memberikan sentuhan dan pendampingan semaksimal yang kita punya. Selebihnya, biarkan Allah yang memaknai dan meneruskan dengan segala KuasaNya. Sebab Allah yang paling berhak atas takdir mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mengawal dan mendampingi remaja modern bukan dengan pencekokan radikalitas, melainkan harus dengan kaidah-kaidah dan pendekatan yang lebih elegan, humanis, sekaligus menyehatkan psikologi mereka. Islam (bagi) remaja, seharusnya memang Islam ceria. Islam yang bertumbuh dengan kapasitas mereka yang masih ranum, penuh kejujuran, bukan sarat dengan penggiringan yang teramat "doktrinir" berbasis pemaksaan dan kekerasan. Biarkan Islam matang di tangan remaja dengan semangat dan nilai-nilai keceriaannya, sehingga surga benar-benar nyata dan menggembirakan, bukan semata untuk mereka, melainkan juga bagi kita sebagai bangsa. ***

8

Persaudaraan Keserumpunan

Pada dasarnya setiap agama diturunkan oleh Tuhan adalah untuk ikut megantarkan manusia lebih mendalami hakikat eksistensi dirinya dimuka bumi dan dihadapanNya. Sebab manusia, seperti kata Mandeville, sering kali cenderung mengejar kepentingan dirinya sendiri. Sehingga manusia kerap terlampau egois baik saat berinteraksi dengan sesamanya maupun dalam berhubungan dengan Tuhan.

Meskipun jenis dan tradisi agama sangat beraneka ragam itu tidak lain sebagai manifestasi dari kekuasaan Tuhan dihadapan Makhluknya. Maka perbedaan nama dan tradisi agama bukan lantas menjadi acuan legitimasi untuk melakukan disharmoni kemanusiaan. Perbedaan ini sejatinya merupakan potensi sekaligus menajdi modal bagi setiap umat untuk saling memompa kematangan spiritualitasnya menuju Tuhan itu sendiri.

Sayyid Hussien Nasr, pernah menegaskan bahwa pada ruang yang sangat substansial semua agama itu sama. Yakni, sebagai media sosial dan spiritual bagi setiap insan untuk mengarungi lautan

kehidupan dan keagungan Tuhan. Bahkan dalam pandangan Jalaluddin Rumi, tulang belulang agama-agama memang berbeda, namun dagingnya tetap sama; mencerahkan dan menuntun setiap hamba merengkuh kelezatan cinta ilahi.

Agama Tauhid

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Ia bukan agama yang terus mendengungkan hegemonisasi dan diskriminasi, terutama dalam konteks sosio-kemanusiaan. Sebagai agama rahmat, islam senantiasa mengedepankan kesantunan, keramahan, dan kejernihan dalam pikiran serta tata laku keagamaannya.

Sebagai agama rahmat, tentu saja islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanitas. Dalam konteks ini, islam tidak henti-hentinya menyadarkan kepada seluruh umat manusia, bahwa perbedaan fisik dan status sosial, sama sekali bukan jaminan atas kedalaman keagamaan setiap makhluk. Hal itu tidak lebih sekedar hiasan luar dari bentuk material manusia.

Alquran sendiri telah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, bergolongan-golongan sejatinya untuk saling mengenali dan membesarkan, bukan justru untuk berfriksi dan mendiskriminasikan. Bahkan dihadapan Allah eksistensi manusia yang paling diakui hanya menyangkut kualitas ketaqwaan mereka bukan status "duniawiyahnya" (Qs. Al-Hujurat:13).

Disamping agama rahmat, Islam merupakan Agama Tauhid (baca:berbasis pada kualitas nilai-nilai ilahiah). Oleh karena itu, yang diidealkan islam adalah kualitas moral dan spiritualitas dari setiap hamba. Nabi Muhammad SAW pernah menyerukan bahwa Allah tidak akan pernah melihat rupa dan harta manusia, melainkan hanya akan melihat pada amal kebajikan dan kebeningan hati mereka.

Sebagai Agama Tauhid, islam harus dikembalikan kepada akarnya, yakni agama yang benar-benar mengada untuk keselamatan semua manusia, dan bukan sebatas demi keuntungan beberapa kelompok (kepentingan). Artinya, islam tidak bisa di "gesek-gesek" menjadi agama yang mudah menghegemoni dan mengekspolitasi sosio-kultur masyarakat meskipun berbeda jalan dalam menuju

Tuhan.

Adapun ciri Agama Tauhid, setidaknya meniru istilah Fazlur Rahman, Pertama, islam tidak pernah memiliki watak merebut dan menguasai politik kekuasaan. Kedua, islam senantiasa memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan mendasar umat dengan tanpa menafikan nilai-nilai budaya kolektifnya. Ketiga, dalam transformasi gerakan keagamaan, islam selalu mengutamakan kualitas moral dan spiritual setiap umat itu sendiri.

Sebagai agama Tauhid, seyogyanya islam ditransformasikan menjadi agama yang senantiasa merekatkan silaturrahim kemanusiaan tanpa tendensi etnisitas atau sejenisnya. Atau, seperti kata Gusdur, "kalau islam dinegeri ini mau benar, lihatlah ia sebagai pemberi warna, tidak lebih dari itu. Jika islam difungsikan sebagai satu-satunya kebenaran, sedangkan yang lain harus mengalah, maka ia menjadi eksklusif".

Eksklusifitas keagamaan, tentu saja merupakan cara hidup yang kurang menyejukan bagi kelangsungan keumatan. Sebab disamping akan menjauhkan dari amanah luhurnya, eksklusifitas sebenarnya akan memangkas nilai-nilai kemanusiaan dalam skala yang sangat luas.

Asghar Ali Engineer, juga sempat menguraikan bahwa "hukum, cara hidup bisa berbeda, namun din, esensi ilahiah, kebenaran ilahiah, adalah sama. Ia terefleksikan dalam semua agama, dalam semua tradisi spiritual dan manusia tidak mempunyai hak untuk menolak pihak lain sebagai tidak legitimit, atau palsu. Jadi, ego kemanusiaan kita lah yang menolak keberagamaan pihak lain dan bukan kepalsuan tradisi iman orang lain".

Persaudaraan Sejati

Sepanjang sejarahnya, islam juga tidak henti-hentinya menyerukan dan mengajarkan pentingnya persaudaraan dalam keagamaan dan kemanusiaan. Salah satu rukun islam, yakni ibadah haji, tentu menjadi panduan sangat riil atas semangat persaudaraan berbasis keagamaan ini.

Begitu kuatnya komitmen islam terhadap jalinan persaudaraan antar manusia, sehingga Nabi Muhammad Saw dengan tegas menyatakan bahwa manusia yang terbaik diantara hambanya adalah

mereka yang mampu memberikan maslahat kepada sesamanya.

Membina persaudaraan kemanusiaan, sejatinya tidak boleh hanya dilandasi oleh latar golongan, suku, dan ras tertentu. Sebab persaudaraan kemanusiaan merupakan amanah Tuhan yang tidak bisa diabaikan. Artinya, barang siapa yang merusak tatanan persaudaraan, baik dalam internal maupun eksternal keagamaan, sebetulnya mereka sudah mengingkari fitrahnya sebagai hamba Tuhan.

Moh. Iqbal, sang filosof besar islam dari pakistan itu telah lama menegaskan bahwa persaudaraan keagamaan dan kemanusiaan adalah sebuah fakta yang harus dimengerti melalui kombinasi penalaran dan iman. Sebab dengan nalar dan iman yang matang, niali-nilai persaudaraan akan tertransformasi dengan lezat dan menyehatkan.

Bagi kaum sosialis, lanjut Iqbal, persaudaraan muncul dari perluasan solidaritas alami berbasis sikap pekerja secara kolektif. Sementara bagi Muslim, persaudaraan merupakan pertumbuhan alami dari komunitas iman. Maka keluhuran sikap keberagamaan tidak hanya berkait dengan Tuhan semata, melainkan langsung bersentuhan dengan interaksi kemanusiaan secara makro. Dalam rangka mengawal dan membumikan persaudaraan berbasis keimanan ini, Seminar Agama dan Kemanusiaan yang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda (GP) ANSOR Bangka Belitung dengan Keuskupan Pangkal Pinang, selayaknya dijadikan spirit religiusitas yang harus dimaksimalkan. ***

9

Gerakan NU

KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PB NU pernah mengatakan bahwa "Kondisi NU saat ini menggembirakan sekaligus menggelisahkan. Menggembirakan karena NU sebagai ajaran bisa diterima dan terus meningkat. Namun, sebagai orang-perorangan, NU itu ruwetnya bukan main" (*Kompas*, 1/6/09).

NU memang bukan komunitas kecil. NU adalah komunitas para ulama dan umat yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam konteks teologi, tasawuf dan fikih, yang sedari dulu telah eksis di negeri ini. Bahkan dalam pergulatan sejarahnya, NU pernah menjadi sebuah partai politik yang cukup disegani.

Sebagai komunitas para ulama dan umat, tentu saja NU mesti mengembangkan diri dengan berbagai latar maupun karakter individu yang mengada di dalamnya. NU mesti lihai mengeja dinamika internal (*internal dynamics)* dan ketegangan kreatif (*creative tension)* yang terus menerus mengiringi eksistensinya.

Jati Diri

Untuk itu, NU memerlukan jati diri yang lebih otentik. Jati diri adalah kunci dari terbentuknya kualitas segala dasar gerakan sosial setiap komunitas. Sebab dengan jati diri, sebuah komunitas gerakan dapat membedakan kapan ia mengerahkan kekuatannya untuk kepentingan internal dan dimana ia bisa memosisikan potensi sosio-budayanya demi kemitraan (eksternal) strategis dengan komunitas lain.

Jati diri yang kuat dan berkarakter, akan mengantarkan setiap komunitas gerakan dengan mudah membawa dirinya menghadapi momentum dan dinamika sosial apa pun. Ia tidak akan gampang "mengeleminasi" diri manakala bersentuhan dengan eksistensi komunitas lain, baik sesama Islam maupun di luar Islam.

Melalui jati diri yang bersahaja, NU akan bernas dalam membedakan mana yang disebut *harakatul ula* (gerakan utama) dan mana yang hanya berkait dengan ketakutan sosial yang berlebihan. Sebab fitrah NU dilahirkan adalah untuk ikut menjernihkan dinamika kebangsaan ini, dan bukan menjadi komunitas yang tidak kreatif secara sosial.

Fenomena direbutnya masjid-masjid NU oleh komunitas Wahabi-an, Ikhwanul Muslim (IM), dan Hizbut Tahrir (HT), misalnya, seperti yang diungkap KH. Mu'adz Thahir, Ketua PC NU Pati, Jawa Tengah (lihat buku *Ilusi Negara Islam*, yang diterbitkan *The Wahid Institute*, *Maarif*, dan *Gerakan Bhineka Tunggal Ika*, Jakarta, 2009) selayaknya dijadikan bagian dari *muhasabah jam'iyyah*, terutama di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini.

Kalau hal itu tidak segera disikapi secara *mujmal* (menyeluruh), maka cepat atau lambat NU hanya akan tinggal nama dan jasadnya dilindas oleh gerakan-gerakan "paradoks" jamaah Wahabi-an yang terus menggeliat. *Al haqqu bilaa nidham qad yaghlabu al bathil bi al nidham,* bahwa kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan tergilas oleh kebatilan yang terus ditata melalui sistem yang progresif.

Maka yang harus dilakukan NU, termasuk NU di Kepulauan Bangka Belitung ini, adalah reorientasi-konstruktif dari paguyuban ulama menuju komunitas gerakan ulama yang senantiasa berpegang teguh pada *Khitthah Nahdliyyah*-nya. Bahkan NU wajib melakukan

terobosan dari tradisi *khalaqah* (sekadar majelis taklim, *lailatul ijtima'* dan sejenisnya) menuju tradisi *harakah* (mengorganisir pergerakan) dalam makna yang sesungguhnya.

Pembasisan ideologi ke-NU-an pun bukan saja penting, melainkan harus menjadi *fardu ain* atau *sunnah muakkad*. Terlambat dan lalai sedikit lagi, kerusakan pada bagian-bagian yang sangat vital di tubuh NU sangat sulit dihindari. Padahal NU memiliki kaidah : mencegah lebih baik dari pada mengobati *(dar ul mafaasid muqaddamun ala jalbil mashaalih)*.

Hal lain yang mendesak dilakukan NU Bangka Belitung khususnya, adalah penataan ideologinya di kalangan pesantren-pesantren. Sebab pesantren dengan berbagai latar maupun tipologinya merupakan potensi dan *asset* terbesar NU dalam penguatan gerakan sosial kebangsaan. Tanpa pesantren, NU rapuh. Tanpa pesantren, NU tidak lebih dari sekadar "pelengkap" dalam entitas kebangsaan.

Independen

Sebagai komunitas yang memiliki jati diri, NU dipastikan mampu independen dalam segala hal. Sebab independensi adalah faktor terbaik mewujudkan otonomisasi sebuah *harakah* (gerakan). Dan ketika gerakan sudah otonom, ia dapat melaju dengan terobosan-terobosan yang meyakinkan. Ia akan mudah mentransformasi kemaslahatan keorganisasiannya di setiap keadaan. Otonomi gerakan sebuah komunitas berkait juga dengan kapasitas individu di dalamnya. Persis seperti disinggung Robert D. Lee (2000), bahwa suatu kelompok dapat bertindak hanya jika individu-individu bergerak, dan individu-individu akan berhasil hanya jika dalam tindakannya itu dia mengerahkan seluruh kekuatan dan keberaniannya.

Independensi merupakan kekuatan yang sangat vital untuk menyadarkan dan mencerahkan NU, baik secara kelembagaan maupun perorangannya. Nilai-nilai ideal independensi itu akan mengangkat dan mengantarkan NU menuju martabat aslinya sebagai petarung yang jantan dan santun, bukan komunitas latah yang kurang vitamin.

Akhirnya, gerakan-gerakan NU akan menjadi teladan keumatan manakala NU lebih dulu mengislahkan diri dengan fakta-

fakta sosial dan tegangan kreatifitas setiap individunya, termasuk dalam menyikapi interaksi dengan tradisi dan komunitas keagamaan yang lain di negeri ini.***

10

Biji Iman

Beberapa gereja (Katolik) yang ada di wilayah Kota Bandung, khususnya, sering kali menyanyikan lagu berjudul "Biji" yang diciptakan oleh Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto. Lagu ini berkisah tentang falsafah sebuah biji. Lagu padat dan berisi secara rohani. Menginti. Dan, sekadar tafsiran bebasnya bahwa "Biji itu kalau tidak mati, ia tetap akan tinggal sebagai biji. Tidak bisa memberikan makna dan manfaat bagi diri maupun sesuatu di luar dirinya. Akan tetapi, kalau biji itu tulus (me)mati(kan) diri dengan baik dan terarah, maka ia akan mampu melahirkan buah yang berlimpah ruah."

Dari sisi naturalistik, sebagian besar sesuatu itu mempunyai biji, tak terkecuali (ke)iman(an) kita selaku umat Tuhan. Sedangkan biji iman adalah kehalusan, kelembutan, dan kejernihan sikap religius di hadapan sesama umat beragama. Biji iman juga merupakan aktualisasi kebesaran jiwa keagamaan dalam memaknai dan menjalin interaksi sosial dengan setiap makhluk. Dan seandainya biji iman ini dimaknai sebagai "hati" dari bangunan rohani masing-masing umat, tentulah silaturrahim sosial berbasis religiusitas antar umat tidak akan diwarnai hal-hal

yang negatif-destruktif. Sebab iman adalah cahaya (*al-nur*) yang mesti ditransformasikan ke seluruh relung semesta.

Nabi Muhammad Saw tidak menempatkan iman Islamnya sebagai hal yang harus memagari interaksi sosial-humanioranya dengan kaum Yahudi sekalipun. Umat Islam maupun Yahudi, sama-sama manusia, memiliki badan dan jiwa, mempunyai semangat kasih sayang dan keinginan besar untuk dapat menjalani hidup dengan damai penuh kebajikan. Ketika seorang Yahudi meninggal dunia, lalu mayatnya dipandu oleh saudara-saudara sesama Yahudi dan melintas di hadapan Nabi yang tengah bersama para sahabat, seketika Nabi berdiri menghormatinya. Sebagian sahabat berkata "Ya, Rasul. Kenapa Anda berdiri. Bukankah yang tadi lewat itu adalah mayat umat Yahudi?" "Betul," jawab Sang Nabi. "Apa yang salah. Bukankah ia juga manusia sama seperti kita," lanjut Sang Nabi.

Iman itu Luas

Apa yang telah ditransformasikan Sang Nabi betul-betul merupakan wujud keluhuran pikiran dan kejernihan jiwa dalam memaknai dan menumbuhkan biji iman dalam konteks keberagamaan. Sebab iman itu luas. Iman tidak kaku. Iman bukan membuat kesadaran kita parsialistik, melainkan harus universalistik. Kalau iman dianggap terbatas, berarti Allah sendiri Maha Terbatas. Dan ketika Allah Maha Terbatas, agak sulit logika menerima bahwa Allah layak menjadi penguasa jagad raya ini dengan firman-firman yang telah Dia buat sendiri. Padahal dalam perspektif umat beragama dari era terdahulu hingga sekarang, Allah sedemikian disakralkan. Dia diyakini sebagai Dzat yang menciptakan alam ini dengan segala potensi dan nilai-nilainya.

Menurut suatu kisah, ada seorang nabi (Islam) yang juga ditegur oleh Allah lantaran menolak undangan (makan) saudara beragama Yahudi. Nabi ini diundang berkali-kali tapi terus menolak. Ketika diundang kembali bahkan mengajukan suatu syarat, bahwa ia akan datang dan menikmati jamuan makan itu kalau saudara dari Yahudi ini setelahnya langsung masuk Islam. Dengan tegas Allah menegurnya "Wahai KekasihKu, sebegitukah engkau menjalankan ajaran-ajaran agama yang menurut engkau baik. Aku saja yang setiap saat memberikan rejeki kepada mereka, Aku tidak pernah menutut dan menghukum

mereka seperti itu."

Sang Nabi Islam pun terdiam dan terhenyak dari kesadaran parsialnya menuju kesadaran yang universal. Kalau Allah sebagai Dzat yang Maha Menguasai semesta dan seisinya ini mengajarkan tentang kebajikan dan ketulusan universal, bagaimana mungkin hanya sebagai hamba harus memaksakan kehendak yang terkadang sebatas versi kesadaran kita yang kurang etik. Hal ini bukan saja akan menghambat pertumbuhan mentalitas rohani kita sebagai umat, melainkan pasti menjadi batu sandungan terhadap penyuburan sikap-sikap imani kita di hadapan sesama makhluk Allah yang lain.

Jelas sudah bahwa iman itu luas. Iman tidak bisa dibatasi oleh kehendak kita yang jauh dari jalur nilai-nilai ilahiah. Iman akan terang dan nyata kalau diaktualisasikan bukan hanya dalam ruang lingkup eksistensi kita, melainkan juga ditransformasikan sebagai pelita bagi eksistensi semua makhluk semesta. Sebab, kata Sang Pelukis Kawakan, Jeihan Sukmantoro, sebagai pemilik iman, di hadapan Tuhan kita hanya bertugas "mengamini" bukan mengebiri. Tuhan sudah Mahatahu apa yang menjadi potensi dan kekuatan kita sebagai hambaNya. Dan sekuat-kuatnya kita secara sosial maupun spiritual tetap saja tidak bisa mengungguli kekuatan dan keistimewaan Tuhan.

Intelektual Islam terkemuka, Ismail Raji Al Faruqi, misalnya, mengurai bahwa iman adalah sesuatu yang terjadi dalam diri manusia, ketika kebenaran, faktualitas dari suatu obyek terbuka bagi mata hatinya dan meyakinkan tanpa keraguan lagi akan kebenarannya. Itulah iman, menginti sekaligus realistik. Sebab iman berada pada sisi terdalam setiap diri yang menjadi hamba. Iman bukan semata lapisan luar penuh coretan kusam, melainkan kualitas etik yang benar-benar menakjubkan dan mencerahkan. Iman bukan rajutan hasrat parsial, akan tetapi fakta dari kebenaran yang sangat esensial. Dan luasnya iman adalah keseimbangan harmoni (ke)semesta(an).

Perbedaan Iman

Lebih lanjut Al Faruqi mengatakan bahwa perbedaan iman Islam dan iman Kristen itu hanya terletak pada penempatan. Kalau iman Islam, tegas Al Faruqi, ia merupakan kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah mempercayai apa saja.

Makanya iman itu mempunyai dampak estetis sekaligus logis. Bahkan, kata Al Faruqi, kebenaran-kebenaran dari iman itu selalu bersifat kritis dan rasional. Dan perspektif ini layak untuk terus diapresiasi. Sehingga nalar imani benar-benar bertumbuh dengan jernih dan menyehatkan, bukan malah memancing gesekan antar iman yang tidak produktif secara kemanusiaan.

Kalau kebenaran iman bersifat kritis dan rasional, sejatinya iman juga dapat dirujuk menjadi sebuah pengetahuan. Maka, masih kata Al Faruqi, iman bukanlah semata-mata kategori etik. Sesungguhnya, pertama-tama, iman itu adalah suatu kategori kognitif. Ia berhubungan dengan pengetahuan manusia, dengan kebenaran proposisi-proposisinya. Dan karena itu, iman juga berdimensi untuk menjadi cahaya yang mampu menyinari segala sesuatu. Hal ini dapat dijadikan bukti rasional bahwa iman itu memang luas dan nilai-nilai yang dikandungnya benar-benar harus menerangi segala hal, termasuk cara hidup dan pergaulan keagamaan kita di alam semesta.

Beranjak dari kategori kognitif ini, tak berlebihan bilamana Al Gazali ikut memberikan warna diskursus tentang keberadaan iman. Al Gazali menegaskan bahwa iman sejatinya merupakan visi ilahiah yang selalu menempatkan semua fakta dan data dalam perspektif yang sesuai dengan, dan perlu bagi, pemahaman yang benar atas mereka. Karenanya, lanjut Al Gazali, iman adalah dasar bagi suatu penafsiran yang rasional atas alam semesta. Bahkan bagi Al Gazali, iman merupakan prinsip rasionalitas yang pertama dalam konteks menemukan kebenaran Tuhan dan kemanusiaan sekaligus.

Sekiranya iman kita hendak menemukan kebenaran Tuhan, tentu banyak cara yang bisa dilalui, mulai dari konstruksi pikiran secara kritis hingga pengolahan kesadaran rohaniah ke arah yang lebih integral-praktis. Maka dalam rangka meraih pencerahan iman, salah satunya dapat mengunyah biji yang dikandung dan membumbuhinya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga biji iman itu lebur, lalu menampilkan buah-buah kebajikan berkualitas ilahi. Sebab kata Sang Buddha "harumnya bunga tak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin, harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru." ***

11

Pelayan Tuhan

Kaum sufi sering kali mengajarkan bahwa keberadaan setiap hamba seperti kita ini sejatinya adalah untuk melayani Tuhan. Bahwa Tuhan Mahakuasa dan tak kekurangan apapun, sungguh telah dimafhumi sekali. Akan tetapi, sebagai Raja Semesta, Tuhan wajib dibanggakan dan ditempatkan sebagaimana layaknya Sang Raja. Dia harus dilayani oleh kita selaku makhluk, hamba dan khalifahNya di muka bumi. Semangat pelayanan ini kalau dikaitkan dengan istilah Alquran tidak jauh beda dengan apa yang disebut penyembahan dan pemasrahan diri sepenuhnya pada Tuhan (QS. Al-Dzariyat [51]: 11).

Melayani Tuhan memang tampak mudah dan bisa dikerjakan oleh siapa saja. Namun demikian, pada aspek yang paling mendalam sesungguhnya tidak gampang untuk mewujudkan tugas-tugas pelayanan, terlebih ketika hendak dikaitkan dengan keberadaan Tuhan. Sebab tak sedikit diantara kita yang merupakan hamba (*'abdun*) ini selalu memandang rendah status sebagai pelayan atau melayani. Apalagi kalau dikaitkan dengan realitas sosial sehari-hari, rasanya mayoritas dari kita lebih enjoi dan seakan terhormat kalau

dilayani, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, lembaga pendidikan dan lain-lain.

Bisa saja paradigma kita tentang pelayanan atau melayani itu sangat beragam mulai dari pengertian hingga cara mengaktualisasikannya. Ini tentu hal yang sangat naturalis (manusiawi). Tidak terlalu keliru. Akan tetapi, jikalau dicermati dari aspek (peng) hamba(an), akan tampak elegan dan mencerahkan sekiranya kita menuju orientasi terluhurnya. Yakni, komitmen mendedikasikan semua kreasi dan karya untuk Tuhan semaksimal mungkin di seluruh ruang kehidupan bermanusia, berbangsa, dan bernegara. Hanya dari dan untuk loyalitas pelayanan kepada Tuhan ini kualitas kehidupan dan kedirian kita sebagai penganut agama mendapatkan jalur evaluatif tersendiri.

Peleburan Diri

Dalam persepsi sebagian filosof (ketuhanan), bahwa hanya sesuatu yang mengandung unsur ilahi yang dapat menembus jalur-jalur dan keberadaan ilahi. Benda atau sesuatu yang sama sekali tidak bersentuhan dengan unsur dan nilai-nilai ilahiah, akan sangat sulit masuk dan lebur ke dalam "Diri Ilahi" atau yang akrab disebut Tuhan. Dan faktanya, tidak ada sesuatu apa pun di muka bumi yang tidak mengandung unsur maupun nilai-nilai ilahiah. Sebab semuanya merupakan makhluk (ciptaan) Allah dan bukan Sang Khalik (Pencipta). Bahkan bumi dan langit serta isinya sekalipun masih tetap dibawah kendali kekuatan dan nilai-nilai ilahiah.

Untuk dapat menjadi pelayan Tuhan berkualitas baik dalam realitas kehidupan, kita harus melakukan peleburan diri semaksimal mungkin kepadaNya. Tidak bisa setengah-setengah. Kebesaran dan Kasih Tuhan juga tidak pernah setengah-setengah bagi setiap manusia, baik yang sebatas dikategorikan hamba maupun khalifahNya. Tuhan selalu total mendampingi dan memberikan anugerahNya kepada kita. Tuhan tidak memandang agama, ras, suku, dan kepentingan kelompok dalam menaburkan kasih sayangNya. Dia benar-benar melampaui pikiran dan perbuatan manusia yang serba fana.

Tuhan senantiasa lebih mendahulukan keluasan kasihNya dari pada keangkeran kemarahanNya dalam mewarnai kehidupan

manusia. Tuhan tidak pernah diskriminatif ketika menaburkan rahmatNya kepada seluruh makhluk. Dia sangat terbuka sekaligus Maha Pemurah untuk memapah kehidupan setiap manusia. Dia sama sekali tersucikan dari perbuatan tercela. Dia benar-benar utuh menjaga dan mengawal kehidupan para makhlukNya. Yang sering bermaksiat masih diperhatikan, yang rajin menyembah dan melayaniNya juga semakin disayang penuh, yang malas-malasan mengigat Dia pun tidak pernah dikucilkan. Semua dianugerahi rejeki dan napas kehidupan.

Lagi-lagi kuncinya adalah peleburan diri seutuhnya dari, untuk, dan dengan Tuhan. Hal inilah yang di dalam ajaran Islam (sufistik) dikategorikan sebagai ke-fana-an. Artinya, setiap hamba sebetulnya adalah perwujudan dari citra Tuhan. Sifat-sifat yang melekat pada diri pelbagai hamba merupakan turunan dari sifat-sifat Tuhan, terutama sekali sifat-sifat yang luhur dan terpuji seperti menyayangi, mengasihi, memaafkan, mendampingi, menyebarkan kelembutan, mendistribusikan kebajikan dan lain sebagainya. Ketika meleburkan diri ke dalam Tuhan, maka tidak ada satu pun sifat dan perbuatan yang dapat diklaim semata berasal dari diri kita sendiri.

Cinta sejati

Peleburan diri ke dalam Tuhan juga memerlukan kesadaran tinggi dan cinta sejati setiap hamba. Peleburan diri tanpa cinta sejati tidak akan banyak memberikan makna dan maslahat baik bagi diri sendiri maupun terhadap Tuhan. Bahkan, tanpa cinta sejati kepadaNya hanya akan melahirkan peleburan diri yang banyak melahirkan kekeliruan dan menuai masalah-masalah religiusitas. Atau, dalam istilah yang lebih kren, tanpa cinta sejati dalam peleburan diri pasti memunculkan disorientasi religiusitas yang mengkhawatirkan dan destruktif.

Cinta sejati mengandaikan bahwa segala hal yang kita cita-citakan dan direalisasikan merupakan fakta ilahiah, bukan sebatas kreasi insaniah. Meminjam kosakata Alquran bahwa saat kita melempar sesuatu, sejatinya bukan reaksi dari tenaga kita saja melainkan benar-benar dorongan dari kekuatan Tuhan. Maka setiap hamba tidak dibenarkan mendistorsi konstruksi nilai-nilai ilahiah.

Setiap hamba akan dikategorikan congkak manakala menempatkan berbagai kebajikan yang ditaburkan kepada sesama murni dari kesadarannya. Bahwa masing-masing hamba telah dikaruniai "akal" dan "potensi/kekuatan" oleh Tuhan sama sekali tidak dimungkiri. Hanya saja, semua itu berfungsi sebagai media awal mewujudkan apa-apa yang telah digariskan Tuhan.

Cinta sejati, menirukan kata-kata Paus Yohanes Paulus II, bukanlah suatu perasaan yang samar-samar atau nafsu buta. Sebaliknya, lanjut Paus, cinta sejati merupakan suatu sikap batin yang melibatkan seluruh diri manusia. Cinta sejati adalah memperhatikan orang lain, bukan untuk memanfaatkannya, tetapi untuk melayaninya. Dan teramat jelas bahwa cinta sejati kepada Tuhan adalah mengharuskan peleburan diri sekaligus melayaninya sepenuh hidup tanpa kecuali. Pelayanan dari dan untuk Tuhan tidak mensyaratkan apapun baik dari aspek material maupun spiritual. Sebab dari Dialah kita semua berasal. Dari Dialah kita dapat menikmati kehidupan.

Seorang novelis Kristen terkemuka, Leo Tolstoy, mensinyalir bahwa kebajikan dan kebahagiaan bagi setiap hamba di muka bumi, sejatinya akan hadir kalau mereka telah memahami dan melayani Tuhan dengan baik. Karen Armstrong malah lebih tegas menyatakan bahwa ketika kita ingin sampai ke hadirat Tuhan tidak bisa hanya dengan semangat rasionalitas (baca: intelektualitas). Sebaliknya, lanjut Armstrong, kita mesti mengalami Tuhan dalam segala realitas sosial. Karena Tuhan bukan "material" sempit, melainkan "esensi" yang sangat luas dan menakjubkan. Tuhan bukan saja "simbol" Kekuatan Mahadahsyat, akan tetapi juga "simbol" dari Kelembutan Yang Maha Mendamaikan.

Kang Jalal – sapaan akrab Jalaluddin Rakhmat – lebih rinci mengurai pandangan Leo Tolstoy. Jika kita ingin mengetahui dan meleburkan diri dengan Tuhan dalam seluruh sendi kehidupan ini sejatinya mesti melayani kehendak Tuhan itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan berkhidmat dan mencintai sesama manusia tanpa sentimentalitas ras, suku, agama, budaya, status sosial, kepentingan politik dan sebagainya. Sebab, masih kata Tolstoy, "dimana ada cinta di situ ada Tuhan." Maka melayani Tuhan berarti mencintai dan melayani sesama makhlukNya. ***

12

Iman Itu Pintu

Ada yang menarik dari uraian Mgr. Hilarius Moa Nurak selaku Uskup Pangkalpinang pada penutupan "Tahun Iman" di Gua Maria, Belinyu, Kabupaten Bangka (24/11/2013) yang lalu. Iman, tegas Uskup, merupakan pintu rohani yang harus dimiliki dan dirawat setiap umat agar mampu menempa diri menjadi hamba yang baik. Sebagai pintu, iman itu merupakan *wasilah* para umat untuk memasuki kerajaan Allah dengan damai. Iman juga adalah bahasa harmoni agar umat lebih produktif menjalin interaksi dengan sesama makhlukNya.

Tanpa merawat iman sebagai pintu rohani, kemungkinan setiap umat akan berada dalam pelbagai kegamangan selama meniti kehidupan di muka bumi. Tanpa memupuk iman dengan baik dan mencerahkan, sulit sekali bagi masing-masing umat untuk menemukan terang dalam pentas sosialnya sebagai hamba. Dan bilamana kehilangan cara berkualitas dalam memaknai maupun membawa iman, maka umat akan mudah terperosok ke selokan hidup yang (terkadang) mencemaskan.

Iman, selain merupakan pintu rohani bagi setiap hamba, sejatinya adalah cahaya (*nur*) yang akan menerangi berbagai ruang sosial umat

itu sendiri. Tanpa iman, umat ibarat benda yang mudah terapung dan terombang-ambing di pusaran dinamika kehidupan duniawiyah maupun yang berskala ukhrawiyah kelak. Bahkan tanpa iman, siapa saja yang mengaku menjadi umat akan sulit membedakan eksistensi dirinya dengan makhluk Tuhan yang lainnya.

Makna Iman

Dalam Islam, menurut sebagian teolog, iman identik dengan Islam. Setiap diri yang tidak beriman, ia tidak bisa otomatis disebut sebagai Islam. Bahkan, menurut Najm al Din al Nasafi, seorang teolog dari kalangan Maturidiyyah, kata-kata iman dan Islam adalah satu. Keduanya tidak bisa dipisahkan, terutama secara esensial. Dan kalau kedua kata itu dikembangkan dengan baik, tentu akan menjadi pasangan kekuatan rohani yang sangat menakjubkan dalam seluruh sendi kehambaan. Di kalangan Asy'ariyah, tak sedikit teolog yang justru menegaskan bahwa dilihat dari aspek bahasa saja keduanya jelas berbeda. Iman berarti "pembenaran" dari seseorang dalam perspektif kehambaan kepada Allah, sementara Islam merupakan "penyerahan total" kepadaNya. Namun demikian, setidaknya kata Taftazani, keduanya merupakan satu kesatuan kuat tanpa bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Toshihiko Izutsu, sambil merensi pemikiran Ibn Taimiyyah mensinyalir bahwa antara iman dan Islam kalau didampingkan, maka wilayah makna iman akan terbatas. Iman secara khusus hanya bermakna perbuatan batin dari yang dinamakan hati. Bahkan Izutsu juga menyertakan pandangan Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa Islam itu merupakan masalah lahir, dan iman adalah urusan hati (batin).

Dinamika pengertian kedua istilah ini, kelak melahirkan pemikiran yang berbeda pula dalam tradisi Islam. Dan hampir semua mazhab (teologis) dalam Islam kemudian mentransformasikan bahwa *iman*, *Islam* dn *ihsan* merupakan trilogi utama dalam perspektif kehambaan yang tidak bisa diceraiberaikan. Satu dari ketiga istilah ini memiliki potensi untuk melengkapi dua istilah yang ada dengan makna yang dikandungnya. Maka cukup jelas kalau potensi dan makna masing-masing istilah itu ternyata saling menyertai dan menyempurnakan.

Setiap diri hamba tidak bisa hanya menarik kata iman tanpa

kemudian mengolahnya dengan disertai makna, potensi, dan nilai-nilai aktual keislaman. Demikian pula spirit iman dan Islam akan kurang maksimal ketika dijauhkan dari sentuhan yang dinamakan ihsan dengan berbagai bangunan etik di dalamnya. Sebab ihsan, menurut sebagian pakar, merupakan wujud aktual paling bermakna dalam proses menuju kehambaan seutuhnya di hadapan Allah SWT.

Ihsan senantiasa dimaknai sebagai perilaku aktual dari setiap umat dalam konteks keduniawian tanpa mengabaikan tuntutan dan nilai-nilai luhur yang telah dijanjikan Allah di akhirat nanti (ukhrawi). Melalui ihsan jua, Allah telah memberikan bimbingan praktis bagi setiap umat agar dapat menjaga keseimbangan antara kesibukan jasmani dengan capaian luhur rohaninya. *I'mal li dunyaka ka-annaka ta'isyu abadan, wa i'mal li akhiratika ka-annaka tamutu ghadan.*

Singkatnya, iman merupakan sumber potensi terluhur dalam memolah keberagamaan seorang umat. Tanpa iman, kelangsungan keberagamaan masing-masing umat tidak akan melahirkan arti dan dampak apa-apa, baik pada areal individualitas maupun pada ranah sosialnya. Sebab iman adalah esensi penggerak dan penyubur dari religiusitas setiap hamba dalam skala makro.

Aktualisasi Iman

Iman juga bukan sekadar kata-kata atau istilah gersang. Iman itu pintu bagi masa depan rohani masing-masing umat beragama. Melalui iman kita bisa memasuki *rahman* dan *rahim* Allah dengan baik dan menyenangkan. Dari dan utuk iman pula kita akan dapat keluar dari cobaan maupun ujian Allah dengan penuh syukur. Bahkan, bersama iman kita akan mampu bergeser dari pergunjingan sosial kehidupan manusia secara menenteramkan.

Lemahnya iman akan membuat kita lunglai dalam beragama. Kusutnya iman dipastikan akan menyeret-nyeret kepribadian kita sebagai hamba ke arah yang kurang produktif dalam mengolah sosio-keumatan. Retaknya iman sungguh akan menyulitkan langkah-langkah umat dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Bahkan, disadari atau tidak, pudarnya iman dari diri manusia ini akan terus memicu disorientasi dan disfungsionalisasi dari amanah luhur kekhalifahannya.

Di era modern, aktualisasi iman memang tidak cukup hanya dengan melaksanakan ritual-ritual formal keagamaan. Sebab ritual formal semacam salat di masjid atau sembahyang di gereja, vihara, dan tempat-tempat sakral yang lain, merupakan sebahagian dari wujud kehambaan kita kepadaNya. Jauh dibalik itu, iman harus menjadi napas dan darah bagi perilaku sosial kemanusiaan kita. Tak terkecuali dalam tradisi Islam, salat bukan sekadar ritual untuk lepas dari kewajiban secara syar'i, melainkan sangat berkaitan dengan kualitas moral-kehambaan.

Kalau iman itu masalah hati, seperti kata Ahmad bin Hanbal, maka ia akan senantiasa menghadirkan hal-hal yang mengharmoniskan dalam pola kehidupan umat beragama. Sebab hati, setidaknya kata Syaikh Abdul Qadir al Jailani, merupakan tempat bergeraknya ruh. Bahkan, meniru istilah Ibn Arabi, posisi hati bagi setiap umat beragama itu setara dengan Ka'bah, "rumah suci bagi manusia." Sebagai sumber awal religiusitas, iman terkadang memang tampak kurang rasional. Dalam iman, setiap hamba seringkali tidak diminta selain mengedepankan apa yang dinamai kepercayaan. Sedangkan kepercayaan, dalam banyak pemahaman, selalu identik dengan pelibatan hati dari pada akal (nalar). Sebab *hati*, seperti dalam sajak KH. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus, *bukanlah santapan yang dihidangkan kepada setiap tamu/hati punya logika yang tidak dikenal oleh logika.*

Dalam rangka membumikan nilai-nilai (ke)Tuhan(an) secara lebih produktif, tentu setiap hamba di era modern ini perlu memenukan kembali makna iman yang sesungguhnya. Yakni, iman yang tak henti-hentinya membuka diri kepada Tuhan dan menebarkan kebajikan terhadap sesamanya. Sebab hampir semua kata iman (*amanu*) dalam Alquran, selalu disandingkan dengan istilah berbuat kebajikan (*'amilu al shalihat*).

Oleh karena itu, iman tanpa amal kebajikan, terutama kepada Tuhan dan sesama makhluk, hanya akan menjadi istilah gersang yang membosankan. Dan tak berlebihan bilamana Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa hanya iman yang disertai perbuatan baik yang selalu menyebarkan terang, membuat cinta Allah kelihatan dan menjadi nyata. ***

13

Panggilan (Ber)Haji

Disamping persoalan teknis dan antrean yang panjang, panggilan (ber)haji bagi setiap umat beragama islam, merupakan kehendak dan ijin Allah SWT. Tidak seorang pun yang dapat memanipulasi keterpanggilan haji baik secara fisik, material dan spiritual. Pada segi fisik atau dhahiri, ada sosok umat yang tampak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, namun karena belum terpanggil maka tidak bisa ikut berbondong-bondong ke Tanah suci. Adapula yang dalam konteks materi terlihat lebih dari cukup atau kaya raya tetapi juga belum berangkat. Sekali lagi itulah bukti kalau panggilan (ber)haji sepenuhnya hak Allah.

Panggilan (ber)haji memang penuh rahasia. Semua tergantung kepada Allah SWT. Seorang pedagang bakso, tukang jual gorengan dan kuli bangunan yang berangkat melaksanakan ibadah haji, kadang diluar rasio materialitas kita. Pun seorang kakek dan nenek atau mereka yang tergolong usia lanjut ikut berjamaah ke Baitullah dengan kloter tertentu, adalah fakta bahwa keterpanggilan memang kuasa Allah SWT. Padahal masih sangat banyak yang gagah, tergolong

kaya, kekar secara jasmani, tapi belum terpanggil sebagai tamu penuh rahmat ke rumahNya.

Makna Dasar

Sachiko Murata dan W.C Chittick mensinyalir bahwa secara tradisonal makna dasar haji adalah ritual perjalanan utama dari keterliban dengan dunia ini menuju kebersamaan dengan Allah SWT. Ia bukan perjalanan sepi makna, sebuah napak tilas imani yang membutuhkan perangkat lunak berbasis kedalaman religiusitas dan ketulusan amaliah tanpa kompromi. Sekali saja niat keliru sepanjang perjalanan, yang akan lahir bukan maslahat imani melainkan luapan keburukan yang mengalir tanpa sengaja dari diri sang pejalan. Konsekuensinya, ia mudah menjadi perjalanan hampa dan menyakitkan.

Bagi Ali Syariati, pun juga Murata dan Chittick perjalanan haji mirip perjalanan menuju kematian. Makna bertemu Allah dirumah-Nya yang agung, lebih identik dengan wujud kematian. Mati, berarti kembali kepada dekap ruhNya. Terlebih dalam alquran tegas Murata dan Chittick, kematian sering kali dideskripsikan sebagai perjumpaan dengan Allah SWT. Berhaji berarti "mematikan" diri atas dasar perspektif imani dilingkaran ka'bah dirumah agung Allah SWT. Adapun kembali dari menunaikan ibadah haji mengandung makna kelahiran kembali sebagai HambaNya.

Perjumpaan dengan Allah SWT, termasuk melalui ibadah haji, adalah cita-cita luhur setiap hamba beriman islam. Disinilah seorang hamba akan melihat langsung "wajah" Allah SWT terutama ketika mampu meleburkan diri dalam rukun haji, seperti pada saat wukuf dipadang arafah, di Muzdalifah, Jumratul Aqaba dan Nafar di Mina. Seorang pelukis terkemuka Jeihan Sukmantoro, misalnya, begitu hebat menginternalisasi makna dan nilai beberapa rukun haji, seperti dalam sajak-sajaknya

"berbalut/kain kafan/aku/nengadah/langit malam/bersejarah/diri/ Allahu Akbar" (Mabit). Atau sajak yang berjudul Nafar Dimina. "mata/ hari sore/bayangku/jatuh ditanah/terbujur".

Itulah diantara sajak-sajak perjalan haji yang mengisyaratkan dan mengilustrasikan kematian diri. Sebuah kematian berdasarkan panggilan Allah sendiri bukan karena kita yang memilih. Kematian

yang sejatinya hendak mengingatkan setiap hamba bahwa perjalanan menuju rumahNya benar-benar tidak mudah. Membutuhkan kesiapan ilmu dan kesadaran diri secara lahir dan batin. Apalagi ketika diJabal Rahmah, seperti yang dilukiskan Jeihan, "haru/bahagia/bertemu/lagi/kita/Alhamdulillah".

Tawaf pun, adalah simbol peleburan diri antara semua makhluk dengan Allah SWT. Ia bukan semata langkah putar memutar badani atau fisik, melainkan benar-benar bagian dari cara Allah SWT untuk menunjukkan betapa hidup setiap hamba tidak sendirian. Berada dalam putaran sosio-kemakhlukan yang dinamis. Maka egoisme individualistik harus dimusnahkan . kesombongan dan kecongkakan terhadap sesama mesti dibakar habis-habisan tak tersisa. Lagi-lagi dalam sajak Jeihan berkata,

"Bulan/diatas/Ka'bah/CahayaMu/UmatMu/HambaMu/Lebur/Menyatu/dalam/Tawaf".

Bekal (Ber)haji

Rasulullah Saw sedari dahulu sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan ada suatu masa dimana orang yang berangkat haji tidak lebih dari sekedar tamasya, jalan-jalan ketanah suci tapi lepas dari semangat dan spirit haji. Banyaknya umat yang berulang kali melaksanakan ibadah haji namun masih kerap terlibat korupsi, atau rajin membawa barang-barang yang hendak dibisniskan semisal jamu kuat, adalah contoh tersendiri. Itulah bentuk tamasya yang mudah dilihat, tidak lagi bisa membedakan mana ibadah haji sebagai perjalanan ruhaniah menuju Allah SWT dengan perselancaran bisnis duniawiyah belaka.

Al Ghazali menegaskan bahwa sedikitnya ada dua hal yang harus dijadikan bekal oleh setiap hamba ketika hendak ingin menunaikan ibadah (ber)haji. Pertama, secara fisik dan material (finansial) memang harus kuat dan memadai. Kuatnya fisik bukan untuk kepentingan duniawi semata, akan tetapi demi menjaga stabilitas diri dalam menjalani rukun haji. Materi yang memadai juga bukan untuk kepentingan belanja barang-barang duniawiyah khas bangsa arab melainkan agar bisa memperbanyak amal kebajikan sepanjang perjalanan berhaji. Ini bekal yang masih berdimensi dhahiri.

Kedua, adalah bekal yang bersifat ruhani setiap hamba mesti matang dan dewasa secara spiritual perjalanan haji adalah perjalanan batin dalam rangka bertamu dan berjumpa langsung dengan Allah SWT yang bukan bentuk fisik. Yang dibutuhkan sesungguhnya kematangan hati, sebab hati, adalah bejana. Dan Allah SWT sendiri sang pemilik bejana yang bernama hati. Dan hati imbuh Hazrat Inayat Khan adalah "ka'bah" bagi manusia. Adapaun hati yang paling dekat dengan Allah SWT ialah hati yang lembut, suci, dan teguh. Bahkan hati merupakan media paling baik mencermati dan memahami alam keberadaan maupun kerohanian sehingga dapat dijadikan alat untuk makrifat kepada Dzat Allah SWT.

Bekal kematangan hati akan membawa kemaslahatan bagi setiap hamba yang melaksanakan perjalanan haji bila dipenuhi dengan dzikir dan doa. Sebab meminjam perspektif Annimarie Schimmel, doa itu timbul dari kehadiran Tuhan dihati dan Tuhan menjawab sebelum doa terucap. Memperbanyak doa sepanjang perjalanan berhaji akan menjadikan diri mudah lebur dengan Allah SWT. Sebaliknya, kalau banyak bergosip sepanjang perjalanan berhaji, hati akan keras, jiwa meranggas, dan hilang daya ilahiah.***

14

Berhaji, Melatih Mati

"Dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan bertelanjang kaki atau dengan menunggang unta yang sudah lemah dan mereka akan datang kepadamu dari setiap padang pasir yang jauh letaknya" (QS. Al Hajj [22]: 27).

Manakala memberikan pengantar singkat dalam bukunya, *Haji*, Ali Syariati, sosiolog Muslim (Syiah), mengurai bahwa ada tiga hal dari rukun Islam yang mampu memberikan motivasi tersendiri bagi kualitas kesadaran religi manusia. Pertama adalah tauhid, kedua itu jihad dan ketiga ialah haji.

Apa yang diungkapkan Syariati, terutama berkait dengan tiga hal di atas, sesungguhnya bukan semata penguatan iman setiap umat. Lebih dari itu, tegas Syariati, dengan tauhid, jihad, dan haji, setiap diri dari kaum beriman akan menemukan kemerdekaan dan tanggungjawab sosialnya yang empatik. Bahkan, sebagian ulama (Sunni) sendiri mensinyalir bahwa tiga hal dimaksud merupakan rangkaian terpenting dalam proses kehambaan sepanjang serajah.

Umat Islam, misalnya, dari kalangan yang sangat rendah secara ekonomi dan sosial hingga yang terbilang tinggi dan amat mampu dalam aspek finansial, seakan kurang *afdhal* menganut Islam kalau tidak sempat menunaikan ibadah haji. Ini sudah menjadi "tradisi" atau "keyakinan" di hampir seluruh daerah muslim di Indonesia dan penjuru dunia lainnya.

Filosofi haji

Secara filosofis, haji merupakan ritual terluhur yang menakjubkan. Filosofi haji itu adalah aktualisasi ritualistik terhebat yang akan menuntun setiap manusia kembali ke jalur fitrahnya. Dalam keyakinan sebagian besar umat beriman, ibadah haji adalah praktik religiusitas yang dapat dikategorikan sebagai penghapusan dosa dan pertaubatan sejati. Dengan berhaji, manusia melatih mati. Mereka akan langsung "bertamu" kepada Allah di dunia ini.

Dalam perspektif sosiologis, haji dapat menjadi ajang pembuktian komitmen sosial manusia terhadap cita-cita sekaligus cinta ubudiyahnya di hadapan Allah dan manusia secara umum. Sekiranya (masih) ada individu beriman yang menunaikan ibadah haji dan tidak memahami semangat filosofis dan sosiologis ini, maka gampang ditebak bahwa ia akan mengalami sedikit krisis spiritualitas meraih kemabrurannya.

Berdasarkan spirit di atas pula, hingga kini masih sering kita dapatkan bahwa sebagian besar umat Islam kala menunaikan ibadah haji pun "berniat" langsung kembali ke pangkuan Allah (baca : meninggal dunia di tanah suci). Sepintas niat ini adalah hak setiap umat beriman. Akan tetapi, secara esensial, peletakan niat ini kurang etis. Sebab kematian hanya urusan Allah, bukan wilayah kita sebagai hamba. Dan setiap umat manusia, mempunyai garis takdirnya masing-masing. Namun demikian, Syariati sempat menegaskan bahwa ibadah haji sejatinya juga mencerminkan kepulangan setiap diri kepada Allah, Sang Maha Perkasa, yang tidak memiliki keterbatasan. Adapun pulang kepada Allah, lanjut Syariati, adalah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai, dan fakta-fakta (kehambaan).

Itulah salah satu semangat evolutif yang sedari awal telah tertanam

dalam ibadah haji. Sebagaimana Allah berfirman, "Sesungguhnya setiap ruh itu adalah milik Allah dan pasti juga kembali kepada Allah" (QS. Al Isra [17]:36). Dan seandainya ada pandangan yang mengatakan bahwa haji adalah "kematian kecil" bagi diri yang beriman, tentu tidak dapat disalahartikan. Bukankah setiap harinya manusia juga mengalami "kematian kecil", yakni tidur, apalagi dalam beribadah haji.

Di lain ruang, Allah sendiri telah menegaskan bahwa melaksanakan ibadah haji adalah bagian dari perjalanan menuju kematian (QS. Al Syura [42]:53). Maka setiap orang yang menunaikan ibadah haji harus memakai dua helai kain ihram. Itulah kain yang menyerupai kain kafan, pakaian kebesaran terakhir manusia menuju alam kubur. Dan pakaian, sejatinya melambangkan pola, preferensi, status, serta perbedaan-perbedaan tertentu.

Batas palsu

Pakaian, dalam paradigma sosial (terutama di era modern), telah menciptakan batas palsu yang sering kali juga menyebabkan perpecahan, friksi, dan konflik di kalangan manusia. Bahkan, lantaran perbedaan pakaian yang amat mencolok tak jarang diskriminasi sosial menyeruak hingga melahirkan anarkisme dan brutalisme sosial kehambaan. Padahal Allah menegaskan bahwa "pakaian terbaik di mata Allah adalah takwa."

Sebagaimana orang mati, setiap diri yang menunaikan ibadah haji pun tidak membawa pakaian mewah, harta kekayaan, atau terus mendemontrasikan status sosialnya. Yang mereka bawa hanya kesadaran kepenghambaan dan kecintaan kepada Allah dalam kualitas terbaik, bukan yang dihiasi kepura-puraan. Sebab dalam ibadah haji, totalitas kepasrahan kita selaku hamba sangat dipertaruhkan.

Diri yang sedang menunaikan haji semestinya meninggalkan segala kepunyaan dan status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Ia harus fokus dan konsisten menuju Allah dengan segala kuasaNya. Ia tidak boleh egois dan melekatkan diri dengan hal-hal materialitas (duniawi). Sebab ensensi haji adalah kesadaran mencari, menemukan, memaknai dan mencapai kedigjayaan Allah. "Dan Allah adalah tujuan perjalanan" (QS. Al Nur [24]:42 dan Fathir [35]: 18).

Usai mengenakan pakaian ihram, sudah termafhumi, setiap

diri yang naik haji mesti berangkat menuju padang Arafah. Sebuah medium untuk mengolah dan menetaskan pengetahuan dalam kehambaan. Di tempat inilah setiap jamaah haji akan mengetahui bahwa perbedaan ras, suku, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya, hanya batas palsu yang harus disingkirkan dari konstruksi pikiran dan laku sosial kita sehari-hari.

Padang Arafah, merupakan miniatur alam Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia di hadapan Allah untuk melapor dan menerima penilaian integral selama hidupnya. Di padang ini setiap diri juga mesti mengetahui bahwa kelahirannya ke muka bumi sama sekali tidak membawa apa-apa. Maka dari itu, manusia tidak boleh congkak, sombong, senang menertawakan nasib sesama dan membanggakan status sosial yang digenggamnya.

Selepas tahap pengetahuan adalah tahap kesadaran. Tahapan kesadaran inilah yang disimbolisasikan dengan Mahsyar. Diantara Arafah dan Mahsyar ini, setiap diri umat akan dituntun bagaimana selaiknya melahirkan kearifan dalam berpikir, keadilan manakala bersikap, kejujuran dalam memolah dinamika hidup melalui integralisme pengetahuan dan kesadaran. Artinya, setiap yang naik haji harus mengetahui dan menyadari apa saja yang mereka perbuat mulai hal terkecil sampai yang terbilang besar.

Sementara tawaf, masih meniru kerangka Syariati, adalah simbol dari gerakan konsistensi dalam memaknai kehidupan sosial. Demikian halnya sa'i, merupakan ilustrasi terindah agar setiap manusia mampu mengembangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam mewujudkan cita-cita sosial. Begitu juga melempar jumrah, ini merupakan simbol agar manusia mampu menyingkirkan pikiran dan perilaku buruknya sejauh mungkin.

Singkatnya, haji merupakan puncak spiritualitas untuk meniadakan pelbagai bentuk egoisitas pragmatis-parsialistik dalam konteks penghambaan kepada Allah. Dengan berhaji, manusia bukan saja kembali suci, melainkan juga akan dituntun oleh Allah menuju jalan terbaikNya. "Sesungguhnya Kami akan menunjukkan jalan Kami kepada orang-orang yang memperjuangkan hal-hal bermanfaat" (QS. Al Ankabut [29]: 69). ***

15

Haji Itu Pertobatan

Cita-cita terluhur dalam kehidupan muslim adalah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Bahkan sebagian umat menempatkan ibadah haji bukan semata fundamen kelima dalam rukun islam, melainkan menyangkut proses pengujian tingkat tinggi terhadap kontruksi spiritualitas umat itu sendiri.

Ali Syariati, dalam bukunya, Haji. Dengan penuh kedalaman menyatakan bahwa haji adalah jihad spiritual seorang muslim, siapa saja yang berhasil menunaikan ibadah ini dengan baik dan semambrur mungkin akan segera menemukan kefitrian dalam kehambaannya. Ia akan bersih dari dosa, mampu meraih ketenangan dan kedamaian. Dan menurut sebagian ahli agama ia dianggap sama seperti masa kanak-kanak terjauhkan dari dosa dalam kehidupan.

Namun pelaksanaan ibadah haji akhir-akhir ini tampak sebagai "rutinitas"semata. Ia seakan tercerabut dari akar filosofinya sendiri. Tidak banyak mempengaruhi mentalitas dan prilaku keberagamaan secara praktis-kontrukstif. Semakin sering ritualitas haji ditunaikan, kain variatif juga pengerdilan religiusitas dan "instanisasi

keberagamaan" dikalangan masyarakat modern.

Hakikat Haji

Hakikat haji dan shalat, hampir sama. Hakikat shalat adalah malaikat, yakni keberadaan yang terjaga dari kekurangan, cela, dan maksiat, kelupaan dan lain sebagainya. Demikian juga haji, menurut Jawad Amuli, hakikat dan batinnya adalah malaikat. Maka siapa saja yang melaksanakan shalat dan menunaikan ibadah haji hendaknya telah menancapkan dan memantapkan niatnya dengan baik. Sebab mereka akan terbang bersama malaikat, makhluk suci yang tidak (pernah) melakukan dosa.

Dalam pengertian yang sederhana, setiap umat yang melakukan shalat, maupun menunaikan ibadah haji, sejatinya merupakan pribadi yang telah benar-benar membakar dosa dan kealpaan (duniawiyah) lainnya. Adapun dosa adalah beban yang kadang bisa merusak interaksi setiap manusia dengan Allah. Maka ketika shalat dan berhaji manusia itu sesungguhnya sedang melakukan perjalanan kembali atau pertobatan integral kepadaNya. Rasulullah telah bersabda bahwa "seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dan jika Allah mencintai seorang hamba, pasti dosa tidak akan membahayakannya". Mengacu pada tradisi sufisme, tobat itu merupakan awal pendakian dan maqam pertama yang harus dilalui setiap salik. Tanpa pertobatan yang optimal, setiap salik akan kesulitan mendaki tangga ilahiah.

Berkait dengan dosa dan tobat itu, Imam al Sajjad mengurai bahwa mengenakan kain ihram yang tidak berjahit sesungguhnya merupakan penjelasan dari komitmen spiritual setiap umat untuk menanggalkan dosa dan kesalahan. Artinya, siapa saja yang menunaikan ibadah haji, berarti mereka telah siap bertobat kepada Allah dengan ikhlas dan amanah.

Bahkan dalam pandangan Imam Al Sajjad, kain ihram itu adalah baju ketaatan. Ia adalah modal terbaik dalam mematangkan kontrak kehambaan dengan Allah SWT. Sebab dalam mandi ihram, lanjut Sajjad, sedikitnya terkandung tiga hal. Pertama, tidak akan melakukan dosa lagi. Kedua, bertekad dengan senantiasa mematuhi Allah SWT dengan segala perintahNya. Ketiga, menebus dosa-dosa yang telah

lalu. Disamping jalur pertobatan, kata Jawad Amuli, haji itu merupakan perjalanan khusus secara spiritual. Atau meniru bahasa Syekh Abdul Qodir Jailani, seperti dikutip Syed Ali Asyraf, bahwa ibadah haji ini sering di identikan sebagai Al hajj Thariqah (ziarah di jalan spiritual). Dari haji yang berkualitas spiritualistik dalam pandangan Ali Syariati maka siapa saja yang melaksanakannya akan mengalami evolusi yang cukup berarti menuju Allah. Karena pada hakikatnya ibadah haji itu cerminan kepulangan hamba kepadanya. Sementara pulang menuju Allah SWT, adalah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai dan fakta-fakta.

Haji Ikhlas

Ali syariati mensinyalir juga bahwa haji sangat bertentangan dengan perjuangan-perjuangan tanpa tujuan. Haji adalah perjuangan spiritualitas yang sangat jelas struktur dan orientasinya. Dari Miqat, sai, sampai Wukuf. Haji adalah pemberontakan melawan nasib malang yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Dengan memaksimalkan ibadah haji, seorang hamba akan mampu mengiris-iris temali keburukan yang melilit dirinya. Ia akan menjadi manusia yang lepas dari jeratan ketercelaan dan menemukan kembali otonomi kehambaannya.

Sebagai perjuangan spiritualitas ibadah haji membutuhkan komitmen keikhlasan tak terperi dari setiap umat yang menunaikannya. Bahkan Syah Waliyullah al Dihlawi (661-728 H) menulis bahwa salah satu tujuan haji ditetapkan sebagai ibadah tertinggi ialah untuk membedakan antara orang yang ikhlas dengan orang munafik.

Ikhlas dalam pandangan Syekh Mustofa Al Ghalayani, ditempatkan sebagai ruh dari segala perbuatan. Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan bahwa ikhlas adalah ketiadaan bagian atas suatu hal bagi dirinya. Abu ali ad-Daqaq pun menyatakan kalau ikhlas adalah keterpeliharaan diri dari keikutcampuran semua makhluk. Sehingga ikhlas dan shiddiq (orang yang benar) itu sedikit berbeda. Orang yang ikhlas (mukhlish) tidak memiliki riya dan orang yang shiddiq itu tidak akan kagum pada dirinya sendiri.

Dzun Nun al Mishri dengan lugas menyatakan bahwa

sedikitnya ada tiga alamat yang menunjukan keikhlasan seseorang. Pertama, ketiadaan perbedaan antara pujian dan celaan. Kedua, lupa memandang amal perbuatannya di dalam amal perbuatannya sendiri. Dan Ketiga, lupa menuntut pahala atas amal perbuatannya di kampung akhirat. Oleh karena itu tanpa komitmen keikhlasan, seseorang yang menunaikan ibadah haji, agak sulit untuk merengkuh rahasia-rahasia kehajian itu sendiri. Bahkan dalam pandangan Ali Syariati, ia tidak akan pernah meraih kemabruran, namun sering kali melahirkan bumerang spiritualitas. Ia akan tetap berada dalam kungkungan duniawiyah dan ketercelaan, terjebak dalam perilaku riya yang berujung pada reorientasi atau refungsionalisasi kehajiannya. ***

16
Damai Dalam Doa

Bangsa ini sejak awal sudah mengklaim dirinya sebagai bangsa religius, atau bangsa yang telah menganut nilai-nilai kepercayaan atas dasar agama. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang memiliki pola dan kesadaran religius, mempercayai bahwa dunia ini bukan tempat satu-satunya untuk mereka hidup, melainkan ada tempat lain meskipun (terbilang) masih *gaib* yang kelak akan menjadi tempat mereka kembali. Tak berlebihan bilamana beberapa filosof era awal mensinyalir bahwa lembaga kebenaran tertua manusia di dunia ini adalah sistem kepercayaannya.

Bagian dari melekatnya kepercayaan religius itu, sedari dulu bangsa ini telah mengakui aneka agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan beberapa aliran kepercayaan yang lain. Realitas ini menunjukkan kalau masyarakat Indonesia pada umumnya telah mempunyai kesadaran primordial secara keagamaan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan terlepas dari dinamika intelektualitas (religiusitas) yang menyertainya, kesadaran primordial-religius ini pula yang kemudian ikut membidangi lahirnya sila pertama dari dasar negara

kita, Pancasila.

Dengan demikian, pluralitas keberagamaan bukan hal yang baru dan aneh, dan tidak boleh direduksi secara emosional. Pluralitas itu telah menjadi bagian dari akar histori kebangsaan kita. Bahkan simbol-simbol agung dalam konteks pluralitas keberagamaan itu masih terpancang kuat hingga kini seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Masjid Istiqlal. Dan meminjam bahasa Abid Al Jabiri, Candi Borobudur, Prambanan dan Masjid Itiqal itu merupakan "teks suci" pluralitas yang telah berbicara sendiri di hadapan kita sebagai masyarakat Indonesia.

Semangat Pluralitas

Semangat pluralitas keberagamaan itu juga tampak mewarnai acara peresmian Seminari Menengah Mario John Boen (19/12/2013) yang lalu. Dalam peresmian Seminari ini ada yang unik dan mengagumkan walau hanya bersifat seremonial. Setidaknya ada enam tokoh dari enam agama berbeda yang membacakan doa sesuai kepercayaannya masing-masing untuk mengawali acara peresmian itu, yakni perwakilan Kong Hu Cu, Kristen-Protestan, Hindu, Budha, Katolik, dan Islam. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa wacana toleransi dan pluralitas keagamaan di Indonesia terus mengalami kemajuan yang cukup positif.

Selintas dan dalam pola pikir yang sempit, mungkin kita berasumsi kalau Tuhan akan kebingungan dengan realitas ini. Akan tetapi, tak sedikit pula manusia yang akan mempercayai bahwa Tuhan akan senang dengan "pentas doa" umatNya yang berbeda-beda media religiusitasnya. Dan di luar perdebatan intelektual-ideologis, rasanya juga tidak salah kalau sebagai masyarakat beragama kita mempercayai bahwa Tuhan telah memiliki cara tersendiri untuk menyikapi realitas ini. Karena, terutama dalam tradisi Islam, ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa Tuhan itu senantiasa tergantung akan praduga hamba-hambaNya.

Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi terkemuka sempat mengurai bahwa kebanyakan manusia beragama lebih sering bertengkar hanya lantaran tulang-belulang agama yang kurang mendamaikan. Mereka lupa, masih kata Rumi, bahwa agama juga memiliki daging yang seharusnya dikonsumsi dengan baik oleh setiap pribadi beragama. Tulang belulang agama itu lebih berkait dengan "hal-hal formalitas" dalam sebuah agama yang kadang sangat dijunjung tinggi tapi dilalaikan deretan esensialitasnya. Sementara daging agama menyangkut komitmen

kebajikan dan keluasan kasih yang diembannya. Agama bukan semata berisi doktrin-doktrin kaku dan imajiner, melainkan wujud aktual dari Kasih Tuhan yang tak terhingga bagi setiap makhlukNya.

Beragama memang tidak cukup hanya dipresentasikan melalui rajin salat di masjid, suka sembahyang di gereja, vihara, dan lain-lain. Akan tetapi beragama itu, meniru istilah Sayyed Hussien Nasr, sejatinya adalah tindakan nyata berbasis spiritualitas untuk menabur dan menanam amal-amal kebajikan (*al 'amal al shalihah*) demi kemaslahatan terhadap semua makhluk Allah SWT tanpa pandang bulu. Sebab agama itu rahmat. Agama bukan semata "ideologi," melainkan cara terluhur untuk memola hati nurani. Dan salah satu resep memola hati adalah melalui doa, tak terkecuali seperti yang dipentaskan oleh perwakilan enam agama pada peresmian Seminari Menengah Mario John Boen diatas.

Filosofi Doa

Hampir semua penganut agama tahu bahwa doa itu bagian dari ritual keagamaan yang (di)sakral(kan). Namun, tidak sedikit pula umat yang belum bisa memaknai doa dengan produktif, baik itu dari aspek filosofis maupun dalam tataran praktis. Padahal sebagai salah satu ritual keagamaan, doa sesungguhnya mempunyai peran yang cukup vital dan mencerahkan bagi kelangsungan hidup setiap umat beragama. Tanpa doa, sosio-kehidupan umat beragama seperti hampa, kering, dan tidak gurih. Karena dalam doa, tidak ada lagi hal-hal yang friktif, destruktif dan diskriminatif.

Filosofi doa adalah komunikasi ketulusan tingkat tinggi antara individu hamba dengan Tuhannya. Dalam gaya bahasa Annemarie Schimmel, doa itu merupakan *munajat* atau pembicaraan akrab dan hangat antara manusia dengan Tuhan. Doa, masih kata Schimmel, adalah alat bertukar kata cinta yang akan menghibur hati setiap hamba, terlebih bagi mereka yang berduka meskipun tidak langsung dijawab oleh Tuhan seketika itu juga. Sebab dari dan untuk doa, ekspresi spiritual setiap hamba akan bertumbuh dengan lembut dan menakjubkan. Atau, seperti kata Paus Yohanes Paulus II, dari dan untuk doa setiap diri beriman akan mampu mengenali Tuhan secara benar dan personal.

Di sisi lain, doa sesungguhnya adalah luapan bahasa kerinduan seorang hamba terhadap kebesaran kuasa Tuhan. Sedangkan kerinduan,

kata Kuntowijoyo, merupakan suplemen untuk menambah tenaga ekstra dalam memahami eksistensi setiap diri hamba di hadapan Tuhan. Melalui doa masing-masing hamba akan hanyut dalam kesadaran berkualitas bahwa mereka benar-benar lemah dan tidak punya daya selain karena campur tangan Tuhan. Sehingga tidak berlebihan ketika para sufi menegaskan kalau doa dalam arti permohonan adalah hak khusus setiap manusia beragama.

Manakala manusia beragama abai terhadap doa, masih meminjam ulasan Kuntowijoyo, mereka akan sering lepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam interaksi sosialnya. Mereka bisa mudah tergelincir dan mengalami krisis spiritualitas di hadapan bangunan kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas (umat) beragama. Atau dalam pengertian yang sedikit keras, ketika manusia beragama mengabaikan doa pada ranah maknanya yang luhur, mereka bukan saja akan kehilangan kehangatan dan kemesraan dengan Tuhan, melainkan secara spiritualitas akan berantakan. Sebab doa itu iman dan iman adalah kebenaran, demikian petuah Kuntowijoyo melalui sajaknya.

Dalam pandangan Ali Syariati, doa itu dikategorikan sebagai teks pelajaran filsafat (ke)hidup(an). Sebab, lanjut Syariati, pada situasi tertentu doa adalah sarana untuk membela hakikat dan pertanda bahwa kita melakukan tanggungjawab menjalankan perintah jihad dan bertahan serta menyelamatkan diri. Maka sangat tampak bahwa doa memang bukan semata untaian kata-kata indah, melainkan wujud nyata dari proses eksistensialitas kita sebagai khalifahNya di muka bumi. Inilah filosofi doa yang jarang diinternalisasi oleh sebagian umat beragama.

Pentas doa yang mengiringi peresmian Seminari Menengah Maria John Boen kemarin memang memiliki banyak arti. *Pertama*, bahwa setiap manusia meskipun berbeda agama ternyata bisa damai dalam doa. Sebab semua agama mengajarkan akan kepasrahan kepada Tuhannya secara total. *Kedua*, sebagai jembatan toleransi yang cukup produktif dan humanistik untuk terus melangsungkan kebersamaan dalam berbangsa. Karena doa adalah simbol harmoni relasi antara Tuhan dengan manusia sekaligus antara manusia dengan sesamanya. Sedangkan di hadapan Tuhan, membajak istilah Jeihan Sukmantoro, manusia hanya bisa *mengimani* dan *mengamini*. ***

17

Naluri Agama

Agama diturunkan Allah kepada manusia tentu saja untuk kebajikan yang luas dan menyejukkan. Tanpa agama, kelangsungan hidup manusia tidak akan (pernah) menemukan keteduhan. Tanpa agama, setiap diri yang bernama manusia akan kesulitan memahami siklus eksistensialitasnya.

Sedemikian pentingnya sebuah agama bagi manusia, Raja Ali Haji, penyair (sufistik) yang masyhur dari Melayu sempat mengurai indah dalam sajaknya, "barang siapa tiada memegang agama/sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama." Dalam bahasa lain, siapa saja dari manusia yang tidak beragama, tak pantas rasanya menjadi seorang hamba di muka bumi.

Will Durant, seorang ahli agama dari Barat, berbisik lebih lugas. Agama, kata Durant, memiliki potensi seratus jiwa. Ia menggugah dan menakjubkan. Dan sesuatu, lanjut Durant, jika telah dibunuh pada kali pertama, ia pun sudah mati untuk selama-lamanya. Sedangkan agama, sekiranya seratus kali dibunuh, ia akan muncul, bangkit lagi, dan kembali hidup setelah itu."

Dasar harapan

Diakui atau tidak, pada dimensi yang sangat luhur, agama sebetulnya merupakan dasar sebuah harapan (*hope*) bagi setiap manusia di muka bumi. Dari dan dengan agama, manusia akan mengalami kematangan mengarungi kehidupan berbasis kebajikan. Dan bersama agama pula manusia akan terus menemukan ruang kreasi sosialnya yang mendamaikan.

Sekiranya agama dijadikan salah satu alasan untuk melahirkan tingkah hidup yang berada di luar kebajikan, seperti gerakan teroris(me) yang marak akhir-akhir ini, maka menyudutkan agama amatlah keliru. Ini tidak etis dan mengabaikan naluri agama yang berkomitmen tinggi atas nilai-nilai ilahiah sekaligus loyal terhadap realitas insaniyah.

Allah Swt. dengan gamblang menyatakan bahwa setiap manusia yang beriman (baca : beragama), ia harus mengibarkan perilaku kebajikan di setiap ruang dan waktu. "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" (QS. Al Hajj : 77).

Kemenangan identik dengan kebajikan. Sebaliknya, kekalahan sering kali muncul dari perbuatan buruk. Dan seandainya manusia beragama hendak menjadi pemenang, ia tidak bisa memaksakan perilaku yang kurang elok di mata publik. Allah sendiri telah menyatakan bahwa kebajikan pasti mengalahkan keburukan (*innal hasanata yudzhibna al sayyiat*).

Cita-cita ingin mengalahkan kaum kafir atau mereka yang berada di luar jalur Islam, seperti yang didengungkan sebagian kelompok teroris belakangan ini, satu sisi tampak luhur, terlebih kalau dikemas dengan istilah "jihad." Akan tetapi, manakala cara kerja yang ditempuh juga tidak dalam koridor Islam yang berbasis rahmatan lil 'alamin, tentu mudah menuai kekalahan. Itu fakta.

Islam rahmatan lil 'alamin sejatinya merupakan penyatuan dari tiga unsur sangat vital dalam agama; *iman, Islam, dan ihsan.* Tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan antara satu dari yang lain. Dan kalau ada yang memisahkannya, berarti ia telah ikut melahirkan kepincangan dalam beragama. Sebab unsur-unsur dimaksud bersifat hirarkis.

Manusia tidak cukup hanya dengan beriman dan berislam. Ini baru tahapan awal persentuhan dengan Tuhan dan agama. Berikutnya, manusia harus menegakkan kebajikan (*ihsan*), yang menjadi pondasi, modal dan model dalam transformasi spiritualitas agama secara praktis. Itulah yang diteladankan Nabi Muhammad Saw. sedari awal peradaban Islam.

Meniru istilah Musa Asy'ari (1995), tanpa spiritualitas, agama tidak akan berkembang dengan sempurna. Dengan spiritualitas, manusia beragama akan mudah memahami dan memaknai dimensi-dimensi ilahiah. Bahkan melalui konstruksi spiritualitas keagamaan yang baik, setiap umat beragama semakin rendah hati, mempunyai kepekaan dan kepedulian tinggi terhadap kesalihan sosial.

Seruan Islam

Sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw., seruan Islam adalah (ke)damai(an) dan (ke)rukun(an). Sebab agama itu nasihat, kata Rasulullah. Dan Allah, tegas Rasulullah, tidak mengutusku kecuali untuk rahmat belas-kasih bagi semesta alam (QS. Al Anbiya : 107).

Apa yang diperlihatkan Nabi Muhammad Saw., sejatinya telah dicanangkan dalam Alquran, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (QS. Al Hujurat : 13).

Untuk saling mengenal dengan baik, manusia membutuhkan kearifan. Dari kearifan manusia akan menemukan kedamaian. Bahkan menurut Sang Buddha, agar manusia bisa damai dan rukun dengan sesama, ia harus memulai dulu damai dan rukun dengan pribadinya. Dalam istilah Islam, mungkin inilah yang dimaksud dengan *ibda' binafsika*.

Moh. Iqbal mengatakan bahwa ujian yang paling nyata pada suatu pribadi adalah, apakah ia sanggup memberi tanggapan kepada panggilan pribadi yang lain atau tidak. Sedangkan penghargaan terhadap pribadi manusia, meminjam istilah Paus Yohanes Paulus II, merupakan awal dari terciptanya persaudaraan sejati dalam kemanusiaan. Sebab universalitas, kerahiman, pengampunan, keadilan, belas kasih berbasis nilai-nilai luhur religiusitas, senantiasa menuntut

kematangan pikir kedewasaan pribadi.

Paus pun sempat mensinyalir kalau ancaman yang gawat terhadap perdamaian sesungguhnya senantiasa datang dari sikap yang tidak toleran. Yakni, menyatakan diri dalam sikap menolak kebebasan nurani pada orang lain. Intoleransi, terutama dalam perspektif ayat di atas, tentu kurang tepat dijadikan rujukan eksistensial dalam sosio-agama dan kemanusiaan.

Intoleransi bukan saja akan menghambat perdamaian dan kerukunan antara sesama manusia. Jauh di balik itu, intoleransi sebetulnya mencederai fitrah kekhalifahan kita di muka bumi. Intoleransi itu parsialistik. Intoleransi itu diskriminatif dan destruktif. Intoleransi sebetulnya mengabaikan paradigma bahwa semua makhluk, termasuk manusia, hanya merupakan alternatif dari kebenaran Allah.

Agar nurani agama mampu mendamaikan umat manusia, ia tidak harus ditampilkan sebagai perangkat doktrinatif-normatif dari Tuhan semata. Lebih dari itu, ia mesti dicitrakan sebagai tatanan religiusitas yang puitik. Sebab dengan kontruksi religiusitas yang puitik, agama akan sangat artikulatif.

Dengan konstruksi religiusitas yang puitik, agama tidak semata-mata akan mengurai Tuhan yang Agung dan Perkasa yang dikuatkan melalui norma-norma formalistik. Lebih maju dari itu, masih kata Moh. Iqbal, agama akan mencitrakan Tuhan sebagai Keindahan Abadi. Yakni, sumber, essensi, dan potret ideal dari segala sesuatu yang mendamaikan dan menggetarkan. ***

18

Menuju Jalan Tuhan

"Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun" (Qs. 5:124).

Sedikitnya ada tiga hal yang layak dicermati dalam rangka membumikan toleransi dan kedamaian hidup berbasis religiusitas. *Pertama*, bahwa *su'u al dhan* atau *negative thinking* dalam konteks beragama bukan hal yang menggembirakan baik bagi yang menjadi obyek maupun subyek. *Kedua*, kebencian terhadap sesama yang dibalut dengan pemahaman keagamaan parsialistik-tendensius bukan jalan terbaik menata kehidupan berbangsa dan bernegara di pentas global. *Ketiga*, nilai-nilai luhur agama tidak boleh hanya dimonopoli suatu umat atau komunitas tertentu, melainkan mesti ditransformasikan juga kepada semua makhluk Tuhan lain di muka bumi.

Pasca runtuhnya menara World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001 lalu, agama, terutama Islam, mulai diidentikkan

dengan komunitas religius yang mengedepankan teror, kekerasan, permusuhan, friksi, kebencian, dendam, dan mungkin juga "barbarisme." Bahkan Islam pun seringkali dicitrakan sebagai agama dari Timur yang tidak henti-hentinya (akan) memusuhi Barat dengan pelbagai peradaban yang dimiliki. Dan Amerika yang merupakan (di) simbol(kan) kekuatan Barat setelah runtuhnya Uni Soviet, dianggap oleh sebagian kalangan Islam garis keras sebagai musuh utama yang harus diperangi dan dibasmi.

Salah satu akibatnya, diskursus keagamaan pada level dunia semakin "memanas" dan saling melancarkan spekulasi maupun propaganda yang kadang justru mendistorsi nilai-nilai luhur yang melekat dalam agama. Ditambah lagi dengan konflik Israel-Palestina yang hingga kini tak kunjung berada dalam jalur keharmonisan. Bahkan realitas sentimentil dari Amerika terhadap Iran atau perlawanan Iran kepada Amerika, pada sisi tertentu telah ikut "mengipasi" bara gerakan-gerakan berbasis keagamaan. Ini sungguh merupakan realitas sosial keagamaan yang harus kita perah dengan penuh kearifan spiritualitas, bukan dengan kecurigaan berbasis emosionalitas semata.

Esensi Ilahiah

Karakter asli agama bukan pencipta diskriminasi, kekerasan, kebencian, kesombongan, kecongkakan, konflik, permusuhan, apalagi terorisme dan pertumpahan darah. Bahwa dalam lintasan sejarah (pernah) ada bentrok berdarah atas nama agama, hal itu merupakan '*ibrah* paling berharga bagi kita dalam menyongsong kebersamaan secara utuh sebagai khalifahNya di masa yang akan datang. Sebab agama adalah pendamping setiap manusia untuk menemukan kreatifitas dan pencerahan sosial kehidupannya pada level makro. Atau, meminjam istilah Rasulullah, agama itu merupakan "nasihat," yakni pemandu kehidupan manusia yang berbasiskan cahaya dan rahmat ilahiah.

Asghar Ali Engineer, pemikir yang dikategorikan sebagai bagian dari penggagas "Teologi Pembebasan" pernah mengurai bahwa hukum dan cara hidup bisa berbeda-beda dalam suatu masyarakat beragama. Agama tanah Arab dengan Agama bumi

Indonesia, misalnya, tentu memiliki hukum dan cara yang tidak sepenuhnya sama, terutama dalam konteks sosio-religiusitasnya. Namun demikian, lanjut Asghar, yang dimaksud "*din*," yakni esensi ilahiah, kebenaran ilahiah, keindahan ilahiah, dan kebajikan ilahiah dalam agama itu senantiasa sama. Dan esensi ilahiah ini bukan hal yang harus dipertentangkan apalagi sampai dijadikan alasan untuk melegalkan kebencian, permusuhan maupun pertumpahan darah.

Ensensi ilahiah ini, masih kata Asghar, terefleksikan dalam semua agama, dalam berbagai tradisi spiritualitas. Maka manusia itu tidak mempunyai hak untuk menolak pihak lain sebagai yang tidak legitimit atau palsu. Intinya, tegas Asghar, yang menolak keberagamaan pihak lain itu bukan kepalsuan tradisi iman orang lain, melainkan ego kemanusiaan kita sendiri. Dan kalau ego kemanusiaan yang dikedepankan terus menerus, sampai bumi dan langit ini hendak runtuh pun tidak akan pernah terwujud kerukunan dan kenyamanan dalam menatap dan menjalankan praktik keagamaan, baik dalam wilayah individual maupun menyangkut kepentingan komunal.

Agama sejatinya tidak menginginkan sedikit pun pertengkaran, permusuhan, dan keburukan terjadi pada setiap manusia. Cita-cita agama justru untuk mengangkat harkat, martabat, dan menyelamatkan kehidupan manusia tanpa pandang bulu dan baju. Isi agama adalah kebajikan, cinta, dan penjernihan batin masing-masing umat yang menganutnya. Maka tak ada Tuhan pemilik agama yang gila dan memerintahkan setiap umatnya untuk menghisap darah sesamanya. Tidak ada juga Tuhan bejat yang menginginkan umat manusia berada dalam pertikaian yang dapat menghilangkan nyawa mereka. Sebab esensi ilahiah atau ketuhanan itu adalah "penghidupan" yang menyuburkan kasih tiada henti dan bukan "pematian" yang membinasakan kasih dengan kebinalannya.

Atau, meniru ajaran Budha, kita tidak boleh menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Dan agama orang lain pun hendaknya dihormat atas dasar-dasar tertentu. Langkah ini merupakan paradigma terbaik untuk ikut mengembangkan agama kita sekaligus juga memberikan respon positif terhadap agama orang lain. Dari sini akan lahir loyalitas persaudaraan berbasis religiusitas dan humanitas. Sebab, meminjam bahasa Paus Fransiskus, "kita semua

adalah anak-anak Bapa Surgawi, kita berasal dari keluarga manusia yang sama dan berbagi nasib yang sama." Bahkan, lanjut Paus, kesadaran ini akan membuat kita bertanggungjawab dan menjadi komunitas persaudaraan yang saling menghargai, menerima perbedaan dan saling menjaga antar satu dengan yang lain di sepanjang jalan Tuhan.

Jalan Tuhan

Ayatullah Mahmud Taleghani menyatakan bahwa "jalan Tuhan adalah jalan yang mengarah pada kebaikan bagi seluruh manusia, jalan keadilan, jalan kemerdekaan manusia agar tak satu kelompok pun menjadi dominan…" Dan diantara cara-cara mencapai jalan Tuhan adalah melaksanakan amal salih *(al amal al shalih)*. Dalam Alquran Allah telah menegaskan bahwa *"barang siapa yang berharap ingin menjumpaiNya hendaklah ia melakukan amal salih"* (QS. Al Kahfi: 110). Amal salih, merupakan tiket kehambaan yang bisa dibeli dan dimiliki oleh siapa saja, dari manusia sederhana sampai yang terbilang "istimewa."

Allah SWT telah berjanji kepada setiap hambaNya yang mengerjakan amal salih untuk tidak akan menganiayanya sedikit pun. *"Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun."* (QS. 5:124). Semangat ayat ini seakan menjadi bagian dari standarisasi bahwa orang-orang beriman pun tetap diukur dari kualitas amal salihnya. Sebagaimana firman Allah, *"Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami"* (QS. Alkahfi: 88).

Di sisi lain, amal salih senantiasa berkait dengan keberadaan iman setiap umat. Bahkan, menurut sebagian kalangan, amal salih yang tidak didasari oleh keimanan, dianggap tidak ada manfaatnya di hadapan Allah SWT. Sebab iman dan amal salih adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Keduanya seiring sekelindan. Ibarat lampu dan cahaya yang dipancarkan. Melerai keduanya dengan cara dan pemaknaan yang sempit tentu saja akan menapikan nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Iman adalah wujud

kebaktian sebagai hamba kepada Allah SWT, amal salih merupakan aktualisasi bahwa kita juga bagian dari sesama manusia.

Alquran menegaskan secara berulang-ulang bahwa keberimanan tidak bisa dipisahkan dengan amal salih. Setiap ayat yang menyangkut seruan, berita gembira dan perintah kepada orang-orang yang beriman selalu disandingkan dengan penegasan menegakkan amal salih. *"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal salih, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu".* (QS. Al Baqarah:25), *"Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amala salih, kelak akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?* (QS. Al Nisa:124).

Sebuah hadis juga menengarai bahwa Allah itu tidak akan pernah melihat terhadap tubuh kita, wajah kita, dan harta kita. Akan Tetapi Allah hanya akan melihat keberadaan *hati* dan *amal salih* kita dalam seluruh gerak kehidupan. Hati dan amal salih merupakan lampu-lampu di jalan Tuhan. Dan untuk menyusuri jalan Tuhan dengan nyaman, seyogiyanya kita terus meningkatkan kualitas amal salih sekaligus komitmen berkeadilan dalam keumatan secara makro. Sebab jalan Tuhan itu jalan pencerahan dan kedamaian. Jalan Tuhan adalah tapakan kejujuran dan keikhlasan menebarkan kasih sayang, bukan menaburkan kebencian dan memperkuat kebakhilan. ***

19

Esensi Religiusitas

John D. Caputo pernah berujar bahwa kebenaran religius dalam agama adalah suatu kebenaran tanpa pengetahuan. Yakni, sebuah realisasi optimal dari perbuatan yang diarahkan pada pengakuan dan pengabdian terhadap sesuatu yang adikodrati dan sakral, bukan semata konstruksi pemikiran yang sedemikian berjauhan dengan perilaku keseharian umat manusia.

James Martineau dan Friedrich Schleiermacher, seperti dikutif Jalaluddin Rahmat, pernah menyatakan bahwa pada dasrnya religiusitas (agama) tidak dapat dilacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral. Sebab religiusitas (agama) tegas James M, dan Friedrich S, sejatinya berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga.

Oleh karena itu, esensi religiusitas adalah aktualisasi dari spirit dan nilai – nilai luhur ilahiah yang senantiasa mencerminkan apa yang disarankan dan dipahami oleh setiap penganut agama. Kesadaran dan kebenaran religius tidak hanya dapat dibariskan dalam kerangka teoritik, namun harus diejawantahkan melalui kearifan laku sosial

yang unik dan mencerahkan.

Tiga Unsur

Sebagai agama yang sangat Qurani, meniru alur fikir Fazlur Rahman, salah satu faktor kejayaan Islam terletakpada kejeliaannya mengombinasikan antara semnagat jihad dan misi-misi luhur sufisme. Dan dalam sufisme, wujud dari prilaku keagamaan lebih diunggulkan lebih dari pada diskursus religiusitasnya.

Tak berlebihan bila mana Al Ghazali menegaskan bahwa keislaman yang utuh senantias dicerminkan dari tiga unsur yaitu, al ilmu (pengetahuan), al hal (pembawaan), dan al amal (perbuatan). Perbuatan keagamaan tanpa ilmu, dalam perpektif Al Ghozali, hanya akan menghasilakn rutinitas (ritual) yang tak menemukan arah dengan baik. Sebab ilmu, seperti disinyalir Socrates, sejatinya merupakan wujud dari kebajikan itu sendiri.

Nabi Muhammad Saw, melalui sabdanya telah menegaskan bahwa barang siapa yang menginginkan dunia hendaklahdengan ilmu. Barang siapa yang mendambakan akhirat, hendaklah juga dengan ilmu. Bahkan, barangsiapa yang mencita-citakan keduanya, tetap harus dengan ilmu. Karena ilmu, sebagaimana dirilis imam Ali adalah cahaya yang mampu menjaga manusia dalam eksistensi sosialnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketiaka Al Ghozali mengatakan bahwa perbuatan keagamaan yang dijauhkan dari nilai-nilai keilmuan akan menghasilkan ritualitas yang kurang maksimal, kebenarannya memang tak bisa diabaikan. Prilaku sosial yang melekat pada Front Pembela Islam (FPI) seperti yang terjadi di departemen dalam negeri kemarin, dalah realitas yang betul-betul keluar dari kedalaman religiusitas keislaman. Padahal melalui sebuah dialog singkat dengan salah satu sahabatnya, Rasulullah telah memberikan dasar yang kuat terhadap hakikat keagamaan itu sendiri. "Ya Rasulallah, apakah agama itu? Rasul menjawab "Akhlak yang baik". Sahabat itu berulangkali mengajukan pertanyaan yang sama sehingga Rasul mengatakan "belum jugakah engkau mengerti?" Agama itu akhlak yang baik. Sebagai misal, janganlah engkau marah". (Altarghibwa Al Tarhib 3: 405).

Islam Agama Cinta

Dari dialog Nabi Muhammad Saw diatas, cukup mudah dipahami bahwa islam memang tidak mengajarkan anarkisme. Islam merupakan agama yang berbasis budi pekerti terbaik. Berbagai hal yang ada dalam islam sejatinya merupakan cerminan dari keluhuran akhlak Rasulullah itu sendiri. Sehingga dalam alquran terdapat sebuah ayat "*wa innaka la ala khuluqin adhim*".

Meminjam istilah Caputo, Islam Itu Agama Cinta. Ia selalu menebarkan kasih sayang pada setiap makhluk dan pemeluknya. Karena itu islam menjadi agama rahmat bagi alam semesta. Sedangkan rahmat adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejukan, kenyamanan, keindahan, keadilan dan sejenisnya.

Islam juga agama pengasih. Tuhannya memiliki sifat Arrahman dan Arrahim. Maka umat islam sendiri senantiasa dituntut untuk menebarkan nilai-nilai dan komitmen kasih bagi sesama makhluk yang ada. Sampai kepada hewan pun, islam telah menekankan perlunya *al syafaqatu ala al hayawan* (kasih sayang terhadap hewan-hewan). Kedalaman *syafaqah* semacam itu juga terlihat jelas dalam tradisi kaum Buddhis.

Kata lain dari agama kasih bagi islam adalah agama yang senantiasa memperjuangkan dan memberikan penyelesaian sosial-kehidupan antara sesama dengan kedamaian. Kalau saja ada pertikaian sosial keagamaan diantara sesama muslim, seperti dalam bahasa alquran, selayaknya, segera didamaikan dengan cara-cara yang menyejukkan dan menyehatkan bukan dengan pengrusakan atau perilaku penuh kekerasan.

Salah satu ajaran agama pengasih ini, ialah menjamin dan merawat tali silaturahim. Siapa saja yang memutuskan dan merusak tali silaturahim itu tidak diakui sebagai umat islam oleh RasulNya. Bahkan ancamannya adalah neraka, dunia yang penuh penderitaan dan kenistaan. Sedangkan ancaman meminjam bahasa Gusmus, sapaan akrab KH. Mustofa Bisri, adalah janji yang lebih baik bila tidak ditepati. Ringan tapi berat.

Kemelut bangsa ini seperti pertikaian antar elite partai, pejabat (birokrat), hingga kecurigaan berlebih diantara umat beragama, sejatinya membutuhkan silaturahim akbar seperti ditanah suci pada

bulan haji; melenturkan segala ego dan status, melepaskan nafsu-nafsu yang sarat akan kepentingan, lalu duduk bersama demi totalitas kepasrahan pengabdian kepada sang khalik.

Memperluas tali kasih sama artinya dengan memperkokoh bahasa dan nilai kecintaan terhadap semua manusia dan makhluk tuhan lainnya. Sedangkan bahasa cinta, meminjam istilah Javad Nur Bakhsh, ia berada diluar segenap kata dan makna. Ia teramat universal jernih dan suci.

Namun demikian, bahasa cinta dalam konteks keagamaan, sesungguhnya merupakan semangat religiusitas (spiritualitas) yang sedari dulu telah di transformasikan Rasulullah SAW. Siapa peduli meracik dengan maksimal, pastilah menjadi manusia sejati sepanjang sejarah. ***

20

Religiusitas Polisi

Polisi, sebagai simbol kekuatan negara, belakangan ini citranya memang mulai teracak-acak. Bukan saja lantaran tak sedikit petinggi polisi terlibat kasus-kasus krusial di bangsa ini, melainkan karena sebagian masyarakat masih memahami bahwa (ke)polisi(an) hanya asyik dengan dunianya sendiri. Tindakan-tindakannya dalam penegakan hukum, terkadang masih diartikan jauh dari harapan mendasar (*ideal hope)* masyarakat.

Di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang belum sepenuhnya paham tugas dan peran strategis polisi dalam sosio-kebangsaan. Padahal, meniru filosofi Brigjend M. Rum Murkal ketika masih menjabat sebagai Kapolda Babel, "menjadi polisi itu senantiasa berada dalam posisi yang dilematis. Satu kakinya berdiri di kuburan dan kaki satu lagi tertancap di neraka. Dilematis sekaligus sangat kritis."

Tergambar betapa berat tugas dan peran sosial yang diamanahkan kepada polisi. Satu sisi mereka diposisikan sebagai penata ketertiban sosial dengan berbagai risikonya, namun di ranah

yang lain tak jarang menjadi kambinghitam manakala friksi dan konflik di tengah masyarakat mencuat. Padahal sumber perpecahan sosial masyarakat tidak pernah berasal dari (ke)polisi(an), baik secara individu maupun kelembagaan.

Polisi juga Manusia

Apapun keadaan dan pangkatnya, polisi juga manusia. Mereka berbeda dengan malaikat atau nabi. Mereka bukan makhluk berkekuatan canggih yang tidak bisa disentuh oleh nalar kita. Mereka juga bukan pribadi-pribadi yang tanpa salah. Dan sebagai manusia, mereka masih bisa lekat dengan kealfaan dan kesalahan *(al insan mahallul khata' wa al nisyan)*.

Kurang elok kalau kita melihat dan memaknai polisi semata dari aspek-aspek kekurangannya selaku manusia yang diberi tugas berbeda dari masyarakat yang lain. Sebab amanah dan tugas yang diemban polisi tidak bisa dianggap mudah. Terlebih lagi, tanjakan dinamika sosial di tengah masyarakat, disamping variatif juga memiliki logikanya sendiri. Tidak semuanya "senyawa" dengan visi dan misi taktik-strategis (ke)polisi(an).

"Peran polisi bukan untuk menghapuskan masalah. Polisi bukan Tuhan. Polisi adalah manusia biasa, yang memiliki keterbatasan dalam berbagai aspeknya. Polisi itu hadir untuk menjadi mitra masyarakat dalam meminimalisir problematika sosial, baik dari segi kriminalitas maupun penegakan hukum dalam skala makro," ujar seorang teman yang kebetulan jadi polisi di wilayah Madura.

Ungkapan di atas tentu rasional. Juga realistik. Tuhan saja, seperti yang kita saksikan, tidak sepenuhnya menghapuskan problematika sosial yang dihadapi oleh umatNya. Ahli ibadah, yang katanya dijamin berada dalam lindungan KasihNya, tidak sedikit yang masih bergumul dalam kenestapaan, terutama secara ekonomi. Ini nyata. Bukan sekadar tanyangan seniteron.

Bahkan, sebagian umat yang tergolong taat dan ahli ibadah kepadaNya, yang sampai saat ini terus memanjatkan doa agar nasibnya diubah ke arah yang lebih baik, masih jauh panggang dari api. Dan bahwa Tuhan adalah Maha Mampu, tidak ada umat beriman yang mengingkari. Akan tetapi, terlepas dari hak peroregatif dan

pertimbangan Tuhan, permasalahan kemiskinan yang dihadapi sebagian hambaNya hingga kini belum sepenuhnya diberikan jalan keluar.

Padahal kemiskinan, bukan saja cenderung membuat masyarakat galau, terlemahkan secara sosial, atau mengalami kejatuhan moralitas. Lebih jauh dari itu, menurut tradisi Islam, kemiskinan terkadang dapat mendorong umat beralih pada kekafiran dengan berbagai volumenya *(kaadal faqru ayyakuna kufran)*.

Maka kurang etis kalau terus menekan polisi untuk dapat menuntaskan segala permasalahan sosial kemasyarakatan dengan seutuhnya. Polisi itu manusia, memiliki keterbatasan dan kelemahan. Tuhan saja yang Mahakuat dan Perkasa, faktanya masih mempunyai banyak celah di mata hambaNya yang terus meminta.

Kesadaran Religi

Sebagai manusia, polisi tentu saja memiliki potensi dan kesadaran religi. Apalagi polisi yang lahir dan tumbuh di kalangan keluarga penganut salah satu keimanan. Ini adalah modal sosial yang mesti dipahami oleh masyarakat pada umumnya, meskipun belum diolah optimal oleh pihak kepolisian.

Kesadaran religi, termasuk yang dimiliki polisi, awalnya berada dalam wilayah individualitas atau privat. Itu fitrah. Namun nilai-nilai yang terkandung dalam kesadaran religi itu, sejatinya berkait pula dengan kesinambungan aktifitas kehidupan di luar dirinya. Maka segala tindakan sosial yang diambil polisi, tentu sedikit banyak didampingi oleh spirit religi yang dimilikinya.

Ukurannya sederhana, tidak sedikit polisi yang usai melaksanakan tugas, baik di kantor atau di pos-pos tertentu, mereka langsung menunaikan salat, (masih) ikut puasa di Bulan Ramadan, atau sekadar berbagi senyum dengan sesamanya. Bagi polisi yang beragama non-Islam, masih banyak diantara mereka yang setiap minggu "mengoreksi diri" di hadapan Tuhan sebagaimana ibadat di gereja, vihara, dan lain-lain.

Kesadaran religi pada level yang lebih tinggi, sebenarnya adalah wujud dari moralitas keagamaan seseorang. Melalui kesadaran religi ini, setiap pribadi, tak terkecuali seorang polisi dituntut untuk

senantiasa meng-*up grade* dan mendesain struktur spiritualitasnya. Mereka bukan saja mengaudit capaian sosio-materialnya dalam kehidupan sehari-hari, melainkan harus menata konsistensi sosio-keimanannya dalam bermasyarakat.

Secara kelembagaan, pihak kepolisian sejatinya terus melakukan pendampingan terhadap pertumbuhan religiusitas yang dimiliki anggotanya. Yakni dengan mengoptimalkan program pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) yang diikuti oleh seluruh anggotanya. Program ini tepatnya menjadi kewenangan dari Bagian Binjah Ro Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.

Cukup jelas bahwa polisi tidak kering dalam konteks religiusitas dan moralitas keagamaan. Dan sekiranya masih ada individu polisi yang kurang mumpuni mentransformasikan nilai-nilai religiusitas dalam tindakan sosialnya sehari-hari, hal itu patut dimaklumi. Sebab pertama, tidak semua pribadi umat beriman, seperti anggota polisi, memiliki potensi spiritualitas yang sama. Itu sunnatullah.

Kedua, meskipun ada anggota polisi yang mempunyai potensi sama dalam konteks spiritualitas keagamaan, belum tentu pengembangannya dilakukan dengan cara dan dalam ruang yang sama pula. Ada diantara anggota polisi yang lulus dari pondok pesantren dengan baik, ada juga yang belum sempat "mampir" ke pondok pesantren meski "sejenak."

Namun demikian, polisi tetap aset negeri yang wajib kita akrabi. Dan sebagai harapan, semoga kelak ada polisi yang plus santri atau kiai. Atau sebaliknya, santri atau kiai yang plus polisi. Sehingga kaki polisi tidak di kuburan dan di neraka lagi. Amin…… ***

21

Agama (Dalam) KTP

Polemik pengosongan identitas keagamaan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sungguh layak dicermati. Bukan semata berkait dengan cara tafsir beragama, melainkan bagaimana artikulasi sosial (ke)beragama(an) itu diwujudkan dalam perilaku keseharian. Karena agama bukan sebatas identitas atau bentuk doktrinasi dan ritualitas (seremonial), akan tetapi juga menyangkut kesadaran sekaligus aplikasi sosial berkemanusiaan di hadapan sesama makhluk Tuhan.

Penyikapan publik terhadap wacana Mendagri yang cukup beragam dan tajam ini, semakin menunjukkan bahwa keberadaan agama di pentas sosial kebangsaan memang selalu menjadi isu yang paling menggelitik sekaligus sensitif. Maka kehati-hatian, kematangan, pendalaman dan kearifan menempatkan wacana itu merupakan keniscayaan tersendiri. Kita perlu mengiris dan memaknainya dengan penuh keterbukaan dan pikiran positif (*khusnuddzan*), bukan dengan muatan antipati dan kecurigaan (*su'uddzan*) yang berlebihan. Sehingga

tidak terjadi pembiasan beragama dalam berkebangsaan.

Tjahjo adalah bagian kecil dari bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan jabatan atau kuasa yang ia pegang saat ini memang terlihat punya aura. Terlepas dari siapa dan bagaimana latar sosial religi Tjahjo sebelumnya, tugas kita tetap harus sejalan dengan semangat Alquran, yakni saling mengingatkan menyangkut penegakan kebenaran dan aktualisasi kesabaran. *Tawasau bi al-haqqi wa tawasau bi al-shabri.* Dan rasanya kurang elok kalau kita gegabah memonis seakan Tjahjo memiliki rencana untuk menjauhkan agama dari kesadaran dan etika sosial kebangsaan.

Agama itu Fitrah

Tak kurang dari Will Durant menegaskan bahwa ketika agama dibunuh satu kali, maka ia akan muncul dan hidup lebih variatif. Beginilah urain Durant selengkapnya; "Agama memiliki seratus jiwa. Segala sesuatu jika telah dibunuh pada kali pertama itu pun ia sudah mati untuk selama-lamanya, kecuali agama. Sekiranya ia seratus kali dibunuh, ia akan muncul lagi dan kembali hidup setelah itu." Durant tidak sedang main-main. Ia menyodorkan fakta-fakta sosial keagamaan yang terus menggelembung seturut masa-masa yang silam.

Agama tidak bisa disingkirkan atau dimusnahkan dengan mudah oleh siapa pun dan dari kelas sosial manapun. Agama bukan semata kumpulan doktrinasi atau mekanisme ritualitas, melainkan sumber nilai-nilai kebajikan yang sejatinya sangat diperlukan dalam kelangsungan setiap manusia di muka bumi. Sebab agama itu fitrah. Ia telah dengan sengaja diturunkan Allah SWT demi mengawal dinamika (ke)manusia(an) menuju arah hidup yang lebih berkualitas pada aspek moral maupun spiritualitas.

Kefitrahan agama, disadari atau tidak, sesungguhnya telah memengaruhi cara dan tata laku kehidupan kita sebagai makhlukNya. Dari dan untuk kefitrahan agama itu, kualitas pikiran dan bangunan rohaniah kita terus bertumbuh dengan cukup positif. Paling tidak, sebagian besar manusia yang mendekat dan menganut agama, mereka terjauhkan dari paradigma dan perilaku hidup yang kurang terpuji. Mereka senantiasa bergerak dengan kesadaran sosial berbasis nilai-nilai kebajikan ilahi. Mereka pun pelan-pelan belajar memaknai

eksistensialitasnya secara menyeluruh.

Bahwa belakangan terkuak perilaku koruptif, eksploitatif, dan brutalistik dari kalangan beragama, sama sekali tidak bisa dimungkiri. Itu menyata. Dan sedikit mengganggu stabilitas sosial di tengah-tengah kebangsaan kita dengan amat menyedihkan. Namun demikian, kita tetap harus membedakan mana agama sebagai sumber ajaran dengan esensialitas yang dikandungnya, dan mana tarikan hal-hal berbau agama yang dimanipulasi oleh sebagian kecil penganutnya. Agama tidak boleh semena-mena dipersalahkan. Pemaknaan masing-masing penganut agama sendiri yang kerap kali mengeruhkan peran luhur agama dalam berkemanusiaan.

Agama dan KTP tentu soal yang berbeda. Agama adalah sumber nilai berbasis kebajikan ilahiah dan pijakan primer bagi setiap manusia beriman. Sementara KTP hingga saat ini dipahami sebagai simbol (identitas) masing-masing individu rakyat bernegara, terutama dalam perspektif administrasi kependudukan. Manusia tidak beragama, minimal menurut kerangka tradisional, akan tergolong sebagai pribadi yang mengingkari keberadaan Allah dengan segala atribut dan keluasan kuasaNya. Dan itu dapat dihukumi "kafir." Sebaliknya, manusia yang tidak punya KTP, hanya diposisikan individu yang tidak "legal" hidup dalam sebuah negara tapi bukan lantas menjadi "murtad."

Mencampuradukkan

Mencampuradukkan agama dengan KTP secara serampangan, rasanya kurang produktif. Agama mengandung aspek-aspek luhur dan sakral yang setiap saat harus ditelaah, dipahami, dimaknai dan diaktualisasikan oleh penganutnya setulus penuh. KTP berkait dengan keberadaan masing-masing pribadi dalam konteks profanitas, yakni merajut dan melangsungkan sosial kenegaraan. Menempatkan agama dalam posisi dan situasinya secara proporsional, pelan tapi pasti akan dapat mengakomodasi filosofi dan fungsi ideal KTP. Karena Indonesia bukan negara agama, tidak terlalu salah sekiranya KTP juga hanya dimaknai sebagai simbol (identitas) sosial kebangsaan.

Kita mesti mengedepankan kedewasaan dan keterbukaan cara pandang terhadap aspektual KTP yang paling prinsip. Jika KTP semata untuk penegasan identitas sosial setiap masyarakat, pengosongan

kolom agama bukan masalah yang terbilang besar. Selama identitas menyangkut kelahiran, jenis kelamin, tempat tinggal dan ruang pekerjaan masing-masing warga negara tertera di dalamnya, bukankah sudah cukup untuk mengidentifikasi status sosial mereka? Sebab faktanya KTP lebih banyak dipakai untuk hal-hal bersifat sosial, semisal melamar pekerjaan, membeli tiket pesawat, melakukan simpan pinjam di bank, koperasi, dan lain-lain. KTP sama sekali tidak dibawa dan dipakai manakala kita mati dan menghadap Tuhan di alam lain.

Dengan penuh kebesaran jiwa, selaiknya kita mendalami jalan pikiran sosok macam Ibnu Arabi (638 H/1240 M) dan Paul Tillich (1965). Kedua tokoh ini menegaskan bahwa meskipun agama dan ungkapan keagamaan terkait dengan bahasa simbol, namun tetap mempunyai arah dan tekanan yang berbeda. Agama sangat prinsip bagi setiap manusia. Akan tetapi ungkapan keagamaan sejatinya yang akan lebih banyak memberikan fungsi dan warna terhadap keberlangsungan masing-masing pribadi dalam bermasyarakat. Agama yang diletakkan sebagai simbol saja tanpa ungkapan empatik-produktif, sama sekali tidak akan optimal mewujudkan cita-cita luhurnya dalam kesemestaan.

Agama yang dijebak pada konstruks simbolisasi (dalam KTP) semata, seperti istilah kaum santri, ia akan "*mulgha*" atau sia-sia. Ia tidak akan menjadi daya potensial bagi pemompaan dan pengembangan diri setiap penganutnya dalam makna yang universal. Sebaliknya, ia akan mudah ditukar-tempatkan dengan orientasi parsialitsik yang sering kali jauh dari semangat luhur fitratinya. Ia dengan gampang dituliskan pada kolom KTP tapi nilai-nilai dan fitratinya bisa jadi terkikis oleh perilaku pengguna KTP itu sendiri.

Padahal, menirukan uraian Sayyid Hussien Nasr, hal yang paling esensial menyangkut agama dan keagamaan adalah sejauh mana kemampuan kita mengawal kebenaran agama itu sendiri. Melalui perspektif ini diharapkan kita segera mendapatkan dan melahirkan jalan-jalan alternatif yang valid dan mencerahkan secara spiritual. Sehingga setiap pribadi yang menghiasi dirinya dengan nilai-nilai imani bisa optimal bergerak dari dan menuju Tuhan, baik untuk transformasi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan maupun untuk aktualisasi kekhalifahan mereka di hadapan Tuhan. ***

22

Sedulang Rindu

Ada lintingan makna yang dapat dicermati dari maraknya "Lebaran Maulud" di berbagai daerah di Kepulauan Bangka ini. Pertama, masyarakat beragama di Kepulauan Bangka benar-benar telah menjadi *al-ummah*, yakni komunitas besar yang membasiskan struktur sosialnya dari dan untuk loyalitas religius. Daya silaturrahim umat antar kampung melalui peringatan "lebaran maulud" ini bukan isapan jempol belaka, melainkan mewujud sebagai "magnet sosial" yang menakjubkan. Betapa tidak, jalanan di beberapa wilayah Bangka yang biasanya lengang ternyata kemarin tampak padat dengan aneka kendaraan masyarakat yang hendak mengunjungi rumah-rumah sahabat dan keluarga mereka, setidaknya itulah yang terjadi Desa Kreta, Kace, dan Kemuja.

Kedua, tradisi religius yang menyejarah ini merupakan wujud bahwa masyarakat beragama Kepulauan Bangka senantiasa mempersembahkan sedulang rindu kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mencerahkan mereka dalam konteks kehambaan di hadapan Allah SWT. Dan bahwa masih ada beberapa celah yang harus diolah lebih maksimal lagi berdasarkan nilai-nilai religiusitas, ini tidak dapat

dimungkiri. Namun demikian, "lebaran maulud" macam ini sejatinya merupakan "zat pengental" terhadap khazanah kebudayaan dan peradaban sosial religius masyarakat Bangka itu sendiri.

Ketiga, di tengah ancaman krisis kemanusiaan era modern, tradisi "lebaran maulud" dan jenis-jenis yang lain di kalangan masyarakat Bangka, sebetulnya merupakan potensi religius yang patut ditumbuhkembangkan guna ikut andil meluruskan tipologi dan praktik keagamaan yang kian kering, keras, frontal, dan jauh dari keteladanan sosial-religius khas Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Dan sekiranya tradisi ini dikemas lebih massif-kolektif berbasis paradigma produktifitas sosial, kebudayaan dan peradaban beragama masyarakat Bangka akan menjadi cermin bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Atau, dalam istilah pemerintah, tradisi ini bisa menjadi ikon wisata religi khas Kepulauan Bangka dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan.

Lebaran Maulud

Lebaran Maulud adalah lebaran untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw. sebagai pemandu terbaik bagi seluruh umat manusia, terutama dalam konteks kehambaan di hadapan Sang Khalik. Dan sepanjang sejarah sudah diakui bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan disaat hendak berpulang ke pangkuan Allah SWT, yang keluar dari napas beliau hanyalah *ummaty*, *ummaty*, *ummaty*. Tak salah kalau semua umat (Islam), termasuk umat di Kepulauan Bangka kemudian begitu mengidolakan, mendambakan, mencintai dan terus merindukan untuk berdampingan dengan beliau di haribaan Allah SWT kelak.

Nabi Muhammad Saw. pernah menegaskan bahwa diantara umat yang paling beliau cintai adalah umat setelah era sahabatnya. Sebab umat pasca era sahabat itu dianggap oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai umat yang imannya paling menakjubkan. Hal ini tercermin dari uraian beliau saat berdialog dengan para sahabat dalam suatu kesempatan sesudah melaksanakan salat berjamaah. "Wahai manusia, siapakah makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya" tegas Nabi. Para sahabat menjawab, "Malaikat," ya Rasulullah. "Bagaimana mereka tidak beriman, padahal mereka adalah pelaksana perintah Allah," lanjut

Rasul.

"Kalau begitu," kata beberapa sahabat, "para Nabi Allah," ya Rasul. "Bukan juga mereka," seru Rasulullah. "Bagaimana para nabi tidak beriman, padahal wahyu dari langit turun kepada mereka", ungkap Sang Rasul. "Kalau begitu, sahabat-sahabatmu, ya Baginda Rasul," sergah para sahabat. Rasul masih menjawab "Tidak juga mereka. Bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka telah menyaksikan apa yang mereka saksikan, yakni mukjizat yang telah diturunkan kepadaku dan mereka mengalami hidup bersamaku," terang Rasul dengan lugas.

Ditengah keheranan para sahabat, Rasul menjelaskan bahwa umat yang paling menakjubkan imannya adalah umat sesudah era sahabat itu, yakni umat seperti kita sekarang ini. Sebab, kata Rasul, "mereka beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihatku. Mereka membenarkan aku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan (Sunnah) dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan (Sunnah) itu. Bahkan mereka membela aku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ummatku itu."

Bahkan ada suatu riwayat yang menguraikan bahwa Rasul pernah berkata "Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku." Dan Rasul mengucapkan kalimat ini hanya sekali. Sementara ada kalimat lain yang diucapkan Rasul sebanyak tujuh kali, yakni "Berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku." Mungkin inilah yang diasumsikan sebagian kalangan bahwa yang dimaksud adalah umat semacam kita yang hidup pasca era sahabat. Sebab kalau pada masa sahabat itu umat mengimani Rasul dengan landasan bukti empiris, melihat dan menjalani agama bersama Rasul. Sementara umat pasca era sahabat, mengimani Rasul hanya berdasarkan bukti rasional, yang selalu membutuhkan upaya pembelajaran dengan baik dan meyakinkan.

Tahun Salawat

Salah satu bukti keimanan kita kepada Rasulullah adalah memperingati kelahiran beliau sebagaimana juga ditradisikan oleh masyarakat Kepulauan Bangka ini secara turun temurun sekaligus menjalankan sunnahnya dengan maksimal. Dan ukuran keimanan itu secara sederhana adalah dengan membacakan salawat kepada Sang Rasul. Di dalam Alquran sendiri telah dinyatakan bahwa Allah SWT dan

para malaikatnya saja senantiasa bersalawat kepada Nabi Akhir Zaman ini, yakni Nabi Muhammad Saw. Maka tak berlebihan kalau sebagian ahli filsafat dan spiritualis Islam mengatakan bahwa proses penciptaan alam semesta ini sesungguhnya untuk mengiringi kehadiran Sang Rasul ke tengah-tengah kehidupan umat manusia.

Kalau seorang umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw. satu kali, maka di hadapan Nabi Muhammad Saw. dilipatkangandakan menjadi sepuluh kali. Sekiranya seorang umat membaca salawat sebanyak sepuluh kali, di haribaan Nabi Muhammad Saw. langsung dihitung sebanyak seratus kali. Dan kalau ada yang membacakan salawat seratus kali, lipatannya bertambah hingga seribu kali dalam pandangan Rasulullah. Dari sini sangat jelas, bahwa salawat merupakan satu amalan yang berdimensi kebajikan bukan saja bagi Sang Rasul, melainkan juga terhadap siapa saja umat yang melaksanakannya.

Sedulang rindu kepada Sang Rasul yang tiap tahun menghiasi kehidupan religius masyarakat Kepulauan Bangka, meskipun baru disimbolkan dengan upacara "nganggung" dan "lebaran maulud" atau sejenisnya, tentu merupakan modal sosial-religius yang sangat berharga bagi masa depan keumatan di Kepulauan Bangka. Tradisi ini sama sekali tidak mengandung unsur *bid'ah* dalam pengertian yang buruk. Tradisi ini mentransformasikan nilai-nilai kebaikan, terutama dalam konteks penataan jalur silaturrahim antara sesama umat Nabi Muhammad Saw. Dalam kaidah fikih disinyalir *maa ra-ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun*, bahwa apa-apa saja yang dipandang baik oleh kalangan Muslim, maka hal tersebut dipandang baik pula di sisi Allah SWT.

Sebagai bagian dari transformasi kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Saw., alangkah sangat bijak sekiranya tradisi "Lebaran Maulud" ini dijadikan sebagai titik pijak Tahun Salawat bagi masyarakat Kepulauan Bangka. Karena meniru istilah fikih "*al-'adatu al-muhakkamah*," bahwa adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum tersendiri di tengah kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan melalui salawat bukan saja kehidupan rakyat akan semakin berkah, melainkan agar syafaat Rasul semakin melekat, persis sebagaimana dilukiskan Raja Ali Haji dalam Syairnya "*ayuhai nabi kami Muhammad/tuan-hambalah nabi kasihkan umat/syafaatkan kami hari kiamat/daripada huruhara yang amat azmat/*. ***

23

Tali Kasih

Islam itu agama cinta. Ia selalu menebarkan kasih sayang pada setiap makhluk dan pemeluknya. Karena itu ia menjadi agama rahmat bagi semesta. Sedangkan rahmat adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejukan, kenyamanan, keindahan dan sejenisnya.

Islam juga agama pengasih. Tuhannya memiliki sifat *Arrahman* dan *Arrahim*. Oleh karena itu, umat Islam sendiri senantiasa dituntut untuk menebarkan nilai-nilai dan komitmen kasih bagi sesama makhluk yang ada. Sampai kepada hewan pun, Islam telah menekankan *al syafaqatu 'ala al hayawan* (kasih sayang terhadap hewan-hewan).

Sebagai bagian dari tanda kasih, menurut kultur kita adalah saling berpelukan, saling mengunjungi, saling memaafkan (terutama dalam suasana idul fitri), saling menopang dalam hal kebenaran dan kesabaran *(tawasau bi al haq wa tawasau bi al sabr)*, dan saling mendukung dalam kebajikan.

Bahkan, tanda kasih juga dapat diwujudkan dalam kultur saling sapa ketika bertemu kapan dan dimana pun. Seperti diserukan Nabi Muhammad Saw., bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang

lain salah satunya adalah saling menyapa saat berjumpa *(al haqqu al muslimu 'ala al muslimi, idza laqitahu fasallim 'alaihi)*.

Kata lain dari agama kasih bagi Islam adalah agama yang senantiasa memperjuangkan dan memberikan penyelesaian sosial-kehidupan antara sesama dengan kedamaian. Kalau saja ada pertikaian sosial atau keagamaan diantara sesama muslim, seperti dalam bahasa Alquran, selayaknya segera didamaikan (*Fa-aslihu baina akhawaikum*).

Salah satu ajaran agama pengasih ini, ialah menjalin dan merawat tali silaturrahim. Siapa saja yang memutuskan dan merusak tali silaturrahim itu tidak diakui sebagai umat Islam oleh RasulNya. Bahkan, ancamannya adalah neraka, dunia yang penuh penderitaan dan kenistaan. Sedangkan ancaman, meminjam bahasanya Gus Mus – sapaan akrab KH. A. Mustofa Bisri – adalah janji yang lebih baik bila tidak ditepati. Ringan tapi berat.

Silaturrahim adalah tali kasih yang bisa memperindah interaksi sosial antara makhluk yang satu dengan yang lain. Melalui silaturahim, kerjasama dengan sesama menjadi lebih nyaman dan mudah diwujudkan. Adapun menjalin silaturahim itu merupakan langkah produktif mempermudah rizki dan memperpanjang umur (baca: umur bermanfaat). Sebagaimana kata Rasul, sebaik-baik manusia di muka bumi ialah yang senantiasa memberikan manfaat bagi sesama makhluk dan lingkungannya *(khairu al nas an-fa'uhum li al nas)*.

Spirit hadis itu pun mengindikasikan bahwa sebaik-baik umat ialah yang selalu siap menjalin tali kasih dengan umat lain, meskipun beda jalur ideologi, tradisi dan agamanya. Sebab tali kasih tidak ada kaitan "primordialistik" dengan agama tertentu semata. Tali kasih adalah *etika universal* dalam setiap kepercayaan dan agama. Ideologi Komunis dan Marxis pun menjunjung tinggi filosofi tali kasih ini. Terlebih bagi kaum Budhis, dimana semangat kasih ini justru ditransformasikan terhadap binatang-binatang yang ada di alam semesta.

Tali kasih adalah parfum spiritual yang selalu menjadi kunci seluruh kebekuan dan kekakuan sosial kemasyarakatan. Kalau tali kasih ini yang kita lestarikan, maka bentrokan kemanusiaan, konflik horizontal, perbenturan kultural dan peperangan dari berbagai bentuknya tidak akan terjadi.

Kemelut bangsa ini, seperti pertikaian antar elit partai, pejabat (birokrat), hingga kecurigaan berlebihan di antara umat beragama, sejatinya membutuhkan *silaturahim akbar* seperti di Tanah Suci pada bulan Haji; melenturkan segala ego dan status, melepaskan nafsu-nafsu yang sarat kepentingan, lalu duduk bersama demi totalitas kepasrahan pengabdian kepada Sang Khalik.

Memperluas tali kasih sama artinya dengan memperkokoh nilai kecintaan terhadap semua manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Itulah bahasa cinta dalam konteks kehidupan sosial secara makro. Sedangkan bahasa cinta, meminjam istilah Javad Nurbakhsh, ia berada di luar segenap kata dan makna. Ia sangat universal.

Dalam *The Art of Loving*, Erich From pernah menyatakan bahwa sebagian besar manusia selalu ingin dicintai, namun pada saat yang lain terkadang sulit untuk dapat mencintai. Inilah cinta yang kualitasnya masih rendah. Padahal cinta yang baik, adalah ungkapan dan sikap penuh kasih yang tidak pernah terbebani dengan imbalan apapun. Maka berhenti pada taraf dicintai, berarti kurang empatik secara manusiawi.

Meskipun demikian, bila kita merasa dicintai, seperti kata Paus Yohanes Paulus II, kita sendiri pada akhirnya akan lebih bersedia untuk mencintai. Karena cinta senantiasa bebas dari rasa curiga, terjauhkan dari gelora benci dan juga sangat berjarak dengan niat-niat yang tidak produktif.

Cinta itu sangat rohaniah. Ia bukan sesuatu yang lahir dari "rasio" atau "logika", melainkan mengalir dari nurani dan bermuara pada "rasa". Ia jernih dan universal. Ia lugas sekaligus romantis. Maka cinta sejati, kata Paus, bukan perasaan yang samar-samar, melainkan tindakan nyata yang senantiasa memperhatikan dan melayani, bukan memanfaatkan.

Cinta adalah magnet dari tali kasih. Siapa peduli meraciknya, pastilah ia menjadi manusia sejati sepanjang hidupnya. Salam silaturahim, salam kasih sejati. ***

24

Ahli Surga

Cita-cita terluhur setiap manusia beriman ketika sampai di akhirat kelak adalah didaulat oleh Allah sebagai ahli surgaNya. Sebab disurga, hakikat kedamaian dan kebahagiaan sebagai manusia sekaligus hamba Allah itu terjamin sepenuhnya.

Menjadi ahli surga, tentu saja bukan hal mudah. Dalam rangka menggapainya dibutuhkan kerja-kerja kehambaan yang tidak ringan, integritas keimanan yang teruji, termasuk juga modal spiritual yang cukup tangguh dan cemerlang. Sebab ahli surga sejatinya merupakan hamba-hamba pilihan di hadapan Allah Swt. Mereka adalah manusia beruntung yang akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Saw. Mereka merupakan barisan kekasih Allah yang akan dikumpulkan dengan para Nabi, Rasul dan wali-waliNya.

Diantara ciri dari hamba pilihan Allah yang dijamin sebagai ahli surga adalah senantiasa mampu mengawal keberadaan nafsunya selama menjalani kehidupan di tengah sesama makhlukNya. Dalam Alquran Allah Swt telah menyatakan bahwa “dan adapun orang-orang yang takut kepada kebenaran Tuhannya dan menahan diri

dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya" (Qs. An Nazi'at:41)

Mengawal nafsu memang tampak berat, terutama bagi individu yang kualitas spiritualnya terbilang dibawah rata-rata. Nafsu, dalam konteks keberadaan manusia, memang tidak bisa dibuang seratus persen. Tanpa nafsu, manusia mungkin kurang progresif dan tidak produktif dalam hidupnya. Akan tetapi, dan karena pengawalan terhadap keberadaan nafsu yang tidak sesuai ajaran Allah, tak sedikit umat beriman yang terkadang jauh terlempar dari rel nilai-nilai ilahiah.

Meluapnya kekerasan sosial dalam berbagai bentuknya belakangan ini, disadari atau tidak, sebenarnya sebagian besar diakibatkan oleh gelombang nafsu dalam diri manusia yang tidak terkawal dengan baik. Bahkan, kecendrungan perilaku pembunuhan antar sesama, peperangan satu suku dan desa dengan yang lain, hingga merebaknya korupsi diantara para pejabat publik, sekali lagi, hal itu merupakan akibat nyata dari kurang maksimalnya setiap diri manusia mengawal nafsu yang telah menyatu dengan dirinya.

Cara mengelola dan merawat nafsu yang kurang baik, sering kali juga melahirkan berbagai tindakan kejahatan diantara sesama manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Manusia tak jarang saling menjahati satu sama lain. Bahkan maraknya kejahatan terhadap binatang dan tetumbuhan pun akhir-akhir ini sebenarnya tak lepas dari tanjakan nafsu yang terlalu lepas dari kesadaran spiritual manusia. Fenomena semacam ini sebenarnya memperlihatkan bahwa sebagian besar manusia telah melalaikan amanah sebagai khalifah AllahNya yang bertugas menjaga keharmonisan dan keseimbangan semesta.

Sementara kejahatan, apapun bentuknya, merupakan citraan amal yang tidak pernah dianjurkan oleh agama. Berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk Tuhan berarti telah menciptakan ruang negatif dan destruktif bagi diri sendiri. Dan sebagian besar kaum beragama mengklaim bahwa imbalan perbuatan jahat selalu ada di neraka, tempat penuh siksaan dan pembalasan yang teramat keji. Sebab meniru perspektif Seyyed Hossein Nasr, kejahatan adalah perbuatan yang terpisah dari Prinsip Ilahi.

Dengan demikian, selama nafsu itu melekat pada diri manusia, kejahatan tampak teramat sulit dihilangkan dalam dinamika kehidupan. Eksistensi nafsu, menurut sebagian kaum sufi, ibarat pisau yang bermata dua. Penuh jebakan. Keberadaannya memang diperlukan oleh setiap makhluk, akan tetapi juga sangat berbahaya kalau tidak ditundukkan. Salah satunya, dapat mengakibatkan lahirnya perilaku-perilaku yang berbasis kemaksiatan dan pengrusakan.

Sa'id Hawwa, pernah menuliskan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Atha', bahwa sumber dari maksiat, nafsu birahi, dan kelalaian adalah kesenangan pada hawa nafsu. Sedangkan sumber dari ketaatan, keterjagaan, dan pengekangan diri dari hal yang hina adalah membenci hawa nafsu." Bahkan, lebih lanjut Sa'id Hawwa menguraikan versi Ibnu Atha', manakala kita berteman dengan orang bodoh yang membenci hawa nafsunya, hal itu lebih baik dari pada berteman dengan orang pandai yang selalu memanjakan hawa nafsunya.

Paparan Sa'id Hawwa ini merupakan pecut tersendiri bagi kita sebagai umat yang kini hidup di era yang serba polesan pragmatisme dan hedonisme. Gaya kehidupan umat semakin lepas dari kemasan nilai-nilai ilahiah dengan warna dan coraknya yang kian variatif. Keinginan hawa nafsunya untuk menjadi "yang lebih kren" dan "lebih superior" di antara sesama, sering kali dilakukan dengan cara-cara pintas yang tidak lagi mengindahkan etika religiusitas dan semangat humanitas seutuhnya, sebagaimana telah diteladankan Nabi Muhammad Saw. sedari awal.

Dari gaya hidup berbasis hawa nafsu, lahirlah model-model kehidupan manusia yang instan, mudah tersinggung, cepat marah, dan senang meluapkan ketidakpuasan-ketidakpuasan sosialnya dengan cara-cara yang sangat keras atau anarkistik. Konsekuensinya, keharmonisan sosial bermasyarakat dan berbangsa pun kian tercerai-berai. Kusut dan amat menyesakkan. Inilah salah satu corak dari perilaku kemanusiaan yang kurang empatik, tidak etis, dan amat tercela.

Syaikh Zarwaq, sembari ditiru oleh Sa'id Hawwa, menegaskan kalau sumber perilaku tercela itu ada tiga. Pertama adalah perilaku yang condong kepada hawa nafsu, yakni perbuatan yang tanjakan

merusaknya lebih terjal dan negatif. Cenderung disharmoni dan kurang konstruktif. Dari sini pula nafsu birahi timbul dan kemaksiatan lahir silih berganti.

Kedua, perilaku yang disebabkan takut kepada sesama manusia. Inilah perilaku yang sejatinya mengabaikan nilai-nilai keimanan. Karena perilaku takut kepada manusia akan memunculkan sifat pemarah, sifat pendendam, dan sifat hasud berlebihan. Adapun yang ketiga adalah perilaku cinta dunia. Dari cinta dunia yang tidak terkontrol, akan lahir penyakit sombong, congkak, tamak, dan pelit.

Sebaliknya, dengan menjauhkan diri dari perilaku berbasis hawa nafsu, tidak takut kepada sesama manusia, dan mengatrol diri atas kecintaan pada dunia, pelan tapi pasti akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang produktif dan prospektif. Kita akan terus berteman dengan amal baik dalam berbagai bentuknya. Sedangkan orang yang konsisten berbuat baik, seperti disinyalir Imam Tirmidzi, ia senantiasa didoakan oleh semua makhluk di muka bumi. "Sesungguhnya Allah, malaikatNya serta penduduk muka bumi bahkan semut yang ada di sarangnya sampi ke ikan paus, mereka akan mendoakan setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia".

Ciri ahli surga berikutnya adalah saling menjalin persahabatan antar sesama berdasarkan kebesaran Allah, saling bersilaturrahim dan juga saling memaafkan karena Allah Swt. Dalam suatu riwayat, ketika ditanya tentang keberadaan orang-orang di sekitar Arys' yang pakaiannya dari cahaya dan wajah mereka bercahaya, Nabi Muhammad Saw menjawab : mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah, saling berkunjung karena Allah dan saling memaafkan karena Allah".

Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad Saw., juga pernah menegaskan bahwa salah satu ciri orang yang akan menjadi ahli surga adalah mereka yang menjelang tidurnya senantiasa membebaskan hatinya dari berbagai kebencian terhadap orang yang menyakitinya. Sungguh, hal ini merupakan perbuatan yang berat di mata manusia, terutama bagi mereka yang mudah terprovokasi oleh hawa nafsu dengan berbagai tipu dayanya. Na'uzubillah! ***

25

Puasa Adalah Jihad

Meminjam istilah tradisi Katolik, puasa sesungguhnya adalah bagian dari disiplin rohani (Matius 6:16-18). Adapun disiplin rohani, meniru bahasa kaum Buddha, adalah manifestasi kesungguhan, keteguhan, dan keterarahan seluruh kualitas pertapaan secara spiritual menuju Sang Pencipta.

Masih dalam tradisi Katolik, puasa dimaknai juga sebagai ungkapan pertobatan yang obyektif dan efektif dalam rangka menghangatkan dan menyehatkan konstruksi doa kehambaan. Karena dalam doa, kata Paus Yohanes Paulus II, setiap hamba akan mengenali, memahami, dan menjumpai Tuhan dalam konteks personalitasnya yang terbaik.

Dalam Islam, Ramadan senantiasa disebut sebagai *syahru al du'a* (bulan doa). Di bulan ini ucapan-ucapan baik setiap hamba akan dinilai sebagai hikmah dan juga zikir kepadaNya. Dan setiap ungkapan doa akan langsung dikabulkan oleh Allah Swt. Sebab, seperti Sabda Nabi Muhammad Saw., di bulan Ramadan pintu surga dibuka sedemikian lebar dan pintu neraka ditutup dengan rapatnya.

Bulan Jihad

Selain *syahru al du'a*, oleh mayoritas ulama, Ramadan disepakati sebagai *syahru al jihad*, yakni bulan jihad bagi orang-orang beriman. Melalui ibadah puasa di bulan ini, setiap umat Islam dituntut untuk membuktikan ketaatan dan cintanya kepada Allah Swt, baik secara mikro maupun makro.

Puasa di bulan Ramadan tidak hanya menekankan ketaatan dalam aspek yang parsial seperti sekadar menahan lapar, haus, dan melakukan hubungan suami-istri pada siang hari. Lebih dari itu, puasa Ramadan sebenarnya menuntun setiap individu beriman untuk mentransformasikan ketaatan secara spiritual.

Oleh karenanya, ada kategori puasa yang diorientasikan sebatas menunaikan kewajiban agama. Puasa ini sering kali diidentikkan dengan puasa *fiqiyah*, yang menaati aturan-aturan luaran (syariat) saja. Akan tetapi, ada pula puasa dimana ruang dan perwujudannya betul-betul untuk pembuktian cinta dan kerinduan kepada Allah Swt. Inilah puasa *haqiqi,* yang awal dan akhirnya senantiasa berada di atas semangat *takhalli*, *tahalli,* dan *tajalliyat Ilahiah.*

Imam Al Ghazali sendiri menegaskan bahwa ada kategori puasa terkhusus dari yang umum dan yang khusus, yakni puasa hati dari niatan-niatan rendah dan pikiran duniawi serta memalingkan diri dari segala sesuatu selain Allah. Inilah puasa kaum '*arifin*. Puasa yang bersifat batini dan integral. Puasa kehambaan yang berkualitas ketuhanan.

Puasa terkhusus semacam ini, akan senantiasa memicu dan memacu individu yang melakukannya terus berlomba mengoptimalkan jihad dari seluruh potensi kehambaan yang dimiliki. Ia akan bersungguh-sungguh dan tanpa sedikit pun mengalami keraguan dalam menebarkan kebajikan bagi kelangsungan sesama makhluk di muka bumi.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran bahwa "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.* (QS. Al Hujurat: 15).

Individu yang berpuasa dalam kategori terkhusus ini, pola

pikir dan tindakan sosialnya akan bermuara pada komitmen jihad kehambaan secara universal. Bahkan, ia akan selalu menyadari bahwa salah satu semangat puasa adalah memuliakan dan menyejahterakan kaum *mustadh'afin*.

Disamping itu, puasa adalah jihad yang tidak sekadar memerangi hawa nafsu dan keinginan-keinginan buruk. Puasa sesungguhnya merupakan media terbaik dalam menuntaskan jihad sejati setiap manusia, sebagai hamba personal sekaligus bagian dari eksistensi komunal (kemanusiaan).

Jihad Sejati

Jihad memiliki makna dan nilai tersendiri di hadapan Allah. Ia bagaikan kunci dalam proses kehambaan kepadaNya. Tanpa jihad dalam perspektif yang esensial, eksistensi kehambaan kita seperti kurang lezat. Tak berlebihan manakala di kalangan Syiah jihad itu ditempatkan sebagai rukun Islam.

Allah telah membedakan kualitas orang beriman yang melakukan jihad dengan yang tidak berjihad. *"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar",* (QS. Al Nisa : 95).

Namun demikian, jihad bukan semata terjun ke medan perang, baik itu menumpas dan menaklukan musuh-musuh, atau memberantas hal-hal yang dianggap berbau maksiat di hadapan Allah Swt. Itu baru jihad *asghar* (kecil). Adapun jihad yang lebih besar (*al Jihadu al Akbar*) seperti sabda Rasulullah Saw. adalah jihad melawan nafsu, egoisme, dan kebakhilan diri sendiri.

Berjihad dari dan dengan orang lain, sering kali masih melahirkan banyak friksi dan konflik. Dan tidak keliru bila Multatuli berkata bahwa "berjihad dengan orang lain kadang menimbulkan perang, tapi berjihad dengan diri sendiri bisa mendatangkan perdamaian". Inilah jihad sejati. Jihad yang selalu lahir dari dan untuk

progresifitas sekaligus produktifitas diri secara *kaffah* (menyeluruh).

Berjihad dengan diri sendiri itu memang tidak mudah. Tantangan terbesarnya adalah sejauh mana kita tangguh dan lihai mengolah pergolakan-pergolakan antara *al nafsu al amarah*, *al nafsu lawwamah*, dan *al nafsu al muthmainnah* di berbagai ruang dan waktu. Ketiganya memiliki karakter yang tidak serupa dan kadang saling bertabrakan satu dengan yang lain.

Maka mujahid sejati adalah individu yang memiliki kualitas kejuangan seperti para nabi dan wali Allah. Tidak pernah mementingkan citra dan keuntungan pribadi. Tidak terobsesi oleh sesuatu yang berorientasi pragmatis, utopis, dan hedonistik. Tidak pula ambigu dalam meluruskan kehidupan masyarakat yang kian tertindas secara ekonomi dan politik.

Sebaliknya, sebagai mujahid sejati ia akan awas terhadap hal-hal yang parsial-duniawiyah. Yang diprioritaskan hanya ridla dan kasih sayang dari Sang Khalik. Sebab menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa mujahid terbaik itu hanyalah mereka yang bersungguh-sungguh dengan dirinya dalam menggapai Dzat Allah. ***

26

Spirit Jihad di Bulan Ramadhan

"sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang- orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar" (Qs. Al-Hujurat:15).

Melalui Ibnu Abbas, salah seorang mufasir termasyhur digenerasi sahabat, Imam Ali K.W pernah berpesan bahwa Al-quran itu memiliki banyak makna (*dzu-wujuh*). Pesan Imam Ali ini tentu saja sangat kita mafhumi sebab Alquran sebagai sumber dari segala hukum dan moral dalam seluruh lapisan kehidupan pastilah memiliki sifat, karakter, dan struktur universalitasnya sendiri. Seperti anggapan banyak pakar bahwa seluruh yang ada dalam semesta ini secara prinsip sudah ada garis fitrahnya dalam alquran.

Sahl Al-Tustari, mufasir mistik dari Persia, tepatnya dari Tustar, Iran, yang meninggal di Basrah Irak sempat menuliskan bahwa masing-masing ayat Alquran memiliki empat makna. Pertama, makna harfiah (lahir), yaitu pembacaan ayat. Kedua, makna tersembunyi (batin),

yakni menyangkut pemahaman ayat itu sendiri. Ketiga, batas, sebuah penentu antara apa yang dinyatakan halal dan haram, baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, merusak atau memberikan manfaat menurut ayat tersebut. Keempat, titik transendensi (*mathla'*), perintah dari hati atas makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut sebagaimana dipahami dari pandangan Tuhan.

Secara harfiah, berpijak dari metodologi tustari, ayat diatas hanya menggambarkan dan menjelaskan tentang umat manusia yang beriman. Dan salah satu bukti keberimanan secara harfiah (lahir) itu ialah menunaikan (ritual) puasa dibulan Ramadhan ini. Keberimanan "harfiah" dalam konteks bulan Ramadhan adalah sekedar menahan haus (al-'athas) dan lapar (al-juu'), menahan keinginan untuk mencium, dan melakukan hubungan seksual dengan istri atau yang lainnya. Rajin membaca alquran dengan sekian ayat maupun suratnya. Rajin melaksanakan shalat fardu lima waktu dan shalat sunat rawatib, termasuk shalat tarawih. Di sini (tentu) kita sepakat (?)

Di lain hal, tidak dapat dimungkiri bahwa tidak sedikit juga umat manusia yang mengaku beriman, tetapi malas melaksanakan puasa secara harfiah sekalipun dibulan Ramadhan ini. Padahal, mereka pun telah mengetahui bahwa puasa dibulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang beriman.

Namun, pada aspek yang lebih substansial, dalam bahasa tustari lebih transenden, masih banyak yang perlu kita sentuh. Orang-orang yang beriman dan melaksanakan puasa dibulan Ramadhan yang sedemikian girang dan bergairah, belum seratus persen menjamin mampu merefleksikan spirit ayat diatas. Banyak orang yang kelihatan takwa dan beriman secara ritual (harfiah) tapi kering "kufur" dan "syirik" secara sosial. Mereka tidak peka terhadap sekian jeritan tangis dan kegelisahan ribuan jiwa masyarakat yang tertindas. Padahal, kalau kita objektif menelaah ajaran islam, "peribadatan sosial" (*ibadah qhairu mahdhah)* itu lebih banyak ditekankan (untuk tidak mengatakan merupakan inti semangat islam sendiri) ketimbang ibadah *mahdhah*.

Salah satu contoh, shalat adalah ibadan ritual yang paling utama dalam islam. Akan tetapi, shalat juga menyiratkan komitmen moral dan jihad sosial yang tidak bisa diabaikan. "Sesungguhnya

shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar (Qs. Al-Ankabut:45). Oleh karena itu, pelaku shalat secara harfiah semata, yang tidak mampu memaknai atau memberikan "pemaknaan" terhadap tindak laku sosialnya, maka ia belum dikategorikan pelaku yang sebenarnya.

Di sinilah barangkali sabda Rasulullah Saw, "Shalat itu tiang agama. Dan barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, berarti juga telah meruntuhkan agama". Bahkan Rasulullah juga menegaskan shalat yang khusyuk dan benar akan menjadi penentu "kekhusyukan" dan tata laku kehidupan pelakunya.

Berdasarkan perspektif Tustari, sangat rasional kalau ayat diatas kita bedah dan kita kawinkan dengan semangat sosial dibulan Ramadhan ini. Nabi Muhammad ,selaku Rasul pembawa wahyu dan peletak batu pertama agama islam dari sejak awal telah mengampanyekan "jihad sosial" demi membebaskan kaum tertindas dimuka bumi. Dengan gigih memperjuangkan tegaknya solidaritas kemanusiaan (*solidarity humanism)* tanpa pilih kasih dan tidak membedakan kelas sosial. Muhammad sangat konsisten terhadap komitmen besar keberimanan dan Kebertakwaan. Takwa dalam diri Muhammad ialah meretas eksploitasi, hegemoni, dan manipulasi dalam konteks kehidupan sosial. Solidaritas kemanusiaan adalah "Zikir" dan "ibadah" Muhammad sepanjang sejarah. Hal ini bisa kita lihat pada sikap dan tindakan arifnya mencegah kultur eksploitasi dan hegemonisasi yang berlangsung dimasyarakat arab (suku Quraisy) saat itu.

Sebagai bukti jihad sosial Muhammad adalah realisasi moralitas sosialnya ketika mengecam para konglomerat (saudagar kaya) yang hanya menimbun harta demi ekspolitasi dan menindas bagi yang lemah (miskin). Kecaman Muhammad berpijak pada filosofi alquran " celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya" (Qs. 104:1-2).

Maka dari itu, ketakwaan ritual tanpa dibarengi dengan manifestasi ketakwaan sosial, bukan lah nilai yang digariskan agama Allah. Jihad sosial merupakan salah satu bentuk solidaritas kemanusiaan dan penegakan keadilan sosial itu sendiri. Bahkan,

perbuatan dan penegakan keadilan adalah inti keberimanan maupun ketakwaan kita. Bulan Ramadhan memang berlangsung semarak dinegeri ini, sebagaimana juga sedemikian semaraknya pola pikir dan sikap sosial masyarakat indonesia yang kian mengalami psikopatologis. Umat beriman yang sebelumnya tidak rajin shalat dan membaca alquran kini menjadikan bulan Ramadhan menjadi kesempatan untuk "pembelajaran". Tidak sedikit juga para birokrat, politisi, akademisi, aktivis sosial kemasyarakatan yang bulan-bulan sebelumnya banyak menipu rakyat, dengan "profesionalitas klaim-nya" kini menjadikan bulan Ramadhan sebagai ruang pertobatan. Bahkan, para artis pun tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan keberkahan bulan Ramadhan ini dengan melaksanakan umrah ke baitullah didampingi para ustadz yang kurang tepat memahami "jihad sosial" dijalan Allah SWT.

Semangat puasa salah satunya adalah memuliakan dan mensejahterakan kaum *Mustadhafin*. Masyarakat lemah yang tertindas baik secara kultur maupun struktur dalam konstalasi sosial kemasyarakatan, puasa adalah jihad yang tidak sekedar memerangi hawa nafsu dan keinginan-keinginan buruk kita. Puasa tidak lain adalah media dimana kita berlatih untuk tangguh dalam menuntaskan jihad sosial secara menyeluruh. Puasa Ramadhan yang hanya sebulan ini dalam setahun bukanlah semata kewajiban temporalistik. Puasa adalah ruang penyucian rohaniah kita untuk dapat melahirkan sikap sosial keberagamaan dengan segala alternatifnya kearah yang lebih membebaskan dan mencerahkan bagi perjalanan hidup selanjutnya. Maka tidak heran, kalau pahala dan rahasia puasa itu hanya pada Allah untuk kemudian diberikan kepada para hambaNya yang betul-betul memenangkan "pertarungan spiritual" dan mendapatkan penyucian mentalitas-moral sosial sejernih-jernihnya. Dalam hadits qudsi, Rasulullah bersabda "segala amal perbuatan manusia yang baik itu adalah hak miliknya, kecuali puasa, sebab puasa adalah untuk Ku, dan akulah yang membalasnya".

Sebagai orang yang beriman, dan bertakwa, kita harus segera melakukan redefinisi terhadap jihad dalam bulan puasa ini. Jihad bukan semata melawan hawa nafsu. Lebih jauh dari itu, yakni memahami dan memaknai puasa sebagai jihad yang disiratkan oleh

ayat dimuka. Karena dengan pemaknaan terhadap jihad semacam itulah kita akan mampu menembus konsistensi dan keikhlasan kita dalam membebaskan kaum lemah. Berjihad dalam warna ayat diatas, dapat kita wujudkan dengan membebaskan beban sosial rakyat lemah dan meretas kultur sosial yang eksploitatif, sebab rakyat lemah dan miskin itu adalah kekasih Allah, pewaris kepemimpinan.

Berpuasa dibulan Ramadhan sebagai praktik ritual hanyalah media pematangan nalar nurani keberagamaan, sedangkan refleksi dan realisasi spirit jihad sosialnya adalah wujud nyata dari sekian proses pematangan mentalitas keberagamaan (baca: keimanan). Oleh karena itu, spirit reaktualisasi spirit moral bulan Ramadhan haruslah menjadi kerangka dan target prioritas dalam keberlangsungan sistem sosial kemasyarakatan saat ini. Semangat jihad dibulan Ramadhan seyogiyanya diorientasikan untuk menegakkan keadilan kultur maupun struktur. Sebab masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi anggota lain yang lemah dan tertindas, bukanlah ciri masyarakat islam (*Islamic society*). Sekalipun menjalankan ritualitas islam (Asghar Ali Enginer:1999).

Dan bukankah Rasulullah SAW menegaskan bahwa kemiskinan dan ketertindasan itu sama saja dengan kekufuran. Dengan spirit moral dan jihad sosial dibulan Ramadhan ini marilah kita tegakkan keadilan dalam ruang apapun. Sebab salah satu syarat terciptanya masyarakat islam adalah tegaknya keadilan dan terjauhkannya kemiskinan itu sendiri. "wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya" (Qs. An-Nisa:135). Maka sekali lagi disinilah reaktualisasi jihad sosial dibulan Ramadhan sangat dibutuhkan.

Bagi yang memiliki harta dan yang berkeinginan untuk umrah ke Baitullah padahal sudah pernah melakukan sebelumnya, dengan semangat bulan Ramadhan, lebih realistis jika dialihkan untuk "menggelar" jihad sosial dinegeri ini membebaskan kaum lemah dan tertindas dari sekian beban sosialnya. Marilah kita terjemahkan filosofi umrah itu lebih kritis dalam perspektif universalitas-etik-humanistik. Inilah makna alegoris (batin) yang ingin Allah sampaikan melalui ayat

diatas berkait erat dengan jihad sosial yang sesungguhnya. Dan Allah juga memperkuatnya dengan filosofis dengan ayat " Tidakkah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar" (Qs. An-nisa :95).

Untuk kematangan seluruh gairah jihad sosial kita dibulan Ramadhan, mari kita amalkan (potongan doa) dibawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad

Wa ala aali sayyidina Muhammad , allahumma adkhil alaa ahlil kuburissurur.

Allahumma aghni kulla faqir,

Allahumma isbi kulla jaa'i

Allahumma iksu kulla uryan

Allahumma farrijan kulli makruub. Allahumma iqdi daina kulli madin.

Allahumma sudda fakrana bighinaka. Alllahumma ghayyir suahaalina bihusni halika. Bihaqqi Muhammad wa aali Muhammad a.

Walhamdulillahirabbil alamin;

"ya allah sampaikan salam sejahtera kepada nabi Muhammad dan keluarga Muhammad . Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan pada semua ahli kubur. Ya Allah, kayakanlah orang-orang yang miskin. Ya Allah, kenyangkanlah orang-orang yang lapar. Ya Allah berikanlah baju kepada orang-orang yang telanjang. Ya Allah bahagiakanlah orang-orang yang menderita. Ya Allah bebaskan lah orang-orang yang mempunyai hutang (tanggungan). Ya Allah ubahlah keadaan mereka yang fakir dengan segala kekayaan. Ya Allah gantilah keadaan mereka yang jelek dengan keadaan-Mu yang lebih baik. Ya Allah hanya kepadamu kami berserah. Dengan kebenaran Muhammad dan keluarga Muhammad . *Walhamdulillahirabbil alamin.* ***

27

Memaknai Ramadhan

"Doa di Bulan Ramadhan adalah doa untuk mencerahkan mental yang lebih produktif, bukan doa lipstik religiusitas yang hanya tampak megah ditempat-tempat ibadah semata".

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda:*"Apabila datang bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka berserulah seorang penyeru, "Hai, siapa yang menginginkan kebaikan, datanglah! Dan siapa ingin (melakukan) kejahatan, cegahlah dirimu!".*

Di dalam bulan Ramadhan, nilai kebajikan begitu subur. Perbuatan sekecil apapun dari umat yang beriman benar-benar akan mendapat pahala di hadapan Allah Swt. Bahkan, tidurnya orang yang sedang menunaikan ibadah puasa saja langsung dinilai ibadah oleh Allah Swt.

Namun demikian, tak sedikit pula umat beriman yang mengalami keteledoran atau terjebak dalam pemahaman yang parsialistik dan hedonistik atas nilai-nilai ideal puasa Ramadhan. Mereka lebih mempersoalkan hal-hal yang hanya bersifat formal

seperti menahan lapar, haus, atau sesuatu yang berkait dengan kebutuhan jasmani semata. Mereka abai dan tidak berusaha semaksimal mungkin melakukan pembatinan terhadap rumusan-rumusan spiritualitas puasa itu sendiri.

Sifat puasa

Dalam *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam* (Mizan: 2002), Syed Ali Asyraf, menulis bahwa tata laku puasa itu bersifat lahir sekaligus batin. Puasa lahiriah wajib dilakukan semua masyarakat Islam dewasa *(aqil baligh)* di bulan Ramadhan. Dalam wilayah ini mereka tidak diperbolehkan makan, minum, merokok, hingga melakukan hubungan seks (bagi suami-istri) pada siang hari sejak fajar menyingsing hingga matahari tenggelam.

Adapun yang dimaksud puasa batin ialah ajaran disiplin yang diberlakukan pada jiwa setiap orang (mukmin). Menurut Asyraf, ada dua tujuan ideal *(ideal target)* yang ditekankan puasa batin ini. Pertama, agar nafsu manusia bisa dikelola dengan baik. Tidak cepat dilampiaskan, apalagi dengan cara-cara yang jauh dari semangat nilai ilahiah. Kedua, supaya berbagai keinginan (*duniawiyah*) dapat dikendalikan dan manusia tidak mudah terjerumus dalam kejahatan, seperti memfitnah, berbohong, menipu, iri dan dengki, congkak, sombong, dan bentuk keburukan (*al saiat*) yang sejenis.

Tokoh intelektual muslim, Jalaluddin Rakhmat – berpendapat bahwa dalam Alquran itu ada dua kata untuk puasa. Pertama, *shiyam* sebagaimana dalam surah al Baqarah ayat 183.

Kata *shiyam* paling banyak disebutkan dalam alquran ketika Allah berbicara aturan-aturan yang menyangkut hukum-hukum tentang puasa. Misalnya pada kalimat "*uhilla lakum lailata al-shiyam al rafatsu ilaa nisaaikum;*dihalalkan bagi kamu pada malam hari bercampur dengan istri-istri kamu".(Qs. Al-Baqarah: 187).

Berbicara puasa sebagai salah satu bagian dari ritus keagamaan yang ditetapkan hukum-hukumnya, tegas kang Jalal, Allah menggunakan kata *shiyam*. Shiyam ini adalah puasa pada tingkat syariat. Atau, bagi kaum muslimin pada umumnya, *shiyam* adalah puasa dalam ukuran fiqih. Yakni puasa yang hanya terjebak pada pemaknaan *zhahiri*, bukan puasa yang batini.

Kedua, *shaum*. Kata *shaum,* hanya disebut satu kali, yakni dalam surat Maryam ayat 26, "Aku bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara". *Shaum* dalam ayat ini bukan berarti puasa yang hanya menahan lapar, haus, dan mencegah bercampur dengan istri. Akan tetapi, *shaum* itu adalah puasa dalam pengertian yang istimewa, *beyond that point*. Di luar lapar dan dahaga, *beyond your hunger and your thirst.*

Imam al Zuhaili pun menegaskan bahwa yang dimaksud puasa itu adalah *madrasatun khulukiyyat al kubra,* wahana pendidikan mentalitas yang sangat besar artinya. Maka orang yang sedang menunaikan ibadah puasa berarti telah mentraining mentalnya sendiri. Dalam bahasa yang lebih "agamis", orang yang berpuasa itu sedang menegakkan *jihadun nafsi*, mewujudkan amanah dan *muraqabah*, merealisasi laku disiplin spiritual, serta menjaga kesehatan fisik.

Bulan doa

Disamping mentraining mental setiap umat beriman, Ramadhan juga merupakan bulan doa *(syharu al du'a)*. Di bulan ini doa-doa siapa saja yang beriman akan segera mendapat pengabulan dari Allah Swt. Doa-doa itu akan secepat kilat menembus langit. Sebagaimana dinyatakan Imam Al Gazali dan Imam al Qurthubi, bahwa diantara masa terbaik untuk berdoa ialah waktu sahur di bulan Ramadhan. Dan manakala doa itu tepat pada waktunya, maka ia bisa membawa keberuntungan.

Namun demikian, doa dalam pengertian yang lebih filosofis, tentu bukan samata untaian kalimat indah dan menyentuh, melainkan bagian dari disiplin rohani untuk mematangkan karakter moral setiap manusia. Meminjam bahasa Ali Syariati, doa itu adalah proses transendensi. Bahkan, Alexis Carrel menegaskan bahwa doa adalah tinggal landasnya jiwa manusia dalam citra alam-alam agung melalui perjalanan spiritual.

Terlebih bagi tradisi Islam (Syi'ah), doa ditempatkan sebagai "bayonet" yang senantiasa dipakai dalam pergumulan ideologis dan pergesekan sosial. Doa itu dimaknai sebagai teks-teks pelajaran filsafat dan akidah yang tersusun dalam bentuk dialog dengan Tuhan. Ia adalah buku daras kosmologi, teologi dan antropologi dengan

menggunakan gaya ungkap yang mendalam, lembut, dan indah.

Orang yang tidak mampu memaknai dan menempatkan doa secara baik dan ideologis, tentu ia bukan tipe umat bersahaja. Sebab dalam perspektif Ali Syariati, doa merupakan sarana untuk membela hakikat dan menjadi pertanda bahwa kita telah bertanggungjawab melakukan perintah jihad serta bertahan menyelamatkan diri.

Dengan pengolahan mental dan doa secara progresif di bulan Ramadhan ini, cepat atau lambat pasca Idul Fitri kita akan lebih mampu menjadi umat yang kreatif-inovatif. Yakni, umat yang berkarakter dalam melahirkan pilihan-pilihan dalam menata eksistensinya sebagai makhluk sosial, bukan umat cengeng dan emosional ketika menghadapi percepatan realitas-kultural.

Ala kulli hal, doa di bulan Ramadhan adalah doa untuk pencerahan mental yang lebih produktif, bukan doa lipstik religiusitas yang hanya tampak megah di tempat-tempat ibadah semata. Sebab Ramadhan bukan saja bulan untuk tarawihan, melainkan bulan terharum untuk menegakkan komitmen perbaikan diri di hadapan Tuhan. Subhanallah! ***

28

Puasa dan Pembenahan Diri

Secara garis besarnya puasa itu ada dua kategori, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Bagi umat Islam, puasa sunnah terdapat di bulan-bulan tertentu. Adapun puasa wajib hanya terdapat di bulan Ramadan. Firman Allah dalam Alquran, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa* (QS. Al Baqarah: 183).

Dari aspek sifat, puasa itu juga memiliki dua kategori, yakni puasa bersifat lahir dan batin. Puasa lahiriah hanya berada dalam wilayah tidak melakukan aktifitas minum, makan, dan berhubungan badan dengan pasangan pada waktu yang telah dilarang oleh syariat (Islam). Inilah tahapan puasa di permukaan.

Puasa batin adalah puasa yang melampaui wilayah puasa lahir. Inilah puasa yang berat. Tidak semua orang beriman mampu melakukannya. Sebab puasa batin tidak sekadar menahan dari kebutuhan fisik-bilogis. Lebih dari itu, puasa batin merupakan manifestasi disiplin rohani terunggul dari seorang yang beriman. Inilah tipologi puasa yang senantiasa dilakukan oleh makhluk pilihan

Allah, seperti para nabi dan para wali.

Puasa batin ini, meniru istilah Paus Yohanes Paulus II, adalah tindakan kesanggupan setiap hamba untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang sangat duniawiyah. Dengan puasa, lanjut Paus, setiap hamba harus hidup sebagai manusia rohani dan bukan mewujud sebagai manusia jasmani semata. Dan diantara ciri manusia rohani, harus senantiasa menyingkirkan perilaku-perilaku rendahan semisal memanjakan perut dengan makan berlebih, atau menjauhkan kepekaan sosialnya dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

Dengan puasa batin ini, menurut istilah kaum sufi, tarikan nafsu yang destruktif senantiasa dikendalikan secara produktif. Artinya, dalam konteks puasa batin, berbagai perilaku yang bersumber dari nafsu (negatif) seperti memfitnah, iri hati, dendam, dengki, sombong, berbohong, dan sejenisnya sama sekali tidak diberikan ruang tampil ke permukaan sosial kehidupan.

Puasa lahir tidak akan bermakna apa-apa sebelum diperkuat dengan puasa batin. Sebab puasa lahir adalah proses menuju puasa batin dengan segala tatalaku yang disyaratkan. Tidak berlebihan manakala Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa tak sedikit orang yang berpuasa di Bulan Ramadan tapi hanya tinggal haus, lapar, dan letih. Mereka tidak mampu menyelami makna dan meraih hakikat kelezatan puasa secara batini. Konsekeuensinya, usai puasa tidak ada karya luhur yang dapat ditunjukkan di hadapan semua makhluk.

Sebagaimana ayat di atas, puasa itu diwajibkan agar setiap hamba mampu meraih predikat takwa yang hakiki. Takwa bukan berarti sekadar takut akan murka dan siksa Allah Swt. Akan tetapi, bagaimana setiap orang beriman mampu menjaga, mengawal, dan berbenah diri secara produktif dalam ranah sosialnya. Sebab bertakwa bukan hanya rajin melakukan ritualitas formal keagamaan, seperti shalat, ngaji Alquran dan sejenisnya, melainkan sejauh setiap hamba terus komitmen dan loyal terhadap amanah kekhalifahannya dimuka bumi.

Pribadi yang memiliki ketakwaan dalam pemaknaan semacam ini, jangankan berbuat salah kepada orang lain, sudah maksimal melakukan amal yang baik pun ia masih rendah hati. Bahkan ia kadang meragukan apakah yang dilakukan sudah senapas dengan perintah

Allah Swt. atau tidak. Intinya, ia tak pernah lalai untuk introspeksi diri. Ia terus menerus membenahi dirinya, terutama secara mental dan spiritual.

Dengan memaknai dan menempatkan puasa sebagai ritual berbenah diri di hadapan realitas sosio-kemanusiaan dan ketuhanan, maka kelezatan spiritualitas puasa akan mudah diraih. Dan pelaku puasa seperti itu sudah dapat dipastikan menjadi pribadi teladan, yakni cemerlang dalam berpikir, ramah dalam bertingkah laku, dan matang dalam memahami pergulatan realitas sosial secara makro.

Adapun makna puasa tertinggi adalah sabar. Yakni bukan sekadar bisa menahan untuk melampiaskan perilaku negatif-destruktif, melainkan mampu mengolah dan melahirkan kearifan sekaligus keteladan sosial yang sesungguhnya.

Sebagian ulama Islam, terutama dikalangan tasawuf, berbeda pandangan mengenai posisi sabar. Ada yang menempatkan sabar sebagai separuh dari isi puasa. Ada pula yang mengatakan bahwa sabar merupakan keseluruhan puasa itu sendiri. Hadis populer *"… bagaimana mungkin engkau berpuasa, sedangkan saya lihat engkau masih mencaci maki hamba Tuhan?"* selalu dijadikan rujukan substansialnya.

Dalam hadis lain tentang sabar, Rasulullah telah bersabda bahwa: sesungguhnya engkau (manusia) mempunyai dua tabiat dan kelakukan yang disukai oleh Allah Swt. yaitu sabar dan ketenangan (HR. Imam Muslim dari Ibnu Abbas ra.). Sedangkan dalam Alquran Allah menegaskan bahwa pahala orang-orang yang sabar itu tiada batas hitungannya (QS. Azzumar: 10).

Ketika manusia membenahi diri dengan puasa, ia akan mudah menginternalisasi sifat-sifat Allah ke dalam kepribadiannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebab sifat Allah itu sejatinya berada dalam diri setiap manusia. Rasulullah Muhammad Saw bersabda : "Carilah sifat-sifat Allah itu dalam dirimu sendiri."

Sebagaimana kita mafhumi, Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Atau, dalam bahasa Ibnu Qayyim, terdiri dari *al badan* yang berasal dari tanah dan *ar ruh* yang berasal dari *malakutissama*. Kedua unsur tersebut menyatu dalam diri manusia dengan sifat dan karakternya masing-masing.

Sebelum bersatu dengan jasad, ruh mempunyai potensi sekaligus kemampuan berkualitas, diantaranya dapat mengenal hakikat kebenaran bahwa Allah adalah Tuhannya. Hal ini ditegaskan Alquran *"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi."* (QS. Al A'raf: 172)

Namun demikian, kemampuan ruh setelah bersatu dengan jasad sering berkurang. Bahkan sesekali terbelenggu oleh kemauan jasad. Sebab kata Abdul Gani Abud, dalam kitab *al Yaumul Akhir wal Hayatul Mu'ashirah*, bahwa ruh langsung berhubungan dengan Tuhan dan jasad berhubungan dengan realita duniawiyah dimana ia hidup. Inilah yang menyebabkan manusia selalu berada dalam dua tarikan; kehidupan spiritual *(ruhiyyah ilahiyyah)* dan kehidupan materialis (*jasadiyyah*).

Al Gazali, dalam *Ihya 'Ulumuddin* menyatakan bahwa manusia yang hanya memperhatikan dan memanjakan kebutuhan *jasad* (material) dan mengabaikan aspek *ruhiyah* (spiritual), sebenarnya ia sedang sakit namun tidak merasakan dan menyadarinya. Ia masuk perangkap perilakunya sendiri yang teramat rendah.

Oleh karena itu, kualitas ruh harus dipompa kembali, salah satunya dengan melakukan puasa secara batini itulah puasa yang dapat membenahi diri sekaligus mengantarkan setiap manusia meraih ketakwaan sejati, sehingga puasa mampu memberikan jaminan kepada ruh untuk mengontrol ambisi jasmani itu sendiri.***

29

Puasa dan Pancasila

Salah satu orientasi luhur puasa adalah semangat berbagi kebajikan bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi, terutama antar sesama manusia. Dalam kacamata Islam yang mengedepankan perspektif sufisme, puasa bukan saja untuk menahan diri dari berbagai godaan lahiriah, melainkan juga menyangkut hal-hal yang batiniah. Sehingga Allah SWT sejak awal telah menegaskan bahwa puasa itu betul-betul urusan Dia dengan hamba-Nya. Inilah relasi religius yang tentu sangat romantik dan istimewa.

Berbagi kebajikan adalah semangat semua agama. Sebab kebajikan merupakan awal dan akhir dari aktualitas diri sebagai makhluk sekaligus khalifah Tuhan di dunia dan akhirat kelak. Dalam level dunia, kebajikan akan mengantarkan sesama manusia terus berada dalam aliran kehangatan manusiawi atau istilah kerennya, senantiasa bertumbuh dalam keharmonisan berkemanusiaan. Adapun pada konteks akhirat, sebagaimana janji Allah, siapa saja yang menjadi pelaku terbaik dari kebajikan akan mendapatkan surga yang penuh nikmat-nikmat pilihan di hadapan Allah.

Kebajikan, menurut tradisi agama Budhis, harumnya dapat melawan arah angin. Sedangkan orang yang bajik, pastilah harumnya menyebar ke segenap penjuru. Bahkan, masih versi agama Budhis, pada level tertentu harum kebajikan itu melebihi harum kayu cendana, bunga tagara, teratai atau pun melati hutan. Harum dalam konteks spirit nilai kebajikan ini benar-benar melampaui harum material yang serba terbatas sebagaimana sering kali diburu kebanyakan manusia. Dalam istilah religius, itulah harum berdimensi spiritualitas dan ilahiah, menakjubkan dan mengagumkan.

Potret Kebajikan

Dari perspektif Islam, potret kebajikan itu pasti Nabi Muhammad Saw. Ini nyata dan jelas dikatakan oleh Alquran, surat al-Ahzab [33]: 21, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu." Beliau adalah potret dan teladan terbaik bagi siapa saja yang menghendaki kebajikan dengan pelbagai makna, fungsi dan orientasinya. Kebajikan dan keteladanan Muhammad benar-benar telah menjadi cahaya bagi dunia, baik dalam aspek *imani* (berbasis iman dan spiritualitas) maupun aspek *akhlaqi* (berbasis sosial kehambaan dan moralitas kemanusiaan).

Frithjof Schuon, pernah menegaskan bahwa hakikat Muhammad memiliki himpunan kebajikan yang terdiri dari empat bagian yang bersinergi dengan empat titik penting dalam ruang. Diantara titik kebajikan Muhammad, *pertama*, adalah kemurnian, yang berkait dengan ketenangan dan penarikan diri. *Kedua*, kekuatan yang berhubungan dengan semangat dan kewaspadaan. *Ketiga*, keindahan yang menyangkut aktualisasi ketenangan dan rasa syukur. *Keempat*, kebaikan dan cinta, yang selalu berkait dengan kepastian sekaligus kemurahan hati.

Kebajikan-kebajikan yang melekat dan menjadi keteladanan Nabi Muhammad ini sungguh tak bisa dihindari oleh kita sebagai masyarakat beragama. Bahwa amat sulit meneladani semua kebajikan pada diri Nabi Muhammad, adalah hal yang lumrah dan normal dalam konteks kita sebagai manusia dan hamba-Nya, berbeda dengan beliau sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Akan tetapi, menutup mata dan menghindarkan diri sejauh mungkin dari kebajikan-kebajikan yang diteladankan Nabi Muhammad, tentu merupakan penistaan tersendiri atas ajaran dan

keteladanan yang telah dicanangkan.

Kebajikan bukan hal yang sulit ketika dipandang dan diolah tumbuhkan dengan niat maupun spirit berbasis imani dan akhlak kehambaan. Bagi kita yang beriman, kebajikan adalah cita-cita sekaligus amal yang senantiasa harus dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bukankah lantaran kebajikan-kebajikan Nabi Muhammad Saw mampu mencerahkan manusia dan peradabannya. Dari dan untuk kebajikanlah Nabi Muhammad telah mengubah wajah dunia yang tadinya penuh angkara, kekerasan, eksploitasi, hegemonisasi, menjadi bermartabat, penuh kehangatan sosio-manusiawi dan kehambaan.

Kebajikan Pancasila(is)

Di antara titik kebajikan yang diteladankan Nabi Muhammad, *wabilkhusus* menyangkut kemurnian, keindahan, maupun kebaikan dan cinta, tampak memiliki semangat yang sama dengan visi dan misi luhur Pancasila, terutama sila kedua, yakni *kemanusiaan yang adil dan beradab* dan sila kelima, *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Betapa pun berat tantangan Nabi Muhammad saat mengenalkan Islam, beliau tetap mengedepankan penyelesaian kemanusiaan yang dipadu dengan spirit imani. Di tengah puasa Ramadan ini, pelbagai problematika sosial kebangsaan dan kenegaraan, perlu dicermati dan diselesaikan dengan ketenangan dan rasa syukur sehinga kelak melahirkan keindahan dalam berbangsa dan bernegara, bukan terus saling meninggikan egoisme atau malah menempatkan diri antikebajikan dalam lingkup tatanan kebernegaraan Pancasila yang sudah lama dinikmati. Kejujuran sikap dan amal kebangsaan yang dilandasi semangat keimanan, tentu akan menjadi bagian potret kebajikan yang searah dengan perikemanusiaan berkeadilan dan berkeadaban.

Dinamika sosial adalah hal yang niscaya dalam kehidupan, termasuk hidup berbangsa dan bernegara. Lalai dan salah pun demikian, selalu mempunyai ruang dan konsekuensinya sendiri. Akan tetapi, dengan sikap tenang dan syukur, dinamika sesengit apapun pasti ditempatkan pada posisi yang rasional, bukan didorong dengan cara-cara emosional. Begitu pula perbuatan (ke)salah(an), telah memiliki ruang eksplorasi dan pertobatannya. Lalai dan salah kepada Allah, wajib langsung bertobat kepada-Nya. Lalai dan salah kepada sesama manusia,

termasuk kepada bangsa, mesti diselesaikan seturut tradisi manusia dan kebangsaan. Sehingga keindahan hidup tetap terpelihara dan terjaga.

Kebajikan Pancasila(is), yakni spirit dan orientasi sila kelima itu, kalau dikaitkan dengan keteladanan Nabi Muhammad Saw, tentu agar elit-elit bangsa dan negara segera memberikan kepastian dalam berkeadilan, khususnya dalam konteks sosial ekonomi dan kebudayaan. Bukan hanya pandai wacana di ruang persidangan dan forum pencitraan. Sehingga akan teraktualisasi sifat-sifat kemurahan hati senyata-nyatanya dalam interaksi sosial bukan sebatas jargon dan gunjingan perdebatan di media massa.

Memberikan kepastian adil dan murah hati secara sosial perekonomian bukan hanya pada golongan atau kelompok tertentu, melainkan benar-benar berdasarkan semangat pemerataan tanpa padang bulu dan status, apalagi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sehingga tuntutan berlebih dari sebagian masyarakat yang telah lama ber-Pancasila ini tidak terus melenceng jauh atau kehilangan kendali lalu merusak tatanan penting dalam berbangsa dan bernegara, seperti fenomena akhir-akhir ini yang cenderung lepas dari rasionalitas-kolektif berbangsa. Tidak hanya itu, kemurahan hati seperti diteladankan Nabi Muhammad, terutama di wilayah sosial ekonomi dan kebudayaan, minimal akan mengurangi *social image* bahwa Pancasila hanya mekar di dada elit politik dan birokrasi, tapi layu dan mati di kehidupan riil masyarakat Indonesia pada umumnya. Padahal Soekarno telah menegaskan sejak awal bahwa "kita ini satu untuk semua, dan semua untuk satu." Inilah filosofi ke-tubuh-an; tangan, mata, telinga, kaki, bahu, kepala, dan sebagainya memang punya nama sendiri, tapi pada aspek fungsi dan amanahnya adalah menjaga eksistensi tubuh secara keseluruhan.

Puasa dan Pancasila, dari perspektif kebajikan yang diteladankan Nabi Muhammad, khusus keindahan maupun kebaikan dan cinta, sungguh memiliki kesenyawaan esensial yang tak bisa dinapikan. Puasa Ramadan menganjurkan berbuat kebaikan sebanyak mungkin dan mengeluarkan zakat fitrah adalah bukti nyata bahwa perikemanusiaan dan perikeadilan adalah kunci penting dalam berhamba dan berbangsa sekaligus. Dari sini kebajikan agama dan Pancasila menemukan ruang aktualisasinya.***

30

Bulan Prestasi

KH. Moh. Ilyas Ruhiyat, eks Rais Am PB NU, menegaskan bahwa sedikitnya ada tiga hikmah dalam puasa yang dapat dicermati dengan baik oleh setiap diri kaum beriman di manapun. *Pertama*, sebagai perisai diri. Artinya, puasa bukan soal lihai menahan lapar, haus, dahaga, dan bersetubuh di siang hari. Itu semata tautan lahiriah. Lajur biologis ketubuhan. Jauh di balik itu, terlebih di bulan Ramadan, puasa adalah perisai untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji, mungkar, dan perilaku tercela lainnya.

Kedua, melemahkan hawa nafsu. Secara naluri nafsu senantiasa mengajak pada hal yang buruk, jelek, keji, dan tidak diridlai Allah. Tak heran kalau Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa musuh yang paling berat adalah nafsu yang melekat dalam setiap diri kita. Bagi yang kaya, nafsu bisa mengajak untuk kekikiran. Untuk mereka yang menjadi pemimpin, nafsu menggoda agar tidak berbuat adil. Di hadapan mereka yang tergolong miskin, nafsu mudah sekali menggiring guna mencuri atau berbuat jahat jenis lain.

Ketiga, membiasakan diri sabar dan tahan atas beberapa

penderitaan secara manusiawi maupun yang berkait dengan kebijakan ilahi. Dalam istilah yang lain adalah sabar dan tulus atas dinamika pelik dari aspek lahir maupun batin. Mengekang tahan makan di saat lapar, tahan minum di kala haus dan dahaga, atau tahan tidak berhubungan badan di siang hari seperti disyariatkan oleh agama, semua bentuk penderitaan lahiriah. Sementara tidak menggunjing, tidak mengumpat, tidak berkata kotor, buruk, sampai pada membiasakan hati berzikir kepadaNya sungguh bagian dari latihan batini yang harus diprioritaskan dalam berpuasa.

Menjadi kuat

Nafsu menjadi kuat dan gagah, menirukan alur tausiyah KH. Moh. Ilyas Ruhiyat, salah satunya karena makan(an), minum(an), dan beberapa keinginan lain yang sarat pragmatisme maupun hedonisme. Kuatnya dorongan makan, minum, dan keinginan-keingian berlebih dalam diri manusia, akan ikut menguatkan nafsu pula secara kurang baik. Sebab nafsu selalu identik dengan sifat buruk yang melekat di dalamnya. Ini realitas. Ini fakta dalam kehambaan yang dialami hampir sebagian besar manusia.

Nafsu jua yang menarik kaum beriman melebarkan luapan iri, dengki, hasud, dan sifat-sifat tidak terpuji lain di hadapan sesama manusia. Dari dan untuk nafsu, tak jarang banyak kaum beriman lepas kendali, terjungkal jauh dari rel imani. Kehilangan arah dan orientasi luhur sebagai manusia sekaligus hamba. Bahkan bagi kaum berilmu, nafsu tak segan menjadikan mereka mudah takabbur, ujub, sombong, tinggi hati, dan merendahkan sesama. Dan lantaran kecenderungan buruknya ini, nafsu ditempatkan sebagai musuh bebuyutan manusia beriman sepanjang masa.

Nafsu perlu ada dalam diri manusia, minimal dalam perspektif biologis untuk menjaga kelangsungan tubuh secara manusiawi. Ia tak boleh dibunuh dan dimusnahkan seratus persen. Sebab ia adalah bagian dari hidup dan kehidupan. Namun demikian, nafsu mesti ditata, diarahkan, dan dikendalikan agar tetap berada dalam jalur positif-konstruktif dari dan untuk kehambaan sesuai fitrahnya. Menjaga keseimbangan nafsu dalam diri, merupakan awal dari kecemerlangan kita sebagai hamba. Aktualisasi kemanusiaan kita akan terus dinamis,

tidak pincang dan tidak eksploitatif.

Nafsu perlu ada, tapi tidak boleh terlalu kuat sehingga mengalahkan rasa dan warna imani kita dalam berhamba. Sebaliknya, perilaku dan nalar imani harus lebih kuat dari pada nafsu. Seimbang pun, tampaknya kurang bagus. Walau pada kenyataan kita adalah makhluk jasmani, yang terdiri dari tubuh dengan segala perangkat kasarnya, sungguh yang paling prinsip dari diri kita itu sebagai makhluk rohani. Makhluk Tuhan yang memiliki ruh, kunci segala proses dan aktifitas (ke)hidup(an). Kualitas ruh akan sangat menentukan kesejatian penghambaan kita di hadapan Allah SWT.

Ruh, seperti dalam masyarakat tasawuf, potensinya melebihi akal dan hati, terutama dalam konteks irisian spiritualitas. Bahkan dalam wilayah zikir sekalipun, sebagaimana dalam ajaran sufisme, lisan, akal, dan hati, belum memiliki kualitas teruji di hadapan Allah SWT dari pada ruh. Lisan manusia penuh bercak dan lumutan, akal manusia mudah sekali lompat-lompat dan berkelok, hati manusia juga mudah membusuk. Sementara ruh ia adalah milikNya. Ia berada dalam pengawasan Allah SWT langsung. Maka berzikir dengan ruh akan mudah sampai menyatu dengan Allah SWT.

Ruh dan Puasa

Ruh dan puasa memiliki keterkaitan paling prinsip dan monumental. Hikmah puasa seperti disinyalir KH. Moh. Ilyas Ruhiyat di atas, sungguh merupakan media awal untuk mencermati dan mematangkan keberadaan ruh dalam diri manusia. Dengan melemahkan nafsu melalui proses minimalisasi makan, minum, dan berbagai perilaku tercela di hadapan sesama sekaligus di mata Allah SWT, sejatinya untuk menjaga kualitas ruh ilahiah dalam diri agar tidak tercoreng.

Ketika nafsu terlemahkan dan tidak mengeksploitasi akal, hati, maupun ruh, maka pola puasa setiap umat pun akan terjamin baik secara lahiri sekaligus batini. Mereka akan terjauhkan dari perilaku konsumtif, sebatas mengonsumsi makanan dan minuman dengan berlebih. Mereka tak akan mudah terjebak pada hal-hal yang kontradiktif dalam imani, seperti mengunjing, mencerca, menghina, dan menyakiti sesama, baik langsung maupun tidak. Termasuk juga tidak akan dengan semena-mena menghakimi umat manusia yang mengaktualisasikan keberadaan

dirinya secara duniawi di bulan Ramadan.

Ramadan adalah bulan prestasi. Bulan dimana manusia beriman dibimbing langsung oleh Allah SWT dalam rangka menjadi hamba pilihan di dunia dan di akhirat kelak. Bulan dimana Allah banyak memberikan keistimewaan bagi setiap hamba yang merajut prestasi selama puasa Ramadan berlangsung. Bulan dimana tidur seseorang yang berpuasa pun dipahalakan oleh Allah SWT. Dan bulan yang tidak melalaikan sehela napas pun dari manusia kecuali dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Inilah bulan imani, bulan prestasi berbasis ilahi.

Paling tidak ada tiga realitas historis yang dapat dijadikan penguat bahwa Ramadan dan puasa yang ada di dalamnya adalah pemompa prestasi dalam kehambaan. *Pertama*, prestasi yang ditancapkan oleh kaum Muslim ketika mengalahkan pasukan kafir pada perang badar. Sebuah perang imani yang heroik dan menakjubkan. Sebab antara pasukan Muslim yang dipanglimai Kanjeng Nabi Muhammad secara matematis tidak seimbang dengan pasukan kafir kala itu. Tapi kegigihan dan cemerlangnya iman kaum Muslim telah menjadi senjata terampuh dalam liuk kesejarahan Islam.

Kedua, penaklukan kota Makkah. Sebelum Makkah ditaklukkan oleh Nabi dan kaum Muslim, berkali-kali pasukan Islam tidak bisa menunaikan ibadah haji. Selalu terhalang dan dicegah oleh keangkaraan kaum kafir. Makkah dikuasai kalangan kafir Quraisy. Makkah benar-benar hanya tampak sebagai simbol sakral bagi Islam tapi tidak tersentuh oleh kaum muslim. Namun di tengah-tengah puasa Ramadan, Nabi Muhammad Saw bersama pasukan bangkit dan menaklukkan Makkah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Inilah prestasi imani yang wajib diteladani sepanjang sejarah. Puasa tapi perkasa.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah juga didapat saat bulan Ramadan, yang konon jatuh pada hari keenam puasa Ramadan tahun 1945. Ini menjadi bukti puasa yang dilaksanakan dengan mencermati hikmah-hikmah diatas dipastikan melahirkan prestasi imani dan menjauhkan diri dari perilaku tirani berkehidupan. Artinya, dengan memperisaikan puasa bagi diri dan melemahkan nafsu secara imani, pelbagai prestasi melalui puasa Ramadan mudah diwujudkan dan egoisme duniawi akan terjauhkan. Itulah puasa berbasis imani, bukan berkedok ironi. ***

31

Upah Buruh(Dari) Kuali

Dalam konteks pemberian upah kepada setiap manusia yang menjadi pekerja, termasuk bagi pembuat kuali di Tangerang yang tereksploitasi, Islam telah menegaskan agar mengeluarkannya sebelum keringat pekerja itu mengucur. Ini bukti bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam senantiasa komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Nabi Muhammad Saw. bersabda bahwa seorang mukmin yang baik adalah ia yang memperlakukan sekaligus mencintai sesamanya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Sebab, masih kata Nabi Muhammad Saw., keberadaan sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Sekiranya ada salah satu bagian dari tubuh itu yang sakit, maka bagian yang lain pasti merasakan hal yang sama.

Sedemikian vitalnya kepekaan setiap muslim terhadap penderitaan sesama, sampai-sampai Nabi Muhammad Saw., menegaskan bahwa sebaik-baik manusia ialah mereka yang mampu menjadi jaminan kemaslahatan bagi manusia yang lain tanpa pandang bulu. *Khairu al nas an-fa-uhum li al nas.*

Perbudakan

Pada fitrahnya, kata Imam Ali kw., manusia lahir dengan kemerdekaannya masing-masing. Siapa saja yang memperbudak manusia, lanjut Imam Ali, mereka bukan saja mengingkari fitrah kemanusiaan, melainkan telah mengabaikan amanah ilahi sebagai khalifah di muka bumi.

Menyangkut kebebasan manusia ini, terutama dalam dinamika filsafat, perlu dicermati juga pandangan aliran Romantisme dan mazhab Pencerahan. Apa yang disinyalir Imam Ali, sejatinya sejalan dengan prinsip yang ditransformasikan oleh Romantisme maupun Pencerahan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang merdeka, ideal dan "kudus."

Namun demikian, Romantisme dan Pencerahan membedakan tentang apa yang sebenarnya membelenggu atau memperbudak manusia. Dalam perspektif Pencerahan bahwa yang memperbudak manusia adalah mitos-mitos dan emosi-emosi subyektif manusia itu sendiri. Dan semua ini hanya dapat diminimalisir sekiranya manusia memaksimalkan peran dan fungsi rasio yang ia miliki.

Sebaliknya, Romantisme memandang bahwa kebudayaan yang dihasilkan oleh rasio itu yang lebih banyak membelenggu manusia. Sepintas, dua aliran ini mengalami perbenturan konseptual. Akan tetapi, secara substansial, aliran-aliran diatas telah menggariskan bahwa sebebas-bebas manusia pasti akan berbenturan dengan perbelengguan-perbelengguan sosial dimana ia berada.

Konon, seorang filosof sempat menulis bahwa manusia memang dilahirkan bebas. Namun dimana-mana ia terbelenggu. Ia terjepit dan mengalami kepengapan. Tak sedikit manusia yang menganggap dirinya tuan bagi manusia lain, padahal ia tak ubahnya seorang budak yang lebih parah dari pada mereka. Ia terjebak dalam ego-rasionya yang amat materialistik. Ia tersandra oleh mitologi budayanya yang kaku.

Kekuatan rasio kadang tidak cukup kuat untuk membebaskan manusia dari perbudakan sosial yang lahir dan tumbuh dari dalam dan luar dirinya. Ketika manusia hanya bergantung pada rasio untuk menerobos keterbelengguan sosialnya, maka ia hanya akan berada

dalam keberhasilan yang parsialistik. Ini sama sekali tidak menjamin kemaslahatan lebih jauh bagi eksistensi kemanusiaan secara makro.

Untuk melepaskan diri dari perbudakan yang diakibatkan oleh mitos, emosi-subyektif, atau kebudayaan yang kaku, manusia juga memerlukan support dari kekuatan spiritualitas. Dan kekuatan spiritual ini hanya ada dalam agama yang senantiasa menjamin nilai-nilai solidaritas kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*) berbasis ketuhanan.

Kekuatan spiritual selalu mengajarkan tentang kelembutan, kebersamaan, keluhuran sikap, kepekaan insaniyah, dan juga keteladanan kolektif. Inilah yang oleh kaum sufi dikategorikan sebagai sikap dari pada keimanan sejati. Selalu "bisa merasa", dan bukan "merasa bisa." Bahkan JJ. Rousseau menguatkan bahwa tak ada yang begitu amat mengena di hati selain rasa manis yang muncul dari isak tangis bersama.

Penyair terkemuka, Sa'di, ikut menegaskan dalam sajaknya "Anak-anak Adam adalah anggota dari satu tubuh, sejak dari saat penciptaan mereka terbuat dari satu substansi. Ketika takdir menyebabkan sakit pada salah satu anggota, Anggota yang lain tidak bisa tetap diam. Kau yang tak berduka atas derita sesama, tak layak disebut manusia."

Perbudakan yang dialami para pemuda pembuat kuali di Tangerang, Banten, tidak akan (pernah) terjadi kalau tanjakan rasio pemilik pabriknya dikawal dengan komitmen spiritualitas (agama). Mengandalkan kekuatan rasio *an sich,* tentu saja tak akan ada bedanya dengan yang dilakukan Komunisme. Satu sisi begitu getol membela kaum buruh dengan segala haknya, namun di ranah lain telah mengingkari eksistensi Ilahi Rabbi. Karenanya disebut "atheis," dan dicap sangat berbenturan dengan Islam.

Hamba Sejati

Kehadiran Islam sejak awal adalah melawan perbudakan di antara sesama manusia. Dalam pandangan Islam, manusia itu sama. Yang membedakan hanya kualitas ketakwaan mereka di hadapan Allah Swt. Bahkan Asghar Ali Engineer mensinyalir bahwa spirit ideal Islam sejatinya adalah semangat kepedulian dan pembebasan

manusia dari beraneka perbudakannya di muka bumi.

Islam senantiasa mengajak setiap manusia untuk menjadi hamba sejati. Artinya, ia manusia di lingkungan sesamanya, namun ia adalah hamba di hadapan Tuhannya. Sebagai manusia, setiap diri harus meletakkan segala perilakunya di atas kebajikan berbasis kemakhlukan. Dan sebagai hamba, ia wajib menempatkan seluruh sikapnya sejalan dengan ajaran-ajaran Ilahi.

Salah satu ajaran Ilahi adalah mentransformasi solidaritas kemakhlukan sepenuhnya di muka bumi. Tidak boleh pandang bulu, apalagi memasukkan sentimentalitas bernuansa SARA. Bahkan kata para sufi, mengaktualkan kepedulian sosial, belas kasih, dan solidaritas itu ada yang bersifat universal dan parsial. **

32

Uskup Baru, Saudara Baru

Bagaimanapun, Mgr. Hilarius Moa Norak, adalah simbol sekaligus salah satu tokoh teladan dalam iman dan kemanusiaan di Kepulauan Bangka Belitung. Dua puluh lima (25) tahun lebih Mgr. Hila telah menghidmatkan dirinya menumbuhkan, memompa, mengawal, dan mentransformasikan nilai-nilai imani demi penguatan sosial kemanusiaan antar umat. Sebagai putra Timur, dia lepaskan ketimuran dan lebur dalam napas ke-Bangka-an. Mungkin sifat jiwa seperti itu yang ikut mengantarkan dirinya diterima orang Bangka, khususnya umat Katolik, hingga masa-masa produktifnya habis.

Dalam suatu obrolan ringan sekira 3 tahun lalu, Mgr. Hilarius menuturkan bahwa iman bukan semata komitmen spiritualitas dari dan untuk diri seseorang. Lebih dari itu, iman merupakan bahan baku yang paling penting dalam rangka mewujudkan interaksi sosial keumatan. Inilah potret iman yang mencerahkan. Iman yang tidak membuat kita kaku di tengah interaksi sosial kemanusiaan dan kebangsaan. Iman yang sentuhannya senantiasa menggairahkan dan menyuburkan tanaman keharmonisan diantara sesama, baik internal

komunitas seiman maupun lintas imani.

Mgr. Hilarius telah pergi dengan kelebihan dan kekurangan yang pernah dimiliki. Akan tetapi, warisan pencerahan iman dan kemanusiaannya, tak boleh ikut terkubur. Semuanya patut diapresiasi dan ditransformasikan. Dan kini hadir ke pangkuan bumi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penerusnya, Mgr. Adrianus Sunarko. Juga sama-sama putra dari Timur. Namun demikian, Mgr. Adrianus ini dibesarkan secara pendidikan di Yogyakarta sebelum mencicipi sosial budaya hidup dan intelektualitas di Jakarta dan Jerman. Putra Timur yang kembali mesti lebur dengan semangat keserumpunan dalam wilayah kepulauan yang masih berpegang kuat atas kearifan tradisi leluhurnya.

Imam Tarekat

Selaku perwakilan dari imam tarekat, Mgr. Adrianus Sunarko tentu paham akan keserdehanaan hidup yang mesti dijalani. Terlebih karena ia adalah seorang Uskup, yang kelak ditokohkan dan diharapkan mampu memberikan pelukan serta belaian hangat terhadap umat-umatnya. Sebab krisis sosial kebangsaan dan kenegaraan belakangan ini, disadari atau tidak, sebagian berawal pula dari lenyapnya kesederhanaan yang terlibas oleh pragmatisme dan hedonisme masyarakat. Ini fakta sosial yang mesti dicermati dan dicarikan solusi berbasis imani.

Terjebaknya tak sedikit umat beriman di antara paradoks kehidupan sosial kebangsaan pun, tentu adalah konsekuensi logis dari tersisihkannya pemikiran dan sikap kesederhanaan. Padahal sederhana itu sama sekali tidak hina. Ia sangat esensial, rohaniah, dan menyimpan banyak nilai-nilai kebajikan. Sederhana itu unik, menakjubkan dan bersahaja. Ia adalah aktualisasi dari kematangan sosial dan spiritual seseorang. Ia bukan hal yang memalukan dan merendahkan. Sederhana, adalah kunci eksistensi diri berbasis imani. Ia menggugah dan menggetarkan.

Dari kesederhanaan akan lahir banyak kebajikan dan hal-hal produktif, bukan ambisi paradoksal dan sikap semu berkehidupan. Sederhana sungguh empatik, tapi selalu menumbuhkan potensi diri yang tak tersentuh. Dan jauh di balik itu, sederhana yang dilancipkan

dengan spiritualitas cinta kasih adalah teladan dari Sang Kristus. Dari kesederhanaan ini Kristus menjadi pujaan umat sepanjang sejarah kehidupan manusia beriman (Katolik). Sebab yang esensial dalam gereja, kata Marcel Mathijs, adalah Kristus yang sederhana dan hidup, yang senantiasa setia untuk memasuki penderitaan dunia.

Meskipun sederhana, Kristus tidak pernah minder dan selalu siap menghadapi dunia, menerima dan memberikan keselamatan bagi manusia. Ia hadir sebagai utusan Tuhan, yang datang dari dan atasnama Tuhan sembari menyuguhkan harapan-harapan menyegarkan terhadap sosio-kehidupan manusia beriman. Dan harapan, adalah sinyal kehidupan yang mesti dipelihara sebaik mungkin, lebih-lebih bagi pribadi yang beriman. Tanpa harapan, seseorang akan kurang positif menghadapi dan memaknai tanjakan-tanjakan kehidupan bermanusia.

Semangat ini yang tentu perlu ditransformasikan oleh Mgr. Adrianus Sunarko selaku Uskup Pangkalpinang dalam rangka meneruskan warisan Mgr. Hilarius yang supel, sederhana, tapi senantiasa energik. Sehingga interaksi dan jalur-jalur sosial kemanusiaan berbasis kesederhanaan, bertali kerukunan, "bernapas imani,"dan bersayap cinta kasih Kristus, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, semakin terbuka dan bertumbuh lebih sehat dan menyehatkan semua umat. Apalagi kalau nilai-nilai filosofi keserumpunan dan kesebalaian dari kedalaman kultur masyarakat Bangka juga diinternalisasi dengan baik, maka harmoni berbasis "keluarga" khas Bangka Belitung akan terasa gurih.

Cara Bersaudara

Mahatma Gandhi pernah melantangkan suatu ajaran hidup bahwa *"Anda tidak harus kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sebuah lautan; jika sedikit bagiannya kotor, lautan tidak akan menjadi kotor."* Semangat ajaran ini layak diketengahkan dalam rangka menguatkan cara bersaudara dalam kemanusiaan. Terlebih lagi kata Sayyidina Ali kw, setiap diri yang tidak sesaudara dalam iman dan agama, sejatinya adalah sesaudara dalam kemanusiaan. Saudara dalam kemakhlukan dan kehambaan. Ini sangat rasional dan menumbuhkan harapan (*hope atau al-raja'*).

Di sisi lain, Sang Buddha juga mengajarkan keteladanan dalam kesederhanaan yang bermula dan berujung pada salah satu keistimewaan manusia, yakni pikiran. Melibatkan kejernihan dan ketercerahan pikiran dalam hidup akan melahirkan hal-hal empatik bagi setiap diri. Ia akan terjauhkan dari anggapan-anggapan sentimentil berlebihan yang terus menggerogoti keaslian naluri kemanusiaan kita. Sebab, menirukan filosofi Sang Buddha, ketika kita masih berpikir "ia memukul saya, ia menghina saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya, maka selama itu pula kebencian tidak akan berakhir."

Paus Fransiskus pernah menegaskan bahwa kita semua adalah anak-anak dari Bapa surgawi, kita berasal dari keluarga manusia yang sama dan berbagi nasib yang sama. Dan inilah, masih kata Paus Fransiskus, yang membuat kita bertanggung-jawab untuk bekerja sama sehingga dunia menjadi komunitas persaudaraan yang saling menghargai, menerima perbedaan satu dengan yang lainnya dan saling menjaga. Semangat ini tidak boleh jadi diskursus semata, akan tetapi harus terinternalisasi dalam sikap keseharian beragama, berbangsa dan bernegara.

Inilah spirit cara bersaudara yang prospektif. Sungguh menjadi impian kalau kita sepakat hendak menumbuhkan dan menguatkan persaudaraan integralistik dan toleransi keumatan yang produktif. Dan hal ini pula yang mesti dicermati sekaligus dijahit oleh Mgr. Adrianus Sunarko selama menjadi Uskup Pangkalpinang ke depan. Sebab persaudaraan selalu menyangkut kesiapan dan keterbukaan hati maupun perilaku dari dan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga Mgr. Adrianus Sunarko bisa menjadi Uskup sekaligus saudara baru di halaman rumah Kepulauan Bangka Belitung. **

33

Semangat Pluralitas Dalam Penutupan Tahun Iman di Keuskupan Pangkalpinang

Seorang Filosof kristiani, Thomas Aquinas, telah mensinyalir bahwa Iman itu rasional Iman itu aktif dan tidak pasif. Iman itu tajam dan energik. Iman bukan barang yang mirip pesanan kosong. Iman selalu bercahaya dan menakjubkan. Bahkan dalam perspektif tradisi islam, Iman merupakan kunci bagi keberadaan manusia sebagai hamba Tuhan. Dan sekiranya manusia lepas dari sandaran Iman, kelangsungan interaksi sosialnya akan terbilang lambat untuk bertumbuh.

Hassan Hanafi, salah seorang pemikir tokoh islam terkemuka sempat mengurai bahwa Iman sebetulnya merupakan metodologi dalam konteks kehambaan manusia dihadapan Tuhan. Melalui Iman, tegas Hanafi, setiap diri akan dapat menerima dan memahami wahyu yang telah Allah diturunkan. Dan kelak Hanafi memunculkan gagasan menarik bahwa keImanan yang dibangun dari kontruksi rasionalitas atau berdasarkan nalar yang jelas ia akan mampu membangkitkan pemikiran jernih dan mengilap dalam diri masing-masing hamba.

Adakalanya, lanjut Hanafi, Iman ditampilkan sebagai suatu

kerangka teoritis untuk memahami realitas kehidupan baik yang langsung bersentuhan dengan orientasi ilahiah maupun yang berkait dengan sosial keumatan. Dan lantaran tampil bersifat teoritis, Iman senantiasa lekat dengan struktur argumentasinya tersendiri. Disinilah barangkali terjadi persenyawaan antara ilustrasi aquinas dengan jejak pikir teologis Hassan Hanafi, bahwa Iman telah memiliki rincian rasionalitasnya sendiri.

Tiga Hal

Setidaknya ada tiga hal yang cukup layak diapresiasi dan dikembangkan deretan maknanya dari acara "Penutupan Tahun Iman Keuskupan Pangkalpinang" yang dilangsungkan di Gua Maria, Belinyu, Kabupaten Bangka, pada hari Minggu (24/11/13) yang dihadiri oleh ribuan Umat Keuskupan Pangkalpinang.

Pertama, ziarah berbasis imani yang menjadi bagian tahapan acara Tahun Iman yang dilaksanakan oleh umat katolik selama kurang lebih satu tahun itu telah menjadi inspirasi bagi penyegaran spiritualitas kehambaan. Terlebih ketika dikaitkan dengan fenomena keberagamaan akhir-akhir ini yang kian mencemaskan walau tanpa dimungkiri juga telah menampakkan kemajuan di beberapa hal.

Penyegaran iman, terutama ditengah himpitan modernitas dengan berbagai sentuhan pragmatismenya, disadari ataupun tidak merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Sebab, gesekan sosial keberagamaan diera penuh "gaya" dan "kegalauan" ini tampak semakin jauh dari kedalaman humanitas dan spiritualitasnya. Ada sekelompok masyarakat yang mulai arif dengan berbasis keimanannya, tetapi tidak sedikit pula diantara umat yang hanya semakin egois dan temperamental dengan bangunan imannya yang parsialistik.

Perlunya iman disegarkan, sungguh bukan saja akan memiliki dampak bagi pemiliknya, baik yang berada dalam lengkungan tradisi Islam, Kristiani, Buddha, dan yang lain-lain. Jauh dibalik itu, iman yang disegarkan akan menjadi terobosan strategis dalam pemaknaan dan pembentukan budaya hidup kearah yang lebih produktif dan prospektif. Artinya, penyegaran iman adalah pemompaan aktual terhadap fitrah kemanusiaan, baik sebagai individu maupun masyarakat atau dalam bahasa yang lebih "gaul" segarnya iman berarti juga cerahnya peradaban umat dalam skala makro.

Kedua, disamping sebagai inspirasi kematangan spiritualitas, ziarah berbasis imani dalam rangkaian Tahun Iman ini sesungguhnya menjadi teguran rohaniah yang cukup santun tetapi juga menggelitik eksistensi keimanan kita. Santun lantaran diaktualisasikan dengan media dan cara-cara yang disandarkan pada semangat maupun nilai-nilai keagamaan visioner, lembut, dan aspiratif sehingga terjauhkan dari emosi intoleransi dan anarkisme. Dan menggelitik karena visi dan misi dari Tahun Iman ini benar-benar hendak menyehatkan laku dan mentalitas keagamaan kita dihadapan sesama makhluk Tuhan.

Ketiga, sekiranya peringatan Tahun Iman diwujudkan dan ditransformasikan secara kolektif oleh institusi-institusi keagamaan yang berada dinegeri ini, tentu akan menjadi bagian dari perekat sosial kebangsaan yang cukup mencerahkan, setidaknya dalam kontek spiritualitas dan jalinan persaudaraan berbasis imani. Sebab, kontruksi filosofis Tahun Iman, sebatas yang saya ketahui adalah hendak membeningkan jiwa sekaligus membatinkan rasa kehambaan setiap umat baik dihadapan sesama maupun di haribaan Tuhan. Pemilik kerajaan kasih.

Bilamana dilaksanakan secara kolektif dengan institusi keagamaan yang lain, tentu rangkaian ritual Tahun Iman pun akan kaya tradisi, makna, dan sentuhan religiusitas yang plural. Atau, dalam perayaan Tahun Iman ini akan menjadi jalur alternatif dalam rangka memupuk dan menyuburkan prilaku sosial keagamaan berbasis toleransi yang lebih strategis-aplikatif. Disamping itu ia dapat dijadikan barometer atas semangat dan ketulusan persaudaraan kemanusiaan (*Ukhuwah Insaniyah*) dalam kontek keagamaan di negeri ini.

Bahwa dalam praktiknya memang tidak akan sepi dari tantangan maupun hambatan dari berbagai sisi, itu adalah "bumbu" untuk menggurihkan apa yang dinamakan "proses". Sebab, membangun persaudaraan sejati; yang jauh dari kecurigaan, ketertutupan (eksklusivitas), keangkuhan (egoisitas), pesimisme (keraguan/ketakutan), inkonsistensi, toleransi dan yang sejenisnya, merupakan kerja keumatan yang sangat besar. Dan setiap pekerjaan yang berat dan besar, seperti istilah Paus Yohanes Paulus II, senantiasa memerlukan kesabaran, sedangkan kesabaran, kalau meniru ilustrasi sufistika Al-Ghazali, adalah moralitas terluhur dalam konstalasi

kehambaan setiap manusia.

Pohon Iman

Dalam rangka memicu dan memacu transformasi nilai-nilai agung perayaan Tahun Iman itu dengan baik dan terarah, setidaknya menurut hemat saya, tidak berlebihan jika kita mulai menanam dan merawat "pohon iman" terlebih ketika hal itu dikaitkan dengan lonjakan-lonjakan modernitas, industrialisasi, dan globalisasi sosial yang terlihat lincah mendedahkan rasionalitasnya. Dan sebagaimana kita lihat, agama dan keimanan umat (terkadang) sangat terombang ambing diantara peraturan "rasio" modernitas dan globalisasi yang kian ganas. Untuk itu, agama dan struktur keimanannya memang tetap harus lebih kuat dan menyakinkan dimata publik.

Betrand Russell, jauh dimasa yang lalu telah menegaskan "jika agama ingin tetap eksis dalam kehidupan manusia, agama sendiri harus mengubah diri menjadi semakin masuk akal. Sebab ketika agama mulai dikalahkan oleh nalar-nalar modernitas dan globalisasi yang semakin liar, pelan tapi pasti agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Tidak hanya sampai disitu, kalau agama semakin ngawur dan kehilangan rasionalitasnya dihadapan peradaban modern, cepat atau lambat akan gampang disingkirkan dari hiruk pikuk kehidupan umat manusia pada umumnya. Maka wajar kalau Imam Ali Kw. Berkata, *laa dina liman laa aqla lahu*.

Namun demikian, seperti kita mafhumi, tidak semua yang ada dan nyata dimuka bumi, termasuk yang menyangkut (ke)agama(an), selalu bisa untuk dilihat dan diselesaikan melalui akal. Untuk mengetahui kebenaran saja, misalnya, bukan hanya melalui akal (rasio), melainkan juga dengan hati. Disinilah iman itu mendapatkan ruang eksistensialitasnya. Sebab iman kata Blaise Pascal, adalah penasihat terbaik dari pada akal. Dan akal, lanjut Pascal, mempunyai batas, sedangkan iman tidak. Bahkan iman sendiri bukan semata-mata urusan "akal" melainkan selalu bergandengan hangat dengan yang selalu disebut "budi". Maka iman sejatinya adalah kejernihan akal dan kedalaman budi setiap umat beragama.

Dalam iman, mengamini gagasan Pascal, setiap umat memang ditekankan untuk bertaruh dari dan untuk keberadaan Allah. Adapun pertaruhan, pasti mengandaikan ada pihak yang disebut kalah dan

pihak yang dinyatakan menang. Pascal mengurai, "kalau kau percaya (akan adanya Allah), dan kalau menang (Allah sungguh ada), kau memenangkan segalanya, jika kalau kau kalah (ternyata Allah tidak ada), kau tidak kehilangan apapun. Jadi, percayalah jika kau dapat".

Lebih jauh Pascal mengingatkan, bahwa dalam pertaruhan demi Iman kepada Allah akan menyebabkan kita menunda dulu kesenangan-kesenangan yang parsial dan kurang bermakna lalu menggantinya dengan prilaku yang peka-humanitas dan mendamaikan. Seandainya pun kita kalah, lanjut kata pascal, hidup dengan berbuat kebajikan itu sendiri sudah merupakan keutamaan. Dan kalau menang, hidup kita yang baik akan diganjar dengan kebahagiaan abadi. Inilah wujud kematangan rohani kita sebagai hamba dan Khalifah-Nya. Inilah model kejuangan sosial religiusitas yang kelak akan dimaknai oleh Tuhan dengan keadilan dan luasan Kasih-Nya.

Dengan demikian, sebagai kaum yang (masih) percaya akan adanya Allah mari bersama-sama kita tanam pohon iman; yang akarnya terdiri dari kejelian, kepekaan, ketulusan, kesungguhan, keadilan, dan komitmen tinggi terhadap amanah *ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathaniyah* selaku penghuni bumi;sedangkan dahan, ranting, daun, serta pucuknya kita kemas dari kejernihan akal (nalar) dan kematangan batin (spiritual) yang berbasis keluhuran nilai-nilai ilahi sebagai dzat yang bersemayam di Arsy (langit). Dan pohon iman ini perlu kita tanam disetiap ruang sosial kehidupan, lalu kita siram dan pupuki dengan semangat kolektivitas utuh, sehingga berbagai elemen umat dapat menempa diri sekaligus berteduh sepenuh jiwa dibawahnya.

Ala kulli hal, Tahun Iman juga sebenarnya dapat dimaknai sebagai ruang praktis bagi kita untuk bertumbuh dengan iman secara lebih menakjubkan, bukan semata pemolaan aktivitas (fisik) rutinan yang melelahkan.**

34

Cinta Agama Cinta Sesama

Di antara ajaran semangat Nabi Muhammad SAW dengan agama islam yang dibawanya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang dapat menaburkan kemanfaatan bagi sesama manusia. Moralitas Nabi Muhammad yang begitu luhur, menakjubkan, dan mengagumkan telah melahirkan empati humanitas berbasis imani dalam rentang sejarah keagamaan (islam) yang amat panjang. Tidak sedikit manusia yang bersentuhan secara kehambaan dihadapan Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh sentuhan humanitas berbasis imani yang di transformasikan.

Hikayat humanitas berbasis imani yang di gelindingkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sedemikian banyak. Salah satunya ketika ada rombongan umat yahudi yang memanggul saudara mereka yang telah meninggal, lalu lewat dihadapan Nabi dan para Sahabat seketika Nabi berdiri "*Limadza kumta* ya Rasulullah,kenapa paduka Rasul berdiri ? bukan kah yang meninggal dan dipanggil tadi adalah umat yahudi ? tanya sahabat kepada Nabi. "betul dia adalah umat yahudi. Akan tetapi bukankah dia juga manusia ?" jawab Nabi dengan nada

suara penuh kharisma. Sahabat pun terdiam, mencerna apa yang telah disampaikan Nabi.

Selintas, hikayat ini tampak sederhana tapi sungguh substansial. Legalitas imani belum mengindikasikan kualitas kehambaan kalau dijauhkan dari semangat luhur humanitas dari dan antar sesama. Legalitas imani adalah wilayah formal atau struktural dalam ranah religiusitas setiap diri. Namun aktualisasi humanitas merupakan daging dari kerangka imani yang didalamnya darah ilahiah terus mengaliri denyut nadi spiritualitas kehambaan. Dan spiritualitas, seperti menurut banyak pakar keagamaan, tidak hanya identik dengan agama tertentu. Spiritualitas itu tarikannya melebar, meluas, dan melingkupi nilai-nilai sekaligus mentalitas imani berkehidupan. Ia tidak sempit dan menyempitkan diri. Ia bertumbuh dengan aura kedalaman esensialnya.

Cara Beragama

Ada banyak cara beragama. Hal itu tergantung pada pola pikir, konstruksi paradigmatik, kecermatan, kejernihan, atau ketulusan mengaktualisasikannya. Agama bukan semata wacana, pemikiran, retorika teoritis, atau propaganda religius. Agama adalah wujud perilaku, sikap, moralitas, dan totalitas dalam menghamba dan berkhalifah dimuka bumi Allah SWT. Agama yang sering diteorikan dan diwacanakan belaka, pelan tapi pasti (mudah) mengalami disorientasi praksis dihadapan realitas hidup umatnya. Meski melahirkan banyak gagasan (baru) sekalipun, agama yang hanya diteorikan gampang di cerca dan dikerdilkan penganutnya sendiri.

Terlebih lagi agama kalau dipolitisasi atau dikapitalisasi, ia akan tumpul secara sosio-spiritual. Ia kehilangan sensitivitas dan akuntabilitasnya , tidak banyak menebarkan maslahat, kurang aspiratif, dan tidak jernih dalam memaknai berbagai realitas sosial masyarakat. Yang sering keluar dari agama semacam ini adalah semangat mengdistorsi, mengeksploitasi, atau mengkapitalisasi atau juga saling mengkafirkan ketertundukan umat dihadapan Allah SWT maupun dalam konteks kehidupan antar sesama. Disinilah agama akan kehilangan produktifitas dan keluhuran nilai-nilai spiritualitasnya. Ini cara beragama yang kurang matang, jauh dari dewasa, dan tidak peka humanitas, selalu kontraproduktif, bias dan bahkan sulit untuk berbagi keharmonisan.

Fitrah agama itu pemanggul, penebar, dan penyemai kebajikan bagi setiap penganutnya. Kalau dalam istilah sabda Nabi Muhammad Saw, agama itu "nasihat" bagi setiap diri umat. Nasihat bukan semata untuk meluruskan prinsip atau paradigma yang terlihat bengkok dari kehidupan manusia, melainkan nasihat atas seluruh cara pikir, olah laku, wujud interaksi, tatakrama ucap, hingga spirit berhamba dihadapan Allah SWT sekaligus berkhalifah dimuka bumi. Cara beragama ini tertancap dan terinternalisasi empatik dalam diri Mgr. Hilarius Moa Nurak. SVD. Sosok ini disamping kharismatik juga humoris kaya akan cerita unik berdimensi religius.

Suatu waktu, saat Mgr. Hila (saya memanggilnya), membuka diri untuk tamu-tamu yang berdatangan dihari Natal, rombongan GP ANSOR Kepulauan Bangka Belitung ikut menyelami dan menikmati bagimana cara Mgr. Hila mengaktualisasikan nalar praksis beragama sebagai Uskup melayani umat dan merangkul sesama. Tidak ada lagi perbedaan ideologi, ras, dan agama diantara kami kala itu. Mgr. Hilarius Moa Nurak menyalami dan memeluk satu persatu diantara rombongan GP ANSOR. Sungguh kehangatan nyata. Keharmonisan itu ada. Kerukunan menjadi fakta. Ketulusan beragama sedemikian terasa. Pilihan-pilihan simbolik keagamaan diantara kami berjalan seiring seesensi; lebur berkemanusiaan.

Mgr. Hila sedikit berseloroh, "agama itu soal hati. Iman juga soal hati, bukan semata pikiran. Sebab kalau semata agama sebatas "dipikirkan" ia kan terbang jauh dari sikap hidup bermanusia, tapi kalau agama dipijakkan dan digerakkan dengan hati, yang akan lahir adalah simpati dan empati. Kita akan lebih dalam dan tulus memaknai kehadiran sesama meskipun beda iman, beda ideologi, berlainan suku, dan ketidaksamaan beberapa hal lain. Berkumpulnya kita diruangan ini sekarang (saat Natal 2014), bukti bahwa kehadiran kawan-kawan GP ANSOR merupakan wujud dari sikap agama yang dilapisi kejernihan hati".

Sejenak kami terdiam. Dalam hemat pribadi, saya bergumam dihati "Mgr. Hila ini *kok* penganut sufi ajaran Imam Al-Ghazali ya? Dari mana Mgr. Hila tahu dan membaca kitab Ihya Ulumudin ? apa Mgr. Hila ini pintar bahasa arab lalu fasih membaca kitab klasik? Atau Mgr. Hilarius Moa Nurak membaca versi bahasa inggris dan bahasa lain?"

sederet pertanyaan menghantui kala itu. Disela-sela pembicaraan dan diselingi humor ringan, tiba-tiba saya menangkap kedalaman beragama sang Uskup dari selorohan diatas. Dan kedalaman beragama senantiasa membawa setiap diri memasuki relung ilahiah kemudian menempatkan sesama makhluk dalam satu nafas rahmat, kasih, kebajikan, dan kemakhlukan. Seperti kata Imam Ali K.w., meskipun diantara manusia ada yang dipandang tidak sesaudara dalam iman, sebetulnya mereka tetap sesaudara dalam kemanusiaan (sesama manusia).

Luaskan Pergaulan

Cara beragama yang matang dan jernih tentu saja dengan meluaskan pergaulan di kalangan sesama. Ia tidak asyik dengan dirinya sendiri tidak egois, tidak ekslusif, tidak pula fanatik berlebih. Sebab fanatik berlebih hanya akan melahirkan hal-hal yang berbau kontradiksi, antipati, mengurangi kualitas kehambaan sekaligus menyempitkan jalan kemanusiaan. Padahal jalan Tuhan sejatinya, adalah jalan kemanusiaan. Jalan yang tiada henti dan tidak kenal batas untuk tetap menyentuh, merangkul, dan memaksimalkan potensi kebajikan dari dan untuk sesama makhluk Tuhan. Jalan ibadah kepadaNya merupakan jalan awal meneruskan amanah kebajikaNya direlung realitas sosial antar sesama.

Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa kunci ibadah bukan semata proses diri untuk diri sendiri, melainkan kesiapan diri untuk terus memenuhi seruan dan panggilan ilahiah. Atau, dalam istilah Moh. Iqbal, sejauh mana pribadi memiliki konsistensi kepekaan atas kebajikan *rabbani* sekaligus harmonisasi. Semangat luhur ini sering dikategorisasikan jihad dalam makna dan trasnformasi nilai yang lebih integralistik, bukan jihad formalistik yang kadang destruktif. Jihad diri yang integralistik ini cukup berat dan membutuhkan penghambaan penuh. Bahkan usai memenangkan pertarungan dengan orang kafir, ketika sahabat-sahabat sedang hendak meluapkan kegembiraannya, dihadapan para sahabat itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa jihad yang paling besar dan sulit sejatinya adalah jihad melawan orientasi (nafsu) diri sendiri. Artinya, setelah diri ini pergi untuk bertransformasi secara eksternal, ia pun harus dikawal agar kembali ke dalam fitrahnya dengan intergral, empatik dan universal.

Berhaji ke Tanah Suci dan mengelilingi ka'bah , kata Ali

Syariati, adalah artikulasi dari simbol-simbol religiusitas yang sangat substansial. Peleburan dalam satu ruang dengan simbol-simbol dan ritual sama didalamnya adalah rujukan riil bahwa agama tidak hanya berdimensi ilahiah, melainkan menjunjung tinggi potensi, harkat dan martabat insaniyah (kemanusiaan). Agama Allah SWT merupakan kebajikan bagi sesama manusia. Ia bukan semata media ritualitas-formalistis. Dan karena sumber kebajikan, agama senantiasa melampaui batas-batas partikularitas dalam sosio-kemanusiaan. Maka cinta agama sejatinya adalah cinta sesama. Cinta agama juga cinta keutuhan diri sebagai hamba sekaligus khalifah. Militan dalam imani, produktif secara praksis manusiawi.

Apa yang dilakukan GP ANSOR Kepulauan Bangka Belitung terhadap Mgr. Hilarius Moa Nurak di akhir hidup duniawinya (baca: memikul keranda menuju peristirahatan ukhrawi), merupakan artikulasi dan komitmen praksis manusiawi berbasis imani dan kedaulatan diri. GP ANSOR hendak menegaskan bahwa dinamika keberagamaan bagian tidak terpisahkan dari dinamika hidup kita sebagai makhluk Allah untuk menabur subur rahmat bagi seluruh alam. Sebab agama, termasuk islam, adalah pembawa kabar gembira kepada manusia. Cinta agama, cinta sesama. Cinta agama, merupakan peta teologis dan sosiologis menuju keharmonisan universal dan bukan fanatisme parsial yang sering kali diteriak-teriakkan dengan varian pembenaran.

Hidup sudah kaya warna. Tidak tunggal, selalu berkait antara yang satu dengan yang lain. Saling melengkapi, membutuhkan dan menumbuhkan. Hidup, dalam istilah Muthahhari, penuh dengan keadilan ilahi. Sebagai manusia, lanjut Muthahhari, sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari warna dan peran serta orang lain. Yang kaya sejatinya tidak boleh memungkiri keberadaan yang miskin. Yang tampan sebetulnya menuai berkah dari eksistensi yang kurang tampan. Dan yang islam, bisa jadi menemukan keislamannya dari yang katolik, atau sebaliknya. Tidak baik saling menjatuhkan. Mendalami diri tidak cukup hanya dari diri sendiri, bisa juga dari sesuatu yang berada diluar diri kita. Itulah *ibrah* atau perumpamaan. Demikian cara beragama dan bermanusia yang konstruktif. Sebab cinta sesama atas dasar trasnformasi nilai religi sejatinya merupakan aktualisasi dari

realitas kesemestaan maupun keilahian. Ini akan terus menakjubkan.

Akhirnya, Mgr. Hila, inilah sajakku:

Kau embun sekaligus api
Kau didamba dicinta dan dipuja
Kau tak kan kembali
Nafasmu tetap disini, di ulu hati
Kusebarkan selangit tinggi, sedalam bumi
Jalan kasihmu putih mewangi
Di sini di ulu hati
Kau berdiri
Tiup kasih surgawi
Mengenangmu itu sabda
Sebut nama pun pelembut rasa
Bermanusia
Laut kau lintasi dengan misi
Gunung kau daki berkaki ilahi
Kau dan kita
Tetap pengembala
Damailah di surga
Telapakmu menyala-nyala
Dari timur kau tata huruf dan kata
Dibarat kau teguk samudera
Diulu hati kau jernihkan jiwa
Dibangka kau peletak segala
Dikedip matamu
Timur barat lebur jadi cinta
Melebar dilaut bangka
Keringatmu
Berlapis timah
Bening bertuah
Sepanjang masa
Selamat jalan Mgr. Hila
Kau terutus
Ruh kudus
Halleluya.... Halleluya.... Halleluya....
Pangkal Pinang, 04 Mei 2016

35

Spiritualitas Natal

Sederhananya, Natal dapat diartikan sebagai pujian dan uangkapan selamat atas adanya kelahiran atau sampainya seseorang pada masa yang dipandang baik dan mempunyai nilai luhur tersendiri. Praktis, Natal tak begitu jauh bedanya dengan ungkapan "selamat idul fitri" "selamat ulang tahun" "selamat merayakan kemenangan" "selamat menunaikan ibadah haji" "selamat melaksanakan puasa Ramadhan" "selamat menempuh hidup baru" dan lain-lain. Maka Natal(an) adalah ungkapan kehangatan sosial kita terhadap sesama demi merekatkan harmoni berkehidupan sebagai makhluk-Nya.

Ketika Natal dikaitkan dengan tradisi Agama (Kristiani) tampaknya ia bukan semata ungkapan berskala manusiawiyah untuk menjalin kehangatan diantara sesama dalam lingkungan atau situasi kehangan religiusitas tertentu. Atau, bukan pula hanya untuk ikut memeriahkan Hari Besar Kristianitas yang berdekatan dengan pergantian Tahun Masehi yang dikaitkan dengan semangat spiritualitas (Agama). Lebih dari itu, perayaan Natal sejatinya adalah bagian dari aktualisasi kedalaman religiusitas setiap umat Kristiani tentang keluhuran dan keteladanan

sosok Isa as. Yang telah dijadikan panutan terbaik dalam iman mereka.

Bukan hal yang salah kalau spiritualitas Natal menjadi milik semua umat beragama, terutama yang ada dibawah payung nalar batin Pancasila ini. Sebab Isa as, bukan semata milik kaum Kristiani. Dia adalah simbol dari kuasa ilahi. Raja semesta yang Maha Kasih. Dan sudah tentu Isa as tidak (akan) primordialistik menebarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam misi ideal sekaligus ajaran-ajarannya. Sebab sebagai Nabi, atau "Tuhan" dalam pandangan agama lain, disamping merupakan wujud dari transendentalitas, Isa pun adalah fakta manusiawi penyubur nilai-moral kehambaan yang mendamaikan. Isa bukan saja simbol keperkasaan parsial melainkan realitas "kasih" yang universal.

Natal dalam Alquran

Kang Jajal, sapaan akrab KH. Jalaluddin Rakhmat mengurai bahwa semangat Natal dalam Alquran itu sudah ditradisikan sejak zaman para Rasul. Ini dapat dicermati minimal dalam kisah Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Isa as, dan Nabi Muhammad SAW. Pada konteks Nabi Yahya tegas kang Jalal, sebelum ayat yang mengisahkan Khusus tentang Maryam, Allah sebetulnya telah memuji dan menghargai kelahiran Nabi Yahya, *"kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali"* (Qs. Maryam [19]:15).

Menyangkut kelahiran Nabi Isa as Alquran pun mengajarkan hal yang sama *"dan kesejahtraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali"* (Qs. Maryam[19]:33). Dalam Surat Ash Shaffat[37]:109 Allah juga memberikan Ungkapan berupa pujian kepada Nabi Ibarahim. Lalu pada ayat 120 Nabi Musa dan Nabi Harun langsung mendapatkan ucapan mulia dari Allah SWT yaitu "*salamun ala musa wa harun*" yang berarti keselamatan dan kesejahtraan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikian halnya kepada Nabi Ilyas ayat 130, dan kepada para Rasul yang lain (ayat 181).

Sementara pada konteks Nabi Muhammad SAW, Allah lebih tegas dan terang lagi menganugrahkan ucapan keselamatan baik saat kelahiran maupun hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Sampai-sampai Allah memerintahkan kepada seluruh Umat manusia dan malaikat untuk senantiasa memuji dan mempersembahkan Shalawat (pujian

Keselamatan) kepada Nabi Muhammad SAW "sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkan lah salam penghormatan kepadanya" (Qs. Al-Ahzab[33]:56).

Pola penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, disadari ataupun tidak sedemikian total dan menggemuruh dikalangan Umat Islam, khususnya yang menganut jalun Sunni-Nahdlatul Ulama (NU) dan Islam Syiah (Imamiyah). Kalau kelahiran Nabi Isa as diperingati secara serentak dinegeri ini dan seantero dunia, demikian pun terhadap kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dan jika kelahiran Nabi Isa As diperingati dalam bentuk Natal(an) yang berdekatan dengan peralihan Tahun Masehi, maka kelahiran Nabi Muhammad Saw diperingati setiap bulan Maulud (bulan kelahiran).

Peringatan-peringatan semacam ini, meski dilepaskan dulu dari justifikasi *Bid'ah* atau tidak *bid'ah* dimata agama. Sebab diantara keduanya mempunyai rajutan tersendiri khususnya dikalangan Umat Kristiani (pengikut Nabi Isa as) dan umat Muslim (bagi pengikut Nabi Muhammad). Sekedar contoh, dimasyarakat Madura misalnya, setiap peringatan kelahiran Nabi Muhammad, Majelis-Majelis keagamaan begitu marak. Disinilah Kiai-Kiai dan tokoh agama menemukan momentum sosial religiusitasnya mentransformasikan keteladanan Nabi Muhammad SAW melalui ceramah dan *halaqah-halaqah* bahkan berbagai macam buah-buahan pun dijadikan bagian terpenting dari ritual pengkhidmatan kepada sang Nabi ini.

Ekspresi Ilahiah

Cukup terang kalau Natal bukan hanya budaya manusiawiyah (*cultural of humanisme)* dalam momen sosial keberbangsaan dan kebernegaraan. Lebih dari itu, Natal merupakan bagian dari ekspresi ilahiah untuk mengevolusi dan mematangkan kembali temali makna spiritualitas dikalangan umat beragama. Atau, dalam istilah yang sederhana perayaan hari Natal adalah bentuk penghargaan tulus Tuhan terhadap realitas sosial yang terjadi dikalangan umat manusia. Sehingga Tuhan dan manusia, terus berada dalam kedigjayaan transendentalitas sekaligus produktif dalam keharmonisan dalam aspek-aspek imanennya.

Disisi lain, perspektif ini akan mengantarkan setiap umat senantiasa berada dalam mengada dari dan untuk hakikat kehambaannya.

Mereka tidak akan menyempitkan ritual Natalan semata "doa akhir tahun" selama membawakan diri sebagai bagian dari umat beragama (kristiani). Lebih jauh dari itu mereka semakin memantapkan religiusitan dan menerangi batin dirinya sesuai dengan cahaya ilahiah (*Al-Nur Al-Rabbaniyah*). Dan selaku umat Yesus, melalui peringatan Natalan mereka akan segera memahami, memaknai, menginternalisasi dan meneladani seluruh proses dan prototipe kehidupan Yesus, Tuhan dambaannya.

Peristiwa sejarah dimana tempat yesus dilahirkan, mau tidak mau harus menjadi stimulasi spiritual tersendiri bagi siapa saja yang mengaku sebagai Umat-Nya. Mereka patut jernih memanen makna terhadap ajaran kitab sucinya. Sebagaimana dinyatakan bahwa "kelahiran yesus kristus dikandang hina batlehem adalah wujud nyata kasih Allah yang begitu agung kepada manusia dan dunia" (Yoh:3:16) dan masih menurut kitab suci yang sama bahwa "yesus yang datang dari ketinggian dan memasuki realitas dunia sekuler bukan untuk menghakimi melainkan menyelamatkan umat manusia dan dunia" (Yoh:3:17).

Ajaran kitab suci diatas sungguh mengharukan. Kandang adalah simbol kesederhanaan. Kandang merupakan istilah atau sebutan yang seakan banyak negatifnya dihadapan masyarakat ragawi-duniawiyah. Tapi tidak demikian bagi mereka yang memiliki batin jernih dan nalar spiritual yang kreasi imaninya berkualitas. Kalau bagi umat yang hidupnya lebih cenderung rohaniah-syurgawi, kejadian seperti seruan dalam kitab suci tersebut akan diperah menjadi paradigma dan sikap sosial kemanusiaannya dimuka bumi. Minimal, mereka akan menjadi penabur kasih sejati kalau tidak mampu mendampingi dan menyelamatkan manusia dari kedukaan hidup.

Ditengah krisis kemanusiaan belakangan ini, seyogyanya keluhuran pekerti dan misi Yesus yang menakjubkan tentang kasih dan penyelamatan sungguh-sungguh diaktualisasikan secara kolektif kebangsaan. Sehingga gerakan penyederhanaan (gaya) hidup yang diteriakan kabinet jokowi tersirami nilai-nilai segar spiritualitas Natal dan bukan malah ditentang dengan pola pikir parsialistik-materialistik. Sebab Natal adalah ekspresi ilahiah yang universal dan bukan kegenitan (reaktif) keberagamaan yang berskala tahunan. Itulah spiritualitas Natal. Sekali bersama Yesus, berjuanglah terus loyal dan tulus. Shallom ! ***

Biografi Penulis

MASMUNI MAHATMA, Lahir di Pulau Masalembo, 8 September 1976. Masa kecil dan remaja dibesarkan di lingkungan pesantren hingga menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (1991), Madrasah Tsanawiyah (1993) dan Madrasah Aliyah (1996) di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Disinilah kitab kuning menjadi santapan keseharian yang telah mematangkan ketajaman spiritualitasnya. Hijrah ke Bandung untuk menyelesaikan studi (S1) Akidah Filsafat, Magister Konsentrasi Filsafat (2005) dan Pemikiran Islam (2010) serta program Doktoral *Religius Studies* (2018) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bapak dari dua orang anak, Zahratul Kauniyah Mahatma dan Tubagus Haidar Baihaqi Mahatma ini, kini tinggal di Jl. Manisi, Lio Utara Cipadung RT/RW 004/009 No. 41 Cibiru Kota Bandung 40614.

Segudang pengalaman organisasi kampus dengan berbagai jabatan ketua organisasi intra dan ekstra yang diampunya menjadi kawah candradimuka, mengasah orisinalitas kepemimpinan intelektualitasnya. Sebagai aktivis dan akademisi yang tiap detik giat

mengukir dan meramu ide-ide kreatifnya, beliau telah menaburkan ratusan tulisan menghiasi di hampir seluruh media lokal dan nasional.

Darah khidmahnya di PB PMII hingga mengalir deras bagi organisasi keagamaan [Nahdlatul Ulama] maupun kepemudaan [KNPI]. Selain Menjabat Ketua PW GP ANSOR Bangka Belitung (2014-2019), kini tercatat sebagai Dosen [PNS] di UIN Sunan Gunung Djati Bandung [2018-sekarang], sebelumnya di STAIN SAS Bangka Belitung (2010-2018).

Berikut amanah yang diemban di organisasi dan karya yang telah serta sedang digarap hingga sekarang, di antaranya :

Pengalaman Organisasi

1. Masa Pendidikan

- Wakil Ketua Ikatan Santri Timur Daya (IKSTIDA) Sumenep (1993-1994)
- Ketua Forum Silaturrahim Santri Pantai Utara (FOSPUT) Sumenep (1995-1996)
- Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas (MPK) MTs I Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep (1992-1993)
- Ketua Umum OSIS MA I Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep (1995-1996)
- Ketua Umum *Sanggar Andalas* (Anak-anak Annuqayah dalam Aktifitas Sastra) Sumenep selama dua periode (1994-1994)
- Komunikator Jarak Jauh (Bandung), Sanggar Giring Angin Prenduan Sumenep (1996-2002).

2. Masa Kuliah

Intra Kampus:

- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah-Filsafat (HMJ-AF) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1999-2001)
- Ketua Lembaga Pengkajian Intelektual LPIK (Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman) UIN Sunan Gunung Djati

Bandung (2000-2001)
- Redaktur Sastra dan Budaya SKM SUAKA UIN SGD Bandung (2001-2002)
- Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN SGD Bandung (2001-2002)

Ekstra Kampus

- Ketua Angkatan MAPABA Ciloto (1998) PMII Cabang Bandung Raya
- Ketua LP2J PMII Komisariat IAIN SGD Bandung (1999)
- Ketua eLSAS PMII Cabang Bandung Raya (1999-2000)
- Ketua LP2J PMII Cabang Bandung Raya (2000-2001)
- Ketua LP2J PKC PMII Jawa Barat (2002-2003)
- Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi PB PMII (2003-2005)
- Sekretaris PW Lakpesdam NU Jawa Barat (2006-2011)
- Ketua Kaderisasi PW GP ANSOR Bangka Belitung (2010-2014)
- Ketua OKK DPD I KNPI Bangka Belitung (2014-2017)
- Ketua PW GP ANSOR Bangka Belitung (2014-2019)

Pengalaman Profesional

- Staf Pengajar TKA/TPA Insan Kamil, Kiaracondong Bandung (1997-1998)
- Staf Peneliti di MAULA (*Masyarakat Universal Lintas Agama*) Bandung (1999-2002)
- Editor Lepas di beberapa penerbit;
- Mutiara Press Bandung (2003)
- Media Cendekia Bandung (2003-2006)
- Jeihan Institute (2007)
- Kepala SMA Plus Assalam, Bandung (2006)
- Redaktur Pelaksana Majalah Assalam, Bandung (2006)
- Staf Pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung (2007-2010)
- Dosen (PNS) di STAIN SAS Bangka Belitung (2010-2018)
- Dosen (PNS) di UIN SGD Bandung (2018-sekarang)

Pengalaman Lain-lain:

a. Divisi Propaganda Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI) Wilayah Bandung Raya (1999)
b. Tim Penyusun Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 (JAMPPI)
c. Program Officier *Voter Registration Audit* (VRA) Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI) Nasional (2004)
d. Fasilitator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Bangka Belitung (2011)
e. Tim Seleksi Anggota KPU Propinsi Bangka Belitung 2013-2018
f. Tim Seleksi Panwas Kab/Kota Propinsi Kep. Bangka Belitung 2017
g. Tim Seleksi Bawaslu Kab/Kota di Wilayah Kerja Prop Bangka Belitung 2018-2023
h. Tim Seleksi Penambahan Bawaslu Kep Bangka Belitung 2018-2023

Buku yang ditulis:

1. *Merajut Nalar Demokrasi.* Bandung: Media Cendekia, 2005.
2. *NU 2 VERSI; dari Pergulatan Menuju Kejayaan*. Bandung: PűSAKA Pűblisher, 2007.
3. *Aku Butuh Darahmu (antologi puisi)*. Bandung: PűSAKA Pűblisher, 2009.
4. *Bulan di Atas Ka'bah;* Sufistika Jeihan. Bandung : Jeihan Institut, 2010
5. (Kontributor) dalam Buku *Mengalami Pancasila; Kisah Pancasila dari Ruang-Ruang Pembelajaran,* Bandung : UNPAR Press, 2017.

Buku-buku yang dieditori:

1. *Unjuk Rasa Kepada Allah*, D. Zawawi Imron, Rosdakarya, Bandung (1999)
2. *Gumam-Gumam dari Dusun*, D. Zawawi Imron, Pustaka Hidayah, Bandung (2000)
3. *Menjadi Manusia*, Jakob Sumardjo, Rosdakarya, Bandung, (2001)

4. *Arkeologi Budaya Indonesia*, Jakob Sumardjo, Qalam, Yogyakarta, (2002)
5. *Mencari Sukma Indonesia*, Jakob Sumardjo, AK Group, Yogyakarta, (2003)
6. *Sate Rohani dari Madura*, D. Zawawi Imron, Rosdakarya, Bandung (2001)
7. *Soto Sufi dari Madura*, D. Zawawi Imron, Media Cendekia, Bandung (2002)
8. *Menjaga Kemuliaan Alquran*, KH. Yusuf Muhammad SQ., Media Cendekia Bandung, (2003)
9. *Stairway to Heaven*, KH. Yusuf Muhammad SQ., Media Cendekia Bandung, (2003)
10. *Muzakarah Jam'iyah*, KH. Yusuf Muhammad SQ., Media Cendekia Bandung, (2003)
11. *Sketsa Pergerakan; Kritik Otokritik Gerakan PMII*, A. Malik Haramain, Fajar Pustaka Yogyakarta, (2003)
12. *Khazanah Ilmu Haji dan Umrah*, KH. Yusuf Muhammad SQ. (Penerjemah), Media Cendekia Bandung, (2003)
13. *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*, Wakhudin, Mutiara Press, Bandung, (2003)
14. *Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004*, JAMPPI Jakarta, (2004)
15. *Jeihan: Ambang Waras dan Gila*, Jakob Sumardjo, Jeihan Institute, Bandung, (2007)
16. *Sajak Filsafat Jeihan,* Jakob Sumardjo, Jeihan Istitute, Bandung (2009)
17. *Sinuhun Paku Buwono X,* KRT. Kastoyo Ramelan, Jeihan Institute (2010)
18. *Revitalisasi Madrasah,* H. Firdaus Basuni, M. Pd, Media Maxima, Bekasi (2010)
19. *Makbulnya Zikir dan Doa,* KH. Yusuf Muhammad SQ., Qibla (BIP) Jakarta, 2014
20. *Buku Pintar Ayat-Ayat Alquran,* Syamsul Rijal Hamid, Qibla (BIP) Jakarta, 2014

Tulisan-tulisan Lepas yang terpublikasi di media massa

1. *Puisi itu Rasakanlah*, SKM SUAKA, Edisi 47, Th VIII, Mei 1999
2. *Puisi atau "Curhat"*, SKM SUAKA, Edisi 48, Th IX, September 1999
3. *Puisi dan Berita*, SKM SUAKA, Edisi 49, Th X, September 1999
4. *Poros Tengah; Alternatif Strategis?,* Suara Publik, Senin 2 Agustus, 1999
5. *Ukhuwah Politik atau Kedewasaan Berpolitik,* Media Indonesia, Jumat 20 Agustus, 1999
6. *Moral, Substansi yang Terlupakan* (resensi), Bernas, 25 April 1999
7. *Pemilih dan Pencoblos*, Pikiran Rakyat, 13 April 2004
8. *Dicari, Pemikir Politik Tercerahkan!,* Pikiran Rakyat, Sabtu 3 Januari 2004
9. *Menata Moral dengan Alquran*, Pikiran Rakyat, 24 Oktober 2003
10. *Spirit Jihad di Bulan Ramadan*, Pikiran Rakyat, 7 November 2003
11. *Konferwil Menuju Pembenahan NU*, Pikiran Rakyat, 24 April 2006
12. *Falsafah Maaf*, Pikiran Rakyat, 30 Mei 2006
13. *Masih Perlukah Jadi NU*, Pikiran Rakyat, 31 Mei 2007
14. *Mukerwil "Politisi" NU*, Kompas, 13 Juni 2007
15. *PKS DIKEPUNG*, Radar Bandung, 6 Juli 2007
16. *Pilgub dan Futuwah Politik,* Kompas, 5 Februari 2008
17. *Kiai dan Ormas,* Kompas, 22 Februari 2008
18. *Politik Menang dan Kalah,* Kompas, 21 April 2008
19. *Meditasi Politik,* Pikiran Rakyat, 5 Mei 2008
20. *Ujian Terakhir Politik (Kiai) NU,* Kompas, 31 Oktober 2008
21. *Manusia Politik,* Kompas, 16 Desember 2008
22. *Belajar Politik dari Madura,* Radar Madura, 12 Januari 2009
23. *Golput Itu Fitrah,* Kompas, 3 Februari 2009
24. *Iman dan Politik,* Kompas, 25 Februari 2009
25. *Jujur dalam Politik,* Kompas, 1 April 2009
26. *Iktikaf Politik,* PR, 14 April 2009

27. *Upah Demokrasi,* 23 April 2009
28. *Ukhuwah Politik,* 25 Mei 2009
29. *NU di Persimpangan Jalan,* Radar Madura, 25 Mei 2009
30. *Guru dan Politik Kita,* Kompas, 2 Juni 2009
31. *Kearifan Kolektif,* Pikiran Rakyat, 29 Juni 2009
32. *Melirik Kuasa Agama* (Resensi Buku), Pikiran Rakyat, 06 Juli 2009
33. *Merengkuh Spirit Puasa* (Resensi Buku), Pikiran Rakyat, 10 Agustus 2009
34. *Golkar Muda*, Pikiran Rakyat, 15 Agustus 1009
35. *Puasa Politik,* Kompas, 24 Agustus 2009
36. *Agama Itu Surga,* Bangka Pos, 29 April 2011
37. *Ketakutan (dalam) Politik,* Tribun Jabar, 29 Juni 2011
38. *Miraj (Politik) PPP,* Pikiran Rakyat, 2 Juli 2011
39. *Saatnya PPP di Depan,* Bandung Ekspres, 4 Juli 2011
40. *Memaknai Ramadan,* Bangka Pos, 30 Juli 2011
41. *Lapar dan Politik,* Tribun Jabar, 27 Agustus 2011
42. *Haji Itu Pertobatan,* Bangka Pos, 12 Oktober 2011
43. *Esensi Religiusitas,* Bangka Pos, 20 Januari 2012
44. *Uang dan Politik,* Babel Pos, 11 Februari 2012
45. *Keadilan (Dalam) Politik,* Babel Pos, 27 Februari 2012
46. *Agama (untuk) Manusia,* Babel Pos, 28 April 2012
47. *Persaudaraan Keserumpunan,* Bangka Pos, 4 Mei 2012
48. *Kemenangan Itu Amanah,* Babel Pos, 10 Mei 2012
49. *Gerakan NU,* Bangka Pos, 18 Mei 2012
50. *Tuhan Parlemen,* Babel Pos, 30 Juni 2012
51. *Puasa adalah Jihad,* Babel Pos, 10 Juli 2012
52. *Perempuan Dalam Politik,* Pikiran Rakyat, 11 Juli 2012
53. *Ahli Surga,* Bangka Pos, 28 Desember 2012
54. *Menakar Peran Pemuda,* Babel Pos, 29 Desember 2012
55. *Religiusitas Polisi,* Bangka Pos, 11 Januari 2013
56. *Naluri Agama,* Bangka Pos, 17 Mei 2013
57. *Politik (yang) Jujur,* Babel Pos, 16 Mei 2013
58. *Teologi Politik,* Babel Pos, 27 Mei 2013
59. *Perilaku Penyelenggara Pemilu,* Babel Pos, 22 Juni 2013
60. *Isu Politik,* Babel Pos, 28 Juni 2013

61. *Pilkada (untuk) Rakyat,* Babel Pos, 5 Juni 2013
62. *Ksatria Politik,* Babel Pos, 15 Juni 2013
63. *Puasa dan Pembenahan Diri,* Bangka Pos, 10 Juli 2013
64. *Berhaji, Melatih Mati,* Bangka Pos, 27 September 2013
65. *Kesalihan Struktural,* Bangka Pos, 31 Oktober 2013
66. *Pesan (Politik) Pesisir,* Babel Pos, 31 Oktober 2013
67. *Syarah Politik,* Rakyat Pos, 22 November 2013
68. *Partai Politik,* Babel Pos, 26 November 2013
69. *Kedaulatan Rakyat,* Babel Pos, 3 Desember 2013
70. *Masyarakat Pembaca,* Babel Pos, 10 Desember 2013
71. *Ulama dan Politik,* Babel Pos, 17 Desember 2013
72. *Iman Itu Pintu*, Bangka Pos, 13 Desember 2013
73. *Mata KNPI,* Babel Pos, 21 Desember 2013
74. *Irama (Politik) Rhoma,* Babel Pos, 27 Desember 2013
75. *Damai dalam Doa,* Bangka Pos, 28 Desember 2013
76. *Semangat Pluralitas Dalam Penutupan Tahun Iman di Keuskupan Pangkalpinang,* Inspirasi, Nomor 113 Tahun X Januari 2014
77. *Spiritualitas Natal,* Inspirasi, Nomor 125 Tahun XI Januari 2015
78. *Tangisan Politik,* Babel Pos, 7 Januari 2014
79. *Menuju Jalan Tuhan,* Bangka Pos, 10 Januari 2014
80. *Politik Nama Besar,* Babel Pos, 15 Januari 2014
81. *Sedulang Rindu,* Bangka Pos, 17 Januari 2014
82. *Jiwa Baru KNPI,* Babel Pos, 8 Februari 2014
83. *Biji Iman,* Bangka Pos, 28 Februari 2014
84. *KNPI BPJ, KNPI Karya,* Babel Pos, 3 Maret 2014
85. *Guru Politik,* Babel Pos, 12 Maret 2014
86. *Islam (Bagi) Remaja,* Bangka Pos, 21 Maret 2014
87. *KNPI dan Pemilu,* Babel Pos, 27 Maret 2014
88. *Intelektual Politik,* Babel Pos, 3 April 2014
89. *Agama (Dalam) KTP,* Media Indonesia, 15 November 2014
90. *Pelayan Tuhan,* Bangka Pos, 6 Desember 2014
91. *Memaknai Bencana,* Bangka Pos, 9 Januari 2015
92. *Beragama Itu Indah dan Penuh Harmoni,* Bangka Pos, 23 Januari 2015
93. *Generasi Politik,* Babel Pos, 24 Januari 2015
94. *Agama Itu Perilaku,* Bangka Pos, 6 Februari 2015

95. *Berani Itu Manusiawi,* Babel Pos, 7 Februari 2015
96. *Remaja (Malam) Kamisan,* Bangka Pos, 7 Mei 2015
97. *Bulan Prestasi,* Bangka Pos, 23 Juni 2016
98. *Teks (Ke)pemimpin(an),* Bangka Pos, 13 Agustus 2016
99. *Rakyat (yang) Merdeka,* Bangka Pos, 30 Agustus 2016
100. *Mgr. Hila, Api Religius Sejati,* Majalah Hidup, 10 Juli 2016
101. *Cinta Agama, Cinta Sesama*, Inspirasi, Nomor 142 Tahun XII Januari 2016
102. *Krisis Keteladanan,* Koran Madura, 28 Juli 2016
103. *Wisata Kita, Wisata Rakyat,* Koran Madura, 19 Juli 2016
104. *Seni Beragama,* Koran Madura, 30 Agustus 2016
105. *Puasa dan Pancasila*, Bangka Pos, 6 Juni 2017
106. *Panggilan (Ber)haji,* Bangka Pos, 12 September 2017
107. *Uskup Baru, Saudara Baru,* Bangka Pos, 26 September 2017
108. *Catatan dari Lepar,* Bangka Pos, 7 November 2017

***

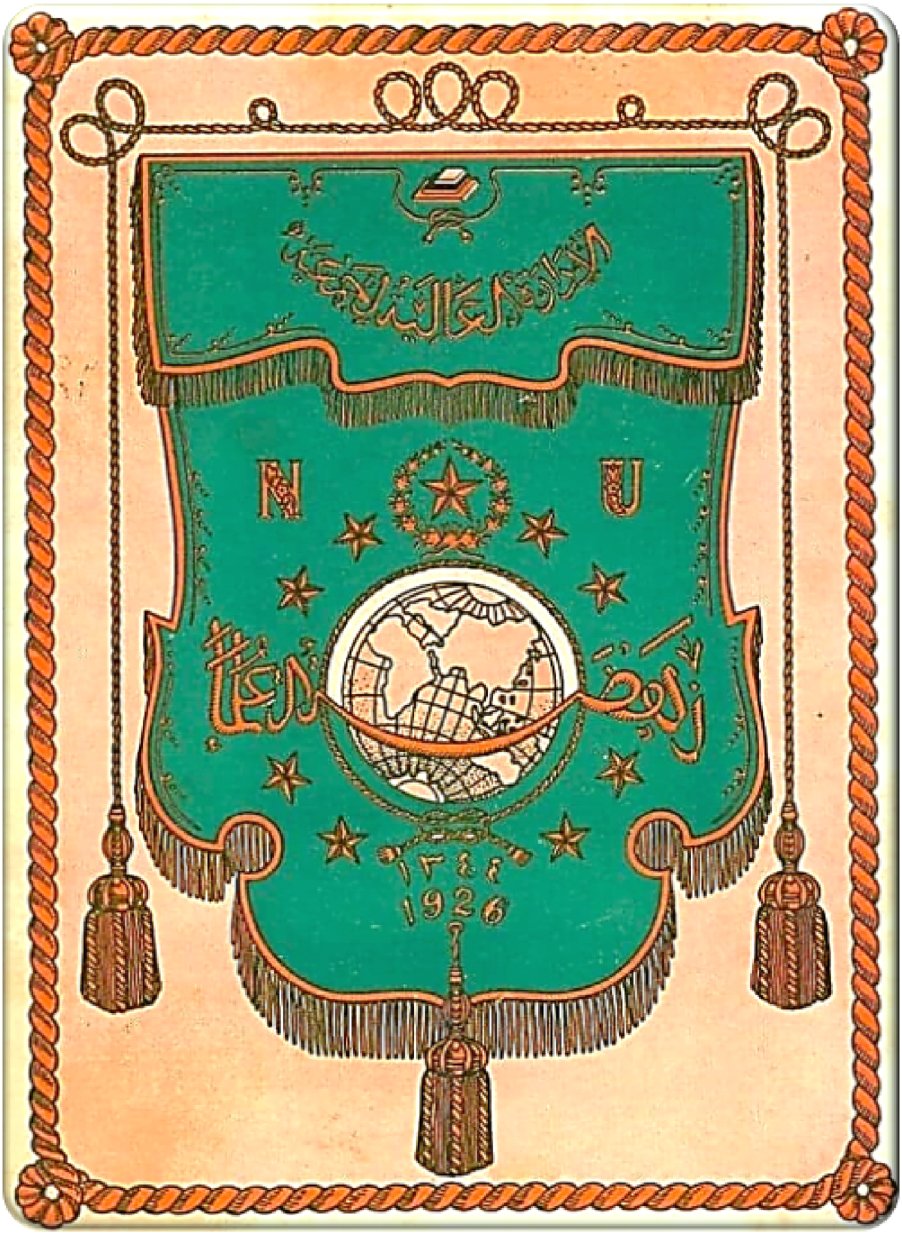
N
U
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Manusia POLITIK dan NALURI AGAMA

Otokritik Terhadap Geliat Sosial Politik dan Keberagaman

Saya kenal Masmuni Mahatma, sosok progresif dan konsisten mengawal inklusifitas beragama maupun berkebangsaan. Setidaknya, saya amati di Bangka Belitung. Bukan semata sebagai aktifis GP ANSOR, melainkan, saya lihat karena berlatar sebagai dosen. Sehingga senantiasa paradigmatik-transformatif dalam menyuburkan gerakan keindonesiaan.

Buku ini, semakin mencerminkan progresifitas dan kekuatan analisanya terhadap fenomena sosial politik-keagamaan tanah air. Meskipun tulisannya terbilang variatif dari aspek tema dan waktu, spirit dan orisinilitas pemikirannya, masih relevan dan bernilai...

Ir. Rudianto Tjen [Anggota DPR RI Fraksi PDIP]

... Sahabat Masmuni Mahatma, cukup apik mengumpulkan tulisan lepas yang dimuat di beberapa media lokal dan nasional. Meski sebagian besar terbilang lama dari aspek publikasi, tapi napas dan nilai-nilai tulisan ini masih layak diinternalisasi. Tulisan berjudul "Jujur dalam Politik," "Politik Menang dan Kalah," "Iman dan Politik," "Puasa Politik," dan "Manusia Politik," spirit dan tarikan substansinya masih "selirik" dengan dinamika sosial politik akhir-akhir ini. Sahabat Masmuni Mahatma, mengajak kita mengenal Manusia-Manusia Politik alternatif di era kekinian. Manusia politik yang senantiasa sadar sekaligus menyadari akan eksistensi dirinya sebagai makhluk berakal dan beragama.

Untuk para pembaca, selamat mengunyah diskursus dalam buku ini. Dan untuk Sahabat Masmuni Mahatma, selamat berkarya di tengah kesibukan berkhidmat terhadap GP ANSOR di Bangka Belitung selama ini.

H. Yaqut Cholil Qoumas [Ketua Umum PP GP ANSOR]

Lahir di Pulau Masalembo, 8 September 1976. Masa kecil dan remaja dibesarkan di lingkungan pesantren Annuqayah, Guluk-guluk, yang telah mematangkan ketajaman spiritualitasnya. Sementara kampus dengan berbagai jabatan ketua organisasi intra dan ekstra yang diampunya menjadi kawah candradimuka, mengasah orisinalitas kepemimpinan intelektualitasnya. Sebagai aktivis dan akademisi yang tiap detik giat mengukir dan meramu ide-ide kreatifnya, beliau telah menaburkan ratusan tulisan menghiasi di hampir seluruh media lokal dan nasional.

Darah khidmahnya di PB PMII hingga mengalir deras bagi organisasi keagamaan [Nahdlatul Ulama] maupun kepemudaan [KNPI]. Selain Menjabat Ketua PW GP ANSOR Bangka Belitung (2014-2019), kini tercatat sebagai Dosen [PNS] di UIN Sunan Gunung Djati Bandung [2018-sekarang], sebelumnya di STAIN SAS Bangka Belitung (2010-2018).

PENERBIT
PUSTAKA AURA SEMESTA

Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung

ISBN 978-623-7231-01-1
9786237231011